S T A N L E Y

SEPUTAR KEDUNG OMBO

Kata Pengantar:
Dr. George Junus Aditjondro
Dr. Arief Budiman

ELSAM
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT

Cetakan pertama, Agustus 1994
Diterbitkan oleh
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
bekerja sama dengan INFID (International NGO Forum on Indonesian Development)

●

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM merupakan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pengkajian dampak kebijakan pembangunan terhadap hak-hak asasi manusia (human rights impact policies studies) dan pembelaan (advokasi) terhadap hak-hak dan kepentingan masyarakat yang tidak beruntung (disadvantage communities) seperti buruh, petani gurem, dan masyarakat adat (indiginous people) di Indonesia.

datanglah kepada rakyat
hidup bersama rakyat
belajar dari rakyat
berencana bersama rakyat
bekerja bersama rakyat
mulailah dengan apa yang diketahui rakyat
bangunlah apa yang dimiliki rakyat
ajarilah dengan contoh, belajarlah dengan bekerja
bukan pameran, melainkan pola
bukan rintangan dan akhir, melainkan suatu sistem
bukan pendekatan cerai-berai, melainkan menyatu
bukan kompromi, melainkan mengubah
bukan pertolongan, melainkan pembebasan

(James Y.C Yen)

untuk
orang-orang yang selalu dikalahkan
namun sesungguhnya
tidak pernah terkalahkan

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

SAMBUTAN DIREKTUR ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM merupakan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pengkajian dampak kebijakan pembangunan terhadap hak-hak asasi manusia (*human right impact policies studies*) dan pembelaan (advokasi) terhadap hak-hak dan kepentingan masyarakat yang tidak beruntung (*disadvantage communities*) seperti; buruh, petani gurem, dan masyarakat adat (*indiginous people*) di Indonesia.

Melalui kegiatan pengkajian dampak pembangunan terhadap hak-hak asasi manusia ELSAM mencoba mencari alternatif gagasan, saran, dan kebijakan yang mungkin untuk memperbaiki kedudukan dan peran dari masyarakat-masyarakat yang tidak beruntung di atas. Kegiatan pengkajian kebijakan pembangunan dengan segala akibatnya terhadap hak-hak asasi manusia merupakan salah satu landasan untuk menjalan program advokasi ELSAM yang terdiri atas kegiatan pembelaan, lobi, mobilisasi pendapat, dan pendidik-

an publik, serta pelatihan hak-hak asasi manusia. Melalui kegiatan advokasi demikian itu diharapkan tumbuh kesadaran, semangat, dan kekuatan baru di dalam masyarakat yang pada gilirannya mengarah pada perubahan kebijakan dan pembaharuan kelembagaan yang lebih mencerminkan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan ketahanan ekologis (*sustainable*).

Naskah buku berjudul *Seputar Kedung Ombo* ditulis oleh sdr. Stanley aktivis mahasiswa yang aktif di dalam Kelompok Solidaritas Kurban Pembangunan Kedung Ombo (KSKPKO) yang pada tahun 1989 sangat aktif melakukan pembelaan, dukungan kepada masyarakat yang menjadi korban pembangunan Kedung Ombo. Dalam waktu yang sudah sangat terlambat KSKPKO, organisasi-organisasi non-pemerintah seperti, LBH, WALHI, dan lain sebagainya melakukan berbagai kegiatan advokasi untuk membela hak-hak dan kepentingan masyarakat Kedung Ombo. Dikatakan terlambat oleh karena masalah pembangunan bendungan Kedung Ombo sebagai suatu masalah hukum dan sosial sudah mengemuka pada awal tahun 1980-an. Jadi baru beberapa tahun kemudian organisasi-organisasi non-pemerintah dan para mahasiswa melibatkan diri mereka pada kasus Kedung Ombo.

Keterlambatan itu terjadi disebabkan oleh berbagai faktor antara lain perhatian dan akses pada informasi. Akses pada informasi inilah yang paling menentukan. Pada saat itu tidak banyak yang diketahui oleh masyarakat tentang Kedung Ombo. Dalam sistem politik yang tertutup yang sangat ketat mengontrol kehidupan pers maka sangat sulit informasi-informasi yang secara jujur mengungkapkan kelemahan dan kebobrokan birokrasi pemerintah dapat diperoleh dan diberitakan. Akan tetapi lebih baik terlambat dan berbuat sesuatu demi rakyat Kedung Ombo daripada tidak berbuat sama sekali.

Ada beberapa alasan mengapa ELSAM menerbitkan buku *Seputar Kedung Ombo*. Yang pertama, penerbitan buku ini merupakan upaya untuk menyebarkan informasi dan pengalaman kepada masyarakat luas berkenaan dengan proses pembangunan waduk Kedung Ombo dengan segala dampaknya terhadap hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi dari masyarakat yang terkena pembangunan waduk tersebut.

Dengan memperoleh informasi dan pengalaman proses pembangunan waduk Kedung Ombo yang disajikan buku ini diharapkan kalangan pembaca dapat menarik pelajaran berharga dari kasus Kedung Ombo tersebut. Sehingga secara bersama-sama dapat mengikhtiarkan agar dilakukan perbaikan dan pembaharuan dalam konsep, kebijakan dan praktik pembangunan di Indonesia. Yang kedua, bahwa kasus pembangunan Kedung Ombo yang menimbulkan derita ribuan orang penduduk belumlahselesai. Para penduduk di daerah-daerah yang terkena proyek waduk Kedung Ombo yang tanahnya diambil-alih dengan paksa dan ditenggelamkan masih terus mencari keadilan. Proses pencarian keadilan itu merupakan ujian bagi sistem hukumdan peradilan di Indonesia. Oleh karena itu buku *Seputar Kedung Ombo* yang sarat dengan informasi dan data tentang praktik ketidakadilan khususnya dalam pembebasan tanah merupakan bahan yang berharga dalam rangka advokasi kepentingan dan hak-hak masyarakat korban pembangunan waduk Kedung Ombo. Ketiga, penerbitan buku ini bisa dikatakan sebagai catatan sejarah yang diharapkan senantiasa mengingatkan kita bagaimana sebuah pembangunan yang dijalankan dengan pen-

dekatan Top-down, dan menegasikan peran serta rakyat telah menimbulkan ketidakadilan dan derita pada ribuan manusia.

Dengan membaca catatan sejarah itu pemerintah dan kalangan masyarakat luas akan berusaha untuk mencegah terulangnya kembali kasus-kasus semacam itu di masa depan. Keempat, penerbitan buku ini juga akan memperkaya pengetahuan dan wawasan kita tentang pembangunan bendungan-bendungan besar dengan segala dampaknya terhadap kehidupan manusia dan lingkungan hidup.

Akhirnya atas nama ELSAM, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penduduk Kedung Ombo, organisasi-organisasi nonpemerintah, para mahasiswa, dan khususnya kepada Yapika (Yayasan Persahabatan Indonesia-Kanada) yang telah memungkinkan diterbitkannya buku *Seputar Kedung Ombo*. Semoga buku ini bermanfaat bagi kalangan masyarakat luas di Indonesia dan dunia.

Abdul Hakim G. Nusantara
Direktur

UCAPAN TERIMA KASIH

Tanpa bantuan dan dukungan moril dari banyak orang, mustahil tulisan ini bisa tersusun. Saya merasa berhutang budi kepada banyak pihak yang telah membantu mem-berikan bahan-bahan dan data-data. Terutama dorongan semangat yang diberikan kepada saya pada saat saya mengalami stagnasi dan keragu-raguan apakah tulisan ini akan berguna buat banyak orang.

Terima kasih yang tulus harus saya nyatakan kepada Arief Budiman dan INGI (terlepas dari kritik banyak pihak terhadap model pendekatan yang dipakai INGI) yang telah mempercayai saya untuk menuliskan sebuah peristiwa yang cukup penting ini. Ucapan terima kasih juga saya nyatakan kepada Ariel Heryanto, George Junus Aditjondro, Romo YB Mangunwijaya, Johny Simanjuntak, Kutut Suwondo, Abdul Hakim G Nusantara, Nur Ismanto yang bukan sekedar memberikan bahan-bahan berharga, tapi juga bersedia untuk membaca draft tulisan saya serta memberikan kritik-kritik yang saya perlukan. Juga kepada teman-teman Suhartono Sanyoto, Amir H Daulay, Andre, Damairia Pakpahan, Untoro

Hariadi, M Yamin, Harry, John Tobing, Andi Munajat, Wahyu Susilo dan aktifis KSKPKO lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Kiranya rasa terima kasih juga harus saya nyatakan kepada orang-orang Kedung Ombo, yang di tengah-tengah penderitaannya bersedia membantu dan menjawab setiap pertanyaan saya secara langsung maupun lewat rekan Anung dan Eri, tanpa kecurigaan apapun. Ketabahan, sikap keras kepala dan perlawanan yang telah ditunjukkan, paling tidak telah menyadarkan saya bahwa ternyata mereka tidak dapat begitu saja diremehkan.

Akhirnya, saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah membantu meringankan pekerjaan saya. Mereka adalah M Anung DBK, Eri Sutrisno, Bunthomi, Aris Santoso, Hendrikus A Ondi, Yosafati Gulo, Yos Satya Dharma, Bagus Pursena, Pudjo Utomo, Mathius Hosang, Wilasih Noviana, Paulus Budiraharjo, Dono Prasetyo, Eko Budianto, Eko Haryanto dan semua rekan-rekan dari Yayasan Geni dan YLBHI. Juga, Skephi dan Yaphi yang membantu memberikan kliping-kliping beserta buku acuan.

oo0oo

PRAKATA

Perasaan ragu-ragu menghinggapi diri saya, ketika pertama kali datang tawaran untuk menulis sebuah buku tentang "geger Kedung Ombo". Saya tidak begitu yakin apakah saya mampu mengumpulkan, menuliskan sekaligus merefleksikan pengalaman di Kedung Ombo hanya dengan berbekal pada "aksi-aksi mahasiswa" yang pernah saya ikuti dan bahan-bahan yang ada pada saya. Kalaupun nantinya tawaran tersebut saya terima, saya tidak begitu yakin apakah saya mempu menulis secara obyektif. Apalagi secara emosional saya mempunyai keterlibatan langsung dengan persoalan Kedung Ombo.

Dan, pada akhirnya ketika perasaan ragu-ragu telah sirna, dan saya memutuskan untuk menerima tawaran menyusun sebuah buku, hambatan-hambatan mulai bermunculan. Tumpukan bahan, baik kliping koran, laporan maupun rekaman-rekaman yang ada pada saya ternyata kurang memadai dan belum dapat saya gunakan untuk menyusun sebuah buku dengan informasi yang cukup lengkap. Saya pun mulai mencari tambahan bahan.

Namun ternyata tidak mudah, karena banyak pihak yang memiliki informasi yang saya perlukan, menaruh curiga dan

menutup diri. Maklum, masalah Kedung Ombo memang cukup peka. Ketika sebagian bahan-bahan yang dibutuhkan berhasil saya kumpulkan berkat dukungan simpatik dari beberapa sahabat, saya baru sadar bahwa tumpukan bahan yang harus saya olah betul-betul telah menggunung. Kembali saya dihinggapi perasaan bingung dan ragu-ragu. Bagaimana saya bisa mengolah bahan yang begitu banyak?

Setelah saya pelajari, di antara bahan-bahan yang luar biasa banyaknya itu ternyata lebih banyak merupakan pernyataan-pernyataan pejabat atau ceceran catatan orang-orang yang pernah "memasuki" Kedung Ombo. Informasi yang serba kering tentang kondisi sosial-budaya rakyat Kedung Ombo beserta mitologi-mitologinya belum dapat saya pergunakan untuk membuat tulisan. Sedangkan daerah genangan Waduk Kedung Ombo telah terlanjur diporak-porandakan oleh genangan air dan juga dipagar betis oleh Satgaspam 0724. Hal itu menyulitkan niat saya untuk memasuki daerah genangan. Apalagi aparat keamanan mengenali saya sebagai anggota KSKPKO. Terus terang, saya mengalami kesulitan dalam melakukan upaya pelacakan mitologi dan sikap penduduk yang oleh pemerintah dianggap sebagai pembangkang.

Kendala yang lain, kasus Kedung Ombo sama sekali belum selesai. Bahkan ketika penulisan yang saya kerjakan rampung. Secara moral, saya merasa berkewajiban untuk tidak merusak "setting" dan kerja yang disusun oleh kelompok-kelompok yang berupaya membantu orang-orang Kedung Ombo. Tulisan saya tidak ada artinya sama sekali dibandingkan dengan perjuangan orang-orang Kedung Ombo untuk mendapatkan kembali hak-haknya yang terampas.

Sementara itu, persoalan Kedung Ombo yang sangat luas dan kompleks akhirnya membuat saya harus bersikap realistis. Saya mencoba menitikberatkan penulisan hanya pada saat menjelang

dilakukannya peresmian penggenangan sampai dengan akhir Pebruari 1990. Namun saya juga mencoba melengkapinya pada bagian Kronologi (Lampiran). Ambisi dan keinginan untuk membahas LSM dan fenomena bangkitnya kembali aksi-aksi mahasiswa untuk sementara terpaksa saya buang jauh-jauh.

Masalah yang lain, sebagai orang sekolahan yang belas-an tahun dibiasakan berpikir rasional-eksak, sulit bagi saya untuk mencoba memahami mitologi-miitologi setempat yang mungkin menyebabkan orang-orang Kedung Ombo nekad bertahan di daerah genangan. Baru setelah menyaksikan sendiri, bagaimana sikap keras kepala dari orang-orang di daerah genangan yang tidak memiliki apa-apa lagi, kurang pangan, tidak bisa mengharapkan bantuan dari LSM yang pernah membantu, namun mereka tampak tetap "ber-gembira" saya jadi percaya. Harapan akan terjadinya suatu perubahan yang mungkin menghindarkan penduduk terhadap keputusasaan itulah yang membuat saya mau tidak mau harus percaya pada kekuatan mitologi dan cerita-cerita setempat. Meskipun tidak tertutup suatu kemungkinan, bahwa mitologi-mitologi tersebut sengaja direkayasa dan dicocok-cocokkan oleh penduduk sendiri untuk memberikan semacam "kekuatan" bagi dirinya.

Ada banyak kendala lain yang muncul di tengah-tengah kesibukan menulis seperti tugas-tugas organisatoris yang datang susul-menyusul. Kesempatan waktu yang hanya enam bulan diberikan kepada saya untuk mengumpulkan, mengolah, merenungkan dan menulis rasanya begitu sempit. Setelah kendala-kendala tersebut berhasil teratasi, ganti muncul isyu koooptasi dan lain-lain. Di tengah semangat anti LSM yang merebak di kalangan aktivis mahasiswa, saya diisyukan telah tercaplok oleh kepentingan LSM Besar (Big NGO).

Alhamdulilah, berkat pengertian, kerjasama dan bantuan

banyak pihak berbagai kendala berhasil saya eliminir. "Tugas" untuk menuliskan semua "pengalaman" pembangunan Waduk Kedung Ombo akhirnya terselesaikan juga. Apa yang terekam dalam buku ini mungkin belum mampu menggambarkan semua peristiwa yang terjadi yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan Waduk Kedung Ombo. Ada peranan beberapa pihak yang membantu orang-orang Kedung Ombo yang mungkin luput dari pengamatan saya. Khususnya peranan para aktivis LSM di antara tahun 1985 - 1988 yang sangat berjasa dalam menempa watak orang Kedung Ombo menjadi pemberani, "pembangkang" yang mencoba mempertahankan hak-haknya.

Sama sekali tak ada niatan saya untuk mengecilkan peranan mereka. Tidak masuknya peranan mereka dalam periode penting tersebut, semata-mata hanya karena masalah keterbatasan dan pembatasan kerja saya. Demikian juga peranan pribadi-pribadi aktivis mahasiswa dan kelompok intelektual yang sengaja tidak saya tonjolkan di sini.

Sama sekali juga tidak ada niat saya untuk mendiskreditkan atau mempermalukan pemerintah, seseorang atau pihak yang ada dalam buku yang saya tulis ini. Kata-kata yang bernada keras memang tidak dapat saya hindari. Tema Kedung Ombo sendiri dan kenyataan yang terjadi memang sangat "keras".

Apa yang saya kerjakan ini merupakan dedikasi dan sumbangan saya untuk mengenang keberanian orang-orang kecil seperti yang ada di Kedung Ombo atau tempat-tempat lain yang mungkin selama ini tidak pernah diberitakan secara resmi.

Salatiga, Medio Juli 1990

Stanley

Catatan:

Ketika revisi buku ini rampung saya kerjakan, kondisi dan perkembangan di Kedung Ombo mungkin telah berubah. Demikian juga keadaan di Muko-muko yang kabarnya telah maju pesat.

Penduduk di pemukiman baru Kedungmulyo dan Kedungrejo lewat wakilnya, Kelompok Sembilan pada tanggal 21 April 1990 mengirimkan surat kepada Bank Dunia, Pimpinan Proyek Waduk Kedung Ombo dan sektoral instansi terkait. Mereka mempertanyakan soal ganti rugi yang belum dibayarkan dan terkatung-katungnya nasib penduduk karena sertifikat tanah yang dijanjikan pemerintah tidak kunjung jadi.

Lima orang penduduk Desa Klewor dan Sarimulyo tengah diadili di Pengadilan Negeri Boyolali. Mereka dituduh menggelapkan uang calon anggota MKGR di Kedung Ombo untuk kepentingan pribadi.

Pada tanggal 19 April 1990, dengan diantar 50 mahasiswa, sekitar 356 penduduk Desa Soka, Kecamatan Miri dan Desa Pendem Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen mendatangi gedung DPR RI untuk menemui wakil-wakil rakyat dan menyampaikan persoalan ganti rugi tanah di Kabupaten Sragen yang digunakan untuk proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo. Dan pada tanggal 4 Juni 1990 seorang guru SMA Muhammadiyah Gemolong II Sragen datang ke DPR RI mengadukan pemecatan atas dirinya gara-gara ikut aksi ke DPR RI pada tanggal 19 April 1990.

Sedangkan 54 KK warga Kedungpring, Kelurahan Nglanji lewat LBH Semarang melakukan gugatan terhadap Pemda Jateng dan Pimpro Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna cq pimpinan waduk Kedung Ombo. Dalam gugatan lewat Pengadilan Negeri Semarang, penduduk menuntut ganti rugi sebesar Rp 2,063 milyar sebagai pengganti tanah, rumah dan tanaman sumber hidup mereka yang telah tenggelam. Mereka juga menuntut hak prioritas untuk mengusahakan tanah pasang-surut, hak membudidayakan air, hak menikmati waduk sebagai obyek wisata dan tuntutan untuk

diberi prasarana umum seperti sekolah, jalan desa dan tempat ibadah.

Sementara 1.062 KK yang masih bertahan di daerah genangan dalam waktu dekat akan menyusul gugatan 54 warga Kedungpring. Sedangkan 22 warga yang lain merencanakan akan menggugat Camat Kemusu dan Bupati Boyolali sebesar Rp 1 milyar sebagai ganti rugi atas pencemaran nama baik mereka akibat KTP yang dicap ET/OT.

Gugutan-gugatan tersebut mengakibatkan penduduk di daerah genangan mendapat tekanan-tekanan baru dan intimidasi dari aparat keamanan. Mereka mencoba memaksa penduduk agar mencabut gugatannya.

Pengantar Arief Budiman

KASUS KEDUNG OMBO: SEBUAH CATATAN AKHIR

Sang Pengarang

Saya mengenal Stanley (panggilan akrab dari Yosep Adi Prasetya) sejak ketika dia masih menjadi mahasiswa Fakultas Teknik Jurusan Elektro di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Stanley adalah seorang pendiam. Dia lebih merupakan seorang pekerja. Karena itu, kalau ada pertemuan-pertemuan dengan kelompok-kelompok mahasiswa dari luar Salatiga, Stanley biasanya bekerja di "seksi sibuk," seperti mencari kendaraan, menyediakan konsumsi, dan mengurus "kecerewetan-kecerewetan" lain para peserta pertemuan.

Dalam pertemuan-pertemuan seperti itu, saya biasanya sibuk dalam kegiatan-kegiatan diskusi. Maka, sangatlah wajar kalau Stanley kurang muncul dalam ambang kesadaran saya. Baru setelah perte-

muan usai dan panitia menyatakan terima kasih kepada para pekerja di "dapur", Stanley muncul ke permukaan.

Orang ini makin saya kenal ketika terjadi persengketaan di kampus pada tahun 1987. Salah satu pihak yang bersengketa menggunakan kelompok tukang berkelahi untuk mengintimidasi kelompok lainnya. Mereka kadang-kadang datang malam hari dengan membawa senjata tajam. Salah seorang mahasiswa bahkan sempat dipukul di tempat kostnya.

Dalam keadaan seperti ini, Stanley muncul kembali. Dia ternyata bukan saja ahli mengurus kendaraan dan konsumsi untuk pertemuan, tapi juga "jago berkelahi". Dengan keberaniannya yang luar biasa, dia menghadapi beberapa orang yang bersenjata tajam yang mendatangi tenpat kostnya. Kemudian, bersama teman-temannya, dia mendatangi kelompok lawan. Menghadapi perlawanan "keras" seperti ini, kelompok lawan tampaknya jadi lebih ber-hati-hati dan menawarkan perdamaian.

Stanley menjadi sangat "muncul", ketika masalah Waduk Kedung Ombo mencuat pada permulaan tahun 1989. Sebagaimana diketahui, penduduk Kedung Ombo telah berusaha supaya mereka diperlakukan secara adil ketika dipaksa meninggalkan tempat pemukiman dan lahan garapannya. Tapi, Usaha ini tampak sia-sia. Penduduk makin disudutkan, upaya organisasi non-pemerintah seperti Lembaga Bantuan Hukum sudah tidak berdaya menolong mereka. Pada titik inilah para mahasiswa "turun" mencoba melakukan sesuatu. Mereka mendirikan KSKPKO (Kelompok Solidaritas Kurban Pembangunan Kedung Ombo), yang intinya terdiri dari mahasiswa Yogya, Salatiga dan Jakarta. Stanley adalah salah seorang pimpinan KSKPKO, yang berperan cukup aktif.

Dengan demikian, Stanley bukan sekadar merupakan seorang pengamat dari jauh dalam persoalan Kedung Ombo. Dia adalah salah seorang pelaku aktif, dari permulaan sampai akhir. Dia ada di

tengah-tengah para demonstran ketika mereka pertama kali mengunjungi lokasi waduk Kedung Ombo dan berhadapan dengan anggota-anggota Kodim dari Boyolali, dia ikut serta dalam demostrasi di Boyolali dan Semarang, sehari setelah Pak Harto menyatakan bahwa penduduk Kedung Ombo adalah bekas orang-orang PKI, dia datang ke Jakarta menemui Menteri Dalam Negeri (ketika itu) Jendral Rudini, dia ikut ditahan setelah kelompok KSKPKO menggelar aksi di Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta, dia juga membantu Romo Mangunwijaya untuk melakukan aksi sosialnya. Pendeknya, Stanley selalu berada di garis depan bersama rekan-rekannya dalam gerakan membela penduduk yang digusur di Kedung Ombo.

Kemudian, sebuah "bakat" Stanley yang lain tampak ketika dia menuliskan apa yang dia alami tentang keterlibatannya dalam kasus Kedung Ombo. Ternyata Stanley adalah seorang peneliti yang cermat, penyimpan dokumen yang rajin, dan penulis yang "lumayan". Dalam kegiatannya sebagai aktivis pembela penduduk yang tergusur di daerah Kedung Ombo, dia sempat berbicara dengan orang-orang yang dibelanya tentang sejarah dan legenda-legenda yang hidup di daerah tersebut. Dia juga membuat catatan -catatan pribadi tentang kegiatannya, dan mendokumentasikan surat-surat serta guntingan-guntingan koran tentang masalah ini. Dia mengambil foto-foto dari peristiwa-peristiwa penting, atau memintanya dari rekan-rekan wartawan yang memiliki foto-foto yang bagus tentang kasus ini. Dan ketika ada orang yang meminta dia menuliskan semuanya ini, dia menuliskannya dengan baik (dan terutama: lengkap). Hasilnya adalah buku yang sedang Anda baca sekarang.

Atas dasar ini, maka saya beranggapan bahwa Stanley merupakan salah satu orang yang sangat representatif untuk menuliskan kasus Kedung Ombo. Bukan karena pengalamannya lebih banyak dari teman-temannya atau pengetahuannya tentang latar belakang penduduk Kedung Ombo lebih baik dari para ahli antropologi yang

(kalau ada) melakukan studi di daerah tersebut. Tapi terutama karena Stanley memiliki kombinasi yang memadai dari berbagai keahlian ini. Saya yakin ada teman-temannya yang memiliki pengalaman yang lebih intens sebagai aktivis kasus Kedung Ombo, tapi banyak dari mereka tidak terampil untuk menuliskannya. Juga, ada banyak penulis-penulis yang bisa menuliskan secara lebih baik tapi mereka bukanlah orang lapangan yang ada di tengah-tengah para demonstran menghadapi senjata laras panjang yang berbayonet, atau sempat ditahan dan diinterogasi, dan sebaginya, semua hal-hal inilah yang membuat buku yang ditulis Stanley ini menjadi unik.

Dua Kelemahan

Tetapi, kekuatan yang dimiliki Stanley sebagai penulis kasus ini merupakan juga kelemahannya. Sebagai seorang peserta aktif dalam gerakan membela penduduk Kedung Ombo, Stanley mungkin bisa menceritakan secara lengkap dan mendalam apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh dia dan teman-temannya. Tapi, mungkin Stanley akan sulit melihat pandangan pemerintah. Keterlibatannya yang dilakukan secara intens sedikit banyak "mencegah" dia untuk bisa menghayati argumen "lawan"nya. Maka, seperti tampak pada buku ini, cara berpikir dan argumen pihak "lawan" kurang lengkap dicerminkan pada buku ini.

Soal lain yang kurang dibahas pada buku ini adalah perjuangan yang terjadi di dunia internasional. Hal ini bisa dipahami, karena Stanley bergerak di aras akar rumput, di tengah-tengah medan di mana aksi dilakukan. Stanley, yang pada waktu masih mahasiswa di Universitas Kristen Satya Wacana, tidak dilibatkan dalam usaha-usaha di forum internasional untuk memperjuangkan penduduk Kedung Ombo. Dia hanya mendapatkan hasil-hasilnya saja, melalui pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh INGI (*International*

NGO Forum for Indonesia), atau surat-surat orang-orang Bank Dunia yang "bocor" ke tangan para aktivis.

Padahal, dalam kasus Kedung Ombo ini, peran luar negeri cukup besar. Bahkan dapat dikatakan, kasus Kedung Ombo merupakan kasus pertama di Indonesia di mana kerjasama antar NGO Indonesia dengan NGO luar negeri bisa menghasilkan sesuatu yang nyata. Reaksi pemerintahpun cukup keras. Para wakil NGO Indonesia peserta pertemuan INGI di Belgia pada tahun 1989 sempat dipanggil oleh Mensesneg Murdiono untuk mendapatkan "teguran" sambil menyatakan bahwa orang Indonesia di luar negeri hendaknya memegang prinsip "righ or wrong, my country". Reaksi keras ini sekali lagi menunjukkan keberhasilan kerjasama internasional antar NGO seperti disebutkan di atas. Kalau tidak, tentunya pemerintah tidak perlu menugaskan Mensesneg untuk memanggil wakil-wakil NGO ini.

Apa yang terjadi sebenarnya adalah di samping wakil-wakil NGO [1] yang bertemu di Belgia menulis surat ke Bank Dunia untuk memperhatikan nasib penduduk yang tergusur oleh waduk Kedung Ombo, mereka juga secara satu persatu melakukan pendekatan kepada anggota-anggota parlemen negara masing-masing setelah usai menghadiri pertemuan ini. Para anggota parlemen yang dihubungi kemudian mempersoalkan masalah Kedung Ombo ini dengan pemerintahnya masing-masing. [2]

---

[1] Puluhan wakil-wakil NGO hadir dalam pertemuan di Belgia ini. Di samping wakil-wakil NGO dari Indonesia, hadir juga wakil-wakil NGO dari Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Jerman, Belgia, Kanada, Australia, Perancis, dan beberapa negara lain.

[2] Di Amerika Serikat, kampanye ini sangat berhasil. Ini disebabkan karena pengaruh AS kepada Bank Dunia sangat besar.

Hasilnya sudah diceritakan pada buku ini. Bank Dunia kemudian secara sangat halus "menegur" pemerintah Indonesia, antara lain dengan menyatakan bahwa dana dari Bank Dunia untuk pembangunan yang akan menggusur penduduk akan dipertimbangkan berdasarkan keberhasilan pemerintah untuk menyelesaikan masalah Kedung Ombo secara adil. Maka, pemerintahpun secara drastis mengubah sikapnya. Penduduk yang tadinya dituduh bekas PKI, penduduk yang tadinya dianggap "mbalelo" karena menolak dipindahkan ke desa Kayen atau pemukiman transmigrasi Mukomuko di Bengkulu, tiba-tiba dikabulkan tuntutannya, yakni mendapat sekeping tanah pengganti di sekitar waduk. Bahkan, oleh Gubernur Jawa Tengah mereka sempat dipanggil sebagai "pahlawan".

Dengan menunjuk pentingnya "perjuangan" di forum internasional, samasekali tidak berarti bahwa tulisan ini mau mengecilkan apa yang telah dilakukan oleh para penduduk Kedung Ombo, para mahasiswa dan organisasi-organisasi non-pemerintah di dalam negeri. Sebaliknya, tanpa apa yang mereka lakukan, kekuatan-kekuatan di luar negeri tidak berarti apa-apa.

Karena itu, uraian tentang pentingnya peran kekuatan-kekuatan internasional adalah sekadar menunjukkan bahwa aspek ini hendaknya tidak dilupakan oleh para aktivis yang memperjuangkan nasib rakyat kecil di negeri ini. Perjuangan ini diperlukan, karena dalam konteks politik Indonesia masa kini, pemerintah telah berhasil menghimpun kekuatan politik yang sangat besar, sehingga kekuatan-kekuatan politik non-pemerintah menjadi relatif sangat lemah. Bila perjuangan membela penduduk Kedung Ombo hanya dilakukan di dalam negeri saja, saya meragukan hasilnyaakan seperti yang sudah terjadi.

Penutup: Soal Patriotisme

Kemudian timbul pertanyaan, apakah dengan demikian kita jadi tidak bersikap patriot dengan tidak menganut semboyan "right or wrong, my country". Untuk menjawab ini saya ingin mengutip kata-kata Romo Mangunwijaya yang mengatakan bahwa pemuda Indonesia sekarang seharusnya bersikap "right or wrong is right or wrong". Karena, hanya dengan bersikap demikian kita bisa menjadi seorang patriot sejati, dengan membawa negara kita ke arah yang benar.

Kasus Kedung Ombo telah membuktikan hal ini. Di tengah-tengah tuduhan bahwa aktivis adalah orang yang tdak patriotik dan pengkhianat bangsa, pada akhirnya yang menikmati hasilnya adalah orang-orang kecil bekas penduduk daerah yang dijadikan waduk itu. Saya yakin mereka beranggapan bahwa aktivis ini sabagai sahabat mereka, sahabat sekelompok rakyat Indonesia yang tidak memiliki kekayaan dan kekuasaan, yang nasibnya biasanya selalu tergusur oleh pembangunan. Apakah ini bukan patriotisme?

ooOoo

Pengantar G.J. Aditjondro

BALADA BENDUNGAN-BENDUNGAN RAKSASA DI INDONESIA

SYAIR WADUK

PURWANTO

***PARA** Ulama berdo'a dengan khusuk*
para cukong berlobi dengan kasak-kusuk
para birokrat dengan santai duduk-duduk
tinggal lah para penduduk
dengan hati yang dak dik duk
menunggu ditenggelamkan waduk.

Rakyat terlalu suntuk
melihat keadilan berubah bentuk
pasal hukum gampang ditekuk
halal haram bercampur aduk

Wakil rakyat berjanji muluk-muluk
ikut sidang sambil mengantuk
dari pada kehilangan tempat duduk
lebih aman mengangguk-angguk.

Lihat, hakim-hakim saling gebuk
seperti sedang mabuk
gedung pengadilan pun ambruk
sebab pilar-pilarnya buruk.

Konglomerat mangkin kemaruk
tak peduli rakyat terpuruk
jika rakus sudah mewaduk
yang penting duit masuk.

Kaum cendekiawan terlalu sibuk
dengan kertas seminar yang bertumpuk
kemiskinan menjadi topik empuk
di hotel mewah mereka berembuk.

Yang mahasiswa juga sibuk
ramai-ramai bikin spanduk
dan melakukan aksi duduk
meski akhirnya harus tunduk.

Media massa tak berani mengutuk
selain karena takut diciduk
demi stabilitas isi periuk
walaupun sekedar nasi uduk.

Waduk, waduk, waduk
nasib rakyat di ujung tanduk
awas, jangan menyeruduk
nanti laras senapan terbatuk-batuk.

(Surat Pembaca dalam Panji Masyarakat,
1-11 Februari 1994, hal. 4)

Kedung Ombo, kini praktis sudah (atau:sedang?) lenyap dari halaman depan media massa di Indonesia. Namun itu tidak berarti, pembangunan bendungan-bendungan besar maupun sedang kini praktis dapat berjalan dengan mulus di negeri ini. Sama sekali tidak. Sudah ada sejumlah bendungan besar dan sedang yang sudah berteriak minta perhatian. Pada saat popularitas Kedung Ombo mulai surut, dari kawasan perbatasan Riau dan Sumatera Barat rencana pembangunan PLTA Kotopanjang mulai meminta perhatian, karena menjadi sorotan di Jepang dan Indonesia.

Kemudian, pada saat PLTA Kotopanjang mulai dilupakan orang, kontroversi sekitar rencana pembangunan PLTA Danau Lindu di Sulawesi Tengah mulai merebak, berkat kerjasama yang erat antara para pegiat (aktivis) lingkungan dan masyarakat kampung-kampung yang mau digusur, serta media massa di Palu dan Jakarta. Akhirnya, tak pelak lagi, drama penembakan empat penduduk desa yang memprotes pengukuran tanah untuk waduk irigasi Nipah di Pulau Madura, merebut *headlines* media massa di Jakarta

dan Surabaya selama beberapa minggu. Sehingga hantu Kedung Ombo kembali menyeruak ke permukaan.

Makanya, penerbitan buku karangan Stanley ini masih tetap penad (relevan). Kepenadannya, menurut hemat saya, dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, buku ini menggambarkan proses pembebasan tanah di kawasan waduk Kedung Ombo secara cukup terinci, khususnya taktik-taktik penekanan yang dijalankan oleh aparat pemerintah daerah terhadap para pemilik tanah. Aspek pertama ini terutama dibeberkan dalam Bab I dan II.

Kedua, buku ini juga menggambarkan secara cukup rinci perubahan-perubahan kebijakan pemerintah dalam soal pembebasan tanah dan pemindahan penduduk, setelah menghadapi oposisi rakyat setempat. Aspek kedua ini terutama digambarkan dalam Bab IV.

Ketiga, buku ini menggambarkan respons kaum terpelajar —khususnya kelompok-kelompok aktivis mahasiswa serta sejumlah organisasi advokasi profesional— yang berusaha mempertinggi kekuatan menawar (*bargaining power*) rakyat di kawasan Kedung Ombo menghadapi pemerintah di berbagai aras (*level*). Baik di front dalam negeri, maupun menghadapi badan internasional yang paling besar andilnya dalam pembiayaan bendungan Kedung Ombo, yakni Bank Dunia. Aspek ketiga ini terutama digambarkan dalam Bab III.

Yang juga menarik dari buku ini adalah bahwa, berbeda dengan buku sebelumnya yang telah ditulis tentang kasus Kedung Ombo, buku ini juga dilengkapi satu Bab yang khusus berisi Renungan dan Evaluasi. Bab penutup yang cukup panjang ini, selain melakukan refleksi kritis terhadap interaksi antara "orang kampung" dalam gerakan protes Kedung Ombo, juga berusaha melakukan demitologisasi terhadap pembangunan bendungan besar.

***

Kita memang perlu angkat topi bagi perlawanan rakyat di Lembah Sungai Serang dan Uter, Jawa Tengah, menghadapi pembelian tanah mereka yang dibarengi paksaan bertransmigrasi. Tanpa ketegaran rakyat setempat, dukungan kaum muda terpelajar di kota-kota di Jawa dan Lombok juga tak ada artinya. Kendati demikian perlawanan rakyat di kawasan waduk Kedung Ombo juga tidak perlu terlalu diromantisasi. Dalam arti, janganlah dianggap bahwa kasus Kedung Ombo itu begitu unik dari sudut perlawanan rakyat pedesaan setempat, khususnya rakyat pedesaan di Jawa.

Soalnya, berbeda dengan pandangan populer bahwa rakyat pedesaan di Jawa umumnya lebih bersikap *nrimo* terhadap semua kehendak pemerintah, pembangunan bendungan serta proyek-proyek irigasi dan PLTA serupa selama Orde Baru cukup "teratur" menghadapi perlawanan rakyat yang tidak bersedia digusur dan dibeli tanah mereka begitu saja. Penelitian kepustakaan saya lakukan untuk studi disertasi saya tentang liputan pers terhadap kasus Kedung Ombo [1] menunjukkan bahwa pembangkangan rakyat pedesaan Jawa *a la* Kedung Ombo terjadi secara "rutin" semenjak pemerintah pusat *cq* Departemen Pekerjaan Umum (PU) dan Perum Listrik Negara (PLN) mulai menggalakkan pembangunan bendungan besar di Jawa.

Di luar kasus Kedung Ombo, lima bendungan yang paling intens mengundang perlawanan rakyat pedesaan di Jawa adalah rencana bendungan Jipang di Jawa Timur, bendungan Gajah Mungkur dan Mrica di Jawa Tengah, serta bendungan Saguling dan Cirata di Jawa Barat.

[1] G.J. Aditjondro, *The Media as Development "Textbook": A Case Study on Information Distortion in The Debate about the Social Impact of an Indonesian Dam*. Tesis Ph.D. pada Cornel University di Ithaca, A.S., Januari 1993.

Perlawanan terhadap rencana bendungan Jipang di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, termasuk perlawanan terhadap suatu proyek bendungan yang paling berdarah selama sejarah Orde Baru. Karena kepala desa Luwihaji, Isnafsiran, terlalu bersemangat mendorong warga desanya untuk bertransmigrasi ke Sulawesi Tenggara dan Jambi, demi pembangunan waduk Jipang, sebagian warga desanya berkomplot untuk menghabisi nyawa sang lurah. Sesudah pada satu rapat desa memaki-maki sekretaris desanya, Rusman, yang dikatakan tidak becus mendorong warganya untuk bertransmigrasi, Rusman dan 13 orang temannya membunuh sang lurah pada tanggal 10 Juli 1976. Sesudahbersidang selama tiga bulan, pada tanggal 4 Oktober 1977 Pengadilan Negeri Bojonegoro menjatuhkan hukuman antara 20 bulan s/d 13 tahun kepada Rusman dan kawan-kawannya.

Kendati menghukum para pembangkang yang dicap sebagai "sisa-sisa BTI" dan "pengikut Mbah Suro", PU toh memetik hikmah juga dari perlawanan rakyat itu. Di bulan November 1990, Dirjen Pengairan, Subandi Wirosumarto, mengumumkan bahwa rencana pembangunan bendungan Jipang yang waduknya bakal menenggelamkan 7.000 Ha tanah yang dihuni 50.000 jiwa, secara resmi dibatalkan. Sebagai gantinya PU akan membangun bendungan gerak di desa Sembayat di Kabupaten Gresik, sebagai bagian dari usaha mengendalikan banjir Bengawan Solo, sambil mencegah intrusi air laut. Keputusan Dirjen Pengairan itu baru-baru ini dipertegaskan lagi oleh Menteri PU Radinal Mochtar, ketika meninjau lokasi banjir bengawan Solo di Lamongan, Jawa Timur. Pertimbangan untuk pembatalan bendungan Jipang itu, menurut Menteri PU, selain biayanya yang sangat besar, adalah dampak sosialnya yang terlalu tinggi karena harus memindahkan 12.500 keluarga atau sekitar 50.000 jiwa (*Kompas*, 5 April 1994).

Bahwa dampak sosial yang dapat timbul dari pembangunan

sebuah bendungan sampai menjadi pertimbangan untuk membatalkan rencana itu, tampaknya merupakan suatu perkembangan baru di lingkungan para pembangun bendungan besar di Indonesia. Sebab ketika bendungan Gajah Mungkur akan dibangun di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, penggusuran 51 desa oleh waduk itu —kurang lebih dua kali lipat dari potensial digusur oleh waduk Jipang— tampaknya tak terlalu merisaukan pemerintah. Bahkan "kerelaan" mereka untuk pindah demi pembangunan waduk Gakah Mungkur "dipuji" lewat Monumen Bedol Desa yang dibangun di tepi waduk itu, lengkap dengan peta ke-51 desa yang tergusur.

Walaupun tak sedrastis Bojonegoro, perlawanan rakyat terhadap cara-cara pembebasan tanah serta paksaan bertransmigrasi di kawasan waduk Gajah Mungkurberlangsung cukup lama dalam beberapa gelombang dari tahun 1978 s/d 1992. Pada mulanya, rakyat cukup tegas menentang harga ganti rugi tanah yang di beberapa tempat hanya Rp 28 per m^2, padahal harga pasaran tanah setempat sampai mencapai Rp 500 per m^2. Perlawanan rakyat di salah satu desa dipimpin oleh kepala desanya, yang menjelang Sidang Umum MPR 1978 dicopot dari jabatannya dengan tuduhan "menggelapkan dana kredit Bimas".

Sementara itu, walaupun menurut taksiran pemerintah hanya 5% dari rakyat setempat menolak bertransmigrasi, di beberapa desa sesungguhnya sekitar 20% rakyat hanya memindahkan rumah-rumah mereka ke kawasan yang lebih tinggi. Itu sebabnya, sesudah waduk terbentuk, masih cukup banyak rakyat setempat yang menghuni kawasan sabuk hijau. Kawasan sabuk hijau seluas 1.150 Ha itu sendiri, yang baru diputuskan oleh PU pada tahun 1981 dan terentang dari ketinggian 138,3 m s/d 142 m di atas muka laut, atau 25 s/d 200 meter dari tepi waduk, menyebabkan 1.650 keluarga terancam penggusuran, di luar penduduk 51 desa yang sudah tergusur terlebih dahulu. Walaupun sebagian di antara mereka akhirnya

bersedia bertransmigrasi, sampai dengan Juni 1983 ada yang masih tetap tegar memperjuangkan ganti rugi yang lebih adil bagi tanah mereka yang di-sabuk-hijau-kan. Perlawanan itu melibatkan Kepala Desa Boto dari Kecamatan Baturetno. Walhasil, kehadiran sekitar 1.800 keluarga di sekitar waduk akhirnya "ditoleransi" secara formal lewat SK Gubernur Jawa Tangahdi tahun 1992. Sebelumnya, 236 orang mandor proyek Gajah Mungkur memungut "sewa" atau "bagi-hasil tidak resmi" dari para penggarap sabuk hijau dan kawasan pasang-surut waduk itu.

Perlawanan rakyat terhadap rencana pembangunan PLTA Mrica di Kabupaten Banjarnegara juga tak kalah seriusnya dengan para pembangkang Gajah Mungkur. Perlawanan yang berlangsung dari tahun 1982 s/d 1991, pada mulanya juga berfokus pada soal ganti rugi tanah yang dianggap sangat tidak wajar. Sejumlah 314 penduduk desa-desa yang akan ditenggelamkan oleh waduk PLTA Mrica menunjuk pengacara LBH Yogya dan Jakarta untuk menggugat PLN sebagai instansi pembangun bendungan itu. Tuntutan rakyat akhirnya dikalahkan oleh pengadilan, setelah PLN di tahun 1986 menggugat balik mereka sebagai "penghambat pembangunan sarana kepentingan umum".

Sesudah kalah dalam perkara ganti rugi tanah, antara tahun 1987 s/d 1991 sebagian warga desa yang tanahnya sudah tenggelam menuntut pengurus Korpri dan manajer Bank Pasar Banjarnegara, yang menyalahgunakan uang ganti rugi mereka yang didepositokan di bank itu. Sementara itu, di tahun 1990 rakyat yang tetap bermukim di sekitar waduk melakukan "sabotase halus" terhadap sabuk hijau waduk itu dengan membabat bibit-bibit pohon kaliandra yang ditanam oleh pengelola proyek. Soalnya mereka masih tetap memperjuangkan pengganti tanah garapan mereka.

Kalau di Jawa Tengah, Gajah Mungkur, Mrica, dan Kedung Ombo menjadi "Primadona" perlawanan rakyat desa, di Jawa Barat

pasangan bendungan Saguling dan Cirata lah yang menjadi gelanggang protes petani yang utama. Gerakan protes itu berlangsung dalam beberapa gelombang dari tahun 1982 s/d 1990, dan, seperti biasa, berfokus pada penentuan besar ganti rugi tanah yang tidak demokratis dan masih dimanipulasi lagi oleh aparat pemerintah setempat. Gerakan-gerakan protes itu diselingi suatu peristiwa berdarah, yakni pembunuhan seorang warga Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, oleh aparat kecamatan yang terlibat manipulasi uang ganti rugi rakyat setempat. Mahfuddin Hermanto, 28 tahun, pernah kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung, dan dengan pengetahuan hukumnya membantu rekan-rekannya menghadapi aparat pemerintah setempat yang serakah. Pada suatu malam yang naas, 12 oktober 1986, Apud dijemput oleh beberapa orang Hansip. Duabelas hari kemudian, mayatnya ditemukan hanyut dalam karung di sungai.

Para bekas teman kuliahnya di FH Unpar tak tinggal diam mengetahui kematian rekan mereka. Acara berkabung disusul dengan *long march* dari kampus Unpar di Bandung ke Cirata, memaksa pemerintah mengusut para pelaku pembunuhan itu secara serius. Walhasil, pada tanggal 28 Juli 1987, seorang Hansip dihukum 13 tahun penjara, sedangkan dua orang kepala desa yang menjadi saksi dalam perkara pembunuhan Mahfuddin, dipecat dengan tidak hormat. Pengadilan terhadap bintara-bintara polisi di Ciranjang yang terlibat dalam pembunuhan "aktivis hukum kaki telanjang" (*barefoot lawyer*) itu memakan waktu lebih lama. Baru pada tanggal 22 September 1989, Mahkamah Militer di Bandung menjatuhkan vonis 17 dan 15 tahun penjara kepada Kapolsek Ciranjang, Nadio Soetrisno dan wakilnya, Yusuf Effendi. Keduanya dipecat dengan tidak hormat dari Polri.

Di luar perkara pembunuhan warga desa Kertajaya itu, berbagai kelompok masyarakat desa di Kabupaten Cianjur yang dirugi-

kan oleh kedua bendungan itu sempat menggugat pemerintah. Ada yang menggugat PLN melalui LBH Bandung, menolak penetapan ganti rugi yang tidak demokratis. Sampai bulan Februari 1991, masih ada 4.000 orang pemilik tanah yang tersebar di 27 desa, yang menolak penetapan ganti rugi tanah secara sepihak oleh proyek bendungan Saguling. Ada juga penduduk yang memprotes penarikan "sewa tanah" tak resmi terhadap tanah PLN yang mereka garap. Sebelumnya, di bulan Agustus 1986 ada 23 orang warga desa Kabupaten Bandung yang menuntut ganti rugi bagi tanah dan tanaman mereka, yang diambil-alih oleh PLN untuk pembangunan jalur transmisi listrik bertegangan 500 KV. Begitulah berbagai bentuk protes rakyat sehubungan dengan pembangunan kedua PLTA di hulu sungai Citarum itu.

***

Dukungan kaum terpelajar di kota-kota besar, seperti yang ditampilkam dalam kasus Kedung Ombo, sesungguhnya juga tak terbatas dalam kasus bendungan itu saja. Seperti yang telah disinggung di depan, kasus bendungan Mrica di Jawa Tengah serta Saguling dan Cirata di Jawa Barat melibatkan pengacara-pengacara LBH Yogya, Jakarta, dan Bandung. Selain itu, Achmad Sulaiman, penghubung antara rakyat desa-desa yang terancam penggenangan oleh waduk PLTA Mrica dengan LBH Yogya, masih kuliah di Fakultas Teknik UGM. Ia kebetulan berasal dari salah satu desa yang akan ditenggelamkan. Berarti, posisi Sulaiman dalam kasus Mrica hampir mirip dengan posisi almarhum Mahfuddin Hermanto dalam kasus Cirata.

Kombinasi antara aktivis pemuda desa setempat (yang masih atau pernah kuliah di kota) dengan pengacara dan aktivis profesional lain yang bukan berasal dari desa korban waduk, tampaknya sering

berperan memacu gerakan-gerakan protes di seputar proyek-proyek bendungan besar di Indonesia. Baik di Jawa, maupun di luar Jawa. Misalnya dalam kasus pembangunan bendungan Proyek Asahan di Sumatera Utara, kasus bendungan Riam Kanan di Kalimantan Selatan, dan kasus bendungan PLTA Bakaru di Sulawesi Selatan. "Medan latihan" pertama pengacara kondang yang juga ketua umum Serikat Buruh Setiakawan Indonesia (SBSI) Mochtar Pakpahan, adalah kasus PLTA Siguragura dan Tangga di Hulu Asahan, Sumatera Utara. Pakpahan akhirnya pergi melanjutkan studi ke Jakarta, karena pimpinan Universitas HKBP Nommensen menganggap posisi Mochtar sebagai Ketua LBH universitas itu terlalu "berbahaya" bagi posisi perguruan tinggi swasta itu.

Namun, dari ketiga kasus perlawanan "orang kampung" dan "orang kampus" dalam pembebasan tanah untuk bendungan-bendungan di luar Jawa itu, kasus PLTA Bakaru yang paling unik dalam sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia. Sebab hanya dalam kasus itulah ada lima orang aktivis mahasiswa yang diseret ke meja hijau karena tuduhan "mengahsut rakyat setempat" untuk menentang suatu proyek bendungan. Soalnya, pada tanggal 15 Januari 1985, ke-5 orang aktivis mahasiswa itu ikut bersama 75 orang warga desa menempuh perjalanan sejauh 250 Km untuk mengajukan protes mereka ke Gubernur dan DPRD Sulawesi Selatan, sehubungan dengan proses pembebasan tanah untuk proyek PLTA itu.

Kelima orang aktivis itu adalah Mustafa Pajjo (25 tahun), Amir bin Maddese (24 tahun), Abdul Rasyid Toali (27 tahun), Muhammad Jafar (27 tahun), dan Hamsyah (27 tahun). Bersama dua orang tokoh masyarakat Desa Ulu Sadang, yakni Nasir (28 tahun), seorang petani, dan Lawangeng alias Salama (43 tahun), imam desa itu, mereka diajukan ke depan meja hijau Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 4 Desember 1985. Kecuali Abdul Rasyid Toali yang dianggap tak langsung terlibat dalam aksi-aksi protes masyarakat desa itu,

keenam orang aktivis itu pada bulan Maret 1986 divonis empat tahun penjara.

Walhasil, Mustafa, Amir, Hamzah dan Jafar terpaksa drop out dari kuliah mereka di Ujungpandang. Sesudah menjalani masa hukumannya, Mustafa dan Lawangeng bermigrasi ke Malaysia, karena malu bahwa perjuangan mereka tidak berhasil. Abdul Rasyid Toali, yang berhasil menggondol gelar Sarjana Hukum di Universitas Hasanuddin, pertengahan 1991 menyatakan masih tetap siap membela masyarakat desa korban PLTA Bakaru. Sedangkan masyarakat desa Ulu Sadang sendiri tampaknya tetap tegar menghadapi desakan pemerintah untuk meninggalkan desa asal mereka dan ber-"transmigrasi lokal" ke Kabupaten Luwu. Makanya PLN mengambil langkah-langkah ekstra ketika PLTA itu diresmikan, bulan September 1990, karena takut "sabotase" masyarakat yang dirugikan oleh proyek itu.

***

Pembebasan tanah dan "saudara kembarnya", pemindahan penduduk secara terpaksa (*involuntary resettlement*), telah berulang kali disebut sebagai dampak sosial utama akibat pembangunan bendungan. Makanya, saya rasa perlu ada catatan tambahan bagi *chronicle* perjuangan rakyat Kedung Ombo ini, yakni: masih banyak dampak sosial dan ekologis lain akibat pembangunan bendungan besar. Mengacu pada karya Edward Goldsmith dan Nicholas Hildyard (*The Social and Environmental Effect of Large Dams*, San Francisco: Sierra Book, 1984), pengarang telah berusaha membeberkan dampak-dampak itu. Hal itu dapat dibaca dalam Bagian berjudul "Perlunya Demitologisasi Pembangunan Bendungan Besar" di Bab terakhir buku ini. Banyak contoh diberikan di situ dari Mesir serta sejumlah negara lain, dan sangat sedikit dari Indonesia.

Padahal pengalaman pembangunan dan pengoperasian bendungan-bendungan besar di Indonesia cukup kaya dengan contoh-contoh dampak sosial dan ekologis yang dapat dicermati. Pada kesempatan ini hanya tiga aspek yang akan saya kemukakan, bertolak dari penelitian tesis saya yang masih tetap saya lanjutkan dengan penelitian kepustakaan, wawancara, dan pengamatan lapangan di Indonesia. Ketiga aspek yang masih kurang mendapat perhatian dalam literatur tentang dampak sosial dan ekologis bendungan itu adalah **(1)** dampak sosial akibat jebolnya bendungan sementara (*coffer dam*) pada masa konstruksi; **(2)** dampak sosial bagi buruh-buruh konstruksi; dan **(3)** dampak sosial akibat ketidaksiapan penduduk sekitar waduk serta para pelancong menghadapi tubuh air yang belum dikenal dan belum mereka kuasai sepenuhnya.

Tentang aspek pertama, marilah kita simak Tabel 1. Untuk menyegarkan ingatan kita, jebolnya *coffer dam* (bendungan sementara) Sempor pernah cukup menghebohkan. Ada yang berspekulasi waktu itu, jangan-jangan "sisa-sisa PKI" yang melakukan sabotase terhadap proyek itu. Penduduk setempat menjelaskan peristiwa itu secara mistis dengan menyalahkan pimpinan proyek yang tidak mau berziarah dan menaruh sesajen di dua kuburan keramat warga Sempor di Gunung Kedoya, sebelum menggenangi kampung halaman mereka. Sedangkan sumber-sumber Departemen PU yang pernah saya wawancarai menyebutkan sulitnya mendapatkan hutang luar negeri untuk membangun proyek itu di masa Orde Lama, sebagai penyebab malapetaka itu. Akibat sulitnya mendapatkan pinjaman itu, *coffer dam* Sempor yang hanya mampu bertahan selama dua tahun sebelum bendungan yang sesungguhnya dibangun, dipaksa bertahan lebih lama. Sampai banjir badang akhirnya menjebolkan bendungan sementara itu. Walhasil, Sempor lah satu-satunya kasus di Indonesia yang telah "diabadikan" dalam literatur tentang kecelakaan-kecelakan bendungan di Dunia.

Tabel 1.

Jumlah warga desa yang meninggal pada masa konstruksi dua bendungan besar di Jawa Tangah

Nama Bendungan (kabupaten)	Jumlah warga desa yang meninggal	Tahun peresmian bendungan
Sempor (Gombong)	127 *)	1978
Mrica (Banjarnegara)	6 **)	1989

Catatan:

*) Musibah ini terjadi ketika bendungan sementara (*coffer dam*) Sempor jebol akibat serangan banjir badang pada malam hari, tanggal 27 November 1967, menghancurkan 1.100 rumah dan sebuah mesjid di enam desa, memutuskan 800 meter rel kereta api, dan membunuh ribuan ekor ternak.

**) Warga desa yang tinggal sepanjang Sungai Serayu ini meninggal dunia, ketika banjir badang berkekuatan 4.486 m^3 per detik terjadi pada tanggal 24 Maret 1986. Banjir badang ini terjadi akibat jebolnya *coffer dam* Mrica pada jam 5.40 sore, akibat erosi batu-batuan pengisi bendungan sementara itu. Selain korban jiwa yang tidak seberapa dibandingkan dengan dalam kasus Sempor, 15 jembatan hanyut, 300 rumah tenggelam, dan tujuh di antaranya hanyut terbawa arus.

Sumber: Aditjondro. 1993:48.

Berbeda dengan kasus Sempor yang terjadi di awal Orde Baru, jebolnya *coffer dam* Mrica terjadi ketika hutang luar negeri sudah membanjiri Indonesia. Toh bendungan yang dibiayai hutang dari Inggris itu sempat mengalami musibah juga. Untunglah korban jiwanya tidaklah sebanyak Sempor, berkat sistem pemberitahuan dini (*early warning system*) Mrica yang cukup baik.

Adapun tentang aspek kedua, cobalah kita simak Tabel 2. Di situ tampak bahwa data yang sempat direkam oleh pers dan para peneliti di Indonesia, bendungan-bendungan PLTA Sengguruh di hulu Kali Brantas, Jawa Timur, mencatat "rekor" angka kematian buruh yang tertinggi selama masa konstruksinya. Namun sifat

kecelakaan itu agak "unik", yakni jatuhnya truk pengangkut buruh ke dalam jurang. Jadi angka kematian yang fantastis itu bukanlah hasil komulatif dari berbagai kecelakaan kerja lewat kurun waktu masa konstruksi yang cukup panjang.

Sementara itu, dua bendungan dengan angka kematian buruh komulatif yang tertinggi adalah, lagi-lagi Bakaru Sulawesi Selatan, dan Karangkates, yang juga termasuk Proyek Kali Brantas (seperti Sengguruh). Nah, kalau sekarang kita bandingkan Bakaru dan Karangkates, kita perlu bertanya: kemajuan apa yang telah kita capai selama Orde Baru di bidang K-3 (kesehatan dan keselamatan kerja) buruh? Khususnya buruh kontruksi pada proyek-proyek yang lebih sulit dan berbahaya, seperti bendungan besar? Soalnya, Karangkates dibangun dengan dana pampasan perang Jepang di awal Orde Baru, sedangkan Bakaru dibangun dengan "hutang murni" dari Jepang dalam dasawarsa 1980-an.

Perhatian terhadap segi-segi K-3 buruh konstruksi, selayaknya juga dicermati oleh para pemerhati bendungan di Indonesia. Sebab rasanya kurang fair kalau penderitaan petani yang tergusur oleh waduk kita perhatikan sekali, sementara penderitaan buruh yang kadang-kadang sampai mengorbankan kesehatannya (apabila ia sampai cacat) atau bahkan nyawanya, kita abaikan begitu saja. Perhatian ini perlu, sebab perkembangan teknologi bendungan juga semakin "maju". Dalam arti, para insinyur kita senang berlomba dengan rekan-rekan mereka di mancanegara untuk membangun bendungan yang lebih tinggi, atau lebih panjang, atau lebih melengkung busurnya, atau membangun terowongan pelimpas air (*tailrace tunnel*) yang lebih panjang, atau ruang tempat meletakkan turbin yang lebih dalam di bawah tanah. Atau, listrik yang dibangkitkan dari PLTA-PLTA juga semakin tinggi, dibandingkan dengan yang mampu dibangunkan dalam dasawarsa-dasawarsa yang lalu.

Berbagai prestasi teknis itu, tidak hanya membutuhkan alat-

alat bantu yang lebih canggih, melainkan juga resiko kerja yang semakin berat bagi buruh-buruhnya. Apalagi bilamana buruh-buruh konstruksi tidak punya kekuatan menawar (*bargaining power*) yang berarti, resiko kerja itu akan semakin berat pula. Dan pada saat buruh di Indonesia tidak punya kebebasan berserikat, dalam arti, kebebasan untuk memilih serikat buruh yang ingin dimasukinya, kekuatan menawar mereka masih sangat lemah. Lebih-lebih lagi dalam proyek-proyek vital seperti bendungan raksasa, yang karena umumnya merupakan proyek pemerintah, pendirian basis SPSI pun sering dihambat. Makanya, pada saat kita menghadapi bendungan dengan maupun tanpa PLTA yang semakin canggih, misalnya PLTA Danau Singkarak di Sumatera Barat yang terowongannya konon terpanjang di Asia Tenggara, kita juga harus bertanya bagaimana kondisi kerja buruhnya?

Tabel 2.

Angka kematian buruh selama konstruksi 10 bendungan besar di Indonesia yang sempat terekam oleh pers dan peneliti

Nama bendungan (propinsi)	Angka kematian buruh berkebangsaan Indonesia	Tahun peresmian
Sengguruh (Jawa Timur)	48	1988
Bakaru (Sulawesi Selatan)	30-37	1990
Karangkates (Jawa Timur)	30	1972
Wlingi (Jawa Timur)	16	1977
Sempor (Jawa Tengah)	11	1978
Cirata (Jawa Barat)	11	1988
Mrica (Jawa Tengah)	10	1988
Bening (Jawa Timur)	8	1982
Kedung Ombo (Jawa Tengah)	7	1991
Gajah Mungkur (Jawa Tengah)	6	1981

Sumber: Aditjondro, 1993:247: berbagai media massa; pengamatan lapangan.

Akhirnya, marilah kita bahas aspek ketiga (lihat Tabel 3). Dari tingginya angka kematian penduduk dan pelancong yang tenggelam di berbagai waduk bendungan di Indonesia, dapat kita simpulkan bahwa kesiapan rakyat kita menghadapi tubuh-tubuh air buatan itu belum terlalu tinggi. Juga dapat kita simpulkan bahwa perhatian para pengelola waduk terhadap keselamatan jiwa penduduk dan pengunjung juga tak terlalu tinggi. Tugas-tugas SAR di berbagai waduk umumnya adalah mencari mayat orang yang tenggelam. Bukan menyelamatkan orang yang sedang tenggelam. Apalagi mencegah orang tenggelam lewat latihan-latihan berenang dan menyelamatkan orang yang terancam bahaya tenggelam.

Tabel 3.

Angka kematian penduduk & pelancong yang tenggelam di 10 waduk bendungan di Indonesia yang sempat terekam oleh pers dan peneliti

No.	Nama waduk (propinsi)	Jumlah kematian yg terekam	Periode	Rata-rata kematian per-tahun
01.	Saguling (Jawa Barat)	115 (2	1985-1987 8 Juni 1993)	35
02.	Malahayu (Jawa Tengah)	80	1980-1991	7
03.	Selorejo (Jawa Timur)	± 60 (2	1970-1993 27 Juni 1993	2

04.	Kedung Ombo (Jawa Tengah)	45	Maret '89-April '94	10
05.	Gajah Mungkur (Jawa Tengah)	35	1981- 6 Maret 1994	2
06.	Riam Kanan (Kalimantan Selatan)	12	1980 - 1987	1
07.	Jatiluhur (Jawa Barat)	10	1991 - 1992	4
08.	Ngebel (Jawa Timur)	9	1991-1993	3
09.	Karangkates (Jawa Timur)	6	1993	6
10.	Cirata (Jawa Barat)	5	1987 - 1988	2

Sumber : Aditjondro, 1993: 223,227; berbagai media massa maupun laporan yang tak diterbitkan; serta wawancara di lapangan.

***

Begitulah sepintas kata pengantar yang dapat saya tulis, menyambut terbitnya buku karangan Stanley, yang dengan metode "pengamatan terlibat" (*participant observation*) telah berusaha merekam gejolak "orang kampung" dan "orang kampus" di Indonesia menghadapi pembangunan bendungan "serbaguna" Kedung Ombo di Jawa Tengah. Akhirnya sebagai penutup saya ingin mengutip puisi seorang penyair muda dari Riau, Fakhrunnas MA Jabar, yang resah menyaksikan pergumulan rakyat di Lembah Sungai Kampar menghadapi rencana pembangunan PLTA Kotopanjang, yang kini telah mulai direalisasi.

DO'A ORANG-ORANG BENDUNGAN

Fakhrunnas MA Jabar

orang-orang bendungan adalah riwayat yang kosong
dan penuh kebimbangan
di antara deru sungai mengalir airmata mereka
bergulir menuju maha-muara duka
tak tertahankan sedu-sedan dan ratapan
tapi, siapakah lagi menyapanya kini?

orang-orang bendungan adalah secarik kertas usang
tak bertuliskan apa-apa
hanya ada noda di jendela hati mereka
sepi tak bernyali, rindu tak bertepi
siapakah kini yang peduli?

"Ilahi, yang maha dari segala sapa
pada-Mu juga terkirim do'a
dari para peladang, santri, pekebun yang malang
dari orang-orang seperti kami yang renta dari segala jaga
butakan mata kami dari riwayat yang kosong ini"

(sekumpulan orang-orang, sekumpulan burung-burung,
sekumpulan rama-rama dan sekumpulan tatapan yang perih
jatuh di sebuah turbin raksasa yang mengalirkan ratusan
kilowatt proton dan elektron menuju muara-muara yang jauh)

ada tetumbuhan yang runduk di air yang tak berbiduk
ada pagar yang memar dilanda arus datar
ada sisa kebun jagung yang dipatuk seekor burung
ada harapan yang tak terenyahkan

orang-orang bendungan adalah catatan-catatan yang buram
dari untaian mata-pena tak bernyali, tak bernyanyi
di antara tiang-tiang menjulang dengan kabel tegangan tinggi
yang lewat di antara atap daun mereka, pesantren mereka, dan
pucuk-pucuk tanaman yang berbunga mereka
tak setitik pun aliran api meneranginya
hanya ada: kegelapan yang membelenggu harapan

"Ilahi, kegelapan bagi kami adalah sahabat sejati
terasa sakral, sama sekali bukan mimpi
tapi maha-mata hati kami tak buta menatapmu
dalam malam yang diam, hanya ada rakaat tahajud kami
menyentuh sajadah dan getar lidah yang pasi
inilah syukur kami"

(seekor cecak berdecak di serambi
seekor serangga malam bernyanyi-nyanyi
seekor kucing kedinginan dan sepi
sementara ratusan kilowatt bunga api terus mengalir
ke rumah-rumah besar dan gedung perkantoran
tanpa singgah lagi digubuk-gubuk yang dihuni para santri
para peladang dan pekebun yang malang)

hanya ada senyum anak-anak yang telah lama tertahankan
di antara deru bendungan yang tak pernah pelan
hanya ada semilang aliran yang tak berkesudahan
hanya ada kegetiran di hati orang-orang bendungan

sekarang: riwayat yang kosong, kertas usang dan
catatan yang buram
dibacakan kembali dalam syair-syair cair

dengarlah gemanya kembali meski getir
ada harapan dan ratapan di bekas tanah sisa yang masih bertahan
tanamlah kembali meski penuh beban
tamatkan mimpi
meski ada yang terus terulang kembali : penderitaan

Pekanbaru, akhir 1990

BAB I

PENDAHULUAN

Pada 1989, nama Waduk Kedung Ombo tiba-tiba saja mencuat. Hampir semua media massa di Indonesia memuat pemberitaan tentang Kedung Ombo. Entah itu masalah pembebasan tanah, intimidasi terhadap penduduk yang kemudian ada yang melarikan diri ke hutan, pembangkangan penduduk di wilayah genangan Waduk Kedung Ombo, demonstrasi mahasiswa, atau harapan-harapan akan hasil pembangunan waduk. Bahkan sampai dengan teguran pemerintah kepada LSM-LSM yang dianggap menjelek-jelekkan pemerintah di luar negeri.

Kasus Kedung Ombo yang dimulai pada 1984 dan mencapai puncaknya pada 1989 ini memang bisa dikategorikan sebagai sebuah kasus besar yang menyangkut pilihan model dan kebijakan pembangunan dengan ekses-eksesnya yang bermunculan. Mungkin juga Kasus Kedung Ombo merupakan sebuah model kasus pembangunan yang bisa mewakili banyak kasus lainnya dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, yang tidak sempat muncul ke permukaan.

Kasus Kedung Ombo yang sangat unik dan menarik ini, yang mungkin bisa dijadikan contoh dari ironi pembangunan di negara dunia ketiga ini, melibatkan hampir semua unsur masyarakat. Mulai

dari rakyat petani, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM),[1] mahasiswa, kelompok intelektual, rohaniwan, wartawan. Juga aparat pemerintah, mulai dari lurah sampai presiden, ABRI bahkan sampai kepada lembaga-lembaga negara seperti misal DPR.

LSM-LSM dalam negeri yang terlibat antar lain YBYKS (Yayasan Bimbingan Kesejahteraan Sosial, Solo), LBH (Lembaga Bantuan Hukum), KSBH (Kelompok Studi dan Badan Hukum), Yayasan Sosial Bhakti Satria Mangkunegara, LPHAM (Lembaga Pembela Hak-hak Asasi Manusia), dan GPS (Gabungan Pembela Sukarela). Sedangkan dari LSM luar negeri antara lain Tapol (Inggris), IMBAS (*Initiative for Human Right in Asean States*, Jerman), Dutch Indonesian Comitee, JATAN (*Japan Tropical Forest Action Group*, Jepang), IWGIA (*International Work Group for Indigenus Affairs*), Friends of the Earth (Jepang), Reseau Solidarite (Perancis), APPEN (Malaysia), Third World Network (Malaysia), INDOC (Belanda), ILSA (Colombia), Canada Asia Working Group, Trocaire (Irlandia), South East Asia Information Centre (Jerman Barat) serta INGI.[2]

---

[1] Di sini saya sengaja memekai istilah LSM. Alasannya, istilah ini terlanjur populer. Sebenarnya saya lebih suka menggunakan istilah "Ornop", kepanjangan dari Organisasi Non Pemerintah yang cocok dengan istilah *Non Goverment Organisation*. Selain itu istilah Ornop lebih tegas, tidak seperti istilah LSM yang bisa ditafsirkan sebagai beberapa model, antara lain "LSM plat merah", "LSM plat kuning" dan "LSM plat hitam".

[2] INGI (International NGO Forum On Indonesia) adalah suatu forum komunikasi yang bertujuan memberikan masukan kepada IGGI (salah satu institusi donor yang memberikan piutang kepada pemerintah Indonesia). Anggotanya terdiri dari beberapa LSM besar di Indonesia dan LSM berbagai negara anggota IGGI serta beberapa LSM internasional lain yang bersimpati.

Pembangunan Waduk Kedung Ombo yang merupakan sebuah bagian dari proyek raksasa pengembangan sumber air sungai-sungai utama di Jawa Tengah ini, mungkin merupakan kasus terbesar kedua munculnya perlawanan rakyat dan LSM dari proyek-proyek yang dibiayai Bank Dunia, setelah proyek transmigrasi yang menghebohkan itu.

Namun demikian, meskipun Kasus Kedung Ombo diketahui oleh banyak orang, agaknya masih ada yang belum mengetahui secara persis gambaran tentang Waduk Kedung Ombo Juga penduduk yang pernah tinggal di wilayah genangan beserta kondisi sosial-budayanya. Apalagi semenjak penggenangan mulai dilaksanakan seluruh wilayah Kedung Ombo diberlakukan sebagai daerah tertutup. Di beberapa tempat, misalnya di daerah Kemusu, didirikan pos-pos militer di bawah komando Dansatgaspam (Komandan Satuan Tugas Pengamanan) 0724 yang dijabat oleh Komandan Kodim Boyolali, Letkol Drajad Budi Santoso.

Ingatan tentang kondisi penduduk, budaya dan cerita-cerita Kedung Ombo yang pernah hidup seakan-akan terkubur dan sirna. Bersamaan dengan naiknya genangan air Waduk Kedung Ombo yang menenggelamkan desa-desa yang berada di daerah genangan. Hanya dalam waktu sekitar tujuh bulan setelah penutupan pintu air Waduk Kedung Ombo. Karena itu, sebelum melihat semua permasalahan yang muncul di seputar pembangunan Waduk Kedung Ombo, ada baiknya melihat kembali letak geografis, kondisi penduduk dan cerita-cerita serta latar belakang dan tujuan pemerintah membangun Waduk Kedung Ombo.

Letak Geografis dan Data Fisik Waduk Kedung Ombo

Lokasi Waduk Kedung Ombo berada tepat pada pertemuan tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Boyolali, Sragen dan Grobogan yang akan membendung Sungai Serang di sekitar 90 Km sebelah tenggara kota Semarang, Jawa Tengah. Letak lembah Sungai Serang sendiri berada di antara 6°40' - 70°40' lintang selatan dan 110°25' - 110°45' bujur timur. Sebelah utara lokasi Waduk Kedung Ombo merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 50 - 94 meter di atas permukaan laut. Sedangkan sebelah selatan merupakan dataran tinggi dengan ketinggian antara 94 - 292 meter di atas permukaan laut.

Genangan Waduk Kedung Ombo terletak pada dua aliran Sungai Serang yang mengalir ke arah timur laut dan Sungai Uter yang mengalir dari selatan ke arah utara. Dataran tinggi di sekitar daerah genangan terdiri dari beberapa pegunungan kecil. Pegunungan yang terletak di sebelah utara aliran Sungai Serang dimulai dari Gunung Rendeng di Wonoharjo sampai di desa Kemusu merupakan hutan jati dan hutan campuran yang sebagian merupakan wilayah KPH Karangsono. Sedangkan di sebelah selatan aliran Sungai Serang dan sebelah barat aliran Sungi Uter di sekitar Gunung Gedat, termasuk dalam wilayah KPH Karangsono. Di sekitar Gunung Bulakmanyar, sebelah timur Sungai Uter, yang merupakan sambungan dari pegunungan kapu Kendeng, termasuk dalam wilayah KPH Juranggundul.

Di antara lembah-lembah perbukitan di sekitar Waduk Kedung Ombo banyak daerah aliran air hujan yang kemudian membentuk beberapa sungai-sungai kecil. Antara lain Sungai Kapuran, Sungai Klumpit, Sungai Bibis, Sungai Tegalsari, Sungai Genuk, Sungai Dombong dan Sungai Kedungmadu.

Luas genangan Waduk Kedung Ombo bila ketinggian air men-

capai elevasi 95,0 m adalah sebesar 6.125 Ha. Luasan tanah ini merupakan areal tanah yang harus dibebaskan. Areal itu terdiri dari 1.500 Ha tanah pertanian, 730 Ha sawah, 985 Ha pekarangan, 2.655 Ha tegalan, 30 Ha perkebunan dan sisanya merupakan hutan yang meliputi 37 desa di tujuh kecamatan dalam tiga kabupaten. Khusus untuk Kabupaten Boyolali, areal tanah yang terkena Proyek Waduk Kedung Ombo seluas 1503,6792 Ha, meliputi 10 desa di antaranya Wonoharjo, Lemahireng, Watugede, Nglanji, Genengsari, Kemusu, Ngrakum, Sarimulyo, Bawu dan Klewor. Sedangkan untuk Kabupaten Sragen desa yang tergenang antara lain Lorog, Gilirejo, Soka, Boyolayar dan Ngargomulyo.

Daerah genangan Waduk Kedung Ombo, terutama yang ada di Kabupaten Boyolali, mempunyai tanah yang cukup subur. Penyebabnya, di sebelah selatan daerah Waduk Kedung Ombo ada Gunung Merapi yang masih aktif bekerja. Sebagian besar material yang keluar bersamaan dengan kerja aktifnya Gunung Merapi, menjadi lapisan penyubur tanaman. Lapisan ini dilarutkan oleh air hujan menuju sungi utama yaitu Sungai Serang. Kemudian menumpuk di daerah lembah Sungai Serang, terutama di daerah Ampel dan Suruh.

Bangunan Waduk Kedung Ombo berbentuk seperti tapal kuda. Terdiri dari tubuh bendungan utama sepanjang 1,6 Km, bangunan pelimpah, bangunan penyadap, pembangkit listrik tenaga air dan terowongan pengelak. Waduk Kedung Ombo mempunyai daya tampung air sebesar 635 juta meter kubik, dengan luas permukaan waduk sekitar 47 Km persegi. Ketinggian permukaan air minimal 64,50 meter dan maksimal 90 meter. Ketinggian air normal 73,50 meter. Air waduk akan meluap apabila permukaan air mencapai elevasi 95 meter. Listrik yang dapat dihasilkan oleh PLTA Waduk Kedung Ombo direncanakan bakal mencapai angka 22,5 MW.

Kondisi Penduduk Kedung Ombo

Penduduk yang berada di wilayah yang terkena Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo secara keseluruhan berjumlah 5.268 kepala keluarga. Lebih dari separuh di antaranya, yaitu 3.006 KK, berada di wilayah Kecamatan Kemusu. Wilayah ini tanahnya relatif paling subur dibanding wilayah lainnya. Sedangkan di Kecamatan Miri 1.516 KK, Kecamatan Sumber Lawang 619 KK dan Kecamatan Geyer 127 KK.

Rata-rata jumlah jiwa dalam setiap keluarga antara 5 - 6 orang, sehingga jumlah orang yang harus meninggalkan tanah kelahirannya ada sekitar 30.000 jiwa. Mayoritas penduduk bermatapencaharian sebagai petani. Baik sebagai petani penggarap, maupun buruh tani. Sedangkan lainnya, bekerja sebagai pencari kayu, tukang batu, tukang kayu, sopir/kenek angkutan, pengrajin barang kerajinan, penggembala, pegawai negeri dan pensiunan.

Industri kecil yang ada di desa-desa yang terkena pembangunan Waduk Kedung Ombo adalah industri pembuatan gula kelapa, anyaman bambu dan penempaan besi. Prosentasi matapencaharian masyarakat desa yang terkena pembangunanWaduk Kedung Ombo terlihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Prosentasi Matapencaharian Masyarakat Desa yang terkena Pembangunan Waduk Kedung Ombo di 4 Kecamatan

Matapencaharian	Sumberlawang	Miri	Geyer	Kemusu
Petani	36,7%	39,1%	39,9%	37,1%
Buruh Tani	24,4%	26,4%	32,8%	24,1%
Lâin-lain	38,9%	35,5%	27,3%	38,8%
Jumlah	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Sumber : *Enviromental Impact Analysis of The Kedung Ombo Dam*, Institute of Ecology Pajajaran University, Bandung, June 1984.

Hasil pertanian yang sebagian besar dikonsumsi oleh para penduduk desa sendiri adalah padi, jagung, wijen, kedelai, ketela ubi dan pisang. Khusus untuk Kecamatan Kemusu yang daerahnya lebih subur dibanding wilayah lain di mana kedelai, jagung, pisang dan ketela ubi berlimpah ruah, hasil pertanian dijual ke luar. Umumnya dijual ke kota atau wilayah lain.

Tanaman kedelai tersebar di beberapa desa di Kecamatan Kemusu. Seluruhnya meliputi 460 Ha di mana setiap hektarnya menghasilkan delapan kuintal kedelai yang daerah pemasarannya meliputi kota Solo, Salatiga dan Semarang.

Dilihat dari tingkat penghasilan yang diperoleh penduduk di wilayah genangan Waduk Kedung Ombo, bisa dikatakan cukup besar untuk ukuran orang desa. Misalnya di desa-desa di lingkungan proyek pengambilan batu Juwangi, seorang buruh tani dapat menerima upah Rp 500,- per hari untuk 4 jam kerja. Seorang tukang kayu dapat memperoleh Rp 750,- untuk 1 hari kerja. Seorang pembuat anyaman bambu dapat memperoleh penghasilan rata-rata Rp 600,- per hari. Sedangkan mereka yang membuat gula dapat memperoleh penghasilan bersih Rp 1.800,- per hari.[3]

Secara umum, tingkat pendidikan formal penduduk Kedung Ombo dapat dikatakan sangat rendah. Sebagian hanya sempat menikmati pendidikan formal sampai tingkat SD atau tidak tamat SD. Banyak yang masih buta huruf meskipun telah ada Kelompencapir (Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pirsawan) seperti yang ada di daerah Kemusu, dan juga kegiatan belajar di kalangan warga masyarakat seperti Kejar (Kelompok Belajar) di mana 582 anggo-

[3] Angka ini diambil dari penelitian Tim LPU Universitas Kristen Satya Wacana tahun 1981. Sebagai perbandingan, harga beras perkilo pada tahun 1981 adalah Rp 193,68. Harga beras rata-rata per kg ini adalah untuk mutu menengah di kota Semarang pada bulan Juni 1981.

tanya di desa-desa Kemusu berhasil lulus ujian persamaan SD sampai pada bulan Agustus 1987. Kemampuan baca-tulis yang sangat rendah bisa dilihat dari orang-orang yang menjadi klien LBH seperti pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Kemampuan Baca-Tulis Klien LBH Yogyakarta di Kecamatan Kemusu

Desa	Buta Huruf	Melek Huruf	Tanpa Ket	Jumlah
Nglanji	371	126	-	497
Genengsari	320	65	15	400
Klewor	44	23	-	67
Kemusu	70	130	-	200
Bawu	66	38	-	104
Ngrakum	324	58	35	417

Sumber : *Laporan LBH tentang hasil pendataan klien Waduk Kedung Ombo*, tanggal 10 Agustus 1987.

Meskipun pada kenyataannya masih ada cukup banyak orang yang buta huruf, pada akhir Oktober 1987 daerah Kecamatan Kemusu dinyatakan sebagai daerah bebas tiga buta, yaitu bebas buta aksara, buta angka dan bahasa Indonesia.

Agama mayoritas penduduk di daerah genangan Waduk Kedung Ombo adalah Islam. Selain itu terdapat pula pemeluk agama Protestan dan Katholik, seperti di Desa Juwangi dan Pilangrejo. Juga agama Hindu dan Budha seperti yang ada di Jerukan, Kayen, Juwangi dan Pilangrejo.

Selain menjadi penganut agama resmi, sebagaian besar orang-orang di Kedung Ombo menjalani gaya hidup dan keyakinan

kejawen, seperti orang Jawa pada umumnya.[4] Ada beberapa tempat yang masih dikeramatkan oleh penduduk, seperti sebuah pohon beringin dan sendang di dekat bukit Juwangi. Sendang Jolotundo yang berada di dekat bukit Juwangi, yang pernah menjadi tempat pertapaan Raja Pakubuwono X, ramai dikunjungi orang pada hari raya Idul Fitri dan malam satu Suro. Menurut kepercayaan, orang yang mandi di Sendang Jolotundo pada hari tersebut akan awet muda. Selain itu, penduduk juga masih melakukan berbagai upacara yang berhubungan dengan penghormatan leluhur seperti *Punggahan, Nyadran* atau *Apitan*.

Ceritera-ceritera di Sekitar Waduk Kedung Ombo [5]

Ceritera-ceritera yang beredar di antara penduduk di wilayah genangan Waduk Kedung Ombo, yang kebanyakan berupa epos dan mitologi, berhubungan dengan dua orang tokoh yang terlibat langsung dalam Perang Jawa (1825-1830) atau biasa disebut sebagai

[4] Ada sementara pihak yang berpendapat bahwa kejawen bukanlah sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai keagamaan, tapi menunjukkan suatu etika dan gaya hidup yang diilhami oleh cara pemikiran Jawaisme. Kejawen dianggap hanya merupakan suatu sikap khas terhadap kehidupan yang mampu mengatasi perbedaan agama. Lihat: N. Mulder, *Pribadi dan Masyarakat Jawa*, Sinar Harapan, Jakarta, 1985.

[5] Sumber-sumber cerita yang berhasil saya kumpulkan di sini, terutama perihal mitologi, sepenuhnya tergantung kepada kebenaran cerita penduduk. Sumber utama didapat dari serangkaian wawancara dengan lebih dari sepuluh pemuka masyarakat Kedung Ombo yang dipercayai dan dianggap menguasai sejarah lisan setempat. Wawancara dilakukan di tahun '89 setelah penggenangan dilaksanakan. Beberapa tulisan dan buku saya pakai untuk melengkapi pemahaman saya terhadap cerita penduduk.

Perang Diponegoro. Yaitu Nyi Ageng Serang (1752 - 1828) dan Tumenggung Prawirodigdoyo (1780 - 1827). [6]

Ceritera-ceritera yang beredar ini diwariskan dari orang-orang tua kepada yang lebih muda secara turun temurun. Orang hanya mengetahuinya dari mulut ke mulut. Orang-orang Kedung Ombo banyak yang percaya, bahwa mereka adalah keturunan langsung dari kedua tokoh dalam Perang Diponegoro tersebut, ataupun keturunan para prajuritnya, yaitu trah Serang dan trah Gagatan.

Nyi Ageng Serang

Nyi Ageng Serang nama sebenarnya Raden Ajeng Kustiah Retno Edi lahir di Serang. Ia dikenal pula dengan nama Raden Ajeng Serang. Ia adalah anak kedua Panembahan Notoprojo yang lahir pada saat berlangsungnya perang saudara di bumi Mataram antara Sunan Pakubuwono II melawan adiknya, Pangeran Mangkubumi.

Ayah RA Kustiah, Panembahan Notoprojo adalah seorang Bupati di Serang. Ia masih keturunan Sunan Kalijogo derajat ke sembilan. Panembahan Notoprojo membela Pangeran Mangkubumi dalam berperang melawan Sunan Pakubuwono II, karena Sunan mendapat bantuan dari kompeni Belanda. Perang itu sendiri diakhiri dengan sebuah perjanjian yang dibuat di Giyanti, sebuah desa yang terletak antara Solo dan Madiun ada tanggal 13 Februari 1755. Dalam perjanjian, wilayah Mataram dibagi menjadi dua bagian. Pertama, adalah Kesunanan Surakarta di bawah pemerintahan Pakubuwono II. Kedua adalah Kesultanan Yogyakarta yang diperintah oleh Mangkubumi, yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I.

Panembahan Notoprojo kecewa dengan Perjanjian Giyanti yang telah menghentikan usahanya untuk mengusir Belanda dari bumi Mataram itu. Ia menolak kembali ke Solo dan memilih menetap di Serang. Ia kembali ke bumi Serang dan menghimpun kekuatan bersenjata di daerahnya sampai akhirnya diketahui oleh pihak Belanda. Kolonial Belanda memutuskan untuk mendahului dengan sebuah serangan mendadak. Serangan ini mengakibatkan Panembahan Notoprojo dan anak laki-lakinya gugur, sedangkan RA Kustiah dibuang ke Yogyakarta.

Tak lama setelah masa pembuangannya lewat, Nyi Ageng Serang kembali ke Serang. Dan bersama-sama dengan Raden Mas Papak, cucu dari perkawinannya dengan Adipati Serang Pang.paeran Kusumawijaya, Nyi Ageng Serang mengumumkan peperangan melawan kolonial Belanda sampai ia meninggal dunia. [7] Nyi Ageng Serang kemudian dimakamkan di Beku, Desa Banjarrejo, Kalibawang, Kulonprogo.

[6] Epos dan mitologi yang ditulis ini diduga menjadi salah satu sebab yang mengilhami munculnya pembangkangan rakyat Kedung Ombo. Mitologi-mitologi tersebut mampu memberikan harapan dan ketabahan kepada mereka yang sedang menanggung beban yang berat. Harapan yang lebih sering merupakan kata yang indah, biasanya tidak sesuai dengan kenyataan. Sedangkan adanya epos-epos tentang kepahlawanan nenek moyang orang Kedung Ombo nantinya akan menyebabkan cara semena-mena yang dipergunakan aparat dalam upaya pembebasan tanah dipandang orang-orang Kedung Ombo (terutama yang berusia lanjut) sebagai suatu penghinaan. Orang Kedung Ombo beranggapan bahwa nenek moyang mereka di jaman kolonial telah gugur untuk 'perjuangan nasional' tapi sekarang mereka justru diperlakukan semena-mena. Pihak pelaksana pembangunan proyek sama sekali tidak pernah mengajak mereka bermusyawarah.

[7] Dalam perang Diponegoro, meskipun kesehatan Nyi Ageng Serang telah merosot, ia masih berjuang dan memimpin langsung pertempuran. Bersama dengan Pangeran Mangkubumi dan Tumenggung Prawirodigdoyo, Nyi Ageng Serang menjadi penasehat sekaligus ahli siasat peperangan yang kemudian harum namanya sebagai divisi pasukan siluman (Pasukan Lambu) yang merajalela di daerah Serang, Purwodadi, Gundeh, Demak, Semarang, Kudus sampai ke Salatiga, Boyolali, Klaten dan Magelang

Keluarga pangeran Serang yang merupakan keturunan wali yang termasyur dan sangat berpengaruh serta disegani. Mereka berhasil menarik banyak pengikut untuk berjuang di pihak Diponegoro. Kedudukan Pangeran Serang oleh penguasa Belanda dipandang sebagai seorang *onafhankelijk gelstelijk Prins* (Pangeran spiritual yang bebas serta merdeka) yang diperkirakan mengilhami Diponegoro dan pengikutnya untuk mendapatkan kharisma serupa dengan cara memakai gelar yang sama. [8]

Pengalaman peperangan Nyi Ageng Serang bersama pasukannya melawan kolonial Belanda begitu membekas di bumi dan rakyat Serang. Hampir semua desa dinamai dengan nama-nama atau kejadian yang berhubungan dengan pertempuran pasukan Nyi Ageng Serang melawan pasukan kolonial pasukan Belanda, antara lain :

- Pacingkerep :

Nama dusun yang diambil dari satu tempat di mana terjadi satu pertempuan dahsyat antara pasukan Nyi Ageng Serang dengan pasukan Belanda. Pasukan dari kedua belah pihak banyak yang gugur. Mayat-mayat berceceran seperti potongan *pacling* yang rapat (*pacling kerep*).

- Kleco :

Ketika Nyi Ageng Serang dan prajuritnya kehabisan perbekalan, ia menemukan buah yang kulitnya bisa dimakan dan terasa lezat. Tempat tersebut kemudian dinamai sebagai Kleco, yang berasal dari kata *kulite eco* (artinya : kulitnya enak).

---

[8] Peter Carey, *Ekologi Kebudayaan Jawa dan Kitab Kedungkebo*. Pustaka Azet, Jakarta, 1986, hal. 31 -32

- Jatisebo :

Tempat di mana pernah tumbuh sebuah pohon jati yang sangat besar. Ketika pasukan Nyi Ageng Serang beristirahat, mereka duduk (*sebo*) di bagian pangkal pohon. Batang pohon jati itu kemudian dicoba untuk dijadikan sebuah perahu yang bisa digunakan untuk mendukung gerakan pasukan lewat air. Namun belum selesai perahu dibuat, pasukan Belanda datang dan membakarnya.

- Nglanji :

Hutan tempat di mana pasukan Nyi Ageng Serang menemukan banyak pohon lanji.

- Banger :

Nama sebuah tempat di mana pasukan Nyi Ageng Serang kehausan dan kehabisan persediaan air minum. Mereka mencoba menggali dan membuat sebuah sumur, tetapi yang keluar ternyata air berbau tak sedap (*banger*) dan tak bisa diminum.

- Nglempong :

Karena rasa haus yang tak tertahankan, banyak di antara pasukan Nyi Ageng Serang yang mencoba meminum air yang berbau tak sedap itu. Hal ini berakibat sebagian perut anggota pasukan menderita muak-mual (*nglempong-nglempong*).

- Ngrakum :

Tempat di mana para pasukan Nyi Ageng Serang berembug (*rahuman*) menyusun strategi, sambil mandi bersama secara berendam di air (*kungkum*).

- Mlangi :

Nama sebuah dusun di mana pasukan Nyi Ageng Serang akan menyeberangi Sungai Serang dengan cara berenang (*mlangi/ nglangi*).

- Kedungiyu :

Sebuah danau (kedung) di mana pasukan Nyi Ageng Serang yang sedang beristirahat setelah kelelahan berjalan sepanjang hari, bisa bergembira dan tertawa (*ngguyu*) melupakan rasa capai dan tegang yang mereka alami sebelumnya.

- Guyuban :

Nama sebuah tempat di mana pasukan Nyi Ageng Serang yang tadinya mengalami perpecahan dan konflik intern menjadi rukun dan bersatu kembali (*guyub*).

- Karang :

Tempat di mana Nyi Ageng Serang beserta pasukannya melepas lelah sambil mengarang strategi pertempuran.

- Kemusu :

Sebuah tempat di mana pasukan Nyi Ageng Serang yang tengah beristirahat, tiba-tiba bertemu dengan musuh (ketemu musuh) dan harus bertempur lagi.

- Jurang Genting :

Sebuah tempat di mana para prajurit pilihan dari divisi silumannya Nyi Ageng Serang harus melewati medan yang sangat sulit, berupa sebuah jurang dengan tebing-tebing terjal

yang terletak di kaki Gunung Kendeng. [9]

Berbagai epos tentang keberanian Nyi Ageng Serang beserta para prajuritnya pada setiap pertempuran ikut memunculkan berbagai ceritera yang beredar dari mulut ke mulut, secara turun temurun. Diceritakan pula dalam legenda-legenda yang ada di Kedung Ombo, tentang pusaka Nyi Ageng Serang yang dinamai Cindhe Wilis yang bisa membuat ketakutan pihak pasukan Belanda. [10]

Tumenggung Prawirodigdoyo

Tumenggung Prawirodigdoyo adalah guru ilmu kesaktian Sunan Pakubuwono VI yang paling disegani dan dicari-cari kolonial Belanda. Ia adalah anak kedua Surotaruno III, seorang demang perdikan Gagatan. Lahir pada tahun 1780 di desa Nglumpang Gagatan yang sekarang terletak di Kecamatan Karanggede, Kawedanan Wonosegoro. Menurut garis silsilah, Prawirodigdoyo masih merupakan kemenakan Nyi Ageng Serang.

Gelar Tumenggung diberikan oleh Sunan Pakubuwono IV Surakarta kepada Prawirodigdoyo, ketika ia diangkat sebagai Bupati Pamajekan Gagatan. Nama sebenarnya adalah Panji Anom

---

[9] Nama-nama tempat ini didapat dari hasil wawancara dengan bapak Supardi dari desa sumberagung, Bapak Wiryodiharjo dari desa Grogol, Bapak Sujito dari Desa Kedungiyu, Bapak Damis dari Desa Kedungiyu, Kyai Haji Syamsuri dari Desa Karanggede. Rangkaian wawancara dilakukan antara tanggal 12 sampai 19 Agustus 1989.

[10] Cerita tentang tindak-tanduk kepahlawanan Nyi Ageng Serang dan para prajuritnya menjadi semacam legenda di daerah Serang dan Gagatan. Baca juga: S. Sastroatmojo, *Nyi Ageng Serang*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982.

Prawiroyudo. Ia keturunan ketujuh dari Sultan Agung Hanyokrokusumo Mataram yang gigih melawan Kompeni Belanda di Batavia.

Tumenggung Prawirodigdoyo sebenarnya adalah seorang tokoh yang sengaja tidak ditampilkan ke permukaan, untuk menghindari upaya penangkapan oleh pihak Belanda karena kebrilyanan siasat perangnya sangat dibutuhkan. [11] Ketika pecah perang Jawa pada bulan Juli 1825, ia diangkat menjadi Panglima Perang Wilayah di Manca Negara Brang Timur dan pesisir utara. Selain itu, ia juga menjadi penasehat utama pribadi Pangeran Diponegoro dengan gelar Kyai Guru Kaweron. Bersama dengan Nyi Ageng Serang yang juga menjadi penasehat perang, ia menjadi pelatih pasukan di seluruh kawasan perang.

Tapi sungguhpun nama Tumenggung Prawirodigdoyo selalu dirahasiakan, akhirnya pihak Belanda mengetahui juga peranannya dalam setiap pertempuran. Pihak Belanda pertama kali mengetahui keterlibatannya ketika terjadi pembakaran gedung Kadipaten Serang, di mana terjadi persekutuan antara Gagatan dan Serang. Kolonial Belanda beberapa kali berupaya menangkap Tumenggung Prawirodigdoyo, karena ia dianggap bertanggung jawab atas tewasnya Komandan Van de Graaf dan serang- kaian penyerbuan tangsi

[11] Tumenggung Prawiro inilah yang merapikan pasukan Perang Diponegoro dengan membentuk divisi-divisi dan kesatuan-kesatuan antaralain Pasukan Bulkio untuk para ulama dan santri yang berniat melakukan perang sabil. Pasukan Turkio untuk para bangsawan, priyayi dan rakyat laki-laki, Pasukan Arkio untuk para wanita dari segala lapisan. Tokoh pasukan Arkio yang terkenal adalah RA Sumirah dan RA Akhadiyah. Dikenal pula pasukan kavaleri berkuda yang disebut sebagi pasukan alap-alap. Cerita lengkap tentang Tumenggung Prawirodigdoyo bisa didapatkan dari orang-orang tua yang masih merupakan Trah Gagatan, yang sekarang banyak menjadi tokoh masyarakat di tiga kabupaten yang terkena Proyek Kedung Ombo. Lihat juga: Suwarno Adinoto, *Menyingkap Kepahlawanan T. Prawirodigdoyo*, CV Djati, 1985 (dicetak khusus untuk kalangan kerabat Gagatan).

Belanda. Antara lain di Purwodadi, Demak dan Semarang. Namun upaya menangkap Tumenggung Prawirodigdoyo yang dilakukan Belanda tidak pernah berhasil.

Nama Tumenggung Prawirodigdoyo memang tidak tercatat dalam sejarah resmi 'perjuangan nasional' bangsa Indonesia melawan kolonial Belanda. [12] Tetapi pihak Belanda yang menjadi musuhnya betul-betul mengakui pengaruh besarnya dalam perlawanan kaum pribumi Jawa. Hal yang terakhir inilah yang mendorong seorang perwira Belanda yang menjadi lawannya, PYF Louw Mayoor Infantri Nederlandsch Indisch Leger mencatatnya dalam buku *De Java Oorlog* meskipun hanya secara samar-samar, karena dalam setiap pertempuran Tumenggung Prawirodigdoyo selalu disamarkan dan dilindungi oleh sistem santiyuda yang dipergunakan oleh Sunan Pakubuwono VI. [13]

Pada saat menjelang meletusnya perang Jawa, Tumenggung Prawirodigdoyo bersama-sama dengan Sunan Pukubuwono VI dan Pangeran Diponegoro membuat ikrar kesetiakawanan dalam perjuangan mengusir "penjajah" dari tanah Jawa, yang kemudian

[12] Kata "perjuangan nasional" sengaja saya beri tanda kutip utnuk membedakan dengan pengertian yang ada sekarang. Pemahaman konteks perjuangan, cakupan wilayah dan sebutan bangsa pada saat itu mungkin lebih tepat dikatakan terbatas pada Jawa (tepatnya: Jawa Tengah!). Saya memakai pengertian "perjuangan mengusir orang-orang Belanda (penjajah) dari Jawa" berdasarkan dua tulisan Peter Carey tentang Perang Jawa. Lihat Peter Carey, op cit. hal 38, 50 dan Peter Carey, *Asal Usul Perang Jawa*, Pustaka Azet, Jakarta, 1986. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang motif-motif peperangan yang dilakukan Nyi Ageng Serang, Prawirodigdoyo dan Diponegoro bisa baca sendiri pada tulisan/buku yang saya pergunakan sebagai sumber.

[13] Suwarno Adinoto, *op cit.*, hal. 2

disebut Sumpah Atiroto, di Punthuk Gagatan di tepi Sungai Serang.[14] Tempat bersejarah ini pada 2 September 1979 mengalami perenovasian.

Dalam pertempuran di Nglengkong, Tumenggung Prawirodigdoyo tertusuk pinggangnya oleh sebuah keris pusaka milik seorang pangeran Yogyakarta yang memihak Belanda (De Kock). Sekitar dua minggu kemudian, tepatnya 30 Nopember 1827 ia meninggal dunia dan kemudian dimakamkan di Blunyahgedhe, sebelah utara kota Yogyakarta, berdekatan dengan makam gurunya, Syeh Kaliko Jipang. [15]

Cerita kepahlawanan Tumenggung Prawirodigdoyo semasa hidup sangat membekas kepada orang-orang Gagatan, seperti halnya Nyi Ageng Serang. [16] Banyak lagu-lagu tradisional semacam Tembang Asmaradana atau Tembang Mijil *cengkok* Gagatan yang dulu dipopulerkan Tumenggung Prawirodigdoyo untuk mendorong semangat para pemuda dalam melawan Belanda masih sering ditembangkan. Nada-nada semangat perlawanan muncul dalam tembang-tembang Jawa *cengkok* Gagatan seperti halnya potongan Tembang Asmaradana berikut :

[14] *Ibid.*, hal 46. Sumpah Atiroto tersebut berbunyi: 1. Setia bakti terhadap Tuhan Yang Maha Esa, siap melindungi sesama makhluk hidup yang tertindas; 2. Memegang teguh janji, tidak boleh berkhianat; 3. Tetap dalam pendirian, tidak boleh berubah naluri.

[15] *Ibid.*, hal. 15. Konon Prawirodigdoyo tidak bisa ditembus oleh peluru yang ditembakkan oleh pihak Belanda.

[16] Pasukan gabungan Serang Gagatan pernah masyhur namanya sebagai Laskar Gula Kelapa yang setiap prajuritnya mempunyai ciri membawa sebuah tombak yang pada ujungnya dikaitkan kain berwarna merah dan putih. Perang yang terkenal dan menjadi semacam legenda adalah pertempuran di Bukit Manoreh.

...Gethingku kapati-pati
yen turu tunggal sebantal
tangane anteng telale
gerayahan mek-emekan
ndemeki barang-barang
e tobel ndemek bathuk
iku gek pendah opo......... [17]

Pangeran Samudro

Selain ceritera tentang kepahlawanan Nyi Ageng Serang dan Tumenggung Prawirodigdoyo, beredar pula ceritera yang tidak jelas asal-usulnya, tentang Pangeran Samudro. Terutama di sekitar Kabupaten Sragen. Makam Pangeran Samudro yang dikeramatkan orang, terletak di Gunung Kemukus Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, sekitar 30 Km di sebelah utara kota Solo.

Dikisahkan tentang seorang Pangeran dari kerajaan Majapahit yang bernama Pangeran Samudro, si oedipus yang jatuh cinta kepada ibunya sendiri. Ayahanda Pangeran Samudro yang mengetahui hubungan anak-ibu tersebut menjadi murka. Lantas Ia mengusir Pangeran Samudro. [18]

[17] Terjemahan bebasnya adalah: Benciku teramat sangat (pada musuh)/yang menumpang hidup di bumiku/tangannya tak pernah diam/ menggerayang meremas-remas/menjamah semua benda/ e kurang ajar! merampas kehormatan/ maunya apasih.

[18] Ada sumber yang mengatakan bahwa Pangeran Samudro berasal dari kerajaan Majapahit. Ia pergi mengembara untuk mencari ilmu. Ketika ia bertapa di Gunung Kemukus, ibunya menyusul. Sedangkan menurut penjelasan juru kunci makam Pangeran Samudro, sang pangeran adalah keturunan dari Kadilangu (?) yang

Dalam kenestapaannya, Pangeran Samudro kemudian mencoba melupakan kesedihannya dengan melanglang buana. Akhirnya Ia sampai di Gunung Kemukus. Tak lama kemudian sang ibunda menyusul anaknya ke Gunung Kemukus untuk melepaskan kerinduan. Namun sial, sebelum sempat ibu dan anak ini melakukan hubungan intim, penduduk sekitar memergoki mereka berdua. Mereka merajamnya secara beramai-ramai sampai keduanya meninggal dunia. Ibu dan anak tersebut kemudian dikubur dalam satu liang lahat di gunung itu juga.

Tapi menurut cerita, sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir Pangeran Samudro sempat meninggalkan pesan yaitu siapa saja yang dapat melanjutkan hubungan suami-istrinya yang tidak sempat terlaksana itu akan terkabul semua permintaannya.

Sampai sekarang, pada setiap malam Jumat Pon, makam Pangeran Samudro beserta ibunya selalu ramai dikunjungi orang. Mulai dari yang meminta berkah, keselamatan, nomor buntut sampai dengan orang-orang iseng yang sekedar ingin menikmati seks secara gratis.

Beberapa sumber menyebutkan, Pemda Sragen sengaja menghembuskan kisah tentang Pangeran Samudro. Hal ini agar Gunung Kemukus bisa menjadi obyek wisata yang mengahsilkan pemasukan bagi kas Pemda. [19]

---

diramalkan setelah meninggal, jasadnya akan dikelilingi oleh samudro (genangan air yang maha luas). Sumber : *Wawancara*, 17.8.1989.

[19] Gunung Kemukus dewasa ini menjadi tempat pariwisata dan juga menjadi sebuah tempat di mana seks bebas dilegalisir sesuai kepercayaan orang terhadap pesan Pangeran Samudro sebelum meninggal dunia. Yang datang ke Gunung Kemukus bukan hanya orang yang hendak berziarah dan meminta berkah, tetapi juga lelaki hidung belang dan para WTS, serta anak-anak kecil yang menyewakan tikar bagi pasangan-pasangan yang ingin melepaskan hajatnya. Baca: "Cerita Malam Jumat Pon di Kemukus" dalam *Suara Merdeka*, 29

Legenda Terjadinya Kedung Ombo

Alkisah, di Sendang Pakang akan didirikan sebuah keraton. Beberapa orang wali yang sedang berada di sana membakar seonggok kayu. Abunya kemudian mereka kumpulkan dan ditebar secara melingkar sampai bertemu di sebuah titik. Tapi setelah diamati lebih lanjut, ternyata lengkaran tertutup yang dibuat dari abu kayu yang dibakar itu masih kurang luas. Maka bersabdalah para wali tersebut bahwa batas keraton akan meluas sendiri pada sebuah jaman di mana akan ada *bader* makan *manggar*.

Orang-orang Kedung Ombo menghubungkan legenda tersebut dengan terbentuknya Waduk Kedung Ombo, di mana airnya mulai meninggi hingga menenggelamkan pohon kelapa dan memungkinkan ikan sungai (*bader*) memakan bunga kelapa (*manggar*). Hal tersebut terjadi, apabila daerah Serang dan Gagatan bersatu akibat genangan air Waduk Kedung Ombo. [20]

Sedangkan legenda versi lain, menceritakan tentang adanya dua orang utusan yang akan membuat sebuah kerajaan baru di daerah Krajan. Kedua orang utusan tersebut kemudian berjalan secara berlawanan arah dari satu titik yang telah ditentukan. Mereka berjalan melingkar sampai akhirnya bertemu lagi. Daerah yang berada dalam lingkaran oleh kedua orang utusan itu dinyatakan sebagai batas dari wilayah kerajaan baru. Akan tetapi, beberapa saat kemudian, kedua orang utusan itu merasa lingkaran yang dibuatnya masih kurang luas. Mereka berdua kemudian bersabda, bahwa kelak akan ada orang yang melanjutkan usaha mereka

---

September 1987. Lihat juga: *Wawasan*, 24 Januari 1989. Setelah penggenangan Waduk Kedung Ombo, Gunung Kemukus menjadi seperti sebuah "pulau" dan semakin ramai dikunjungi orang.

[20] Sujito, Desa Kedungiyu, Wawancara, 12.8.1989

memperluas wilayah kerajaan baru sampai Serang dan Gagatan bisa saling bertemu. [21]

Beberapa orang tua dan tokoh masyarakat setempat mengatakan bahwa di daerah antara Serang dan Gagatan memang semenjak dahulu telah diramalkan akan menjadi sebuah lautan. Akan ada sebuah *kedung* yang sangat luas yang akan menyatukan beberapa kedung yang telah ada. Hal tersebut ditandai dengan adanya tempat yang memakai kata "kedung", seperti Kedunglele, Kedungiyu, Kedungpring, Kedungcerme, Kedung Ombo, Kedung Uter, Kedung Lumbu dan seterusnya.

Mitologi di Kedung Ombo

Di masa lalu, ketika sistem yang represif membuahkan kesengsaraan, banyak rakyat mencari pelarian dengan mengharapkan datangnya seorang juru selamat. Sebagian harapan rakyat terpenuhi dengan adanya ramalan Jayabaya (Jangka Jayabaya). [22]

---

[21] Mulyorejo, Desa Genengsari, Wawancara, 14.8.1989

[22] Namun sebagaimana lazimnya sebuah ramalan, mitologi tentang Jangka Jayabaya di masa lalu lebih sering direkayasa dan dicocok-cocokkan oleh orang yang mempercayainya. Seperti halnya kode buntut, ramalan yang berupa syair dan angka dan perlambang tersebut ditafsirkan dan direka-reka sendiri oleh si pembeli nomor buntut. Ada yang berpendapat bahwa hidup manusia moderen justru dipenuhi oleh berbagai mitologi terselubung dalam berbagai bentuk antara lain permainan, film, adipahlawan dalam komik, bacaan ataupun peringatan-peringatan yang cenderung dikeramatkan. Seorang ahli ilmu agama, Mircea Eliade, melihat Marxixme juga mempunyai struktur mitologis dan isi eksakologis. Yaitu peranan pembebasan dan penyelamatan dari orang yang benar (yang terpilih, yang terurapi, yang tidak berdosa). Mereka adalah kaum proletariat yang akan menciptakan masyarakat tanpa kelas. Lihat: PS Hary Susanto, *Mitos Menurut Pemikiran Mircea Eliade*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1987.

Demikian juga dengan munculnya banyak mitologi di daerah Waduk Kedung Ombo tidak mau harus dihubungkan dengan keterlibatan nenek moyang orang-orang Kedung Ombo, yaitu Trah Serang dan Trah Gagatan dalam perjuangan melawan kolonial Belanda yang berpuncak pada masa pecahnya Perang Jawa.

Dulunya masyarakat di daerah Serang dan Gagatan, yang sekarang menjadi wilayah genangan Waduk Kedung Ombo, pernah mengalami kesengsaraan dan penetrasi secara sosial-politik oleh pemerintah kolonial Belanda. Masa-masa itu merupakan masa terjadinya kekurangan pangan dan wabah penyakit akibat peperangan yang cukup lama. Pada saat kesengsaraan itulah muncul harapan-harapan akan bakal datangnya jaman kemakmuran. Berbagai mitologi muncul seperti halnya sebuah fenomena munculnya gerakan ratu adil. [23] Orang-orang di wilayah genangan Waduk Kedung Ombo juga percaya pada Jangka Jayabaya tentang jaman pra munculnya *Ratuning Adil* (Imam Mahdi) di mana semua orang akan berada dalam suatu keputusasaan. Mau berbuat sesuatu, tetapi kemampuan tidak ada.

Ramalan Jayabaya yang muncul pada Abad XVIII menyebutkan, bahwa :

> Pada masa akhir sejarah Jawa akan muncul pemerintahan yang adil, dermawan dan murah hati. Dan pada masa tutup pemerintahannya akan datang musibah dan masa tanpa adanya hukum, keadilan dan kesejahteraan. Para bangsawan hanya sibuk dengan dirinya dan keluarganya sendiri, sedang rakyat didorong terjun ke lembah bencana. Rakyat kelaparan dan compang-camping, sedang para bangsawan tenggelam dalam kenikmatan. [24]

---

[23] Peristiwa gerak protes seperti pemberontakan Cilegon (1818), peristiwa Gedangan (1904) atau peristiwa Entong Gendut (1916) yang diidentifikasikan sebagai gerakan Ratu Adil, biasanya dimulai karena memburuknya keadaan sosial-ekonomi dan munculnya seorang tokoh yang tiba-tiba merasa mendapat wangsit

[24] Lihat E. Subangun, *Tidak Ada Mesias dalam Pandangan Hidup Jawa*, Prisma No. 1, Januari 1977.

Pada saat itulah akan muncul seorang Erucakra, yang oleh penduduk setempat diidentikkan dalam diri Pangeran Diponegoro yang pernah merasa mendapat wangsit di Pantai Utara Jawa sekitar 1809 untuk mengobarkan peperangan di Jawa dengan topangan massa. Dengan anggapan ini pula, pihak kraton secara diam-diam memberi bantuan kepada pasukan Pangeran Diponegoro.

Tapi, keyakinan ini bubar ketika Jendral De Kock berhasil mengalahkan Pangeran Diponegoro dengan sebuah tipu muslihat.[25] Dalam kasus Kedung Ombo, salah satu tokohnya yang bernama Jaswadi juga merasa pernah mendapat wangsit. Jaswadi merasa harus memimpin masyarakat melanjutkan semangat perjuangan Nyi Ageng Serang melawan tingkah laku kolonial Belanda yang masih tertinggal.

Kesengsaraan yang kemudian memunculkan harapan-harapan baru juga pernah ditulis oleh seorang pujangga Kraton Surakarta, RN Ranggawarsita (1802 - 1874) lewat serat Kalatida tentang akan adanya Jaman Edan yang mendahului Jaman Kemakmuran. RN Ranggawarsita yang juga hidup pada jaman di mana terjadi perang saudara yang banyak menimbulkan kesengsaraan, menulis banyak serat (kitab) yang bernada menyindir keadaan masyarakat pada waktu itu. Sekaligus akan datangnya perbaikan di masa men-

[25] Mitos tentang Ratu Adil ini selalu diberikan kepada seorang pemimpin kharismatik yang menjadi tumpuan harapan untuk merubah kondisi dan keputusasaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat. Pada tahun 50-an, Bung Karno juga pernah dimitoskan sebagai seorang Ratu Adil seperti yang dimaksudkan dalam Jangka Jayabaya. Lihat: Andjar Any, ***Rahasia Ramalan Jayabaya, Ranggawasita dan Sabdopalon***, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang, 1979. Lihat juga: Bernhard Dahm, ***Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan***, LP3ES, Jakarta. Demikian juga dengan Susuhunan Surakarta dan Tjokroaminoto. Lihat: APE Korver, ***Serikat Islam Gerakan Ratu Adil?***, PT Grafitipers, Jakarta, 1985.

datang. Dalam Serat Kalatida, RN Ranggawarsita menulis tentang Jaman Cacat (Edan) sebagai berikut :

> Aku percaya pada berita indah itu, seolah-olah telah berdiri di ambang gerbang kebahagiaan, tetapi akhirnya ternyata, bahwa semua itu tidak terjadi. Aku telah menjadi permainan tangan kotor manusia yang penuh dengan kepalsuan dan keinginan akan keuntungan sendiri. Aku telah menjadi korban fitnah-muslihat yang rendah. [25]

Harapan-harapan yang pernah ditulis RN Ranggawarsita itu juga dipercayai oleh orang-orang Kedung Ombo, seperti halnya Jangka Jayabaya. Ada keyakinan bahwa hidup itu memang ibarat matahari yang tidak selamanya bersinar cemerlang menerangi bumi. Pasti akan datang sang gelap. Tapi habis gelap, terang akan muncul kembali.

Mitologi-mitologi tentang akan datangnya jaman kemakmuran itu tumbuh kembali di kalangan penduduk Kedung Ombo ketika muncul kasus Kedung Ombo yang dianggap sebagai pembawa bencana. Dalam versi Jangka Jayabaya hal ini disebut sebagai Jaman Kali Sangsara. [27] Berbagai mitologi yang dipercayai orang-orang

[26] Lihat: Kamadjaja, *Zaman Edan*, UP Indonesia, Jogja, 1964. Ada pendapat yang mengatakan bahwa RN Ranggawasita memenag terpengaruh oleh Jangka Jayabaya yang muncul pada Abad XVIII itu.

[27] Anjar Any, *op cit.* Tumbuh-suburnya kembali kepercayaan dan harapan terhadap datangnya jaman kemakmuranyang dulu pernah dipercayai oleh orang-orang Kedung Ombo kemungkinan besar lebih merupakan reaksi terhadap tekanan aparat pemerintah (lihat Bab III). Sayangnya dalam hal ini saya tidak bisa menchek keyakinan penduduk terhadap mitologi yang mereka percayai pada saat sebelum ada proyek Kedung Ombo (sebelum 1982). Kliping dan bahan lain yang membahas tentang mitologi di Kedung Ombo kesemuanya dibuat/diterbitkan antara tahun 1986 - 1988, tahun-tahun di mana penduduk paling sering mengalami tekanan intimidasi.

Kedung Ombo ini secara umum meliputi dua hal. Yaitu tentang akan datangnya jaman kemakmuran dan jaman kesengsaraan yang mendahuluinya.

Mitologi dan Interpretasi Penduduk Kedung Ombo Tentang Jaman Kesusahan

Penduduk di sekitar Sungai Serang percaya akan terulangnya kembali Geger Serang yang ke tiga, yang akan melibatkan banyak orang. Geger Serang yang ke tiga ini juga akan menimbulkan dampak luas, dibandingkan Geger Serang yang pertama dan ke dua. [28] Geger Serang yang ke tiga tersebut dilukiskan oleh seorang penduduk sebagai :

> "Bedahe Serang kang kaping telu kuwi geger tundung. Perange, perang brandal. Ana Mangut mangan manggar. Ora ketang sak eyupe payung, Serang kuwi dibedah ping pitu ora bakal isa bedah."................ [29]

---

[28] Para nara sumber yang dihubungi tak bisa menjelaskan tentang Geger Serang pertama dan kedua, kecuali menyebutkan bahwa keduanya terjadi pada jaman Nyi Ageng Serang dan ayahandanya berperang melawan Belanda. Sayang, Babat Serang yang ditulis dalam tulisan Jawa Kuno yang sebetulnya bisa menjelaskan kedua Geger tersebut tidak berhasil ditemukan. Pemiliknya, salah seorang Trah Serang (Bpk Suharno, kepala Desa Ngrambat yang tinggal di Dusun Tegaljeruk) tidak bisa menemukan kembali buku yang pernah disimpannya tersebut.

[29] Terjemahan bebasnya: "Terjadinya Geger Serang yang ke tiga nanti akan mengusir penduduk dari tempat tinggalnya sendiri. Perangnya perang berandal. Ada ikan makan buah kelapa. Meskipun tingga selembar payung, bumi Serang tidak akan terbelah walaupun setiap harinya dibelah tujuh kali." Sumber: Pak Wito, Desa Kedungpring, *Wawancara*, 15.8.1989.

Geger Serang yang ke tiga ini diinterpretasikan oleh orang Kedung Ombo sebagai keadaan di wilayah genangan air Waduk Kedung Ombo setelah peresmian pengge-nangan dilakukan. *Geger tundung* diartikan sebagai adanya rakyat yang telah terusir oleh air yang ketinggiannya naik secara cepat dan memporak-porandakan desa-desa beserta para penghuninya. Sedangkan perang brandal diartikan sebagai permainan yang tidak memakai cara-cara yang wajar yang jujur, mirip tingkah laku para berandal di mana rakyat diintimidasi oleh oknum aparat. Baik militer maupun sipil. Rakyat kecil juga dituduh sebagai pengikut PKI, anti pembangunan dan anti Pancasila, padahal mereka cuma sekedar menuntut dan mempertahankan hak-haknya.

Adanya ikan yang bisa makan buah kelapa (*mangut mangan manggar*) diartikan oleh orang Kedung Ombo pada saat setelah penggenangan, sebagai naiknya permukaan air genangan yang telah menenggelamkan pohon kelapa. Hal ini membuat buahnya akan dapat dimakan oleh ikan. Hal tersebut akan diikuti dengan tenggelamnya sebagian kekayaan orang-orang di kawasan Serang dan Gagatan.

Dengan keyakinan akan kegagalan untuk membelah bumi Serang meskipun telah dibelah tujuh kali inilah orang-orang Kedung Ombo mencoba untuk tetap bertahan di tanah kelahirannya. Meskipun bumi Serang yang tersisa sekarang hanya tinggal "selebar payung" akibat telah terkepung oleh genangan air. Mereka juga yakin bahwa tak ada suatu kekuatanpun yang bisa mengusir mereka dari bumi Serang. Ada *piweling* yang sering diucapkan nenek moyang mereka, yang berbunyi :

"Yen mbesuk ana banjir getih sarap topi, anak putumu klumpukno. Yen ana geger Serang maneh, deloken wae saka jendela."...................................[30]

Pesan tersebut mempunyai makna semacam peringatan agar semua orang berkumpul dengan anak cucunya masing-masing pada saat terjadi keributan. Dan, hanya melihat semua kejadian lewat lubang jendela saja. Artinya, penduduk Kedung Ombo tidak perlu pindah dari tanahnya, meskipun terjadi sebuah keributan besar.

Selain itu, masyarakat di daerah genangan juga mempunyai keyakinan bahwa Nyi Ageng Serang dan Pangeran Samudro akan melindungi mereka. Hal ini terbukti dari terjadinya banjir berkali-kali yang tak pernah bisa menenggelamkan *petilasan* Nyi Ageng Serang yang terletak di Nglorog. Sedangkan Pangeran Samudro akan melindungi masyarakat apabila kelak daerah mereka menjadi "lautan" (samudera), asalkan masyarakat berkumpul di sekitar Gunung Kemukus.

Di sekitar Nglempong, ada sebuah makam keramat Kyai Tlingsing. Masyarakat di sana juga percaya bahwa banjir tak akan pernah menjamah tanah atau desa mereka.

Ada orang Kedung Ombo yang berkeyakinan bahwa pada Geger Serang yang ke tiga akan terjadi di mana terlalu banyak manusia, tetapi kekurangan batu (*kokehan wong, kurang tlungku*) meskipun Gunung Kendeng banyak mengandung timbunan batu. Diramalkan pula alam dan hutan pada batas hutan Totogan akan habis. Hal ini akan menyebabkan orang harus mencari makan dengan cara berjungkir balik (*nungsang-jempalik*). Bila ke arah utara, hutan Sambilangu, orang akan kebingungan (*lingak-linguk*).

---

[30] Mbah Suroto, Desa Guyuban, *wawancara*, 14.8.1989. Mbah Suroto adalah salah satu keturunan Nyi Ageng Serang

Bila sampai pada hutan Merak mati, upaya mencari jalan keluar dengan memeras otak sekalipun akan menemui kegagalan.[31]

Tatkala Waduk Kedung Ombo mulai digenangi, Gunung Kendeng, di sekitar Desa Bodeh memang dibanjiri oleh para pengungsi yang berasal dari desa-desa yang telah tenggelam. Antara lain dari Desa Kleco, Balepanjang, Nguter dan lain-lain. Sedangkan habisnya hutan Totogan, menurut orang-orang di Kedung Ombo, sebetulnya telah dimulai semenjak sepuluh tahun yang lalu. Saat itu orang-orang mulai banyak meninggalkan kampung halaman dan pergi bekerja ke Jakarta.

Menurut orang Kedung Ombo, para orang tua mereka pernah memberikan sebuah *piweling* dan ramalan akan terjungkirbaliknya tatanan hidup mereka. Pada saat orang kebingungan, akan terjadi orang memakan orang (*wong mangan wong*) sementara banyak hal-hal menarik akan tampak di depan mata. Hal ini diibaratkan dengan adanya emas segentong di tengah jalan. Namun hal-hal menarik yang tampak di depan mata tersebut (emas segentong) harus mereka hindari. Apabila mereka menyentuhnya sekali saja akan berakibat tak ada barang sedikitpun yang tersisa yang bisa mereka miliki (*sak lingkare pantat gentong*).

Oleh penduduk *piweling* tersebut diinterpretasikan sebagai datangnya oknum panitia pembebas tanah dan aparat militer yang menekan rakyat. Mereka juga menolak cap jempol sebagai tanda bersedia menerima uang ganti rugi, meskipun sebetulnya prosedurnya sangat mudah dan jumlahnya cukup menggiurkan, khususnya pada saat rakyat dihadapkan pada keadaan yang membingungkan dan menimbulkan keputusasaan. Apabila mereka telah melakukan

---

[31] Mbah Modin Nganji, Desa Kedungmulyo, *wawancara*, 15.8.1989

proses cap jempol, niscaya tanah berikut kekayaan lainnya akan hilang untuk selamanya.[32]

Pada saat dilanda keputusasaan itulah, orang harus pasrah dan menerima apa adanya, juga waspada dan selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa.[33] Hal yang sama pernah dilukiskan oleh RN Ranggawarsita sebagai Zaman Edan, di mana orang yang selalu ingat dan waspada (*eling lan waspodo*) akan lebih berbahagia dibandingkan dengan orang yang tersesat dan lupa.[34] Meskipun untuk itu dituntut ketabahan untuk menderita kelaparan, kemiskinan dan kesusahan.

Penduduk Kedung Ombo juga mempunyai semacam keyakinan tentang bakal terjadinya banjir darah (*banjir getih*) sebagaimana juga disinggung dalam Sabdopalon Jayabaya. Dalam kasus Kedung Ombo, hal tersebut diinterpretasikan sebagai akan adanya hukuman yang dijatuhkan pemerintah kepada penduduk Kedung Ombo dikarenakan pembangkangan dan penolakan mereka untuk pindah dari tanah kelahirannya.

---

[32] Ibid.

[33] Piweling yang dikutip Mbah Supardi (Desa Sumber Agung) adalah sebagai berikut: Mbesuk ki bakal ana banjir saka ngisor. Mbesuk ki gegering Serang polahing wong pating kedungsang. Mbesuk bakal kelakon wader mangan manggar. Nek mbesuk tekan wancine, wong kudu sabar, narima, eling lan waspada. Ya kuwi garaning wong kang lagi nandang pepeteng. Wawancara, 16.8.1989.

[34] Kamadjaja, *op cit.*, hal. 72.

Mitologi dan Interpretasi Penduduk Kedung Ombo Tentang Jaman Kemakmuran

Seperti yang disebut dalam Jangka Jayabaya, setelah jaman Kala Bendu[35] terlewati, akan datang suatu jaman kemakmuran di mana tak ada lagi perang. Harga sandang pangan murah, kehidupan aman dan tentram. Seolah-olah jaman kemakmuran ini adalah hadiah bagi orang-orang yang bersikap 'ingat' dan 'waspada' pada jaman kesusahan yang berhasil mereka lalui.

Ada beberapa mitologi tentang akan datangnya jaman kemakmuran yang tidak ada kaitannya dengan Jangka Jayabaya. Namun hal ini beredar cukup luas di kalangan penduduk Kedung Ombo secara turun temurun. Yang pertama, tentang adanya suatu peristiwa di mana orang akan dapat mendengarkan suara yang tidak nampak wujud orangnya. Suara itu bisa berbentuk sebagai bunyi gamelan, suara ketoprak, wayang orang dan lainnya. Hal tersebut pernah ditafsirkan sebagai pesawat radio. Yang kedua, tentang adanya kereta kencana yang bisa lewat di langit tanpa menggunakan rel, yang oleh penduduk diinterpretasikan sebagai adanya pesawat terbang.

Dua mitologi ini tidak bisaa dijelaskan oleh masyarakat tentang hubungan dengan datangnya kemakmuran. Tetapi beberapa orang mengatakan bahwa masa kemakmuran pernah mereka lewati.

Yang ke tiga, adalah tentang *iwak bader mangan manggar* di mana ikan-ikan di daerah Serang dan Gagatan akan dapat saling

---

[35] Jaman Kala Bendu adalah bagian dari Jaman Edan di mana orang lupa pada kepentingan banyak orang dan saling berlomba mengejar kepentingan pribadi. Kehidupan sangat sulit, meskipun orang telah bekerja membanting tulang. Pada saat itu pula, orang-orang di tanah Jawa banyak berbuat jahat di dalam hatinya dan menimbulkan perbuatan jail di mana-mana. Lihat Anjar Any, *op cit.*, hal. 89

bertemu. Meskipun air genangan Waduk Kedung Ombo telah menenggelamkan sawah, rumah dan sebagian harta penduduk, masa kemakmuran akan datang kepada mereka yang bisa bertahan di sekitar genangan air. Orang-orang yang bertahan di sekitar genangan kelak akan mendapat sepetak tanah di daerah yang keadaannya seperti loyang miring. [36] Hal ini kemudian diinterpretasikan sebagai lereng-lereng bukit milik Perhutani seperti Kedungpring dan Kedunglele yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang tidak mau pindah dari tanah kelahirannya.

Yang ke empat, tentang pasca jaman banjir darah. Sebagian besar penduduk Kedung Ombo berkeyakinan bahwa akan terjadi 'peperangan' yang tak terelakkan dan apabila mereka berhasil ke luar melewati masa banjir darah akan datang suatu jaman kemakmuran di bawah pemerintahan seorang Erucakra. Hal tersebut dikatakan oleh seorang tokoh masyarakat sebagai berikut :

> Bila telah menginjak tahun 2000 kurang 2 atau 3 tahun, kalau ada hari di mana merupakan tanggal ke tujuh hari ke tujuh dan bulan ke tujuh akan tiba saatnya ada jumenengan ratu................... [37]

Kondisi Yang Melatarbelakangi Rencana Pembangunan Bendungan Kedung Ombo (versi Pemerintah)

Sungai Serang dan Sungai Juana memiliki daerah pengairan seluas 4.743 km persegi. Selama puluhan tahun alirannya dapat terkendalikan oleh pintu air Wilalung yang terletak 15 km di sebelah selatan

[36] Sumber yang lain memakai istilah: *Sek eyupe payung*, yang artinya selebar payung yang sedang terbuka.

[37] Wiryodiharjo (84) dari Desa Grogol, *wawancara*, 16.8.1989.

kota Kudus. Pada setiap musim penghujan, bahaya banjir selalu dielakkan dengan cara membuang sebagian air ke Lembah Juana.

Usaha menjinakkan aliran Sungai Serang sesungguhnya telah berlangsung sekitar satu abad, dengan pembuatan tanggul berbantaran lebar sepanjang 2 km. Pada sisi kiri sungai, tanggul di bangun antara Panawangan — Karanganyar. Sementara itu, pada sisi kanan dibangun tanggul antara Klambu hingga tepi jalan raya Semarang—Pati.

Tetapi sekarang, Lembah Juana telah berubah seiring dengan terjadinya perubahan ekonomi dan sosial yang cukup pesat. Lembah Juana yang tadinya merupakan daerah buangan banjir, sekarang menjadi daerah pertanian yang subur. Perubahan ini menyebabkan fungsi pintu air Wilalung yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1918, yang dimaksudkan sebagai penangkal bahaya banjir di hilir Sungai Serang, sekarang justru mengundang musibah.

Apalagi kemampuan pembuangan air ke arah kanan menuju Lembah Juana tak bisa dilakukan lagi, akibat keadaan tanah yang telah meninggi akibat pengaruh sedimentasi. Pada setiap musim penghujan, bahaya banjir selalu muncul mengancam Lembah Juana yang dulunya merupakan daerah kulmatasi Kedung Semat dan Welahan Bum. Dan sebaliknya, di musim kemarau daerah-daerah ini senantiasa mengalami kekeringan yang dapat digolongkan sebagai bencana. Seringkali banjir yang muncul juga menggenangi jaringan irigasi teknis di kawasan Glapan Sedadi.

Hantaman banjir yang terus menerus selama berpuluh-puluh tahun, membuat tanggul-tanggul yang pernah dibangun menjadi tidak efektif dalam pengendalian banjir. Malahan tanggul sisi kiri jebol dihantam banjir yang terjadi pada 1972. Saat itu debit air mencapai 900 m kubik perdetik, sehingga air langsung meluap dan membanjiri daerah seluas 18.000 ha.

Sedangkan banjir besar yang terjadi pada awal 1980 meneng-

gelamkan wilayah seluas kurang lebih 83.500 ha di Kabupaten Jepara, Kudus, Pati dan Grobogan. Banjir di tahun 1981 meneng-gelamkan wilayah seluas kurang lebih 50.000 ha. Banjir-banjir tersebut juga menyebabkan jalan propinsi mengalami kerusakan berat sepanjang 333 km, jalan kabupaten 43 km, jembatan yang hanyut ada 13 buah. Belum lagi, ditambah dengan jebolnya tanggul, bendungan irigasi dan rusaknya jaringan saluran air teknis di empat lokasi.

Selain masalah banjir, muncul juga masalah kekurangan air yang dibutuhkan untuk tenaga listrik, air minum, industri dan irigasi. Hal ini muncul karena semakin banyaknya bermunculan perindus-trian dan persawahan di sebelah utara Lembah Juana. Areal irigasi yang dapat diairi menyusut menjadi 30 % dari kebutuhan. Akibatnya, terjadi lahan surjan yang meliputi areal seluas kurang lebih 13.000 ha di wilayah Sungai Jragung, Tuntang, Serang, Lusi dan Juana. Sebuah kawasan yang biasa disingkat menjadi Jratunseluna.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan air minum dan industri, tercatat untuk kota Semarang pada tahun 1983 hanya 880 kubik per detik dari kebutuhan sebesar 1.500 kubik per detik. Kebutuhan air di daerah hulu Sungai Serang yang merupakan daerah tandus juga sangat besar, terutama di musim kemarau.

Penyebaran luas lahan kritis di daerah Jratunseluna di Sub DAS Serang tercatat sebesar 39.000 ha. Areal ini meliputi sebagian Kabupaten Boyolali, Sragen, Grobogan, Semarang dan Jepara. Pada Sub DAS Lusi tersebar lahan kritis sebesar 30.000 ha, meliputi sebagian Kabupaten Blora dan Grobogan. Untuk Sub DAS Tuntang dan Jragung meliputi areal seluas 30.000 ha di sebagian Kabupaten Semarang dan Demak. Sedangkan Sub DAS Juana sebesar 32.000 ha, yang mencakup wilayah Kabupaten Kudus dan Pati.

Maksud dan Tujuan Pembangunan Bendungan Kedung Ombo (versi Pemerintah)

Rencana pembangunan Bendungan Kedung Ombo merupakan bagian dari rencana Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Jratun-seluna yang akan mencakup tiga karesidenan. Yaitu Karesidenan Semarang, Karesidenan Pati, Karesidenan Surakarta dan sembilan kabu-paten, yaitu Kabupaten Semarang, Demak, Kudus, Pati, Blora, Grobogan, Jepara, Boyolali dan Sragen.

Secara keseluruhan, Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna akan membentang di areal seluas kurang lebih 7.900 km persegi di antara deretan gunung, antara lain Ungaran, Merbabu, Telomoyo, Muria dan Pegunungan Kapur Utara. Lewat proyek pe-ngembangan ini, pemerintah Indonesia berniat meningkatkan usaha pengamanan dan pengendalian banjir. Sekaligus melindungi daerah-daerah pertanian, perindustrian dan pemukiman.

Selain itu, Proyek Jratunseluna juga diharapkan oleh peme-rintah mampu meningkatkan penyediaan air irigasi dan pembuatan jaringan siplesinya, termasuk pengembangan jaringan irigasi tersier-nya. Proyek Jratunseluna merupakan serangkaian proyek pem-buatan waduk-waduk di sebelah utara Jawa Tengah. Proyek nantinya juga diharapkan bisa meningkatkan penyediaan air dan tenaga listrik untuk daerah-daerah perindustrian atau pemukiman, membantu meningkatkan kuantitas penyediaan air minum masyarakat. Juga membantu melakukan usaha pengawetan atau penyelamatan sum-ber-sumber daya air sekaligus sumber daya tanah.

Kandungan air Waduk Kedung Ombo berdasarkan perhitung-an akan mampu mengairi persawahan Glapan Sedadi seluas 37.500 ha. Hal ini memungkinkan dibangunnya 7.500 ha sawah baru di Grobogan Selatan dan 10.000 ha lainnya di lembah Juana.

Waduk Kedung Ombo diharapkan pemerintah akan dapat

berfungsi sebagai sarana pengembangan perikanan dan pariwisata, serta mampu menyediakan tenaga listrik sebesar 22,5 MegaWatt. Hal ini diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan petani dan taraf hidup penduduk setempat.

Dengan sekitar 60.000 ha sawah yang bakal terairi, secara teknis keuntungan telah dapat dihitung. Apabila rata-rata produksi beras di Jawa Tengah sebesar 4,7 ton gabah per hektar, maka dalam setahun dengan dua kali masa panen, akan dapat dipetik keuntungan uang lebih dari Rp 105 milyar. [38] Sedangkan dengan 22,5 MegaWatt listrik yang tersedia, akan ada sekitar 59 ribu rumah yang terang-benderang dengan pencatuan daya untuk setiap rumahnya sebesar 450 Watt. Keadaan ini akan berlangsung terus sesuai dengan usia Bendungan, yang diperkirakan akan mampu bertahan selama 150 tahun.

Menurut perkiraan berdasar masterplan, dalam tahun-tahun mendatang Semarang dan kota-kota di sebelah utara Jawa Tengah akan tumbuh berbagai macam industri yang akan memerlukan cadangan air. Dalam rangka itu pula, Waduk Kedung Ombo dibangun. Untuk kebutuhan penyediaan air minum dan industri di Ibukota Jawa tengah Semarang, diproyeksikan pada tahun 2000 akan mencapai kebutuhan sebesar 6.000 kubik per detik.

Pemerintah juga berharap akan dapat memberikan perspektif ekonomi yang lebih cerah kepada penduduk yang akan dipindahkan dari calon daerah genangan waduk. Bagian tandus daerah genangan dianggap pemerintah tidak dapat lagi memberikan dukungan yang baik bagi penduduk yang bersangkutan. Selain itu juga diharapkan

[38] Lihat: *Kompas*, 5 Juli 1987. Perhitungan keuntungan ini dibuat pada bulan Juli 1987 di mana harga beras jenis IR di Jawa Tengah perkilonya adalah Rp 335,-.

mampu membuka isolasi bagi penduduk yang masih tertinggal dan hidup di pedalaman serta memberikan lapangan pekerjaan baru, sehingga kondisi rawan yang sering timbul di masa lalu dapat dicegah. [39]

oo0Ooo

[39] Menurut pemerintah, daerah Kedung Ombo dan sekitarnya seperti Simo, Boyolali dan lain-lainnya di tahun 1965 merupakan basis PKI di mana BTI mempunyai akar yang cukup kuat. Konon, daerah Kedung Ombo merupakan salah satu tempat orang-orang PKI dieksekusi. Pernyataan resmi bahwa Kedung Ombo dulunya adalah basis PKI diucapkan oleh Presiden Soeharto pada saat peresmian PLTA Mrica pada 23 Maret 1989.

Peta Daerah Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Jragung, Tuntang, Serang dan Juana (Jratunseluna)

BAB II

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, PEMBEBASAN TANAH DAN TIMBULNYA PEMBANGKANGAN RAKYAT

Pelaksanaan Pembangunan Waduk Kedung Ombo

Pembangunan Waduk Kedung Ombo memang sebuah impian dan ambisi raksasa, di mana untuk mewujudkannya harus melalui sebuah proses yang teramat panjang, sekitar 20 tahun. Survei, investigasi dan studi kelayakan telah dilakukan oleh Proyek Perancangan Pengembangan Sumber-Sumber Air (P3SA) bersama dengan konsultan dari Belanda, NEDECO mulai 1969 sampai dengan 1976. Pembuatan disain dilakukan pada tahun
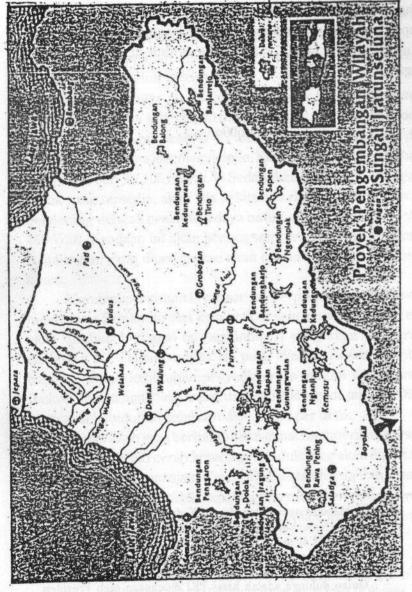
1976 sampai dengan 1978 oleh Proyek Jratunseluna bersama SMEC (*Snowy Mountain Engineering Corporation*) dari Australia yang juga merangkap sebagai kontraktor. Kemudian pada 1979 dan 1984 dilakukan peninjauan dan perbaikan disain yang telah ada.

Sementara itu, untuk sinkronisasi pekerjaan yang meliputi semua Proyek-proyek Pengairan di Wilayah Sungai Jratunseluna di bawah satu sistem manajemen, dibentuklah Badan Pelaksana Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna lewat Surat Keputusan Dirjen Pengairan No 41/KPTS/Ditjenair/1976 tertanggal 18 Maret 1976. Lewat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No 67/KPTS/1977 tertanggal 14 Maret 1977, proyek ditampatkan di bawah pembinaan dan tanggungjawab Dirjen Pengairan. Sedangkan susunan organisasi Badan Pelaksana Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna diatur berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pengairan No 113/KPTS/A/1985 tertanggal 9 April 1985.

Pembangunan bangunan penunjang dan prasarana telah dimulai semenjak 1981. Pada saat itu dimulai pembuatan jalan masuk ke lokasi bendungan dari Monggot ke Kedung Ombo, pembuatan kantor lapangan untuk investigasi dan pelaksanaan, pembuatan gedung laboratorium untuk penyimpanan sampel geologi dan bengkel lapangan, pembuatan perumahan karyawan, pambuatan jalan hantar untuk sarana angkutan material dari Juwangi ke Kedung Ombo beserta jembatan-jembatannya. Pembangunan bangunan prasarana yang dilaksanakan oleh kontraktor dalam negeri tersebut berlanjut sampai tahun 1985.

Pelaksanaan pembangunan terowongan pengelak (*diversion tunnel*) dilaksanakan oleh kontraktor lokal, PT Brantas Abipraya pada akhir 1983 dan selesai pada pertengahan 1985. Pelaksanaannya merupakan kontrak tersendiri, yang terpisah dari kontrak bendungan/bangunan utamanya yang dilelang pada bulan September

1984, meskipun bangunannya termasuk salah satu bangunan pelengkap bendungan.

Sehubungan dengan adanya dua buah jembatan di daerah genangan waduk (di daerah Kemukus dan Kemusu) yang diperkirakan bakal tergenang, maka dibangun dua buah jembatan baru untuk menggantikan jembatan tersebut yang berlokasi di desa Giri Margo, Kemukus, dan di desa Guwo untuk menggantikan Kemusu. Relokasi jembatan tersebut dilaksanakan oleh kontraktor lokal, PT Adhi Karya pada tahun anggaran 1987/1988.

Sedangkan pelelangan bangunan utama yang meliputi pembuatan tubuh bendungan beserta bangunan-bangunan pelengkapnya berupa bangunan pelimpah, rumah tenaga listrik, pipa pesat, menara pengambilan dilakukan pada bulan September 1984. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh PT Brantas Abipraya dan kontraktor dari Jepang yang ditunjuk oleh Bank Dunia, Hazama Gumi. Target penyelesaiannya adalah April 1989. Ada beberapa sub-kontraktor yang ikut terlibat dalam pembangunan bangunan utama ini antara lain Marushima dan PT Barata untuk pekerjaan besi pipa pesat. Sedangkan pengerjaan *water control plant* ditangani oleh Kubota, Marushima dan PT Barata. Pelaksanaan pengadaan dan pemasangan pembangkit tenaga listrik kontraknya dilakukan secara terpisah dari pekerjaan utamanya dan langsung ditangani oleh PLN (Perusahaan Listrik Negara).

Sumber dana untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan Waduk Kedung Ombo berasal dari sumber dana dalam negeri yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berbentuk rupiah, dan sumber dana luar negeri (LOAN 2543 IND) yang merupakan dana dari Bank Dunia (IBRD). Dana Bank Dunia ini terdiri dari *direct payment* dalam bentuk US Dollar dan *prefinance* berbentuk rupiah. Pada tahun Anggaran 1987/1988 di samping IBRD yang merupakan sumber dana luar negeri, diperoleh pula

bantuan dari Exim Bank of Japan dalam bentuk rupiah. Proporsi sumber dana pembiayaan pelaksanaan pembangunan Waduk Kedung Ombo dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1 Proporsi Sumber Dana Pembiayaan Pembangunan Waduk Kedung Ombo

Tahun	D A N A (Rp 1.000,-)			
Anggaran	APBN (Rp)	EXIM (Rp)	LOAN 2543 IND (Rp)	Total (Rp)
1985/1986	15.932.000		5.600.000	21.532.000
1986/1987	7.332.000		7.147.335	14.497.335
1987/1988	270.000	14.747.896	17.936.250	32.954.000
1988/1989	182.748	7.710.779	6.738.258	14.631.785
T o t a l	23.716.748	22.458.675	37.421.843	83.597.266

Sumber : Departemen PU, Dirjen Pengairan, Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna, ***Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo***, Januari 1988.

Jumlah keseluruhan biaya pembangunan Waduk Kedung Ombo, termasuk anggaran untuk pembebasan tanah, bangunan rumah dan tanaman (karang kitri) milik penduduk agaknya jauh lebih besar dari anggaran resmi. Ada sumber yang menyebutkan angka kurang lebih Rp 280 milyar. [1]

[1] Lihat: Kompas, 5 Juli 1987, di mana 74% didukung oleh bantuan Bank Dunia. Namun sumber lain menyebutkan Rp. 200 milyar, lihat: Wawasan, 16 Desember 1988. Ada juga yang menyebutkan Rp 131 milyar, lihat: Suara Pembaruan, 15 Januari 1989. Beberapa sumber lain menyebutkan angka yang berbeda. Hal ini mungkin disebabkan terdapatnya kesimpangsiuran berita, terjadinya manipulasi harga

Informasi tentang rencana dimulainya pembangunan Waduk Kedung Ombo diberikan pada awal 1982. Informasi disampaikan oleh para aparat kelurahan kepada masyarakat di desa-desa yang tanahnya diperkirakan akan dipakai untuk proyek Waduk Kedung Ombo. Namun penjelasan resmi aparat pemerintah kepada penduduk Kedung Ombo baru dilakukan pada April 1985. Penduduk diundang untuk berkumpul di Balai Desa-Balai Desa dan mendengarkan penjelasan tentang akan dibangunnya Waduk Kedung Ombo dan rencana pendataan oleh pihak aparat kelurahan dan Tim Pendataan.

Tekanan Aparat, Pembangkangan Rakyat

Dalam praktek di lapangan, pelaksana pembangunan Waduk Kedung Ombo ternyata mengalami berbagai hambatan. Hal ini terutama berkaitan dengan upaya pembebasan tanah-tanah milik penduduk setempat yang akan digunakan untuk kepentingan proyek. Survei, persiapan teknis dan studi kelayakan [2] yang dilakukan semenjak tahun 1969 sepertinya tiba-tiba menjadi macet, karena tidak diimbangi oleh tingkat pemahaman keadaan sosial budaya setempat dan kecakapan aparat pelaksana pembebasan tanah yang cukup memadai.

ganti rugi dan juga ketertutupan pihak proyek dalam hal informasi yang berhubungan dengan dana. Berdasarkan Uraian Proyek, biaya untuk keseluruhan sistem kali Serang adalah sebesar US$ 177.880.000 dengan perincian dana dalam negeri sebesar Rp 43.057.000.000 (30%) dan dana luar negeri sebesar US$ 109.040.000 (70%) Loan Bank Dunia. Kurs mata uang pada saat itu (1979) US$ 1 = Rp 625,-. Lihat: Departemen PU Dirjen Pengairan Proyek Jratunseluna, ***Uraian Proyek Waduk Kedung Ombo***, Juli 1989.

[2] Ada beberapa lembaga swasta yang ikut melakukan penelitian sehubungan dengan dampak lingkungan dan sosial yang akan ditimbulkan oleh adanya proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo, tercatat antara lain LPU Satya Wacana (1981), Universitas Padjadjaran (1984), Pusat Penelitian UNS dan LPTP (1989).

Pada pertengahan 1985 mulai tampak bermunculan berbagai masalah. Tiba-tiba orang di Kedung Ombo seolah-olah menjadi pembangkang. Mereka menolak tawaran ganti rugi atas pembebasan tanah-tanahnya yang dianggap terlalu rendah. Mereka menolak kedatangan Tim Pendataan dan Tim Pembebasan tanah. Intimidasi oleh aparat desa, aparat keamanan sampai aparat BAKORI (Badan Koordinasi Intelijen) tidak membuat orang-orang Kedung Ombo menyerah, bahkan mereka semakin bersikap defensif dan keras kepala. Sebagian yang ketakutan melarikan diri masuk ke hutan. Namun sebagian yang lain dengan nekad memilih mempe-tahankan tanah miliknya.

Apa yang kemudian terjadi di Kedung Ombo malah menimbulkan polemik lewat media massa, kritik dan opini jelek terhadap cara-cara pelaksanaan proyek pembangunan di sana. Simpati dan dukungan yang sifatnya terbatas, diberikan oleh sekelompok media massa. Juga aktivis LSM yang mencoba melakukan pendampingan kepada orang-orang yang merasa diteror. Tapi, pihak aparat pelaksana sepertinya dikejar target waktu untuk segera mengosongkan daerah genangan. Mereka gunakan semua cara dalam upaya pembebasan tanah. Cara-cara yang sebenarnya justru mengundang masalah baru yang lebih besar. Aparat pemerintah begitu yakin, bahwa segala masalah yang muncul bisa segera diatasi. Tekanan-tekanan baru dilakukan. Bukan saja terhadap penduduk yang dianggap membangkang, tapi juga .paterhadap aktivis-aktivis LSM dan lembaga-lembaga swasta yang bersimpati kepada orang-orang Kedung Ombo. [3]

Apa yang terjadi di Kedung Ombo, khususnya antara tahun 1985 sampai dengan 1988 merupakan suatu jalinan permasalahan

[3] Keadaan ini berlangsung sampai dengan peresmian penggenangan pada 14 Januari 1989.

yang rumit, yang berkaitan dengan upaya pembebasan tanah rakyat dan cara-cara yang digunakan aparat dalam melakukan pembebasan tanah. Yang jelas, rakyat Kedung Ombo tidak begitu saja langsung berani melawan instruksi-instruksi pembangunan yang datang dari pemerintah.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi munculnya pembangkangan rakyat di Kedung Ombo. Antara lain pendekatan aparat yang tidak simpatik, kesimpangsiuran dan rendahnya harga ganti rugi, manipulasi musyawarah dan cap jempol, intimidasi dan penangkapan. Hal ini pada akhirnya menyuburkan kembali mitos-mitos tentang jaman keemasan dan sikap nekad untuk bertahan (melawan) karena merasa harga diri diinjak-injak. Keadaan semakin runyam, karena aparat pemerintah mencoba menutup-nutupi keadaan sebenarnya yang terjadi di Kedung Ombo.

Pendekatan Aparat Tidak Simpatik

Pendekatan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat Kedung Ombo melalui aparat desa setempat, mulai awal 1982 sampai dengan 1985, selalu bersifat sepihak tanpa melibatkan peranserta masyarakat. Masyarakat diundang dan dikumpulkan ke setiap Balai Desa, kemudian gabungan aparat Pemda dari Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan memberikan penjelasan tentang rencana akan dibangunnya sebuah proyek raksasa, Waduk Kedung Ombo. Masyarakat diberitahu bahwa pembangunan waduk bertujuan untuk dan demi kepentingan umum (baca : Rakyat Indonesia). Oleh sebab itu orang-orang Kedung Ombo diminta kesediaannya agar rela memberikan tanahnya kepada pemerintah.

Bagi orang Kedung Ombo yang turun-temurun tinggal di tanah kelahiran mereka, penjelasan aparat pemerintah tentang rencana pembangunan Waduk Kedung Ombo sangat abstrak. Dengan

latar belakang pendidikan formal yang relatif rendah, mereka sulit untuk mengerti jargon-jargon pembangunan seperti 'demi kepentingan umum'. Orang-orang Kedung Ombo sulit menerima kenyataan bahwa tanah yang telah mereka garap semenjak nenek moyang mereka tiba-tiba diminta oleh pemerintah untuk diganti dengan sejumlah uang. Dalam ketidakmengertian yang dihadapi orang-orang di Kedung Ombo, tiba-tiba ada pelaksanaan pendataan tanah, bangunan dan tanaman milik penduduk yang akan dipakai untuk keperluan pelaksanaan pembebasan tanah.

Penjelasan pihak aparat pemerintah kepada orang-orang Kedung Ombo tidak cukup lengkap dan tidak pernah memberikan gambaran lengkap tentang luas tanah yang akan dibebaskan, besar uang ganti rugi tanah yang disediakan pemerintah dan persiapan-persiapan yang tengah dilakukan pemerintah dalam rangka pemukiman kembali. Hal tersebut membuat orang Kedung Ombo beranggapan bahwa pelaksanaan pembangunan Waduk Kedung Ombo masih lama.

Sementara itu, masyarakat tidak pernah diajak berdialog secara aktif ataupun bermusyawarah. Masyarakat yang tadinya bingung menghadapi kedatangan Tim Pendataan berubah menjadi curiga. Bahkan di beberapa desa, kehadiran Tim Pendataan ditolak oleh penduduk. Apalagi ada beberapa orang di Kedung Cumpleng dan Kedung Lele, Kelurahan Nglanji setelah tanahnya didata, dimintai cap jempol dan langsung diberi ganti rugi tanpa pernah mengetahui luas tanah dan besarnya uang ganti rugi yang menjadi halnya.

Tidak adanya penjelasan secara lengkap dari aparat desa kepada masyarakat, akhirnya mendorong Bupati Boyolali M Hasbi mengirimkan surat tertanggal 28 Agustus 1985 kepada Camat Kemusu. Dalam suratnya, Bupati meminta agar pihak Kecamatan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Bupati Boyolali juga meminta agar pihak proyek dan rakyat memusyawarahkan besar ganti rugi.

Namun musyawarah tetap tidak pernah terjadi.

Kekecewaan lain muncul pada penduduk di calon wilayah genangan. Pada saat menjelang Pemilihan Umum di awal 1982, beberapa juru kampanye dari salah satu kontestan berusaha merebut simpati rakyat dengan cara memberikan janji bahwa masyarakat di Kedung Ombo tidak akan digusur kalau mereka mencoblos gambar tertentu pada saat Pemilu berlangsung. Di beberapa desa, bahkan para juru kampanye yang juga aparat pemerintah setempat memberikan suatu ancaman terselubung agar penduduk memenangkan kontestan tertentu, apabila mereka tidak ingin hidupnya sengsara.[4] Banyak orang yang tadinya berharap dengan janji-janji tersebut dan terlibat dalam dukungan aktif kepada salah satu kontestan, merasa dibohongi dan ditipu mentah-mentah.

Cara-cara pendekatan yang digunakan aparat pemerintah untuk membebaskan tanah yang terkena proyek Waduk Kedung Ombo menyebabkan kaum tua yang merasa punya ikatan kuat dengan nenek moyang mereka (Trah Serang dan Trah Gagatan) menjadi tersinggung. Mereka merasa pemerintah sama sekali tidak pernah mengajak mereka bermusyawarah. Padahal orang-orang di Kedung Ombo beranggapan, bahwa tanah yang mereka tinggali secara turun temurun itu adalah sah milik mereka. Kenapa tiba-tiba tanah mereka didata kemudian harus dikosongkan hanya dengan .padiberi uang

[4] Misalnya pada masa kampanye Pemilu 1982, di Ngrakum dan Nglanji para juru kampanye menyatakan bahwa apabila Golkar keluar sebagai pemenang, masyarakat akan tetap tinggal tenang dan tidak akan ada penggusuran, meskipun pembangunan Waduk Kedung Ombo harus terus berjalan. Oleh karena itu masyarakat harus mencoblos Golkar, kalau tidak, maka sekedar menggembalakan kambing atau mengambil rumput di hutan akan dilarang. Sumber: Dokumentasi KSKPKO. Si juru kampanye tidak menjelaskan bagaimana cara membangun waduk tanpa melakukan penggusuran dan siapa yang berhak melarang orang mengambil rumput di hutan bila kontestan lain yang menang.

ganti rugi yang rata-rata cuma sebesar Rp 250,- per meter persegi.[5]

Kesimpangsiuran Besar Uang Ganti Rugi

Penetapan besar uang ganti pembebasan tanah penduduk yang terkena proyek Waduk Kedung Ombo yang tidak jelas kriterianya, berlangsung sampai pertengahan 1986. Banyak penduduk dengan begitu saja harus menerima uang ganti rugi setelah Tim Pendataan mendata tanah mereka tanpa ada penjelasan berapa besar uang yang menjadi hak mereka, kekayaan apa saja yang telah didata oleh Tim dan yang paling penting. Penduduk tidak pernah ditanya, apakah mereka bersedia menerima sejumlah uang sebagai ganti rugi atas kekayaan yang sebelumnya telah didata oleh Tim.

Baru pada Agustus 1985 muncul Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng yang merupakan pedoman penetapan besar ganti rugi tanah , bangunan, tanaman dan lain sebagainya dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah proyek Waduk Kedung Ombo di tiga Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan, Sragen dan Boyolali.[6]

Dalam waktu yang bersamaan, keputusan Gubernur Jateng tersebut dan beberapa keputusan yang berhubungan dengan besar

[5] Besar uang ganti rugi ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng No 592.2/232/86 tertanggal 25 Agustus 1986 untuk jenis tanah Tegalan Kelas II, sedangkan untuk tanah Sawah Kelas I harga ganti ruginya sebesar Rp 380,- per meter persegi. Untuk tanah pekarangan dihargai sebesar Rp 633,- per meter persegi.

[6] Ada kemungkinan aparat pelaksana sengaja tidak memberitahukan besar uang ganti rugi dan dasar penetapan beserta kriteria dengan anggapan tidak akan ada masalah dengan penduduk yang tanahnya akan dibebaskan. Sebenarnya tanggal 20 September 1983 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng telah

ganti rugi pembebasan tanah masyarakat yang sebenarnya telah ada semenjak tahun 1983, tiba-tiba beredar secara meluas dalam bentuk lembaran fotokopi di daerah yang akan terkena proyek Waduk Kedung Ombo.

Banyaknya lembaran fotokopi yang sebenarnya berlainan tanggal penetapannya itu menambah kebingungan masyarakat terhadap kesimpangsiuran besar uang rugi yang disediakan pemerintah. Apalagi dalam tanggapan Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam atas pertanyaan anggota Komisi II DPR-RI pada rapat kerja tanggal 25 Nopember 1987 menyebutkan bahwa besar ganti rugi yang disediakan pemerintah untuk pembebasan tanah proyek Waduk Kedung Ombo sebesar Rp 3.000,- per meter persegi. Tanggapan Mendagri tersebut, beserta kliping dari sebuah berita koran daerah yang memuatnya, beredar juga secara meluas di masyarakat.[7]

Tidak lama kemudian muncul lagi Surat Mendagri Soepardjo Rustam tertanggal 13 Januari 1988 No 592.2/464/SJ yang berisi bantahan. Bantahan itu menyatakan, pemerintah tak pernah menetapkan harga ganti rugi sebesar Rp 3.000,- per meter persegi untuk tanah yang terkena proyek Waduk Kedung Ombo. Dan pemerintah hanya mengacu pada SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng tertanggal 2 Mei 1985 No 593/135/1987. Acuan itu menetapkan mana besar ganti rugi tanah pekarangan yang terkena proyek Waduk Kedung Ombo di wilayah Kabupaten Sragen, Boyolali dan Grobogan sebesar Rp 700,- per meter persegi.

mengeluarkan pedoman penetapan ganti rugi pelaksanaan pembebasan tanah bernomor 593.8/290/1983, yang disusul keputusan tanggal 22 Juni 1984 No 593.8/16950 dan tanggal 13 April 1985 No 593.8/133/1985.

7) Lihat: Kedaulatan Rakyat, 28 Nopember 1987

Namun lembaran fotokopi surat Mendagri terakhir tersebut, yang banyak tertempel di depan kantor-kantor kelurahan, sudah tidak dipercayai lagi. Masyarakat Kedung Ombo menganggapnya sebagai sebuah surat palsu yang sengaja dibuat dan diedarkan oleh oknum panitia pembebasan tanah. Hal ini dilakukan untuk menekan harga tanah di Kedung Ombo yang meningkatkan dengan pesat.

Beberapa surat keputusan lain yang muncul belakangan, yang menyangkut besar ganti rugi atas tanah yang terkena proyek, betul-betul tidak lagi dipercayai masyarakat. Apalagi harga ganti rugi tanah resmi versi pemerintah dianggap dianggap masyarakat sangat rendah untuk harga sepetak tanah yang sangat subur. Misalnya di daerah Kemusu cuma dihargai sebesar Rp 325,- sampai Rp 750,- per meter persegi. Keadaan semakin membi-ngungkan masyarakat, tatkala banyak bermunculan calo-calo dan spekulan tanah di daerah genangan Waduk Kedung Ombo.

Sementara itu, rencana pembangunan Waduk Kedung Ombo yang memberikan prospek cerah berupa perikanan dan daerah wisata telah menimbulkan daya tarik bagi kelompok-kelompok bisnis untuk membeli tanah-tanah di luar dekat sabuk hijau. Hal tersebut menyebabkan harga pasaran tanah di sekitar Kedung Ombo melonjak hingga mencapai Rp 8.000,- per meter persegi. [8] Penduduk sendiri menginginkan ganti rugi sebesar Rp 15.000,- per meter persegi bagai tanah mereka yang akan digunakan untuk keperluan proyek.

Berubah-ubahnya patok-patok yang menjadi batas sabuk hijau yang setiap kali bertambah lebar, menguatkan kecurigaan orang-orang Kedung Ombo. Mayarakat percaya memang ada pihak yang mengincar tanah mereka dengan cara membonceng pembebasan tanah yang tengah dilakukan oleh Tim Pembebasan Tanah. [9]

[8] Tempo, 31 Desember 1988

Manipulasi Musyawarah dan Cap Jempol

Dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan di beberapa Balai Desa yang diadakan aparat dalam rangka memberikan penjelasan kepada penduduk tentang rencana pembangunan waduk, penduduk diminta mengisi lembaran daftar hadir. Daftar hadir tersebut kemudian dilampirkan pada sepucuk surat yang menyatakan kesediaan masyarakat untuk menerima usulan harga ganti rugi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seolah-olah telah terjadi suatu musyawarah.

Pertemuan-pertemuan tersebut sama sekali tidak pernah membahas besar uang ganti rugi tanah dan harta benda milik penduduk. Yang terjadi malah sebaliknya. Pertemuan semacam itu hanya memberikan pengalaman jelek kepada masyarakat. Mereka kemudian tidak mau lagi menghadiri dan menanggapi setiap undangan aparat pemerintah.

Kemudian dengan cara yang lain, warga diundang secara paksa[10] untuk mendengarkan penjelasan petugas dari Dinas Transmigrasi tentang kemungkinan bertransmigrasi ke luar Jawa bagi masyarakat yang tanahnya terkena proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo. Dalam pertemuan tersebut juga diedarkan daftar hadir sebagai bukti memenuhi undangan. Penduduk yang hadir diminta membubuhkan tanda tangannya, atau cap jempol bagi yang tidak bisa membuat tanda tangan. Dan sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, daftar hadir tersebut dimanipulasi sedemikian rupa sehingga memberikan kesan seolah-olah daftar kesediaan

[9] Konon, berubahnya patok-patok batas tersebut dikarenakan salahnya pengukuran yang dilakukan pihak proyek.

[10] Mereka yang tidak hadir memenuhi undangan, dipanggil ke Polsek setempat dan dituduh melanggar pasal 224 KUHP atau juga pasal 335 KUHP untuk perkara pidana yang digolongkan sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan.

sejumlah penduduk untuk bertransmigrasi atau menerima sejumlah uang ganti rugi.

Dalam pertemuan-pertemuan tersebut juga diundang beberapa orang yang diklasifikasikan pemerintah sebagai ET.[11] Mereka dipaksa untuk menandatangani/cap jempol blanko-blanko kesediaan ikut bertransmigrasi ke luar Jawa. Apabila mereka sedia ditransmigrasikan, predikat ET yang disandangnya dijanjikan akan dihapus. Orang-orang yang berpredikat ET tersebut akhirnya dihadapkan pada suatu situasi di mana tidak ada pilihan lain kecuali ikut bertransmigrasi.

Untuk mengejar target waktu pengosongan daerah genangan, pada menjelang akhir 1988 beberapa aparat desa mendatangi sejumlah penduduk. Para penduduk diminta untuk mengambil uang ganti rugi atas nama penduduk lain yang tetap membangkang dan tidak bersedia pindah. Uang ganti rugi sebagian besar diambil oleh aparat desa yang bersangkutan, sedangkan si pengambil ganti rugi atas nama orang lain memperoleh sedikit imbalan. Tentu saja si pemilik yang asli yang dipecudangi merasa marah, tatkala aparat dan petugas mendatangi rumah-rumah penduduk yang telah menerima ganti rugi dan meminta agar segera mengosongkan tanahnya.[12]

Pelaksanaan proyek Waduk Kedung Ombo sampai dengan

[11] Kepanjangan dari Eks Tapol, yaitu orang yang dianggap terlibat dalam peristiwa G 30 S/PKI di tahun 1965. Dalam kasus Kedung Ombo, banyak orang yang tiba-tiba mendapatkan dirinya sebagai seorang ET. Seringkali juga dipakai istilah OT (organisasi terlarang) sebagai pengganti ET untuk orang-orang yang dianggap pernah terlibat dalam organisasi PKI ataupun organisai yang berafiliasi pada PKI

[12] Kasus ini terbongkar, karena para penduduk yang menjadi "orang sewaan" tersebut merasa bersalah dan melaporkan diri ke kantor Polisi setempat. Ternyata penyelewengan ganti rugi oleh aparat desa ini merupakan kepanjangan tangan dari suatu persekongkolan dan serangkaian manipulasi yang dilakukan oleh oknum. Sumber: Dokumentasi KSKPKO, lihat juga Wawasan, 25 Februari 1989.

peresmian penggenangannya tidak pernah melibatkan penduduk yang digusur ataupun memberikan informasi-informasi penting yang menjadi hak penduduk. Musyawarah wajar perihal ganti rugi yang diinginkan penduduk di tiga kabupaten yang terkena proyek Waduk Kedung Ombo, tidak pernah terjadi.

Intimidasi dan Penangkapan

Akibat cara-cara yang digunakan oleh aparat pemerintah, aparat keamanan maupun anggota Tim Pembebasan Tanah yang menimbulkan permusuhan, penduduk di calon daerah genangan Waduk Kedung Ombo semakin bersikap nekad dan berupaya mempertahankan tanah miliknya. Radikalisme penduduk dalam melawan setiap usaha pembebasan tanah miliknya semakin mengental. Mereka menolak menghadiri setiap undangan, apapun konsekuensi yang harus mereka pikul. Setiap kali petuga Tim Pembebasan Tanah datang ke rumah-rumah penduduk, tidak dilayani. Bahkan penduduk menusir mereka.

Sikap nekad dan pembangkangan yang ditunjukkan oleh penduduk membuat aparat menjadi mata gelap. Mereka sepertinya tidak lagi mempedulikan prosedur standar yang harus dipatuhi. Dengan bantuan aparat keamanan, Tim Pembebasan memaksa penduduk untuk mencapjempoli penerimaan ganti rugi.

Sementara itu, KTP[13] penduduk yang telah habis masa ber-

[13] Kepanjangan dari Kartu Tanda Penduduk. Kartu ini harus dimiliki oleh setiap orang di Indonesia. Kartu ini ditunjukkan setiap kali seseorang akan mengurus SIM (Surat Ijin Mengemudi), menginap di kampung, mengurus SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik), Paspor, menikah dan sebagainya. Kartu yang punya tanda-tanda khusus ini berlaku selama 3 tahun. Kartu ini begitu vital bagi penduduk Indonesia. Di Jakarta, ada "Operasi Justicia" di mana orang-orang yang tak ber KTP ditangkapi. Mereka yang tidak membawa, atau memiliki KTP bisa dijatuhi hukuman denda atau kurungan.

lakunya di tahun 1985 diharuskan memperbarui lagi. Tanpa KTP yang baru, mereka akan mengalami kesulitan bila bepergian meninggalkan desanya. Demikian pula semua urusan yang berhubungan dengan aparat desa dan pemerintah. Tapi tatkala masyarakat Kedung Ombo mengurus perbaruan KTPnya, aparat Kecamatan melakukan penekanan-penekanan kepada orang-orang yang belum mau menerima ganti rugi atau bertransmigrasi. Agar KTP bisa keluar, mereka harus menyatakan kesediaannya ke luar dari lokasi genangan dengan cara membubuhkan tanda tangan atau cap jempolnya di blanko-blanko yang telah tersedia.

Kepada mereka yang terus membangkang dan tidak mau pindah, dan terutama para tokohnya, nomor KTP baru yang telah jadi diimbuhi dengan cap ET. [14] Artinya, mereka adalah bekas tahanan politik yang bisa dikenai wajib lapor ke Koramil-Koramil[15] setempat secara kontinyu.

Predikat ET begitu menakutkan banyak orang, karena juga bisa berarti hilangnya lapangan kerja, hak-hak sebagai warga negara dan terkucilnya anak cucu dari pergaulan masyarakat. Puncak dari ketakutan yang dialami oleh masyarakat adalah larinya 25 penduduk Kemusu ke hutan karena dituduh PKI. Hal tersebut akhirnya menimbulkan sorotan masyarakat luas terhadap pembangunan Waduk Kedung Ombo.

---

[14] Pemberian cap ET pada nonor KTP penduduk dalam kasus Kedung Ombo ini banyak yang tidak masuk akal. Ada orang-orang yang kelahiran tahun 60-an bahkan di atas 1965 yang juga diberi cap ET. Banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana orang yang kelahirannya tahun 60-an bisa dicap sebagai ET, sementara pada 1966 ketika PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang, orang-orang itu masih tergolong kanak-kanak. Sumber: Dokumentasi KSKPKO.

[15] Koramil kepanjangannya Komando Daerah Militer, merupakan isntansi militer tertinggi di tingkat kecamatan.

Beberapa tokoh masyarakat Kedung Ombo yang memberanikan diri minta bantuan ke beberapa lembaga seperti LBH Jogja, YLBHI Jakarta, BKPH MKGR Golkar, GPS dan lainnya [16] ditangkap oleh aparat kepolisian. Mereka dituduh telah melakukan penipuan dengan cara memungut iuran secara tidak sah kepada masyarakat dan kemudian menggunakannya untuk berfoya-foya, makan-tidur di hotel-hotel di berbagai kota. Padahal masyarakat sendiri secara sukarela mengumpulkan uang dan meminta beberapa orang di antara mereka untuk pergi meminta bantuan kepada lembaga-lembaga dan orang yang bisa diharapkan pertolongannya.

Pihak BKPH MKGR Golkar yang dimintai bantuannya oleh masyarakat, bersedia menolong asalkan masyarakat Kedung Ombo mau masuk menjadi anggota MKGR. Hanya orang-orang yang menjadi anggota MKGR dengan cara membayar uang pendaftaran dan iuran anggota yang akan dibela. Uang iuran yang dikumpulkan masyarakat lewat beberapa orang ini juga dipersoalkan sebagai sebuah penipuan, yang kemudian dijadikan alasan aparat untuk menangkapi tokoh-tokoh Kedung Ombo.

Sedangkan penduduk yang meminta bantuan ke LHB Jogja, dipanggil menghadap ke Koramil. Mereka dituduh menentang pemerintah, anti pembangunan, anti Pancasila dan sebagainya. Mereka dikenai wajib lapor dan kerja bakti membersihkan kantor Koramil.

Model intimidasi lain yang digunakan oleh oknum aparat agar masyarakat bersedia menerima uang ganti rugi atau bertransmigrasi adalah dengan cara menangkapi penduduk yang membeli kayu bangunan dari para *blandong* (buruh tebang kayu). Mereka ditangkap dengan tuduhan menjadi tukang tadah kayu curian milik Per-

---

[16] Lembaga lain yang sebelumnya telah aktif membantu orang-orang adalah YBKS dan kemudian menyusul Yayasan Sosial Bhakti Satria Mangkunegaraan, KSBH. Penduduk juga mencoba meminta bantuan pada DPP PDI.

KOMPAS SABTU, 20 JUNI 1987

Penduduk yang tidak mau menerima ganti rugi dikejar-kejar dan ditangkapi. Mereka dituduh sebagai anti pembangunan, anti Pancasila, PKI, subversif dst. 25 penduduk Kemusu yang merasa ketakutan akhirnya lari masuk ke hutan

hutani. Pembebasan baru akan dilakukan apabila mereka yang ditangkap mau menandatangani atau mencapjempoli blanko kesediaan menerima uang ganti rugi atas tanah yang terkena proyek Waduk Kedung Ombo.

Bentuk intimidasi lain yang juga dilakukan oleh aparat desa kepada penduduk yang tidak mau menerima uang ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Pemda adalah dengan menakut-nakuti akan *dipetrus*, [17] atau akan dihukum penjara selama 13 tahun. [18]Pada tengah malam ketika orang sudah nyenyak tertidur, pintu-pintu rumah penduduk digedor-gedor oleh petugas BAKORI (Badan Koordinasi Intelijen), penghuninya diminta keluar untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan petugas. Pada akhirnya penduduk dipaksa untuk melakukan cap jempol. Penduduk yang tidak mau menerima uang ganti rugi dipanggil menghadap ke Kodim atau ke Sospol berkali-kali. Mereka dipaksa menerima ganti rugi. Ada pula yang dikenai wajib apel ke Koramil setempat.

Aparat militer beberapa kali juga melakukan latihan perang-perangan di daerah pemukiman, terutama diwilayah di mana para penduduk banyak yang menolak menerima ganti rugi mencoba bertahan. Latihan perang-perangan yang mungkin dimaksudkan agar membuat ciut nyali penduduk ternyata sama sekali tidak membuat penduduk berubah sikap. Perang-perangan dengan melibatkan cukup banyak personil dilakukan oleh militer pada bulan Juni 1988.

Terjadinya berbagai intimidasi, penangkapan dan perlakuan

---

[17] Petrus adalah akronim dari Penembakan Misterius, sebuah upaya penumpasan para penjahat, gali (*jawara*) yang sampai dilancarkan pemerintah Indonesia pada Maret 1983 sampai akhir 1984. Operasi petrus diperkirakan telah mengakibatkan kematian sekitar 4000 sampai 10.000 orang.

[18] Lihat: Kronologi, 15 Juli 1987.

semena-mena lain tersebut menyebabkan semakin banyak LSM yang terlibat dalam upaya pendampingan kepada penduduk yang sedang ditekan. Persoalan ini pula yang kemudian mengangkat Kedung Ombo ke permukaan lewat pemberitaan media massa.

Hambatan Legalitas dan Birokrasi

Tindakan represif secara birokratis juga dilakukan aparat desa dalam rangka memaksa penduduknya untuk menerima uang ganti rugi. Pamong desa tidak memberikan berbagai rekomendasi kepada penduduk yang memerlukan surat-surat seperti surat jalan, surat pindah atau surat-surat sejenis lainnya kepada seluruh anggota keluarga yang bertahan di daerah genangan.

Orang-orang yang membutuhkan persyaratan dari kelurahan sebagai kelengkapan menikah di KUA (Kantor Urusan Agama) setempat, dihambat. Surat yang dibutuhkan sengaja tidak diberikan sebelum ada tanda kesediaan menerima ganti rugi. Hal tersebut menyebabkan banyak di antara warga yang punya hajad menikahkan anak mereka, mengambil jalan nekad. Mereka terus melangsungkan akad pernikahan beserta pestanya dengan hanya memberitahukan pihak kepolisian setempat.

Sedangkan keluarga-keluarga yang takut dengan bakal munculnya berbagai tekanan apabila mereka tetap melangsungkan akad pernikahan anaknya, memilih melaksanakannya di tempat lain. Seringkali pernikahan dilakukan di Solo, Kartasura dan Boyolali di mana para sanak saudara orang-orang Kedung Ombo bertempat tinggal.

Para pemuda yang membutuhkan SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik) sebagai syarat kelengkapan melamar pekerjaan di kota juga dihambat. Penduduk yang tidak mau menerima ganti rugi, yang sebelumnya menduduki jabatan struktural di organisasi desa

seperti RT (Rukun Tetangga), Hansip dan Wanra, juga AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) juga dipecat dari kedudukannya tanpa melalui prosedur organisasi yang bersangkutan.

Akhirnya, orang-orang yang tidak ingin mendapatkan tekanan dari aparat desa dan aparat keamanan sengaja tidak mengurus semua surat-surat yang dibutuhkannya dari pamong desa. Demikian juga dengan warga yang tidak ingin mendapat predikat ET gara-gara menolak menerima ganti rugi. Mereka sengaja tidak mengurus perpanjangan KTPnya; dengan konsekuensi tidak bisa pergi meninggalkan desa mereka atau berkunjung ke desa lain secara leluasa.

Kekecewaan Transmigran Pionir

Transmigrasi bagi penduduk yang tanahnya tergusur oleh proyek pembangunan seringkali menjadi alternatif yang digunakan pemerintah. Demikian pula dengan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat Kedung Ombo. Alternatif bertransmigrasi baru ditawarkan pada 1986. Dan sayangnya aparat tidak memberikan perihal se-luk beluk bertransmigrasi pada masyarakat di awal-awal 1982 tatkala masyarakat diberitahu tentang rencana pembangunan Waduk Kedung Ombo.

Dan pada 1986 ketika tawaran alternatif bertransmigrasi dimunculkan, aparat desa dan keamanan menggunakan cara-cara tekanan dan intimidasi kepada orang-orang yang berpredikat ET, yang tidak punya alternatif lain kecuali menerima rujukan bertransmigrasi yang ditawarkan pemerintah. Akhirnya, setelah bertahun-tahun masyarakat Kedung Ombo menerima perlakukan tidak menyenangkan dari aparat desa dan keamanan, tawaran bertransmigrasi dianggap sebagai suatu upaya penyelesaian terakhir pemerintah untuk mengusir penduduk dari tanah kelahirannya. Transmigrasi bagi masyarakat tidak lagi dilihat sebagai suatu upaya pemerintah yang

dilandasi dengan suatu niat baik.

Opini jelek masyarakat Kedung Ombo terhadap tawaran pemerintah untuk bertransmigrasi semakin bertambah ketika ada warga Desa Bawu yang pulang kembali dari daerah transmigrasi Pematang Panggung, Sumatera Selatan. Pengalaman yang dibawa dua warga Desa Bawu yang menjadi transmigran pionir itu menyebar menjadi cerita di kalangan penduduk. Dari transmigran pionir ini beredar cerita tentang keadaan nyata di lokasi transmigran yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang pernah dijanjikan pemerintah.[19] Masyarakat yakin pada cerita tersebut. Apalagi ketika kedua orang warga Bawu itu mendapat beberapa kali panggilan untuk menghadap ke Kantor Kelurahan, Kantor Transmigrasi dan Kecamatan. Mereka diminta untuk tidak menceritakan keadaan di tanah transmigran yang pernah mereka datangi.

Penduduk yang sama sekali tidak mengetahui perihal program transmigrasi. Banyak yang dihinggapi perasaan khawatir, bahwa nasib mereka di tanah transmigran akan lebih buruk. Sedangkan tanah sisa yang tidak terkena proyek masih memungkinkan untuk digarap dan menghidupi keluarganya.[20] Sedangkan orang-orang yang telah berusia lanjut merasa tidak ada ambisi lagi untuk hidup lebih baik seperti yang ada pada mimpi-mimpi yang dijanjikan oleh program transmigrasi. Mereka ingin menghabiskan masa tua mereka dengan menikmati apa yang telah didapatkan selama ini. Mereka bersikap pasrah diri kepada Yang Kuasa, jika mereka dikehendaki hidup, mereka percaya akan mendapatkan rejeki hidup.[21]

[19] Lihat: Kronologi, 13 April 1987.

[20] LPTP dan Pusat Penelitian UNS. ***Laporan Penelitian Aksi Restrukturisasi Sosial Pada Masyarakat di Sekitar Genangan Waduk Kedung Ombo***, Surakarta, 1989.

[21] Ibid

Harga Diri Terinjak-injak

Orang-orang di belahan utara Jawa Tengah yang termasuk dalam Trah Serang dan Trah Gagatan di masa lalu pernah melakukan perlawanan secara terorganisasi melawan kolonial Belanda mulai Abad XVII dan berpuncak pada saat terjadinya Perang Jawa.

Nenek moyang penduduk di wilayah yang sekarang menjadi calon daerah genangan Waduk Kedung Ombo ini sebenarnya tidak pernah tunduk kepada kolonial Belanda ataupun raja Jawa yang punya ikatan dengan Belanda. Ketika terjadi Perjanjian Giyanti di tahun 1755, tokoh mereka Panembahan Natapraja sebenarnya tidak pernah mau patuh kepada Kesunanan Surakarta ataupun pada Kesultanan Yogyakarta. Panembahan Natapraja yg kecewa terhadap keberhasilan Belanda dalam membuat perjanjian yang sebenarnya merugikan kaum pribumi itu memilih kembali ke bumi Serang dan mendirikan kantong-kantong perlawanan.

Ketika terjadi Perang Jawa, rakyat Serang dan Gagatan banyak yang menjadi pasukan khusus dari keseluruhan pasukan perang Pangeran Diponegoro. Dan atas jasa rakyat di daerah yang termasuk dalam wilayah Keraton Surakarta itu, pihak keraton memberikan tanah-tanahnya secara bebas kepada rakyat untuk digarap dengan kewajiban bagi hasil. Pihak keraton memperoleh sepertiga bagian dan disetorkan ke Lumbung Layur (Surakarta) dan duapertiga bagian menjadi milik rakyat penggarap. Pemberian tanah milik keraton kepada masyarakat sepenuhnya ini dilakukan pada 1917 berdasarkan petunjuk pembagian tanah (Niti Bantala) dari Sri Sunan Paku Buwana (Ratu Duksana).[22]

Para prajurit yang gugur di jaman Perang Jawa banyak yang

[22] ibid

dimakamkan di sekitar desa-desa di daerah Serang dan Gagatan. Juga di Kulon Progo di sekitar makam Nyi Ageng Serang. Artinya, di daerah Kedung Ombo banyak terdapat makam para sesepuh masyarakat yang sangat dihormati, bahkan dikeramatkan.[23] Makam-makam tersebut tidak pernah mendapat perhatian serius dari pemerintah. Aparat pelaksana pembangunan Waduk kedung Ombo tidak pernah mengupayakan penyelamatan makam-makam leluhur masyarakat setempat yang dulu pernah berjasa dalam berperang melawan kolonial Belanda. Bagi penduduk Kedung Ombo, cara-cara aparat dalam mengupayakan pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan waduk merupakan duplikasi dari apa yang pernah dilakukan oleh kolonial Belanda di jaman nenek moyang mereka.

Ada beberapa semboyan yang sering dikatakan sebagai "filosofi Jawa" yang masih sering terdengar diucapkan oleh orang-orang Kedung Ombo seperti ***sedhumuk bhatuk senyari bumi ditohi tekan pati, mangan ora mangan asal ngumpul.*** Hal tersebut menunjukkan masih adanya upaya penolakan terhadap setiap kekuatan yang mengancam keseimbangan hidup dan tatanan hidup yang ada di masyarakat.

Semboyan ***sedhumuk bhatuk senyari bumi ditohi tekan pati*** dulunya sengaja dimunculkan oleh rakyat 'Jawa' untuk mengobarkan semangat dalam mempertahankan setiap jengkal tanahnya dalam

[23] Hubungan dengan kebiasaan orang Jawa yang punya tradisi menghormati arwah leluhur seperti upacara *slametan, nyadran, bersih desa* dan sebagainya ataupun pemujaan terhadap arwah dari orang yang ditokohkan yang dianggap bisa memberikan bimbingan spiritual. Hubungan juga dengan adanya kepercayaan tentang pembalasan yang bersifat non manusiawi (*walat*) yang akan dihadapi oleh seseorang yang melakukan perbuatan durhaka/menghina orang tua atau mereka yang telah meninggal dunia. Lihat: Niels Mulder, ***Pribadi dan Masyarakat Di Jawa***, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta 1985, hal 46.

peperang an melawan kolonial Belanda. Sedangkan "filosofi" ***mangan ora mangan asal ngumpul*** seringkali oleh banyak pihak, termasuk oleh Belanda di jaman dahulu, ditanggapi dengan sinisme yang ditafsirkan sebagai sebuah filosofi dari kaum pribumi (Jawa) yang pemalas.[24]

"Filosofi" ***mangan ora mangan asal ngumpul*** sebenarnya muncul tatkala terjadi peperangan yang berlarut-larut antara raja Jawa yang berniat mengusir Belanda dari 'tanah Jawa' melawan kolonial Belanda yang dibantu beberapa Pangeran Jawa. Peperangan tersebut mengakibatkan penderitaan pada rakyat jelata, kemiskinan, wabah penyakit dan kekurangan pangan. Rakyat sipil yang tidak mampu berbuat apa-apa lagi, hanya bisa bersikap pasrah.

Pada saat inilah para kerabat enggan berpisah untuk mencari selamat sendiri-sendiri, karena di mana-mana situasinya sama saja. Mereka bertekad untuk terus berkumpul, meskipun untuk itu berarti mereka bakal *ora mangan* karena persediaan pangan yang tinggal sedikit akan cepat habis bila dimakan oleh banyak orang. Dalam anggapan rakyat yang sedang menderita di masa itu, persatuan jauh lebih penting dan menguntungkan diban dingkan persoalan makanan terutama untuk memperkuat semangat dan optimisme untuk terus hidup dan menghadapi musuh serta marabahaya secara bersama-sama. Optimisme hidup dan ancaman kematian yang datang hanya bisa dihadapi dengan cara dihadapi secara bersama dan saling tolong.

[24] Aparat Pemda kelihatannya sengaja membesar-besarkan "filosofi Jawa" inidan memberikan komentar yang sinis dengan mengatakan: "Seharusnya di jaman teknologi ini orang-orang harus beranggapan tidak perlu berkumpul asalkan bisa makan". Dengan munculnya isyu yang ketinggalan jaman tersebut, opini masyarakat terbelokkan dari masalah yang lebih substansial, yaitu rendahnya besar ganti rugi dan dipakainya cara-cara kekerasan dalam proses pembebasan tanah.

Di calon daerah genangan Waduk Kedung Ombo bermunculan kembali dengan subur semboyan-semboyan atau "filosofi" yang dulu pernah ada. Terutama tatkala penduduk merasa terancam tindak-tanduk dan sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh Tim Khusus yang dibentuk untuk menangani masalah pembebasan tanah yang macet.[25] Pada masa ini, tindakan aparat desa yang seringkali lebih menakutkan daripada oknum polisi atau militer.[26]

Demikian juga dengan kenangan-kenangan indah tentang kebesaran dan kepahlawanan nenek moyang orang Kedung Ombo. Nostalgia "masa lalu yang indah" yang muncul di tengah suasana keprihatinan tersebut, menambah semangat dan tekad untuk bertahan dan melawan bila perlu, seperti halnya yang pernah dilakukan orang-orang Kedung Ombo. Penduduk di daerah genangan terlanjur merasa diinjak-injak harga dirinya dan tidak diperlakukan sebagaimana layaknya seorang manusia.

Terganggunya Tatanan Tradisional dan Kembali Suburnya Berbagai Mitologi

Penduduk Kedung Ombo yang lebih dari separuhnya hidup bertani adalah orang-orang yang sangat menghargai tanah dan hak-hak

[25] Tim yang dibentuk semenjak bulan oktober 1987 ini merupakan gabungan unsur Kepolisian, Kodim, Kejaksaan, Sospol, dan BAKORI (Badan Koordinasi Intelejen)

[26] Aparat desa di Kedung Ombo banyak yang tidak populer di mata rakyatnya, karena sering menggunakan intimidasi bahkan kekerasan untuk menekan warga agar mau menerima ganti rugi. Konon mereka juga mengalami tekanan dari atasannya. Sebagai contoh adalah ketika seorang Kepala Desa menjawab pertanyaan penduduk yang menanyakan ada-tidaknya surat perintah dari kantor Agraria, menjawab dengan kata-kata: *"Wong cilik kok takon surat perintah, njaluk dibedil piye?"*. Lihat: Suara Merdeka, 19 April 1988.

milik atas tanah sebagaimana lazimnya masyarakat agraris. Tanah adalah sumber garapan sekaligus penghidupan utama seorang petani yang biasanya diwariskan secara turun-temurun. Tanah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hidup seorang petani seringkali menjadi penentu status utama seseorang dalam kehidupan sosial pedesaan. Ada beberapa hirarki status petani yang juga dikenal di Kedung Ombo seperti petani pemilik (***kuli kenceng***), penyewa tanah (***kuli karang kopek*** atau ***kuli ngindung***) dan buruh tani atau pekerja upahan (***kuli ngindung tlosor, manumpang*** atau ***bujang***).

Penduduk Kedung Ombo yang mayoritas merupakan masyarakat agraris langsung menolak ketika tiba-tiba mereka disodori sejumlah uang ganti rugi oleh aparat pemerintah dan diminta untuk meninggalkan tanahnya yang akan digunakan untuk keperluan proyek Waduk Kedung Ombo. Memang ada sejumlah pemduduk yang menyatakan tekadnya untuk tetap tinggal di tanah-tanah yang telah memberi mereka kehidupan secara turun-temurun, sampai air datang menggenangi rumahnya. Tapi kebanyakan penduduk menyatakan kesediaannya untuk meninggalkan tanahnya guna kepentingan proyek, asalkan pemerintah menyediakan tanah pengganti di sekitar lokasi waduk. Luas tanah harus sepadan dengan tanah yang pernah mereka miliki sebelumnya. Ganti rugi berupa uang tidak bisa diterima oleh penduduk yang merasa punya ikatan sakral dengan tanah yang dianggap sebagai ***wutah getih*** (tumpah darah). Lokasi di dekat waduk yang diinginkan penduduk juga adalah lokasi yang paling dekat dengan tanah mereka semula. Langkah pemerintah untuk mengganti tanah penduduk dengan sejumlah uang ganti rugi dianggap sebagai suatu penghinaan.

Sebagaimana masyarakat agraris umumnya, di Kedung Ombo juga dikenal pola hubungan ***kawula-gusti***, di mana stratifikasi sosial bisa didasarkan pada lamanya seseorang bermukim di desa. Stat

tertinggi diberikan kepada keturunan-keturunan pembangun desa yang lazim disebut sebagai *cikal-bakaling desa,*[27] yang biasanya banyak menjadi pemimpin informal maupun formal di desa. Ketika terjadi proses pembebasan tanah di Kedung Ombo tatanan organisasi tradisional yang berpola *kawula-gusti* ini runtuh. Para pemimpin formal (aparat desa) ikut menekan penduduk agar menerima ganti rugi dengan berbagai cara.[28]

Sedangkan para pemimpin informal yang menjadi tokoh panutan penduduk setempat banyak yang memilih bertahan di daerah genangan dan menunjukkan simpati kepada penduduk yang mengalami tekanan. Sikap para tokoh panutan tersebut banyak diikuti oleh masyarakat di calon daerah genangan, yang hanya akan pindah bila *sang gusti* (dalam hubungan kawula-gusti telah pindah atau mengajak mereka untuk pindah).[29]

Orang-orang Kedung Ombo juga punya semacam kecemasan bahwa kepindahan mereka bakal menyebabkan terputusnya hubungan kekerabatan yang berada dalam suatu ikatan tradisional. Sebuah ikatan yang selama ini mereka pegang secara kuat.

Kecemasan terhadap bakal hancurnya tatanan masyarakat yang ada, ditambah intimidasi aparat, munculnya kefrustasian dan

[27] Stratifikasi sosial juga ditentukan dari status dan peranan keluarga-keluarga yang telah lama menetap (*sikep ngarep*) yang dapat dibedakan dengan nyata dari mereka yang datang belakangan (*sikep buri*). Lihat: Sartono Kartodirdjo, *op cit.*, hal.41.

[28] Tapi ada juga aparat desa yang tidak mau menekan penduduk. Pada saat dimulai pelaksanaan proyek Waduk Kedung Ombo, ada beberapa aparat desa yang mengundurkan diri dari jabatannya, misalnya saja Kepala Desa Gilirejo, Jaswadi. Langkah pengunduran diri Jaswadi di tahun 1986 tersebut diikuti oleh Tholib (Sekretaris Desa), Cokro Prawiro (Kepala Dusun I) dan Yoso Suwarno (Kepala Dusun II)

[29] Lihat: LPTP Dan Pusat Penelitian UNS, *op cit.*, hal.17

beberapa kesulitan lain yang membuat kehidupan penduduk menjadi penuh keprihatinan, akhirnya memunculkan kembali harapan-harapan milenarian. Sebagian masyarakat yang percaya akan datangnya jaman kemakmuran dan seorang Ratu Adil. Orang-orang Kedung Ombo tampaknya mencocok-cocokan kembali keadaan yang mereka alami dengan *piweling* nenek moyang dan Jangka Jayabaya tentang akan adanya Jaman Kesusahan (Jaman Edan) yang mendahului datangnya Jaman Kemakmuran.[30] Untuk itu mereka harus bersikap sabar, *eling* dan *waspada* dalam menghadapi jaman edan di mana terjadi perang berandal, ada orang memangsa orang. Semuanya memang telah tersuratkan.

Orang-orang Kedung Ombo dengan antusias menunggu bakal terealisasinya ramalan di mana ada ikan bader yang bisa memakan *manggar*. Mereka menunggu Jaman Kemakmuran yang telah ditunggu-tunggu, yang konon akan membawa kesejahteraan bagi rakyat kecil, dengan cara bertahan di calon daerah genangan. Mereka tidak perlu merasa cemas dengan bakal datangnya air. Pangeran Samudra di Kemukus dan Kyai Tlingsing di Nglempong serta beberapa tokoh yang makamnya dikeramatkan oleh penduduk dipercaya akan melindungi dan menyelamatkan orang-orang Kedung Ombo dari ancaman air Waduk Kedung Ombo.

Adanya kepercayaan-kepercayaan dan kembali tumbuhnya mitologi membuat penduduk di calon lokasi genangan bersikap tenang-tenang saja. Mereka tidak berupaya untuk mengurus ganti

[30] Hal ini paralel dengan ramalan tentang Ratu Adil yang kerap kali mencakup sumber-sumber gelagat buruk kepada perubahan-perubahan yang sedang berlangsung di bawah kekuasaan kolonial seperti munculnya kereta-kereta tanpa kuda, pungutan pajak pada setiap bidang tanah, diabaikannya tempat-tempat suci, serta meluasnya roda-roda besi di seluruh Jawa. Yang hampir seluruhnya menunjukkan kepada perubahan dengan tanda-tanda dari suatu keadaan merosot (*malaise*). Lihat: Sartono Kartodirdjo, op cit., hal. 56.

rugi atas tanahnya yang akan dipakai untuk keperluan proyek. Bahkan ada sejumlah orang di Kedung Ombo yang menolak ganti rugi, bukan hanya karena jumlahnya yang kecil, tapi juga keyakinan bahwa dengan menerima uang ganti rugi mereka akan menjadi miskin. Mereka ingat pada *piweling* para orang tua di jaman dulu.

Manipulasi Pemberitaan

Sikap tidak berterus terang dengan menutup-nutupi realitas sebenarnya, menyangkut permasalahan pembangunan yang terjadi di Kedung Ombo, yang ditunjukkan oleh aparat Pemda dan pihak-pihak yang terlibat pelaksanaan pembangunan Waduk Kedung Ombo lewat media massa pada akhirnya hanyalah menambah permasalahan. Timbul opini jelek masyarakat secara luas. Banjir simpati justru berdatangan kepada orang-orang yang bertahan di calon daerah genangan.

Upaya untuk menutupi ketidakberesan proses pembebasan tanah, ketidakadilan jumlah uang ganti rugi yang diberikan untuk orang yang memiliki luas tanah sama sekali tidak berhasil. Sedangkan pengecapan KTP-KTP penduduk dengan tanda ET/OT serta berbagai hambatan dan intimidasi yang dilakukan aparat dalam upaya pengosongan areal genangan semakin menjadikan model pembangunan Waduk Kedung Ombo sebagai sebuah polemik berkepanjangan.

Lewat berbagai media massa, pemerintah daerah memberitakan bahwa 95 persen permasalahan ganti rugi telah beres. Peminat transmigrasi terus membludak, melewati target yang telah ditentukan. [31] Bupati Sragen H Suryanto PA tidak mau kalah. Ia

[31] Suara Pembaruan, 28 Desember 1988.

menyatakan bahwa pelaksanaan pembebasan tanah untuk proyek Waduk Kedung Ombo di wilayah Sragen telah beres dan tidak ada masalah. Penduduk Sragen yang mendaftar untuk ikut bertransmigrasi dinyatakan telah mencapai 2.324 KK.[32]

Upacara pelepasan transmigran asal Kedung Ombo ke Bengkulu yang penuh dengan keharuan diberitakan secara besar-besaran. Jumlah penduduk yang bertahan di calon daerah genangan direduksi menjadi hanya 400 KK. [33] Pemda Boyolali juga menyatakan rasa kesal, karena merasa telah memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan kepada penduduk di calon lokasi genangan. Namun hal ini malah menyebabkan penduduk bersikap manja dan muncul banyak masalah.[34]

Hal tersebut membuat pihak-pihak yang sebetulnya bisa membantu menyelesaikan persoalan yang tangah terjadi di Kedung Ombo menjadi enggan membantu pemerintah. Para aktivis LSM, intelektual, ilmuwan dan pekerja sosial bahkan bersimpati kepada rakyat Kedung ombo. Mereka tahu, kondisi yang ada justru sebaliknya.

Realitas di Kedung Ombo sendiri telah menjadi semacam rahasia umum yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Pemberitaan tentang selesainya masalah ganti rugi, tidak pernah adanya pemerasan dan tuduhan PKI di Kedung Ombo dan tidak pernah adanya hambatan dalam pembangunan fisik waduk malah mencerminkan keadaan yang sebaliknya.

Awalan Yang Salah

Berbagai penyebab munculnya banyak masalahdalam pelaksanaan pembangunan Waduk Kedung Ombo yang telah disebutkan mung-

[32] Suara Merdeka, 15 Pebruari 1988.

[33] Suara Merdeka, 8 Desember 1988.

[34] Wawasan, 15 Desember 1988.

kin belum cukup untuk menggambarkan secara lengkap hal apa yang terjadi di Kedung Ombo. Banyak hal yang serba kompleks dan saling berkaitan satu dengan yang lain. Namun pada intinya persoalan muncul karena rakyat yang akan digusur tidak pernah diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Sebuah hal terpenting yang mungkin tidak pernah diperhitungkan sebelumnya oleh pemerintah dan pelaksana pembangunan. Dengan demikian kepentingan penduduk yang digususr tidak pernah dapat diperhitungkan secara tepat dan benar. Penduduk yang tanahnya terkena proyek juga tidak memiliki suatu jaminan terhadap masa depan dan kesejahteraan yang lebih baik.

Munculnya berbagai masalah dalam pelaksanaan pembangunan Waduk Kedung Ombo yang diakibatkan cara-cara pendekatan yang salah, ternyata kemudian juga tidak dikoreksi secara cepat dan benar. Akibatnya, persoalan semakin besar. Terutama ketika jadwal penggenangan telah semakin dekat. Pemerintah mencoba mengatasi para calo yang semakin banyak bergentayangan di Kedung Ombo dan penduduk yang membandel dengan mengambil kebijakan untuk mengkonsinyasikan uang ganti rugi pada pengadilan negeri setempat. Namun upaya tersebut tidak banyak menolong, karena penduduk memang tidak berniat mengambil uang ganti rugi.[35]

Setelah gagal menekan penduduk agar bersedia menerima ganti rugi dengan berbagai cara aparat memekai cara-cara baru. Seperti tuduhan anti pembangunan, anti Pancasila, dan PKI. Aakhirnya pihak aparat mengalihkan tekanan ke-pada lembaga-lembaga dan aktivis LSM yang melakukan pendampingan kepada

[35] Kebijakan yang diberlakukan semenjak tanggal 7 Desember 1988 tersebut mencerminkan tidak mengertinya aparat terhadap aspirasi penduduk yang sebenarnya

orang-orang Kedung Ombo. Beberapa aktivis LSM yang dianggap menjadi sebab munculnya pembangkangan di Kedung Ombo mendapat panggilan dari aparat militer. Mereka dituduh telah menghasut masyarakat dan melemparkan berbagai isyu yang merugikan pemerintah.

Sementara itu, penduduk yang ketakutan dengan suasana teror yang mereka rasakan di Kedung Ombo, beramai-ramai mengungsi ke beberapa kota terdekat. Mereka bersembunyi ke kantor-kantor beberapa lembaga, LSM atau rumah-rumah orang yang bersimpati kepada mereka. Orang-orang Kedung Ombo yang lari mengungsi bahkan seringkali bermalam di tengah alun-alun kota di Surakarta.

Persoalan Kedung Ombo semakin ramai ketika terbongkar kasus manipulasi uang ganti rugi oleh aparat desa. Terjadi ketidaksamaan besar ganti rugi yang diberikan kepada penduduk yang memiliki luas tanah sama. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat atau cukup dekat dengan pamong desa memperoleh ganti rugi yang sangat besar, sebaliknya yang tidak cukup dekat dengan pamong mendapat ganti rugi kecil disertai beberapa macam pungutan.[36]

Juga terbongkar kasus pemanipulasian oleh aparat desa yang jumlahnya meliputi puluhan juta dengan cara menghidupkan barang yang telah mati. Yaitu kembali mengambil uang ganti rugi dari pemilik dengan cara mengganti nama pemilik semula. Dengan demikian sebidang tanah mendapatkan ganti rugi dua kali.[37] Masalah penyunatan uang ganti rugi oleh aparat desa dan penarikan kembali uang ganti rugi oleh Tim Pembebasan Tanah dikarenakan adanya kesalahan teknis, serta penambahan areal pembebasan tanah karena

[36] Suara Merdeka, 15 Desember 1988

[37] Suara Merdeka, 15 Desember 1988

adanya kesalahan pematokan, semakin melengkapi berita-berita tentang ketidakberesan yang ada di Kedung Ombo.

Pihak pemerintah sendiri menganggap belum pindahnya orang-orang di calon daerah genangan sebagai sebuah masalah kecil. Menurut pemerintah, begitu air mulai menggenangi rumah-rumah yang ada di daerah genangan, para penghuninya pasti akan segera pergi mengungsi untuk menyelamatkan harta bendanya masing-masing. Untuk itu, tidak bisa tidak adalah penggenangan harus segera dilakukan.

Meskipun demikian, pemerintah sempat was-was juga melihat tekad penduduk untuk bertahan di daerah genangan apabila penggenangan dilaksanakan. Untuk itu Menteri PU membuat instruksi agar masalah pembebasan tanah bisa terselesaikan demi kredibilitas bangsa.[38] Instruksi Menteri PU tersebut kemudian mendapat tanggapan secara serius dari Gubernur Jateng HM Ismail dan Panglaksusda Jateng DIY Mayjen TNI Setiyana.[39]

Sedangkan Bupati Boyolali M Hasbi mengeluarkan surat edaran bernomor 611.1/02909 tertanggal 10 Nopember 1988. Ia mengingat masyarakat Kecamatan Kemusu agar segera meninggalkan tempat tinggalnya masing-masing atau akan menghadapi tindakan tegas dari aparat jajaran Pemda Dati II Boyolali. Peringatan ini dikeluarkan tanpa pernah ada penjelasan tindakan tegas dan tindakan pengamanan macam apa yang akan diambil.

Tatkala pemerintah sadar bahwa asumsi dan prediksinya selama ini ternyata salah, keadaan sudah terlambat. Menjelang peresmian penggenangan Waduk Kedung Ombo, ternyata pelaksanaan ganti rugi masih belum beres. Masih ada sekitar 1.900 KK yang belum keluar dari calon wilayah genangan. Cara-cara pendekatan dan penanganan aparat yang salah selama bertahun-tahun telah membentuk orang-orang Kedung Ombo, yang sebagian besar adalah petani, menjadi orang-orang yang keras kepala alias pembangkang.

Ketergesaan Peresmian Penggenangan

Target Pemda Boyolali untuk menyelesaikan secara tuntas masalah pembebasan tanah yang terkatung-katung sekali lagi harus mundur. Dari akhir Maret menjadi akhir Juni. Dan target bulan Juni 1988 yang sebenarnya tak bisa ditawar lagi, ternyata mundur lagi tanpa kepastian.

Target penyelesaian pembebasan tanah penduduk tersebut sebenarnya berkaitan dengan dana pinjaman luar negeri dari Bank Exim Jepang, yang konon akan membekukan dana pinjamannya untuk pelaksanaan pembebasan tanah apabila tidak dapat selesai pada akhir Maret 1988.[40] Untuk wilayah Kabupaten Sragen, meskipun masih banyak ketidakberesan dan terjadi ketidakpuasan pen-

[38] Kedaulatan rakyat, 17 Pebruari 1988.

[39] Menanggapi isntruksi Menteri PU Radinal Mochtar, Gubernur Jateng HM Ismail mengatakan: "Mungkin masih ada orang yang masih belum mau dibayar, namum Pemda tetap akan mengupayakan jala baik agar tidak merugikan rakyat. Iklim sejuk yang dicanangkan pemerintah saat ini tetap berlaku kepada pemilik tanah yang terkena proyek Waduk Kedung Ombo. Namun sebagai bangsa yang mengenal Pancasila, sebaiknya para pemilik tanah tersebut juga menyadari betapa pentingnya proyek ini bagi saudara-saudaranya. Jangan sampai sekelompok kecil masyarakat merugikan rakyat banyak. Apalagi sampai mempertaruhkan nama baik bangsa." (Suara Merdeka, 19 Pebruari 1988). Sedangkan Mayjen TNI Setiyana memerintahkan para Dandim untuk bekerjasama dengan apa-rat kabupaten, kejaksaan dan muspida lainnya untuk memberikan penyuluhan di lapangan.

[40] Pihak pelaksana pembangunan juga mengambil kebijakan yang sama. Penduduk diberi kesempatan untuk mengambil ganti rugi hingga akhir Maret 1988. Lihat: Suara Merdeka, 22 Juni 1988. Namun pada kenyataannya batas waktu tersebut diperpanjang dan kemudian diubah lagi dengan sistem kosinyasi.

duduk yang tanahnya terkena proyek, secara resmi dianggap telah tuntas.[41]

Meskipun pemerintah bertekad untuk tidak melakukan penundaan penggenangan lagi ataupun menaikkan uang ganti rugi dan menyatakan tidak akan memaksa penduduk untuk pindah keluar dari calon genangan, aparat pelaksana masih mencoba melakukan upaya akhir untuk mengosongkan daerah genangan. Berbagai upaya akhir yang dicoba dilakukan aparat pemerintah daerah tidak lagi menggunakan tekanan atau intimidasi.[42] Mereka mendekati penduduk yang belum mau pindah dari daerah genagan dengan mendatangi penduduk dari rumah ke rumah untuk dibujuk agar bersedia pindah. Aparat penerangan membuat pertunjukan rakyat seperti ketoprak dengan titipan pesan-pesan pembangunan. Pihak Pemda membuat selebaran-selebaran dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, pengumuman dengan mobil-mobil keliling yang berisi him-

---

41) Penduduk di wilayah Sragen pernah mencoba mengangkat kasus pembebasan tanah dengan menuntut Kanwil Departemen PU dan Pemda Tingkat I Jateng lewat bantuan LBH. Namun terjadi hambatan-hambatan seperti undangan sidang yang takpernah sampai kepada penduduk Sragen dan beberapa tekanan lain yang mengakibatkan persidangan tersendat-sendat. LBH Semarang pada akhirnya memutuskan untuk mencabut gugatannya karena penduduk Kedung Ombo di wilayah Sragen yang menjadi kliennya dinilai memberikan keterangan yang tidak benar. Lihat: Suara Merdeka, 26 Desember 1987. Penduduk di wilayah Sragen juga pernah meminta bantuan LBH Jogja, DPC PDI, DPD PDI dan DPP PDI

42) Tapi upaya aparat yang berkesan simpatik ini hanya berlangsung sebentar, yaitu antara pertengahan bulan Nopember 1988 sampai dengan peresmian penggenangan. Semenjak peresmian penggenangan, di mana Kedung Ombo dinyatakan sebagai daerah tertutup, kembali tekanan dan intimidasi dipergunakan

bauan kepada penduduk yang belum mengambil uang ganti rugi agar segera mengurus dengan jalan menghubungi perangkat desanya masing-masing. Aparat juga meminta kepada penduduk yang telah mengambil uang ganti rugi agar segera pindah.

Pada bulan Nopember, pihak proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo mengeluarkan pemberitahuan bernomor 1348/UM/KDO/XI/88. Pengumuman itu menghimbau kepada penduduk yang berada di areal genangan dalam batas patok kuning (daerah bahaya) dan kuning strip merah (daerah bahaya I) agar segera meninggalkan lokasi paling lambat akhir Nopember 1988. ALasannya, Waduk Kedung Ombo akan diisi tanggal 12 Januari 1989. Papan-papan besar yang memuat pemberitahuan tersebut dibuat dan dipasang di jalan-jalan strategis, di setiap pertigaan dan mulut desa.

Setelah upaya akhir untuk memindahkan penduduk dari daerah genangan tidak banyak membuahkan hasil, Muspida Boyolali membentuk Tim Khusus yang kemudia mengerahkan dua belas orang jurusita dari Pengadilan Negeri Setempat. Para jurusita tersebut ditugaskan untuk menghubungi dan meminta penduduk agar bersedia menerima ganti rugi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun sekali lagi, usaha tersebut tidak banyak membuahkan hasil.

Pihak Komisi A DPRD Tingkat I Jateng yang melakukan kunjungan kerja ke lokasi proyek Waduk Kedung Ombo pada tanggal 14 Desember 1988 menemukan data baru. Mereka terkejut dengan masih adanya 941 KK yang berada di calon lokasi genangan.[43] Komisi A DPRD Tingkat I Jateng meminta agar pemerintah segera

---

43) Data temuan Komisi A DPRD Tingkat I Jateng ini sebetulnya meleset dari jumlah sebenarnya, di mana penduduk yang masih bertahan di lokasi genangan sebenarnya masih meliputi jumlah sekitar 1.900 KK. Media massa menyebutkan jumlah angka yang berbeda-beda, misalnya ada yang menyebut 1.698 KK (Kompas, 4 Januarai 1989) dan ada yang menyebut jumlah 1.916 KK (Wawasan, 5 Januari 1989).

mendirikan pos komando terpadu beserta barak-barak penampungan dan perahu karet. Seruan pihak DPRD ini ditanggapi oleh pihak Pemda lewat rapat tanggal 10 Januari 1989 di Makodim Boyolali. Rapat memutuskan untuk membentuk Satuan Tugas Pengamanan (Satgaspam) 0724 di bawah koordinasi Dandim Boyolali, Letkol Drajat Budi Santoso.

Tanpa sebab-sebab yang jelas, tanggal 12 Januari 1989 yang menurut rencana akan dilakukan peresmian penggenangan Waduk Kedung Ombo, ternyata ditunda hingga tanggal 14 Januari. Menurut sumber resmi, penundaan tersebut dikarenakan tidak sinkronnya jadwal acara Gubernur Jateng HM Ismail dengan menteri PU Ir Radinal Mochtar. Sedangkan isyu yang muncul di daerah genangan, penundaan itu disebabkan penduduk yang tetap enggan pindah. Terutama akibat masih adanya beberapa persoalan lapangan yang mengganjal. Di kalangan masyarakat, penundaan tersebut sempat menimbulkan berbagai spekulasi tentang proyek bernilai ratusan milyar tersebut.

Penduduk di daerah yang bakal tergenang menyambut berita penundaan upacara penutupan pintu air waduk dengan berjingkrak-jingkrak. Mereka, yang tampaknya tidak mengetahui bahwa penggenangan tersebut hanya ditunda dua hari itu, merasa gembira dan optimis bahwa peresmian penggenangan memang akan ditunda sampai masalah ganti rugi beres.

Tetapi harapan penduduk agaknya sia-sia saja, karena tanggal 14 Januari 1989 pukul 09.55 tepat, Menteri PU Ir Radinal Mochtar didampingi Gubernur Jateng HM Ismail, Ketua DPRD Jateng Ir Soekorahardjo, Ketua Komisi V DPRRI dan tiga bupati yang daerahnya terkena proyek pembangunan waduk, melakukan peresmian penggenangan. Peresmian dilakukan dengan cara menimbun tubuh bendungan dan pelepasan balon, yang kemudian dilanjutkan dengan

penekanan tombol sebagai tanda ditutupnya pintu terowongan waduk oleh Gubernur HM Ismail.

Dalam sambutannya, Menteri PU Ir Radinal Mochtar menyatakan terima kasih kepada pemerintah atas keberhasilan pembangunan proyek Kedung Ombo yang telah memakan waktu cukup lama dan pengorbanan sangat besar. Hal itu telah membuktikan mantapnya jalinan koordinasi Pemda Jateng dan jajaran di bawahnya, dengan pihak Proyek Jratunseluna. Sedangkan Gubernur Jateng HM Ismail mengatakan, bahwa sudah sepantasnya apabila para penduduk dari kabupaten Boyolali, Sragen, dan Grobongan yang termasuk daerah genangan Waduk Kedung Ombo, yang telah merelakan atau mengorbankan tanahnya digelari "Pahlawan Pembangunan".

Beberapa wartawan yang mencoba meliput peresmian penggenangan ditangkap oleh petugas keamanan, karena dianggap memasuki lokasi tanpa membawa tanda pengenal yang dikeluarkan panitia. Sedangkan beberapa wartawan yang mencoba menelusuri daerah genangan untuk mengetahui perkembangan situasi terakhir, mendapat peringantan. Dandim Boyolali, Letkol Drajat Budi Santoso, selaku Komandan Satgaspam Waduk Kedung Ombo memberlakukan daerah genangan sebagai daerah tertutup semenjak peresmian penggenangan. Setiap orang yang hendak memasuki lokasi genangan harus memperlihatkan surat keterangan yang hanya dikeluarkan Korem 074/Warastratama Surakarta.

Banyak yang menilai, keputusan pemerintah untuk melakukan peresmian penggenangan tanggal 14 Januari 1989 itu sebagai suatu keputusan yang tergesa-gesa, terlepas dari kemungkinan utang dan malu yang harus disandang pemerintah Indonesia apabila terjadi penundaan lagi. Kesan tergesa-gesa tampak dari masih bertahannya kurang lebih 1.900 KK di lokasi genangan. Juga belum siapnya daerah penerima transmigrasi Muko-muko, Kabupaten

Bengkulu Utara. Serta pemukiman alternatif di Kayen, kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali yang dipersiapkan untuk menampung orang-orang Kedung Ombo seandainya semua menyatakan kesediaannya untuk pidah.

Masalah dan Keadaan Daerah Pemukiman Kayen

Salah satu upaya terobosan yang dicoba dilakukan pemerintah bersama dengan GPS yang dirintis semenjak akhir 1987, adalah menyediakan tempat pemukiman baru di Desa Kayen, Kecamatan Juwangi, 65 Km sebelah barat laut Boyolali, berhimpitan dengan wilayah Kabupaten Grobongan. Lokasi Desa Kayen berada di atas bukit yang cukup terpencil. Transportasi menjadi masalah bagi penduduk yang menjadi pegawai dan bekerja di laur lokasi tersebut.[44] Wilayah Kayen yang mempunyai luas 50 Ha merupakan tanah milik Perhutani yang berupa padang *(oro-oro)*

Pada Desa Kayen inilah pemerintah pada saat terakhir menaruh harapan mencoba menarik perhatian orang-orang Kedung Ombo yang belum mau berubah pendiriannya untuk pindah. Caranya adalah membangun dua pasar, satu unit gedung SD, Puskesmas, tempat ibadah, sumur bor dan berbagai sarana lainnya. Tanah-tanah di Kayen ditawarkan secara obral kepada masyarakat Kedung Ombo dengan harga Rp 160,- per meter persegi, termasuk dengan biaya pembuatan sertifikatnya. Setiap KK mendapat batasan hanya boleh

[44] Biaya transportasi ke Kayen cukup mahal. Dari kota Boyolali yang hanya berjarak 65 Km dibutuhkan Rp 1.100,- untuk ongkos kendaraan yang hanya sampai ke kota Kecamatan Juwangi, selanjutnya harus berjalan kaki sejauh 5 Km. Lihat: Kompas, 14 Januari 1989.

memiliki tanah 1000 meter persegi.[45] Harga yang murah ini oleh pemerintahsengaja dibuat lebih rendah dari uang ganti rugi pembebasan tanah masyarakat di Kedung Ombo, dengan maksud agar dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat yang tanahnya terkena proyek Waduk Kedung Ombo.

Tapi agaknya gambaran kecerahan Desa Kayen yang sengaja diciptakan pemerintah tidak berhasil menarik minat orang-orang yang bertahan di lokasi genangan. Sampai menjelang penggenangan belum ada 10 KK yang memilih Kayen sebagai tempat pemukiman baru. Tapi dalam pemberitaan sebaliknya. Menurut Pemda Boyolali telah ada 100 KK yang mendaftarkan diri untuk tinggal di Kayen.[46]

Permasalahan utama dari tidak menariknya Desa Kayen adalah buruknya kondisi tanah bagi sebuah usaha pertanian. Tanah Kayen sangat keras (cadas) dan mengandung kapur, serta tergolong langka air. Percobaan yang dilakukan pihak proyek untuk membuat sumur bor ternyata sia-sia. Penggalian yang dialkukan hingga mencapai kedalaman 127 meter belum bisa menemukan sumber air. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah sementara melakukan droping air bersih.

Alasan lain, selain masalah transportasi yang sulit, adalah tidak adanya hutan di mana bisa didapatkan kayu bakar yang menjadi kebutuhan sehari-hari seperti bisa didapatkan di daerah Kedung Ombo. Selain itu, luas tanah yang dibatasi hanya 1.000 meter persegi untuk setiap KK itu juga menimbulkan maslah bagi seseorang yang mata pencahariannya bertani. Dengan luas bangunan sebesar 300

[45] Tapi beberapa sumber dari penduduk setempat mengatakan, bahwa mereka diminta membayar Rp 500,- per meter. Lihat: Kedaulatan Rakyat, 13 Desember 1988.

[46] Kompas, 14 Januari 1989.

meter persegi, hanya ada sisa tanah 700 meter persegi. Bagi seorang petani, tanah seluas itu hanya akan mengahbiskan tenaga dan waktu untuk hasil yang tidak seberapa. Dengan kata lain, Desa Kayen di mata Penduduk Kedung Ombo tidak layak huni.

Karena itulah, kemudian pemerintah mengambil langkah untuk mendekati salah seorang tokoh masyarakat Kedung Ombo, Sadi (35 th) seorang guru SD Negeri Ngrakum, Kecamatan Kemusu untuk pindah dan mengajak masyarakat pindah ke Desa Kayen. Usaha ini berhasil, karena akhirnya langkah diambil Sadi tersebut diikuti oleh puluhan warga yang lain. [47]

Masalah Dan Keadaan Daerah Pemukiman di Muko-muko

Muko-muko adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara yang menjadi daerah penerima transmigran di Propinsi Bengkulu, Sumatera. Sebagian tanah di daerah tersebut masih merupakan hutan, baik hutan belukar, hutan lebat maupun hutan rawa. Sarana pendidikan dari Taman Kanak-Kanak sampai tingkat SLTA cuma ada di Kecamatan Muko-muko Utara. Sama halnya dengan tenaga medis dan sejumlah sarana peribadatan.

Daerah Kecamatan Muko-muko Utara terletak 290 km dari ibukota propinsi Bengkulu. Jarak tersebut harus ditempuh dengan kendaraan umum sekitar 12 jam karena kondisi jalan yang masih

[47] Keputusan Sadi untuk pindah ke Kayen sempat menimbulkan konflik batin dan konflik dengan keluarganya yang sebetulnya enggan meninggalkan tanah leluhurnya, apalagi tanah Kayen sangat tandus. Lihat: "Istri Sang Perintis Terus Menangis" di Wawasan, 4 Januari 1989 dan juga "Pak Guru Sadi Penggerak Warga Kemusu Pindah ke Kayen" di Suara Merdeka, 21 Desember 1988.

jelek. Muko-muko dibagi menjadi dua SKP (Satuan Kawasan Pemukiman) yaitu SKP 1.6 dan SKP 1.E yang terdiri dari beberapa SP (Satuan Pemukiman). SKP yang telah mempunyai SRTP (Satuan Rencana Tempat Pemukiman) baru SKP 1.G yang dirancang menjadi 6 buah SP, yaitu SP 1 sampai SP 6. Sampai dengan bulan Juli 1988 SP 1 sampai dengan SP 4 telah dihuni oleh transmigran asal Jawa Barat dan Jawa Tengah, yang dimulai semenjak tahun 1984. Untuk transmigran asal Kedung Ombo dan DAS Lampung, disediakan SP 5 dan SP 6, dengan perincian 500 KK transmigran yang masuk dalam program transmigrasi umum dan 1.000 KK masuk dalam program transmigrasi swakarsa.

Semenjak tahun anggaran 83/84 pihak PU Pengairan telah mengadakan proyek pembangunan Dam Muko-muko untuk membendung aliran air Sungai Air Majunto. Proyek yang menggunakan dana pinjaman sebesar Rp 25 milyar dari bank Dunia ini, direncanakan pada akhir anggaran 89/90 akan mulai dibangun jaringan baru yang akan mampu mengairi lahan sekitar 5.500 ha dari kemampuan maksimal 6.768 ha.

Beberapa masalah sehubungan dengan kesiapan SP 5 dan SP 6 menampung transmigrasi asal Kedung Ombo antara lain adalah sampai Juli 1988 belum ada usaha fisik persiapan lokasi pemukiman. Usaha yang dilakukan baru sampai pada tahap kebijakan, perencanaan, penentuan biaya dan pelelang an. Sedangkan dana yang dibutuhkan untuk lokasi penyiapan lokasi pemukiman mengalami kelambatan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya dana dan kurang baiknya koordinasi antar dinas yang berkompeten.

Kebutuhan untuk program transmigrasi umum, yaitu Dana Banpres (Keppres No 004 tgl 20 April 1988) sebesar 405 juta yang diperlukan untuk pembukaan lahan, pembuatan jalan, jembatan dan lain-lain belum cair. Sedangkan untuk transmigrasi swakarsa, dana yang berasal dari Banpres (Keppres No. 001, tgl 28 Januari

1988) sebesar 1 milyar yang akan digunakan untuk pembuatan 1.000 rumah dan jaminan hidup selama 6 bulan bagi 1.000 KK transmigran ternyata juga belum turun. Dan lagi untuk membuat rumah transmigran, terlebih dahulu harus ada pembukaan lahan pekarangan dan pembuatan jalan.[48)]

Usulan pihak Dirjen Pankim Transmigrasi ke Bank Dunia untuk mencari bantuan dana sebesar Rp 1,8 milyar (berbentuk LOAN 100 %) guna menutup kekurangan dana Banpres bagi rencana program transmigrasi swakarsa (1.000 KK) menemui jalan buntu. Yang diajukan pada 14 April 1988 tersebut sebenarnya adalah dana untuk reklamasi tanah di wilayah Sumatera Selatan yang akan dipakai oleh PU Pengairan. Jadi, untuk pengalihan dana harus ada kesepakatan antara instansi yang terlibat dan ijin dari pimpinan Bank Dunia Pusat maupun Pemerintah Indonesia.

Dengan adanya keterbatasan dana, maka perencanaan penyiapan pemukiman hanya diprioritaskan untuk 500 KK transmigran yang berasal dari program transmigrasi umum. Masalah penting yang lain adalah sampai dengan Juni 1988 belum ada usaha pencetakan sawah, sebagai kelanjutan pembangunan jaringan irigasi. Hal ini dikarenakan antara lain belum adanya pembukaan lahan, belum adanya petunjuk pelaksanaan untuk pembuatan studi kelayakan dari agraria pusat serta belum adanya transmigrasi yang akan diberi kredit.[49)]

Dengan melihat berbagai masalah yang ada di daerah pemukiman transmigrasi SP 5 dan SP 6 Muko-muko yang dipersiapkan untuk menampung transmigran asal Kedung Ombo, salah satu lem-

---

48) Sumber: ________, *Laporan Perjalanan Monitoring Studi Penyiapan Daerah Penerima Transmigrasi Di Bengkulu*, 23 Mei - 6 Juni 1988.

49) *Ibid*

baga yang terlibat dalam studi kelayakan dan persiapan, sempat mengusulkan kepada pemerintah agar meninjau kembali rencana penggenangan Waduk Kedung Ombo. Dikarenakan baru pada bulan Desember 1988 wilayah Muko-muko mulai siap untuk menerima transmigran secara berangsur-angsur, itupun hanya untuk 500 KK transmigran yang berasal dari program transmigrasi umum.

Menjelang penggenangan Waduk Kedung Ombo, pemerintah dengan berbagai cara mengkonsentrasikan persiapan daerah Muko-muko untuk menampung masyarakat Kedung Ombo dengan keyakinan bak cerita Bandung Bondowoso yang mencoba membangun 1.000 buah candi dalam waktu semalam. Tapi agaknya usaha tersebut sia-sia, karena selain memang terlanjur terjadi keterlambatan, juga tak banyak masyarakat Kedung Ombo yang tertarik untuk bertransmigrasi ke Muko-muko. Hal ini dikarenakan citra jelek transmigrasi itu sendiri.

ooOoo

BAB III

SOLIDARITAS MASYARAKAT

Apa yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Kedung Ombo yang tertahan di calon lokasi genangan pada detik-detik terakhir menjelang penggenangan? Mereka merasa ditinggalkan sendirian. LSM dan lembaga-lembaga hukum yang dulunya melakukan pendampingan kepada mereka, satu per satu mundur. Atau kalau tidak, berubah sikap. Hal ini tampak secara jelas sebagaimana ucapan seorang penduduk Desa Ngrakum yang dikutip media massa :

> "Di Jawa Tengah tidak ada lagi yang mau membantu kami. DPRD mengatakan bahwa ini sudah merupakan proyek pemerintah. LBH tidak muncul-muncul waktu kami *kepepet*. Akhirnya, kami terpaksa mencari jalan masing-masing." [1)]

Upaya memperoleh bantuan hukum dari berbagai pihak di Jakarta seperti GPS, DPP PDI, BKPH MKGR, dan YLBHI tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Bahkan penduduk yang me-

---

[1)] Kompas, 14 Januari 1989.

rasa kecewa dengan sikap LBH Yogyakarta, mencabut surat kuasa mereka. LBH Yogyakarta dianggap tidak ubahnya dengan pemerintah yang menyuruh mereka pindah dari tanah kelahirannya, dengan cara menerima uang ganti rugi. [2] LBH Yogyakarta juga dianggap penduduk telah memojokkan mereka. Penilaian ini muncul karena LBH memberikan bantahan, tatkala teman-teman mereka diberitakan lari ke hutan akibat ketakutan. Juga bantahan terhadap adanya KTP-KTP penduduk yang diberi tanda ET/OT.

Penduduk mengeluh atas sikap para pekerja LBH dan LSM lain yang mula-mula memang mencoba membela mereka. Namun kemudian berubah . Tuntutan rakyat atas ganti rugi tanah, malah dipergunakan oleh pekerja LSM untuk kepentingan mereka sendiri.[3] Sementara itu Tim BKPH MKGR yang menjadi salah satu tumpuan harapan penduduk tidak bisa berbuat apa-apa, setelah menerima surat dari DPP MKGR agar tidak membantu orang-orang Kedung Ombo yang dianggap mencoba melawan pemerintah.

Perasaan "kesepian" penduduk di daerah genangan Kedung Ombo semakin paripurna, tatkala Satgaspam menutup lokasi genangan. Tidak semua orang boleh keluar masuk lokasi secara bebas. [4]

[2] Tapi ini dibantah oleh pihak LBH Yogyakarta yang mengatakan pihak LBH lah yang memutuskan hubungan, karena masyarakat Kedung Ombo yang menjadi kliennya dianggap tidak mempunyai monoloyalitas. Setelah menyerahkan kuasa ke LBH Yogyakarta, penduduk masih meminta bantuan ke lembaga lain, nahkan melakukan *by pass* ke YLBHI di Jakarta. Hal ini menyebabkan pihak LBH Yogyakarta merasa tidak dipercaya oleh masyarakat Kedung Ombo. Sumber: Nur Ismanto SH, Wawancara, 25. 8. 1989.

[3] Suara Pembaruan, 25 Maret 1989.

[4] Penduduk Kedung Ombo dalam hal ini memang mempunyai keterbatasan informasi dan tidak mengerti bagaimana aktivis-aktivis LSM dan lembaga-lembaga yang membantu mereka juga mendapat berbagai tekanan dan intimidasi. Mungkin tuduhan penduduk terhadap apa yang dikerjakan para aktivis LSM tidak semuanya benar. Pada kenyataannya, masih ada para aktivis LSM dan lembaga yang terus melakukan pendampingan kepada beberapa orang tokoh Kedung Ombo, meskipun secara resmi mereka tidak memasuki daerah Kedung Ombo. Salah satu diantara mereka itulah yang mengorganisir penduduk yang kemudian hari disebut sebagai "Kelompok Delapan". Demikian juga dengan lembaga-lembaga lain, meskipun tidak lagi berhubungan langsung dengan orang-orang Kedung Ombo, tapi terus melakukan upaya advokasi dengan jalan melakukan lobi-lobi politik. Apabila dilihat dari situasi dan kondisi pada saat itu, apa yang dilakukan oleh para aktivis LSM dan lembaga-lembaga yang membantu orang-orang Kedung Ombo bisa dikatakan sudah "maksimal".

Situasi Daerah Genangan Setelah Pintu Waduk Ditutup

Bulan Januari, di mana dilakukan penutupan pintu waduk, merupakan saat hujan turun dengan derasnya setiap hari. Hujan deras yang turun di daerah hulu Sungai Serang, juga di kota-kota seperti Sragen, Boyolali, dan Salatiga, segera mengisi anak sungai-anak sungai. Aliran yang kemudian menyatu tersebut mengisi bangunan Waduk Kedung Ombo dengan cepat sekali. Hanya dalam waktu seminggu setelah penutupan pintu waduk, ketinggian permukaan air telah mencapai elevasi 57,20 meter. Genangan air telah menenggelamkan sejumlah desa di Kelurahan Wonoharjo seperti Dukuh Kedung Uter, Kedung Lele, Jetis dan Cermai. [5] Keadaan ini meleset dari ramalan semula di mana diperkirakan hingga akhir Maret 1989 elevasi air baru akan mencapai 60 - 65 meter.

Akibatnya penduduk yang semula berkeyakinan bahwa air tidak bakal pernah sampai pada rumah mereka, mulai dihinggapi kecemasan. Mereka mulai membuat *gethek-gethek* dari bambu dan

[5] Wawasan, 21 Januari 1989.

batang pisang,[6] untuk alat penyelamat bila sewaktu-waktu air datang.

Sungai Serang yang dibendung sudah tak tampak lagi. Genangan air yang semakin melebar menggenangi apa saja. Mulai pepohonan pisang, kelapa, hingga jalan-jalan di daerah-daerah yang cukup tinggi. Jalan antar desa terputus. Sarana transportasi seperti sepeda dan mobil tidak bisa dipergunakan lagi. Anak-anak yang akan bersekolah harus menempuh perjalanan secara berputar-putar untuk menuju ke sekolahnya. Itu terpaksa dilakukan untuk menghindari genangan air. Satuan tugas pengamanan juga tidak mengira naiknya genangan air akan secepat itu, segera melakukan sejumlah persiapan. Sejumlah perahu karet dan peralatan SAR didatangkan guna berjaga-jaga menghadapi musibah yang sewaktu-waktu muncul.

Kepungan air di daerah pemukiman yang semakin meninggi membuat penduduk berubah sikap. Kalau tadinya banyak penduduk yang bersikeras untuk bertahan di tanah-tanah mereka, pada saat kepungan air mencapai elevasi 59 meter penduduk tanpa diperintah lagi segera pindah beramai-ramai.[7] Para penduduk bekerja bakti menyelamatkan rumah dan barang-barang yang berada di Daerah Bahaya I.[8] Dengan cara bergotong royong, kaum lelaki bekerja membongkari rumah warga yang paling dekat dengan genangan air. Kemudian diangkat ke tempat yang lebih tinggi untuk disusun lagi menjadi sebuah tempat tinggal darurat. Cara yang lain adalah dengan membongkari rumah yang paling dekat dengan genangan air. Genting, papan, kayu tiang rumah ditumpuk di tepi jalan, di tempat yang agak tinggi agar tidak hanyut. Barang-barang tersebut kemudian diangkati ke tanah yang lebih tinggi, di mana telah menunggu sejumlah warga yang siap menyusunnya kembali.

---

[6] Gethek adalah suatu rakit tradisional yang umumnya terbuat dari bambu. Menurut legenda, alat seperti itu pernah dipergunakan oleh Jaka Tingkir untuk mengarungi Sungai Bengawan Solo yang banyak buayanya.

[7] Suara Merdeka, 25 Maret 1989.

[8] Daerah Bahaya I terletak pada elevasi 50-65 meter.

Sedangkan kaum wanita lebih banyak bekerja di daerah yang tanahnya tinggi. Mereka mencari rumput untuk makanan ternak, membuat dapur umum, membantu memasang dan membuat kayu *usuk* dari bambu untuk atap rumah. Tidak sedikit pula dari penduduk yang secara suka rela meninggalkan tanahnya dan pindah ke daerah di luar genangan di mana sanak keluarga mereka tinggal. Sebagian ada yang mendaftar untuk mengambil uang ganti rugi yang telah dikonsinyasikan di pengadilan negeri terdekat. Atau mendaftarkan diri untuk bertransmigrasi.

Berbagai cara unik dilakukan penduduk untuk menyelamatkan harta bendanya. Seperti yang dilakukan oleh Juwahir, 55, yang tinggal di tepian Sungai Serang di Dukuh Ngrapak. Seluruh bekas bongkaran, termasuk perabotan rumah dihanyutkan lewat aliran Sungai Serang. Bapak enam anak tersebut berbagi tugas dengan teman-temannya. Yang di hulu bertugas menghanyutkan, sedang yang dihilir bertugas menangkap barang yang dipindahkan. Mulai dari almari, meja, atap rumah, dan sebagainya yang bisa berjalan sendiri terapung-apung sampai ratusan meter jauhnya.

Untuk mengatasi sarana transportasii darat yang telah terputus, penduduk membentangkan tali-tali plastik di antara dua daratan yang terpisah oleh air. Tali-tali itu diikatkan pada batang pepohonan besar. Kemudian dengan rakit-rakit yang dibuat, kaum lelaki bergantian menarik tali untuk membantu menyeberangkan siapa saja. Anak-anak sekolah banyak yang memakai jasa kendaraan tersebut.

Sawah-sawah tidak terurus dan hewan ternak menjadi kurus. Pemiliknya sibuk menyelamatkan harta benda masing-masing. Di beberapa desa, warga tetap berusaha menghidupkan suasana desa

yang pernah ada. Pasar yang telah tergusur, tetap digunakan warga untuk tempat transaksi jual-beli. Atau tukar menukar barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan sebagian benda berharaga yang masih dimiliki.

Budaya menggeser rumah ke dataran tinggi di lingkungan daerah genangan terus dilakukan penduduk yang bertahan di tanah kelahiran mereka. Cukup banyak jumlah penduduk yang nekad tidak akan keluar dari daerah genangan. Sebuah rumah yang baru saja digeser, ada kemungkinan seminggu kemudian sudah harus digeser lagi untuk menghindari air yang dengan cepat mengejar kepindahan mereka. Tapi cara ini menjadi tidak efisien lagi ketika kenaikan permukaan bergerak cepat dan meluas. Air genangan seolah-olah dari segala penjuru secara serentak mendekati rumah-rumah penduduk. Setiap keluarga disibukkan oleh urusan masing-masing untuk membongkari dan menyelamatkan harta bendanya. Tak ada lagi kerja gotong royong. Tali-temali yang dibentangkan di antara dua daratan juga banyak yang tidak bisa difungsikan. Jarak antar daratan menjadi semakin jauh.

Ketika ketinggian air mencapai elevasi 76,23 meter lebih, penduduk yang bertahan masih ada sekitar 1.786 KK. [9] Mereka yang berasal dari berbagai desa yang berlainan, banyak berkumpul di bukit-bukit. Pemukiman itu mereka beri nama baru. Banyak rumah tenggelam, tidak sempat terselamatkan oleh pemiliknya. Banyak pula anak usia sekolah yang tak bisa bersekolah. Selain jalan-jalan telah terputus oleh genangan air yang terus melebar, gedung-gedung sekolah juga banyak yang telah tenggelam.

Terlantarnya anak usia sekolah yang kemudian banyak diberitakan oleh media massa, dibantah oleh Ka Depdikbud Boyolali Drs

[9] Suara Merdeka, 28 Pebruari 1989

Moh Said. [10] Sementara itu, satu setengah bulan semenjak penggenangan dilaksanakan mengakibatkan daerah genangan yang sebenarnya sangat subur, berubah menjadi daerah yang rawan meskipun pada bulan Desember dan Januari penduduk baru memanen tanaman mereka.

Selain itu, genangan air yang semakin meluas telah mulai membentuk Waduk Kedung Ombo seprti tapal kuda. Daerah-daerah yang berada di bagian sebelah dalam tapal kuda, sekonyong-konyong menjadi daerah terpencil. Misalnya Dukuh Kedungpring, Banger, Ngrakum dan Ngrapah. Di desa-desa terisolir tersebut, selain rawan pangan muncul beberapa wabah penyakit kulit dan muntaber. Kesulitan lain adalah langkanya air bersih, karena mata air yang menjadi sumber air minum telah tertutupi oleh genangan air waduk.

Untuk pergi ke kota terdekat yang dulunya hanya sekitar lima kilometer dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki, sekarang tidak bisa lagi. Orang-orang di desa yang terisolir harus menempuh perjalanan berpuluh-puluh kilometer lewat daratan di sebelah selatan. Seringkali pula mereka harus melewati pos-pos penjagaan. Pihak militer yang berada di pos penjagaan acapkali sengaja mempersulit penduduk yang pulang belanja dari daerah di luar genangan.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kopi, gula garam, atau pupuk tanaman dan genting, penduduk seringkali pergi membeli ke Pasar Legi , Solo. Ketika penduduk yang membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari tersebut melewati pos penjagaan, biasanya para petugas dengan sengaja memeriksa dan mambongkar barang-barang bawaan secara berlama-lama. Akibatnya penduduk

[10] *Suara Merdeka*, 15 Maret 1989

seringkali harus menginap satu malam di pos penjagaan. [11]

Rumah penduduk banyak yang tenggelam dan tidak sempat terselamatkan. Sampai tanggal 17 Maret 1989 air telah menenggelamkan 35 rumah penduduk. [12] Orang-orang yang tidak bisa menyelamatkan rumahnya hanya mampu bersikap pasrah. Mereka memasang tiang bambu di atap rumah dan bendera merah putih di tengahnya. Bendera setengah tiang itu, merupakan simbol dukacita warga Kedung Ombo.

Air yang menggenangi bekas hutan, di mana banyak tumbuh-tumbuhan dan pepohonan, menjadi daerah baru yang berbahaya. Di bawah permukaan air yang tampak tenang, terdapat cabang dan ranting pepohonan yang siap mengkait apa saja yang lewat di atasnya. Hingga bulan Maret 1989 telah ada dua warga Sumberharjo dan Wonoharjo mati tenggelam. Seorang meninggal karena terjeblos ke dalam parit hutan jati yang sudah tak terlihat lagi. Seorang lagi terpeleset ketika sedang mandi.

Banyak di antara penduduk yang nyalinya menciut melihat air memporak-porandakan tempat tinggal dan desa mereka. Mereka memilih menerima tawaran pemerintah untuk bertransmigasi. Pada akhir Maret 1989 sebanyak 64 KK atau 302 jiwa penduduk dari kawasan yang terkena proyek Waduk Kedung Ombo berangkat bertransmigrasi ke Air Majuto, kecamatan Muko-muko, Kabupaten Bengkulu Utara. Para transmmigran yang mendapat bantuan dana dari Banpres dan Yayasan Dharmais, serta Yayasan Sosial Soegiyapranata ini diberangkatkan dengan pesawat Hercules dari bandar

[11] Suara Pembaruan, 25 Maret 1989. Hal itu merupakan salah satu bentuk tekanan agar pada akhirnya penduduk pindah ke luar dari daerah genangan.

[12] Tempo, 25 Maret 1989.

udara Adi Sumarmo, Solo. Ke-64 KK tersebut di antaranya 8 KK berasal dari Desa Bawu, 29 KK dari Desa Kemusu, 11 KK dari Desa Genengsari, 12 KK dari Desa Nglanji, 3 KK dari Desa Klewor, dan 1 KK dari Desa Sarimulyo. [13] Kedatangan para transmigran asal Kedung Ombo tersebut di Bengkulu disambut dengan pengalungan bunga oleh Ketua Bappeda Tingkat I setempat. Mereka dielu-elukan sebagai pahlawan pembangunan.

Sedangkan sebagian besar penduduk yang masih mencoba bertahan pada saat penggenangan diresmikan, masih terus mencoba bertahan di lokasi genangan. Sampai dengan 23 Maret 1989, dari 5.269 KK yang ada di lokasi genangan Waduk Kedung Ombo, mereka yang bertahan masih 27% dan kesemuanya berada di lokasi dengan elevasi antara 81 meter sampai dengan 95 meter. Sedangkan apabila dilihat dari proses ganti rugi tanah, bagi penduduk Kedung Ombo yang tanahnya terkena proyek, masih ada 13% yang belum bersedia mengambil uang ganti rugi. Jumlah yang 87% telah menandatangani atau mencapjempoli tanda kesediaan untuk menerima uang ganti rugi. Angka itu meliputi jumlah orang yang mau menerima ganti rugi uang, karena takut dengan tekanan ataupun memanipulasi tanda tangan yang dilakukan oleh oknum panitia.

Dari 3.006 KK di kecamatan Kemusu, 32,70 % telah pindah ke sekitar waduk di luar daerah genangan, 6,42 % bertransmigrasi, 13,2 % pindah ke wilayah lain dan 1,03 % pindah ke Kayen. Sedangkan 46,64 % KK sisanya belum keluar dari wilayah genangan sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1.

[13] Menurut versi warga Kedung Ombo, sebagian besar orang-orang yang berangkat bertransmigrasi adalah sanak keluarga pamong desa yang justru tidak memiliki rumah atau tanah di daerah genangan. Mereka mendaftarkan diri ikut bertransmigrasi untuk mendapatkan tanah seluas 2 hektar di daerah transmigrasi

Tabel 3.1 Jumlah KK dan Arah Perpindahan Penduduk Kec. Kemusu dan Wilayah Waduk Kedung Ombo lain, sampai dengan 23 Maret 1989

Kecamatan	Jumlah KK yg harus pindah	Jumlah KK yang pindah keluar wil.genangan					
		Ke se kitar waduk	Trans migra si	Ke wi layah lain	Ke Ka yen	Jumlah KK	%
Kec. Kemusu							
1.Wonoharjo	185	144	14	27	-	185	100
2.Nglanji	717	180	76	232	6	494	69,90
3.Kemusu	621	244	9	19	-	272	43,80
4.Genengsari	606	224	71	71	13	379	62,54
5.Ngrakum	482	51	11	28	12	102	21,16
6.Watugede	27	21	-	-	-	21	77,77
7.Klewor	218	62	2	12	-	76	34,86
8.Bawu	124	33	10	8	-	51	41,13
9.Sarimulyo	26	24	-	-	-	24	92,31
Sub total	3.006	983	193	397	31	1.604	53,36
Kec. Miri	1.516	1.234	57	220	-	1.511	99,67
Kec.Sumber-lawang	619	410	102	107	-	619	100
Kec. Geyer	127	66	48	13	-	127	100
Total Wil.	5.268	2.693	400	737	31	3.861	73,29

Sumber: LPU UKSW, ***Laporan Perkembangan Resettlement Penduduk Waduk Kedung Ombo.***

Khusus penduduk Kecamatan Kemusu yang belum keluar dari wilayah genangan, umumnya menempati tanah-tanah yang berada pada elevasi 85 sampai 95 meter dari permukaan laut. Dan dari penduduk yang telah menggeser rumah sebagian besar masih tinggal di daerah yang ada di bawah elevasi 95 meter. Artinya mereka masih berada di wilayah yang bakal tergenang.

Usaha penggeseran yang dilakukan penduduk, selain menuju ke arah elevasi yang lebih tinggi, mereka juga berusaha untuk berada sedekat mungkin dengan wilayah asal mereka yang diperhitungkan tidak bakal tenggelam. Dengan demikian, di daerah sekitar sabuk hijau (*green belt*) bermunculan dukuh-dukuh baru.

Di daerah Kecamatan Kemusu, di mana tinggal 57% dari total jumlah penduduk di seluruh wilayah Kedung Ombo masih terdapat 669 KK dari 5.268 KK (12,70 %) yang belum bersedia menerima ganti rugi, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Jumlah KK yang Tidak Bersedia Menerima Ganti Rugi Uang, sampai dengan 23 Maret 1989.

Kecamatan/Desa	Juml. KK hrs keluar wi-layah ge nangan	Jumlah KK yang Belum Keluar yg. dari wilayah genangan			
		Jumlah	%	Yg. belum bersedia menerima ganti rugi	
				Jumlah	%
Kec. Kemusu					
1. Ds. Wonorejo	185	0	0.00	0	0,00
2. Ds. Nglanji	717	223	31,00	149	20,78
3. Ds. Kemusu	621	349	56,20	147	23,67
4. Ds. Genengsari	606	227	37,46	48	7,92
5. Ds. Ngrakum	482	380	78,84	252	52,28
6. Ds. Watugede	27	6	22,22	0	0,00
7. Ds. Klewor	218	142	65,14	49	22,48
8. Ds. Bawu	124	73	58,87	24	19,25
9. Ds. Sarimulyo	26	2	7,69	0	0,00
Sub total	3.006	1.402	46,64	669	22,25
Kecamatan lain di Kab. Sragen dan Grobogan	2.262	5	0,22	0	0,00
Total	5.268	1.407	26,71	669	12,70

Sumber : LPU UKSW, ***Laporan Perkembangan Resettlement Penduduk Waduk Kedung Ombo.***

Kehadiran Tim Satgaspam semenjak peresmian penggenangan, sepertinya tidak ada artinya bagi rakyat Kedung Ombo yang mencoba untuk terus bertahan. Tim Satgaspam yang mempunyai fungsi ganda sebagai Tim SAR yang membantu penduduk, memang hanya mendapat perintah untuk membantu penduduk yang mau mengungsi ke luar lokasi genangan. Mereka tidak boleh membantu penduduk yang mencoba bertahan. Sementara dari pihak penduduk sendiri, ada hambatan psikologis untuk minta tolong kepada anggota Tim Satgaspam yang berseragam loreng. Setelah merasa teraniaya selama bertahun-tahun, petugas baik sipil maupun militer, di mata rakyat seolah-olah adalah musuh penyebab kesengsaraan yang harus mereka jauhi. Ada juga kecemasan bahwa apabila mereka minta tolong kepada petugas, mereka akan langsung diangkut ke luar lokasi genangan.

Selain itu juga ada pengalaman traumatis yang dialami penduduk di daerah genangan, di mana pada tahun 1966 mereka diminta untuk menggali kubur bagi eks orang-orang PKI yang dieksekusi di sekitar Kedung Ombo. Eks PKI itu ditangkapi dari daerah Kudus, Pati, Jepara, Boyolali dan sekitarnya. Pengalaman itu menimbulkan kekhawatiran penduduk, bahwa sewaktu-waktu mereka juga akan dieksekusi.

Dukungan dan Simpati Masyarakat Kepada Rakyat Kedung Ombo

Simpati masyarakat terhadap rakyat Kedung Ombo sepertinya terakumulasi di saat menjelang penggenangan waduk, di mana masih ada puluhan ribu manusia yang belum meninggalkan lokasi genangan. Apalagi berbagai media massa dengan gencar memberitakan permasalahan yang terjadi di daerah genangan beserta ganjalan-ganjalan yang tersisa menjelang peresmian penggenangan.

Tidak seberapa lama setelah peresmian penggenangan dan dibelakukannya Kedung Ombo sebagai daerah tertutup, muncul berbagai kelompok yang ingin mendampingi, membantu dan membela rakyat Kedung Ombo yang telah menderita selama bertahun-tahun. Kelompok yang bermunculan ini sangat heterogen, meliputi berbagai profesi, dan kedudukan sosial dalam masyarakat. Namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar. Yaitu kelompok mahasiswa yang diwakili oleh KSKPKO (Kelompok Solidaritas Kurban Pembangunan Kedung Ombo), Kelompok Romo YB.Mangunwijaya dan kelompok LSM.

Ketiga kelompok tersebut, lewat aksi-aksinya yang dilakukan secara terpisah nantinya akan mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan pemerintah secara global, khususnya yang menyangkut cara penanganan terhadap orang-orang yang mencoba terus bertahan di daerah genangan Waduk Kedung Ombo. [14]

KSKPKO (Kelompok Solidaritas Kurban Pembangunan Kedung Ombo)

Aksi Pertama di Tiga Kota

Dimotori oleh beberapa aktivis mahasiswa dari Salatiga, Yogyakarta dan Surabaya yang merasa prihatin dengan nasib orang-orang di daerah genangan Waduk Kedung Ombo, yang terancam tenggelam karena waduk akan segera digenangi, dilakukan serangkaian pertemuan. Mereka melakukan investigasi mengumpulkan data dan informasi. Sekaligus mendiskusikan persoalan yang terjadi di Kedung Ombo.

---

[14] Pembahasan tentang perubahan kebijakan pemerintah ada dalam bab selanjutnya (Bab V)

Kelompok itu bertambah banyak dengan bergabungnya belasan mahasiswa dari Yogya dan Semarang, sehingga akhirnya diputuskan untuk membentuk sebuah kelompok yang kemudian diberi nama KSKPKO.[15]

Salatiga dipilih sebagai sekretariat kerja, kota yang dianggap paling dekat dengan lokasi genangan. Kelompok ini kemudian mendapat dukungan dari para aktivis mahasiswa di Jakarta, Bandung, Bogor dan beberapa kota lain.

KSKPKO kemudian dipecah menjadi beberapa tim kecil. Masing-masing bertugas untuk melakukan kajian, mengumpulkan data dan memantau lokasi secara bergantian. Tatkala penggenangan dilakukan, KSKPKO membuat sebuah konsep surat pernyataan dan mengumpulkan dukungan masyarakat berupa tanda tangan dan barang-barang yang bisa diberikan kepada orang-orang di Kedung Ombo yang sedang membutuhkan pertolongan.

Pada 6 Februari, ketika persiapan telah dianggap cukup matang, KSKPKO mengirimkan surat pernyataan kepada Ketua DPR/MPR, Kharis Suhud yang ditembuskan ke Presiden Soeharto, Menko Polkam, Mendagri, Menteri PU, Ketua DPRD Tingkat I, Gubernur Jateng, rakyat di daerah genangan, lembaga kemahasiswaaan di seluruh Indonesia dan media massa. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh 961 orang. Di antaranya adalah mahasiswa dari 45 perguruan tinggi di Jawa dan Lombok, seniman, pekerja sosial, dosen, biarawan, buruh, ibu rumah tangga dan sebagainya.

---

[15] Sebutan "Kurban Pembangunan" dalam KSKPKO dipilih dari hasil diskusi untuk menandaskan, bahwa model pembangunan yang diterapkan di Kedung Ombo seolah-olah telah menciptakan sebuah kelompok yang akhirnya dijadikan tumbal keberhasilan pembangunan. Sebutan "kurban" ini ditanyakan berkali-kali dan mendapat perhatian khusus oleh petugas Intel Dam Diponegoro, Pudak Payung, Semarang yang menginterogasi sejumlah aktivis KSKPKO.

Surat itu sendiri, selain berisikan tentang keprihatinan dan penyesalan atas keputusan pemerintah untuk terus melaksanakan penggenangan saat persoalan di Kedung Ombo belum beres, juga berisikan empat buah tuntutan. Yaitu agar proses penggenangan dihentikan sementara sampai proses pembebasan tanah terselesaikan secara tuntas, penindakan secara tegas terhadap oknum aparat pemerintah yang melakukan penyelewengan, menaikkan harga ganti rugi tanah, paling tidak berdasarkan musyawarah dengan rakyat yang tanahnya terkena pembebasan, dan pembentukan sebuah lembaga pengontrol pembangunan yang independen.

Selain mengirimkan surat pernyataan, KSKPKO yang diwakili oleh komponen mahasiswanya, membikin aksi solidaritas secara serentak di tiga tempat pada Senin tanggal 6 Februari 1989. Di Jakarta, sekitar 100 orang mahasiswa dari perguruan tinggi di Jakarta dan Bogor datang ke kantor Depdagri di Jl Merdeka Selatan Jakarta. Mereka membawa poster. Kepada petugas yang mencegat di kantor Depdagri, rombongan KSKPKO menyatakan keinginan untuk bertemu dengan menteri Rudini guna menyampaikan surat pernyataan dan semua permasalahan yang terjadi di Kedung Ombo. Namun semua keinginan tersebut gagal, karena menteri Rudini tengah mengadakan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Senayan.

Akhirnya delegasi KSKPKO hanya ditemui oleh Sekjen Depdagri, Nugroho. Itupun setelah melalui perdebatan panjang. Semula rombongan KSKPKO nekad untuk terus bertahan di halaman kantor Depdagri sebelum keinginan untuk berdialog langsung dengan menteri Rudini sendiri terealisasi. Rombongan KSKPKO sangat antusias untuk bisa berdialog dengan Rudini. Maklum, Rudini banyak membikin pernyataan berisikan pembelaan terhadap "orang-orang kecil".

Di Semarang, anggota KSKPKO mendatangi kantor DPRD Jateng. Mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kolonel Artileri

Mardjuki dari fraksi ABRI. Selama satu jam mereka berdialog. KSKPKO juga menyerahkan surat pernyataan kepada Mardjuki. Marjuki berjanji akan membahasnya dalam persidangan DPRD yang akan datang sebagai salah satu masukan kepada Dewan.

Sedangkan 70 mahasiswa berasal dari Salatiga, Yogya dan Semarang yang tergabung dalam KSKPKO mengadakan aksi solidaritas dengan mendatangi lokasi genangan di desa Kedung Cumpleng yang telah tenggelam sebatas dada.[16] Rakyat yang sedang bergotong-royong menyelamatkan bangunan rumah dan harta benda, menyambut kedatangan rombongan KSKPKO dengan antusias. Tim Satgaspam 0724 yang langsung dipimpin oleh Letkol Drajad Budi Santoso mencoba menhadang dan menghalangi usaha KSKPKO untuk bergabung dengan rakyat yang tengah bekerja bakti itu. Rakyat dengan berani, menembus barikade Satgaspam dan bergabung dengan rombongan KSKPKO. Mahasiswa menyambut rakyat dengan bentangan spanduk bertuliskan "Ganti Rugi Tanah Waduk Kedung Ombo Jangan Menyimpang". Sebuah kalimat kutipan dari ucapan Menteri Rudini. Juga berbagai poster dan teriakan-teriakan: "Hidup Rakyat!". Penduduk sendiri membalas teriakan-teriakan mahasiswa rombongan KSKPKO itu "Hidup", "Hidup Mahasiswa!", "Merdeka", disertai kepalan tangan dan acungan arit yang baru mereka pakai untuk bekerja.

Di hadapan Dansatgaspam, salah seorang juru bicara KSKPKO mewawancarai dua penduduk tentang permasalahan yang dihadapi rakyat di daerah genangan. Setelah ada jaminan dari Letkol Drajad Budi Santoso, bahwa tidak akan ada tindakan apa-apa terhadap penduduk dan penduduk boleh bicara apa adanya. Penduduk menceritakan persoalan yang sedang mereka hadapi. Salah satu

16) *Lihat:* Kedaulatan Rakyat, 7 Pebruari 1989 dan *Editor,* 11 Pebruari 1989.

tokoh rakyat Kedung Ombo, Jaswadi dengan bahasa Jawa yang diucapkan terbata-bata mengatakan, bahwa rakyat Kedung Ombo tidak pernah menuntut ganti rugi yang terlalu banyak. Rakyat hanya menginginkan ganti rugi berupa tanah dengan luas yang sama dengan tanah yang dibebaskan. Tanah yang diinginkan adalah tanah yang tidak terkena genangan dan masih di sekitar waduk. Jaswadi juga bertutur tentang penduduk Kedung Cumpleng yang telah tiga hari tergenang air. Beberapa penduduk kemudian juga menyusul menyampaikan keluhannya, yang disambut dengan nyanyian para mahasiswa:

> Mengapa diam, mengapa diam, mengapa ... semua diam
> Mengapa diam, mengapa diam, mengapa ... semua diam
> (dan seterusnya ...)

Penduduk mengatakan bahwa mereka tidak menuntut terlalu banyak kepada pemerintah. Mereka hanya meminta apa yang menjadi hak mereka. Kemudian rombongan KSKPKO menanyakan kepada penduduk apakah pihak Satgaspam telah diberi tahu, Jaswadi mengatakan: "Belum". Dan segera Letkol Drajad menimpali bahwa pihaknya telah menyediakan truk-truk untuk penyelamatan, hanya saja rakyat tidak bersedia dibantu. Jaswadi menimpali kembali, bahwa rakyat memang tidak mau dibantu tim Satgaspam. Mereka khawatir akan diangkut ke lokasi yang tidak mereka inginkan.

Aksi diakhiri dengan pembacaan surat pernyataan sama seperti yang disampaikan oleh KSKPKO di Depdagri dan DPRD Jateng di Semarang. KSKPKO juga menyatakan gugatannya kepada pemerintah di mana seharusnya pembangunan menciptakan ketentraman dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Bukan sebaliknya yakni ketakutan, kecemasan atau bencana seperti yang menimpa rakyat di Kedung Ombo. Mereka yang sebenarnya juga telah rela berkorban meninggalkan tanah leluhurnya, jika saja persoalan ganti

rugi berjalan secara wajar.

Sebelum meninggalkan Desa Kedung Cumpleng, rombongan KSKPKO membagikan surat pernyataan dan menyematkan lencana yang dipakai oleh setiap anggota rombongan KSKPKO kepada penduduk. Tak lupa pula meninggalkan pesan dan alamat untuk sewaktu-waktu dihubungi rakyat setempat bila mereka mendapatkan perlakuan semena-mena dari aparat. Rombongan KSKPKO kemudian bubar. Mereka kembali berjalan kaki sekitar 10 km ke tempat kendaraan di parkir, dan kemudian pulang ke kotanya masing-masing.

Pada kesempatan yang sama KSKPKO secara resmi membuka dompet sosial dan mengundang semua pihak yang mau membantu menyumbang uang, pakaian pantas pakai, beras atau obat-obatan untuk diberikan kepada rakyat Kedung Ombo. Juga himbauan kepada semua pihak untuk memberikan perhatian. Serta membantu terselesaikannya kasus Kedung Ombo secara tuntas.

Buntut dari aksi pertama KSKPKO ini adalah dikepungnya sekretariat di Salatiga dan dijaga oleh aparat selama beberapa hari. Para penghuni rumah yang dijadikan sekretariat KSKPKO merasa khawatir dengan perkembangan situasi setempat. Para mahasiswa terpaksa mengungsi dan mengosongkan rumah mereka selama lebih kurang dua minggu. Beberapa aktivis KSKPKO dicari-car oleh aparat kepolisian dan militer. Mereka dituduh telah mengadakan rapat gelap pada tengah malam 5 Februari 1989 di sebuah rumah di Dukuh Cemara, Salatiga sebelum mengadakan aksi ke lokasi genangan Waduk Kedung Ombo. Salah seorang aktivis kemudian mendapat panggilan dari Polres Salatiga untuk didengar kesaksiannya tentang rapat-rapat gelap dan rapat terselubung lainnya.[17]

[17] Lihat: Wawasan, 14 Maret 1989. Juga Neraca Hak Azasi, Vol.4. Perlu diketahui, bagi kebanyakan orang di Indonesia panggilan-panggilan dari Sospol, Koramil, Kodim, Polsek dan Polres seringkali menimbulkan ketakutan dan kecemasan.

Meskipun Menko Polkam Sudomo telah menyatakan bahwa pemerintah tak pernah melarang rakyat, termasuk mahasiswa untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dianggap merugikan masyarakat kepada pemerintah.[18] Namun aktivis KSKPKO masih dicari, diawasi dan dipanggili oleh aparat militer. Di Jakarta, aktivis KSKPKO didatangi oleh petugas yang mengaku dari BAIS (Badan Intelejen Strategis). Petugas menanyakan semua hal sehubungan aktivitas mereka. Demikian juga dengan beberapa aktivis Yogya yang membawa mobilnya untuk berdemonstrasi di Kedung Ombo. Tekanan tersebut membuat para aktivis KSKPKO mencoba menemui Menpora Akbar Tanjung di Yogya. Saat itu Menpora sedang meresmikan pembukaan basar mahasiswa di kampus IAIN Sunan Kalijaga pada tanggal 9 Februari 1989.[19]

Sementara itu di daerah genangan, terutama di Desa Klewor Kecamatan Kemusu yang menjadi jalan masuk rombongan KSKPKO ke lokasi genangan pada 6 Februari 1989, didirikan pos-pos penjagaan secara berlapis-lapis. Setiap oang yang mau keluar atau masuk lokasi genangan, dikenai wajib lapor ke pos penjagaan.[20] Beberapa tokoh masyarakat yang menjadi simbol perlawanan orang-

[18] Menko Polkam Sudomo juga mengatakan: "Sebagai negara hukum dan demokrasi, pemerintah membolehkan warganya menyampaikan pendapat meskipun bertentangan dengan pemerintah". Lihat: Pos Kota, 9 Pebruari 1989.

[19] Apa yang dilakukan aktivis KSKPKO tersebut merupakan solidaritas dan keprihatinan terhadap teman-temannya yang mendapatkan tekanan dari aparat. Di Kampus IAIN, dua mahasiswi juru bicara KSKPKO

[20] Sebelum tanggal 6 Pebruari tidak ada pos penjagaan, pengawasan dilakukan dari Kantor Polres dan Koramil yang ada di tepi jalan raya. Menurut data intelijen yang dikumpulkan KSKPKO, setelah aksi 6 Pebruari usai, datang dua truk pasukan siap tempur (bersenjata lengkap) yang kemudian dibagi menjadi regu-regu dan menempati posisi strategis di daerah genangan yang

orang di Kedung Ombo diintimidasi. Mereka kembali mendapat panggilan-panggilan yang tidak ada hubunngannya dengan aksi KSKPKO. Mereka dituduh sebagai orang yang mengundang mahasiswa untuk berdemonstrasi. Intimidasi dan serangkaian panggilan yang dilakukan aparat kepolisian dan militer itu mengakibatkan salah seorang tokoh masyarakat Kedung Ombo menjadi stres dan menderita gejala sakit jiwa.[21] Kejadian tersebut mengakibatkan penduduk Kedung Ombo berlarian ke Salatiga, ke tempat Sekretariat KSKPKO dan alamat lain yang pernah diberikan KSKP-KO. Secara diam-diam, kemudian dijalin kontak antara KSKPKO dengan tokoh-tokoh Kedung Ombo lewat penduduk yang pulang-balik dari Salatiga ke lokasi genangan.

Pertemuan Dengan Menteri Rudini

Setelah usaha KSKPKO untuk menemui Mendagri Rudini pada 6 Pebruari 1989 gagal, pada tanggal 9 Pebruari 1989 muncul berita utama di harian Pos Kota tentang kesiapan dan kesediaan Rudini

diberlakukan sebagai Daerah Siaga I. Berdasarkan catatan KSKPKO, pada tanggal 4 Maret jumlah personil yang bertugas di daerah genangan waduk Kedung Ombo ada 122 orang dengan 5 buah pos komunikasi radio, masing-masing di Cawang, Jembatan, SAU/Laut, Jurang dan Posko Klewor. Konon aparat militier mendapat perintah untuk menembak di tempat, siapa saja yang mencoba memasuki lokasi proyek tanpa ijin atau melakukan unjuk rasa.

[21] Salah seorang tokoh Kedung Ombo ini, sempat menitipkan sepucuk surat kepada dua orang warga Klewor untuk disampaikan kepada para aktivis KSKPKO di Salatiga. Surat tersebut berisi permintaan nasehat tentang cara menghadapi aparat yang memanggil dan mengintimidasi dirinya. Dua hari setelah menulis surat tersebut, si tokoh terpaksa dibawa ke sebuah RS di Solo karena mengamuk dan mengomel tanpa sebab yang jelas, yang kemudian diidentifikasi sebagai menderita penyakit Jiwa. Sumber: Dokumentasi KSKPKO.

untuk menerima delegasi mahasiswa. Rudini menyatakan bahwa sama sekali tak ada niatnya untuk menolak bertemu dengan delegasi mahasiswa yang pernah mendatangi kantornya,. Hal itu semata-mata karena kasibukkannya waktu itu untuk bertemu dengan wakil rakyat di DPR RI yang membuatnya tidak dapat menerima delegasi KSKPKO. Sedangkan Menko Polkam Sudomo, pada kesempatan terpisah menyatakan, bahwa sistem demokrasi Pancasila memungkinkan warga untuk menyampaikan pendapat yang berbeda dengan pendapat pemerintah.

Pernyataan kedua Pejabat tersebut kemudian ditanggapi oleh KSKPKO Jakarta. Lewat Koordinatornya, KSKPKO Jakarta mendatangi Depdagri dan menyampaikan surat untuk Mendagri Rudini. Surat tersebut berisikan permintaan agar Rudini bersedia menerima delegasi KSKPKO pada Jumat, 17 Pebruari 1989 pada pukul 13.30 wib. Namun, ternyata sampai dengan waktu yang diusulkan KSKPKO, jawaban dari Rudini yang ditunggu-tunggu tak juga muncul.

Dengan alasan Menteri Rudini banyak pekerjaan dan jadwal acara telah padat, baru pada 16 Pebruari 1989 staf Mendagri mengirimkan pesan lewat radiogram kepada direktorat Sospol Pemda Tk.I Jateng di Semarang dan diteruskan ke Pemda Tk.II Salatiga untuk disampaikan kepada sekretariat KSKPKO di Salatiga. Isi pesan tersebut antara lain tentang kesediaan Mendagri Rudini menerima lima orang delegasi KSKPKO di kantornya pada hari Sabtu, 18 Februari 1989 pukul 13.00 wib. Empat orang tokoh Kedung Ombo yang kebetulan datang ke Sekretariat KSKPKO untuk menyampaikan laporan dan keluhan tentang tindakan represif dari aparat yang mereka alami, menitipkan pesan dan permohonan untuk disampaikan kepada Menteri.

Sesuai dengan kesepakatan dan kontak kilat yang dilakukan aktivis KSKPKO di beberapa kota, pada tanggal 18 Februari 1989 50 orang anggota KSKPKO segera berkumpul. Para mahasiswa

dari Salatiga, Yogya, Bogor, Malang dan Palu itu membagi tugas, membentuk delegasi dan kontak dengan media massa. Akhirnya diambil keputusan bahwa semua yang hadir akan berangkat ke kantor Mendagri. Meski nantinya yang akan menemui Menteri hanya lima orang.

Di kantor Depdagri, Menteri Rudini telah menunggu rombongan KSKPKO di ruang sidang didampingi Sekjen Depdagri, Nugroho dan Dirjen Sospol Hari Soegiman beserta staf lainnya. Setelah mengurus semua prosedural dan digeledah oleh petugas, lima orang anggota delegasi langsung memasuki ruangan sidang. Sebagian besar mahasiswa yang tidak bisa ikut masuk, duduk bergerombol di depan pintu masuk ruangan kerja Menteri. Mereka mendapat pengawasan cukup ketat pihak petugas Depdagri dan aparat keamanan yang berdatangan, baik berpakaian dinas maupun preman.

Mula-mula delegasi KSKPKO memperkenalkan diri secara lengkap dan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya KSKPKO, maksud dan tujuan serta alamat sekretariat. Sedangkan Rudini mengingatkan agar mahasiswa yang tergabung dalam KSKPKO sebagai kelompok generasi muda yang masih murni berhati-hati dan jangan sampai ditunggangi oleh pihak-pihak luar ataupun musuh-musuh Pancasila. Diingatkan pula bahwa sebagian besar penduduk Kedung Ombo yang belum mau meninggalkan tanahnya adalah orang-orang yang pernah terlibat PKI. Ucapan Rudini yang terakhir ini segera dibantah oleh anggota delegasi KSKPKO.

Delegasi KSKPKO sempat mengingatkan Rudini agar jangan hanya mau menerima laporan secara sepihak yang sering merupakan laporan ABS saja.[22] Mendagri Rudini menanggapi semua ma-

[22] Laporan ABS (Asal Bapak Senang) adalah sebutan dan kritik yang diberikan kepada laporan para pejabat yang lazimnya hanya berisi hal-hal yang baik atau keberhasilan saja untuk menyenangkan atasan yang menerima laporan.

sukan KSKPKO tentang ketidakberesan pembangunan Waduk Kedung Ombo. Ia berjanji akan menindak semua aparat Pemda yang melakukan penyelewengan dalam kasus Kedung Ombo. Rudini juga meminta bukti-bukti penyelewengan yang dilakukan aparat daerahnya, yang mungkin dimiliki oleh KSKPKO.

Ide delegasi KSKPKO untuk membentuk korps sukarelawan di daerah genangan Kedung Ombo sebagai janji untuk mengakhiri aksi-aksi demonstrasi yang telah dilakukan, juga telah diterima oleh Mendagri.[23] Asalkan, Korps Sukarelawan yang berencana membantu proses evakuasi penduduk di daerah genangan itu bekerja di bawah koordinasi Satgaspam yang telah dibentuk oleh Pemda. Mendagri Rudini juga berjanji untuk mengusahakan realisasi keinginan dan usulan penduduk yang belum menerima ganti rugi, yang menginginkan menempati tanah-tanah milik Perhutani seperti yang ada di wilayah KRPH Krenjengan dan Kedungpring.

Dalam akhir dialog, disepakati dijalin sebuah *hot line* antara KSKPKO dengan Mendagri Rudini. Khususnya yang menyangkut masalah-masalah pembangunan seperti yang terjadi di Kedung Ombo.

Sepulang dari pertemuan dengan Mendagri Rudini, KSKPKO mengadakan konsolidasi dengan anggota-anggotanya di beberapa

[23] Pembentukan Korps Sukarelawan KSKPKO di daerah genangan Kedung Ombo tersebut sebetulnya dimaksudkan untuk melakukan pendampingan kepada penduduk yang sering mendapat intimidasi dan perlakuan tak menyenangkan lainnya dari para oknum aparat desa dan keamanan. Diharapkan kehadiran KSKPKO sedikit banyak dapat meminimalkan bentuk-bentuk intimidasi yang ada. Sekaligus memperingan kerja yang dilakukan penduduk di daerah genangan dalam usaha menyelamatkan harta benda. Juga menciptakan sebuah preseden agar kelompok-kelompok lain bisa masuk ke lokasi. Sehingga daerah genangan Kedung Ombo tidak lagi diberlakukan sebagai daerah tertutup. Termasuk tertutup bagi semua pemberitaan tentang realitas yang sebenarnya terjadi di Kedung Ombo.

kota. Mereka bersepakat untuk mengurus prosedural resmi bagi perijinan korps sukarelawan. KSKPKO Jogja diputuskan menjalankan fungsi koordinator, meskipun sekretariat masih berada di Salatiga. Pada 27 Pebruari 1989 KSKPKO mengirimkan sepucuk surat kepada Dansatgaspam. Surat itu berisi permohonan ijin untuk ikut membantu usaha penyelamatan penduduk Kedung Ombo dengan mendirikan posko di daerah genangan. Surat tersebut ternyata tidak pernah mendapat tanggapan. Sehingga pada 13 Maret 1989 KSKPKO kembali mengirimkan surat kepada Dansatgaspam 0724 dengan isi yang sama dengan surat sebelumnya. Tapi kemudian surat tersebut tidak dijawab ataupun ditanggapi oleh pihak Satgaspam. Juga Pemda Tk II yang mendapat tembusannya.

KSKPKO Jakarta pada 8 Maret 1989 mencoba menghubungi Mendagri. KSKPKO mencoba menagih janji Rudini untuk membantu kemudahan prosedural perijinan Korps Sukarelawan. Rudini ternyata telah mempercayakannya kepada Dirjen Sospol, Hari Soegiman. Dirjen yang ditemui, hanya menganjurkan agar KSKPKO menemui Dandim dan Bupati Boyolali sesuai hirarki.

Aksi KSKPKO Ke Dua

Upaya KSKPKO masuk ke daerah genangan Kedung Ombo dengan jalan formal menemui jalan buntu. Malah aktivis KSKPKO mendapat kesan diremehkan oleh aparat. Sementara itu secara resmi Gubernur Jateng HM Ismail melarang kelompok Romo YB Mangun-wijaya yang mau membantu anak-anak terlantar di Kedung Ombo. Situasi memprihatinkan makin bertambah dengan munculnya situasi rawan pangan di daerah genangan. Hal ini mengakibatkan beberapa aktivis KSKPKO berniat untuk nekad masuk ke daerah genangan.

Pada 17 Maret 1989, KSKPKO mengadakan pertemuan di Yogyakarta yang dihadiri oleh para wakil dari Jakarta, Bandung,

Semarang, Salatiga dan Yogyakarta sendiri. Pertemuan membahas permasalahan dua surat yang dikirimkan ke Satgaspam dan 'nasib' korps sukarelawan.

Wakil-wakil KSKPKO bersepakat untuk tetap merealisasikan rencana pendirian pos komando di daerah genangan. Semua bahan makanan, obat-obatan yang telah berhasil dikumpulkan diberbagai kota akan dibawa serta. Aksi solodaritas KSKPKO direncanakan akan dimulai dengan berkumpul di depan kantor Kodim Boyolali pada 24 Maret 1989 jam 10.00 Wib. Pertemuan-pertemuan lanjutan guna pematangan rencana dilakukan berkali-kali di Salatiga. Kemudian juga membicarakan langkah-langkah lanjutan apabila rencana memasuki daerah genangan menemui kegagalan.

Dalam persiapan final pada 23 Maret 1989 malam, muncul kekacauan karena Presiden Soeharto dalam temu wicara seusai meresmikan tiga PLTA di Mrica, Banjarnegara Jateng mengatakan:

> "...Sebagai orang Jawa Tengah yang pernah menjadi Komandan Divisi dan Komandan Resimen di Solo, saya tahu persis daerah tersebut dulu adalah basis PKI...*(dan seterusnya)*"

Apalagi pada kesempatan yang sama, Pangdam IV/ Diponegoro Mayjen TNI Wismoyo Aris Munandar ketika ditanya oleh wartawan tentang situasi keamanan di sekitar Waduk Kedung Ombo menyatakan :

> "Semuanya berjalan aman dan tertib, tetapi apabila ada yang ingin coba-coba mengacau, akan saya sikat habis." [24]

---

[24] Pernyataan Mayjen Wismoyo Aris Munandar yang kemudian di muat di Suara Merdeka (25 Maret 1989) tsb menimbulkan berbagai spekulasi terhadap kemungkinan dipakainya cara-cara kekerasan (militer) untuk menyelesaikan kasus Kedung Ombo. Tapi konon pernyataan Mayjen Wismoyo tsb kemudian dibantah sendiri.

Perwakilan KSKPKO dari beberapa kota sempat mengkhawatirkan bakal terjadinya kekerasan dalam aksi yang akan mereka lakukan. Pernyataan Presiden Suharto tentang kasus Kedung Ombo yang disiarkan berulang kali lewat TVRI dan RRI itu menimbulkan kesan bahwa kepala negara telah memberikan 'lampu hijau' kepada aparat pemda dan militer untuk segera menangani dan menyelesaikan 'orang-orang PKI' yang telah membesar-besarkan kasus Kedung Ombo. Tapi akhirnya aktivis KSKPKO perwakilan beberapa kota secara aklamasi memutuskan untuk maju terus sesuai rencana dengan segala resiko akan dihadapi dan ditanggung bersama. Karena tak mungkin melakukan kontak guna menggagalkan rombongan KSKPKO dari berbagai kota yang telah berangkat ke pos di Salatiga dan Yogyakarta pada malam tersebut.

Perasaan was-was diliputi tanda tanya menghinggapi semua anggota KSKPKO yang secara terpisah berdatangan di halaman Kodim Boyolali pada 24 Maret 1989. Di Kodim Boyolali sendiri hanya ada beberapa petugas piket jaga. Tepat pk.10.00 Wib semua anggota rombongan KSKPKO yang berjumlah 150 orang tiba di halaman Kodim Boyolali. Komandan-komandan regu yang telah ditunjuk segera membagikan tanda pengenal untuk dipakai oleh setiap anggota KSKPKO. Bahan makanan, obat-obatan, pakaian dan tali-temali yang dibawa untuk rakyat Kedung Ombo segera dimuat ke dalam dua mobil pick up yang diparkir di halaman Kodim.

Lima orang juru bicara rombongan KSKPKO segera menemui petugas jaga. Mereka menyampaikan keinginan untuk bertemu Dandim Boyolali, Letkol Drajad Budi Santoso. Mereka berniat membicarakan perihal surat-surat yang tidak pernah dijawab dan sekaligus meminta ijin memasuki lokasi genangan. Aparat militer yang terus berdatangan, termasuk Polisi Militer, dan intel berpakaian preman segera mengurung rombongan KSKPKO yang mencoba menarik perhatian bis-bis dan kendaraan lain yang lewat di

depan Kodim Boyolali. Akibatnya lalu lintas jadi macet.[25] Aparat keamanan kemudian meminta rombongan KSKPKO masuk ke ruangan pertemuan sambil menunggu kedatangan Dandim. Permintaan aparat ini ditolak oleh rombongan KSKPKO. Hanya 5 orang juru bicara yang masuk ke ruang pertemuan, diikuti oleh para wartawan.

Sambil menunggu kedatangan Dandim, rombongan yang ada di luar ruang pertemuan membikin yel-yel, baca puisi dan beberapa atraksi lain. Mereka mencoba menarik perhatian massa yang datang berkerumun di pinggir jalan. Sedangkan rombongan yang berada di dalam ruang pertemuan dibujuk oleh aparat dengan berbagai macam cara agar mengajak teman-temannya bubar. Dengan beberapa alasan, aparat militer mulai berterus terang bahwa Dandim Boyolali tidak bersedia untuk ditemui, antara lain dengan alasan bahwa Dandim sedang menghadiri undangan di Ungaran Yang lain mengatakan Dandim sedang main tenis.[26] Semua alasan yang dilontarkan, tidak bisa diterima oleh KSKPKO. Alasan dianggap sebagai tidak masuk di akal. Tak mungkin seorang Dansatgaspam yang sedang bersiaga penuh pergi meninggalkan posnya tanpa bisa dihubungi. Apalagi tidak ada anak buah yang bisa menggantikannya.

Akhirnya rombongan KSKPKO bersepakat menunggu sampai pk 13.00 WIB. Apabila sampai jam yang telah ditentukan Dandim belum juga datang, rombongan akan memasuki lokasi genangan Kedung Ombo dengan ataupun tanpa ijin. Sambil menunggu,

---

[25] Kantor Kodim Boyolali terletak persis di pinggir jalan raya Solo - Semarang

[26] Menurut sumber yang bisa dipercaya, Dandim sengaja dilarang menemui KSKPKO. Ia dianggap terlalu bersikap lunak menghadapi demonstrasi mahasiswa di Kedung Cumpleng pada 6 Pebruari 1989.

anggota rombongan KSKPKO yang beragama Islam melakukan sholat Jumat secara demonstratif di halaman Kodim Boyolali.

Selesai sholat, rombongan KSKPKO kembali bergabung dan mengumpulkan uang secara suka rela. Banyak mahasiswa lapar, karena mayoritas anggota rombongan banyak yang tidak sempat sarapan pagi. Tapi mereka lebih jengkel karena merasa dipingpong aparat militer yang terus berdatangan. Sementara itu udara panas yang menimbulkan kelelahan. Waktu yang ditentukan hampir menjelang, beberapa orang mulai bernyanyi bersahut-sahutan :

Mana Dandim, mana Dandim
Mana Dandim sekarang ....
Dandim lari, Dandim lari
Dandim lari sekarang ....

Penjagaan pihak militer terhadap rombongan KSKPKO semakin diperketat dengan didatangkannya tambahan satu peleton pasukan bersenjata lengkap M-16. Pasukan bertopi rimba tersebut mengawasi rombongan dari jarak sekitar 20 meter.

Beberapa orang komandan regu KSKPKO mencoba mencari mobil sewaan dan supir yang bersedia mengantar ke wilayah genangan Kedung Ombo. Wakil Ketua DPRD Tk II Boyolali datang. Ia mencoba mengajak dialog KSKPKO. Tapi upaya ini mengalami kegagalan kerena KSKPKO bersikukuh hanya bersedia berbicara dengan Dandim Boyolali yang mempunyai wewenang memberikan ijin memasuki lokasi genangan. Yel-yel yang tadinya dimulai dengan Dandim pengecut! Gantung Dandim! kemudian berkembang dengan menyebut nama Ismail, Soeharto.

Kata-kata gantung Ismail! dan Gantung Soeharto! hampir diteriakkan seluruh anggota rombongan KSKPKO yang berjajar dua-dua ketika meninggalkan halaman Kodim Boyolali. Suasana sudah sedemikian panasnya Tapi pihak militer sama sekali tidak mengam-

bil tindakan apapun. Mereka hanya berusaha membubarkan kerumunan massa dan meminta para sopir kendaraan yang memperlambat laju kendaraannya segera memacunya kembali. Beberapa polisi militer mendekati mobil-mobil yang disewa oleh rombongan KSKPKO. Si sopir diminta agar tidak menyewakan mobilnya kepada KSKPKO.

Rombongan KSKPKO kemudian meninggalkan Kodim Boyolali dengan teriakan : Kami kecewa! Iring-iringan 13 mobil yang membawa rombongan dan barang-barang yang akan diberikan kepada penduduk Kedung Ombo itu beberapa kali mencoba berbelok ke arah lokasi. Namun pada setiap pertigaan jalan masuk menuju lokasi genangan telah diblokir oleh satuan polisi militer. Rombongan KSKPKO meneruskan perjalanan ke arah utara dan berhenti di pertigaan jalan di Sruwen, yang merupakan jalan terlebar dan termudah untuk menuju Kedung Ombo dengan berkendaraan.

Tapi, sekali lagi pasukan militer yang mengikuti rombongan KSKPKO semenjak dari Kodim Boyolali dengan segera memblokir jalan masuk dengan senapan M-16 terhunus. Kekuatan pasukan militer bertambah dengan didatangkannya satu peleton pasukan kavaleri dan puluhan polisi yang segera mengambili semua kunci kontak mobil-mobil rombongan KSKPKO. Insiden kecil hampir muncul ketika mahasiswa-mahasiswa marah dan mengepung petugas yang merampas kunci kontak mobil. Keributan terhindarkan tatkala Wakapolres Boyolali Mayor Soewadji memerintahkan anak buahnya mengembalikan barang-barang yang diambil kepada pemiliknya.

Rombongan KSKPKO kemudian didatangi dan diajak oleh Wakapolres dan Kasdim Boyolali Mayor Firmansyah yang saat itu hanya bercelana pendek, berunding di suatu tempat. Lima orang juru bicara KSKPKO diajak menaiki kendaraan jeep. Namun mereka menolak berunding kecuali semua rombongan ikut beserta mereka

dengan berjalan kaki bersama. Usulan KSKPKO akhirnya diterima Wakapolres Boyolali.

Secara beriringan rombongan KSKPKO mengikuti Wakapolres dan Kasdim menuju tempat yang belum diketahui, untuk berunding. Mereka mendapat kawalan ketat dari puluhan polisi militer. Baru berjalan sekitar 200 meter, rombongan menghentikan langkahnya. Mereka baru sadar diajak kembali menuju Boyolali. Komandan lapangan KSKPKO lewat megaphone meminta rombongan agar semuanya kembali ke Sruwen, karena akan percuma saja dengan pihak aparat Boyolali karena toh Dansatgaspam telah tidak bersedia bertemu dengan KSKPKO. Rombongan KSKPKO yang telah merasa kesal dengan beberapa kejadian sebelumnya semakin bertambah kesal, mereka berbalik sambil mengeluarkan poster dan spanduk yang memang telah disiapkan oleh kelompok KSKPKO di Jogja apabila upaya untuk masuk lokasi menemui kegagalan. Dengan bentangan spanduk dan poster yang isinya sangat keras, rombongan KSKPKO berdiri berderet di pinggir jalan. Tontonan ini menarik perhatian massa dan lalu lintas kendaraan yang jadi macet.[27] Beberapa penumpang bis ada yang berteriak : Merdeka! Hidup mahasiswa! Teriakan-teriakan dibalas oleh para mahasiswa.

---

[27] Poster-poster yang dibawa KSKPKO kali ini bernada sangat keras. a.l.: Ismail, Kedung Ombo bukan tanah Mbahmu!, Ismail tidak bersih lingkungan rakyat sudah tahu. DPR antek kapitalis motto: Datang, duduk, dengar, diam, duit. Rakyat dan Mahasiswa bersatu melawan anjing kapitalis. Jangan tipu rakyat dengan TV dan *Jer basuki mawa bhatukmu!* yang artinya untuk mencapai kesejahteraan dibutuhkan jidatmu, sebagai tanggapan ucapan Presiden Soeharto di TVRI yaitu *Jer basuki mawa bea* (untuk mencapai kesejahteraan/cita-cita dibutuhkan pengorbanan). Ucapan presiden tersebut merupakan tanggapan terhadap penduduk Kedung Ombo yang belum bersedia meninggalkan tanahnya.

Ketika semua anggota rombongan kembali berada tepat di pertigaan jalan Sruwen, tiba-tiba secara serentak anggota rombongan bergerak maju menyeberang jalan mendekat ke arah jalan masuk ke Waduk Kedung Ombo yang telah dipagar betis oleh dua regu pasukan militer. Terjadi teriakan-teriakan panik oleh massa yang menonton kenekadan KSKPKO yang berupaya menerobos pagar betis tersebut. Langkah anggota rombongan KSKPKO baru berhenti ketika terdengar sebuah perintah : Siap ! .... disusul oleh : Klik, klik. Suara picu senapan ditarik dan acungan M-16 siap tembak ke arah dada rombongan. Rombongan KSKPKO yang tertegun sejenak segera maju bergerak lagi secara perlahan sambil menyanyikan lagu Maju Tak Gentar.

Tapi langkah rombongan KSKPKO betul-betul terhenti ketika puluhan polisi militer mengurung mereka dan memerintahkan rombongan berhenti bergerak. Beberapa mahasiswa kalap melihat militer mengambil posisi siap tembak. Secara nekad mereka maju mendekati pagar betis sambil berteriak-teriak menantang. Wartawan yang mencoba mengabadikan adegan ini ada yang direbut kameranya, ada juga yang ditempeleng dan rol filmnya dilepas. Situasi benar-benar panas ketika muncul seorang berpakaian preman yang memberikan perintah agar picu dilepas kembali dan pagar betis dibubarkan. Perintah tersebut segera dilaksanakan. Pasukan kemudian mengambil posisi siaga di kiri-kanan jalan.

Kasdim Boyolali Mayor Firmansyah mengambil alih komando. Lewat megaphone yang dipinjam dari komandan lapangan KSKPKO, ia meminta agar rombongan untuk sementara menunda niatnya me-masuki daerah genangan sampai selesainya perundingan antara aparat dan pimpinan rombongan KSKPKO. Kasdim Boyolali meminta agar pimpinan rombongan KSKPKO bersedia mengadakan perundingan dengannya. Tampil lima orang yang sebelumnya telah dipilih sebagai juru bicara rombongan mahasiswa.

Sambil menunggu perundingan yang dilakukan di depan sebuah warung kecil di pertigaan Sruwen, rombongan KSKPKO duduk di atas aspal di pertigaan jalan sambil bernyanyi-nyanyi. Mereka terus bertahan di tempat ketika turun hujan gerimis. Demikian pula dengan massa yang terus bertambah dan seolah-olah ingin melihat tontonan langka.

Sementara itu, 5 juru bicara KSKPKO bersama Wakapolres dan Kasdim Boyolali serta beberapa perwira militer mangadakan perundingan. KSKPKO diminta pengertiannya untuk membubarkan diri. Namun permintaan ditolak dan KSKPKO meminta agar pihak aparat tidak terus berbicara berputar-putar dan mencari-cari alasan penolakan untuk memasuki daerah genangan. Wakil KSKPKO menolak tawaran rokok, teh dan makanan yang diberikan pihak aparat sebagai sikap solider kepada teman-temannya yang sama-sama mulai pagi hari belum makan. KSKPKO juga menolak tawaran untuk menyerahkan bantuan lewat departemen sosial. Pihak militer yang mencoba mengulur-ulur waktu sambil menunggu adanya perintah lebih lanjut lewat ***handy talky***, dengan mencatat identitas masing-masing juru bicara.

Mahasiswa akhirnya menjadi tidak sabar lagi dan maminta ketegasan aparat, apakah KSKPKO diijinkan memasuki lokasi atau tidak. Juru bicara KSKPKO juga menyesalkan pihak militer yang meremehkan KSKPKO yang telah mengurus prosedural perijinan tapi tidak mendapat tanggapan dari Satgaspam, sehingga para mahasiswa akhirnya menjadi marah dan berdemonstrasi. Petugas militer dan polisi kemudian mulai berusaha melunakkan sikapnya. Mereka mencoba berterus terang, bahwa mereka hanyalah seorang bawahan yang sekedar menjalankan perintah Yang berhak memberikan keputusan dan ijin hanyalah atasan mereka. Mereka meminta, bahkan dengan bujukan-bujukan halus, agar KSKPKO

bisa mengerti posisi mereka.[28] Dan kalau KSKPKO tetap bersikeras dengan keinginan masuk ke lokasi genangan untuk mem-bagikan barang-barang, Wakapolres Mayor Soewadji bersedia mengantarkan 4 atau lima mahasiswa. Asalkan anggota rombongan KSKPKO yang lain bersedia membubarkan diri.

Usulan simpatik tersebut ditolak oleh kelima juru bicara KSKPKO. Rombongan KSKPKO terdiri dari para sukarelawan-sukarelawati yang ingin membantu penderitaan rakyat Kedung Ombo. KSKPKO juga menyatakan pengertian atas posisi para petugas sebagai orang yang menjalankan perintah. Atas dasar itu pula, rombongan berjanji untuk membubarkan diri. Sebelum seluruh anggota rombongan meninggalkan Sruwen, KSKPKO menyanyikan lagu "Padamu Negri" secara bersama-sama. Beberapa orang penduduk menggunakan kesempatan tersebut untuk menanyakan alamat KSKPKO kepada mahasiswa secara sembunyi-sembunyi.

Sekitar pk. 16.00 iring-iringan mobil yang membawa 150 anggota KSKPKO dan barang-barang sumbangan kembali berjalan. Rombongan meninggalkan Sruwen secara perlahan-lahan diikuti oleh puluhan polisi dan intel militer. Rombongan kemudian berhenti di sebuah pasar di Desa Gede Tingkir. Sebagian anggota rombongan makan ke warung terdekat, sebagian lagi bersembahyang ke sebuah langgar kecil. Sedangkan yang lain, para juru bicara, komandan regu dan komandan lapangan menuju ke tengah pasar untuk menge-

[28] Salah seorang perwira mengatakan yang hadir dalam pertemuan tersebut bahkan mengatakan: "Okelah, kami mengaku salah telah meremehkan adik-adik semua. Tapi demi kebaikan kita semua, saya mohon adik-adik bersedia membubarkan diri, karena kalu begini terus, kamilah yang akan terkena getahnya. Kondite kami jelek ...(dst). Apakah adik-adik tidak kasihan sama saya, ini kan hari libur. Saya sebetulnya harus mengantarkan anak dan istri berekreasi. Namun tidak bisa, karena saya harus mengurusi adik-adik sekalian ... (dst)". Sumber: Dokumentasi KSKPKO

valuasi dan menentukan langkah lanjutan yang akan diambil sesuai dengan skenario yang ada. Selama perundingan ini, KSKPKO memperlakukan sistem pengamanan secara ketat. Pihak polisi yang berdatangan dengan membawa senapan tua jenis LE hanya mengawasi rombongan dari jarak sekitar 50 meter. Seorang intel militer yang mencoba menyusup dan mendengarkan perundingan dengan mengaku sebagai mahasiswa segera ketahuan dan diusir oleh anggota KSKPKO yang bertugas menjaga perundingan.

KSKPKO bersepakat untuk mengadakan aksi lanjutan di Semarang. Rombongan KSKPKO akan kembali berkumpul pada pk 08.30 tanggal 25 Maret 1989 di depan Mesjid Baiturachman, Simpang Lima Semarang. Dan untuk menghindari kuntitan pihak intel, anggota KSKPKO bersepakat untuk membagi rombongan menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri antara 3 - 6 orang. Hanya mobil yang membawa barang-barang sumbangan yang langsung menuju ke Semarang. Sedangkan anggota rombongan yang lain ada yang naik kendaraan umum menuju ke Salatiga, ada yang langsung ke Semarang dan Jogja. Sebagian besar turun di sepanjang jalan antara Salatiga - Ungaran untuk kemudian melanjutkan ke Semarang dengan kendaraan umum.

Kelompok-kelompok kecil KSKPKO yang tiba di Semarang secara terpisah itu segera berkumpul kembali pada tengah malam di pos yang telah ditentukan. Persiapan aksi lanjutan segera dilakukan, termasuk pembuatan spanduk dan atribut yang akan dipakai.

Aksi ke dua KSKPKO ini mengakibatkan Sekretariat KSKPKO pada keesokan harinya didatangi petugas Sospol yang menanyakan beberapa hal sehubungan dengan aksi di Kodim Boyolali dan Sruwen. Beberepa tekanan diterima oleh anggota KSKPKO Salatiga yang mempunyai ayah pegawai negeri.

Aksi KSKPKO Ke Tiga

Pagi pada tanggal 25 Maret 1989 pk 09.00 tepat, semua anggota rombongan KSKPKO telah berkumpul lengkap. Mereka bergerak meninggalkan Simpang Lima dengan menggunakan kain putih bertuliskan KSKPKO di pergelangan tangan kanan. Sebagaian anggota KSKPKO yang telah kembali di Jogja dan Salatiga dan tidak bisa mengikuti aksi di Semarang telah digantikan oleh puluhan mahasiswa Semarang. Rombongan terdepan bergerak maju dengan membawa sebuah spanduk besar bertuliskan 'Beri Kami Kesempatan Ikut Meringankan Penderitaan Rakyat'. Yang lain membawa poster-poster. Dengan berjalan kaki, rombongan memutari Simpang Lima menuju kantor Gubernuran. L alu lintas jadi macet karena semua penumpang kendaraan ingin membaca kata-kata yang tertera pada poster atau mendapatkan selebaran yang dibagi-bagikan oleh KSKPKO.

Ketika iring-iringan melewati depan kampus Undip, beberapa orang anggota rombongan KSKPKO meneriakkan kata-kata: "Undip banci ! Undip banci !". Teriakan-teriakan ini ditanggapi oleh puluhan mahasiswa Undip yang sedang duduk-duduk di depan kampusnya. Mereka berlari dan bergabung dengan barisan KSKPKO.

Sekitar 5 km rombongan KSKPKO berkeliling, rombongan sampai ke kantor Gubernuran. Mereka segera duduk di teras gubernuran sambil mengangkat poster tinggi-tinggi dan berteriak : "Mana Ismail, ... kami harus bertemu dia! Kami perlu tahu, mengapa aksi sosial kami dilarang". Hal ini membuat petugas keamanan yang berada di pintu gerbang kelabakan. Mereka segera menelpon pihak kepolisian dan militer.

Karyawan Pemda yang berseragam Hansip segera menghambur ke luar dari ruangnya masing-masing ketika melihat rombongan KSKPKO datang secara demonstratif. Himbauan lewat pengeras suara yang memerintahkan agar para karyawan kembali

bekerja dan menempati meja kerja masing-masing tidak diindahkan. Namun kejadian ini hanya berlangsung beberapa menit saja, karena beberapa truk militer datang. Dari dalam truk berloncatan pasukan yang terdiri Armed dan pasukan anti huru hara lengkap dengan perisai kaca tahan peluru, cambuk, pentungan dan gas air mata. Mereka berlarian menuju ke tempat mahasiswa berkumpul. Seorang komandan pasukan menghardik : "Bubar, bubar... Kalian sudah mengganggu ketertiban di sini !" dan dibalas dengan teriakan: "Tidak mauuu. Kami harus ketemu Ismail. Mana dia ?!" oleh para mahasiswa. Sang komandan bingung. Belakangan baru diketahui bahwa semula dia diberitahu kantor gubernur diserbu oleh gerombolan perampok dan pencoleng. Di tengah keheningan suasana tiba-tiba seorang mahasiswi berceletuk : "Kok bawa cambuk segala Pak? Memangnya kami kuda lumping ?!" celetukan spontan ini disambut dengan derai tawa rombongan KSKPKO dan penonton lainnya.

Aparat terus berdatangan. Antara lain dari polisi militer, poltabes dan garnisun yang bersenjata lengkap. Komandan garnisun Semarang Letkol Judo Santoso segera berusaha menekan KSKPKO lewat megaphone. Ia minta agar KSKPKO yang dianggap telah mengganggu ketertiban di wilayahnya segera ke luar dari halaman gubernuran. Atau KSKPKO akan dihadapi dan dipaksa dengan kekerasan. KSKPKO diberi waktu lima menit untuk membubarkan diri.

Suasana berubah menjadi tegang. Massa terdiam. Komandan dan pasukan langsung memberikan aba-aba untuk mengurung rombongan KSKPKO: "Pasukan maju lima langkah Grak!". Rombongan KSKPKO merapatkan diri dan membentuk lingkaran dengan saling berangkulan dan menundukkan kepala. Pasukan yang mengepung KSKPKO melecut-lecutkan cambuk dan mengayunkan pentungan. Langkah maju mereka baru berhenti ketika berada sekitar jarak satu meter dari lingkaran. Bentakan hardikan mulai dilon-

tarkan, namun rombongan KSKPKO bungkam seribu bahasa. Beberapa kali terdengar ancaman, "Lima menit kalian kami beri waktu. Sekali lagi, lima menit". Namun rombongan KSKPKO tetap diam tak bergerak dan membuat petugas tampak kehilangan akal.

Sang komandan kemudian berunding dengan pejabat teras Pemda Jawa Tengah. Sepuluh menit kemudian terdengar kata-kata Letkol Djono Santoso dengan nada lembut : "Adik-adik, ... Bapak Gubernur bukan tidak mau menerima kalian. Beliau sedang tidak ada di tempat. Ke luar kota".

"Kami tidak perduli... sampai kiamatpun kami tunggu di sini", terdengar balasan dari kerumunan KSKPKO yang masih berjongkok sambil berangkulan. Petugas kemudian mencoba menawar,"Bagaimana kalau 6 wakil kalian diterima Kaditsospol Jateng?" Lama jawaban tidak terdengar, hingga akhirnya beberapa pimpinan rombongan KSKPKO berembug. Mereka sepakat untuk menerima tawaran. Keputusan tersebut dijelaskan kepada seluruh rombongan.

Serentak dengan berangkatnya ke enam orang wakil KSKPKO tersebut ke ruang perundingan, massa KSKPKO berdiri tegak kembali. Mereka membentang spanduk besar. Komandan lapangan KSKPKO memimpin massa menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Disusul dengan pembacaan puisi dan pidato-pidato protes di hadapan para petugas keamanan dan pegawai kantor gubernur. Para petugas keamanan kemudian melonggarkan kepungan. Di barisan paling depan pasukan ati huru hara dengan tameng kaca anti peluru dan gas air mata di tangan. Di lapis ke dua, tampak pasukan Brimob. Sedangkan pasukan Armed dan Garnisun berada di posisi paling luar lingkaran. Petugas intel berpakaian preman, hansip dan satuan pengamanan mondar-mandir mencoba menghalau para pegawai kembali masuk ke ruangan masing-masing.

Hampir satu jam kemudian, para wakil KSKPKO ke luar. Mereka diiringi Kepala Biro Hukum Pemda Jateng, Moch Munich

SH. Salah seorang di antaranya memberikan penjelasan kepada salah seorang anggota rombongan KSKPKO : "Perundingan menemui jalan buntu, karena Yang Mulia Ismail tidak ada di tempat!", jelasnya dengan nada mengejek. "Tampaknya, sudah tidak ada gunanya lagi kita berdialog. Semua telah menjadi batu. Niat baik dicurigai. Kesetiakawanan pada rakyat Kedung Ombo ditampik oleh kekuasaan dan birokrasi. Sungguh kita tak berdaya apa-apa, ketika dihadapkan pada senjata".

Komandan lapangan KSKPKO kemudian mengajak rombongan: "Kawan-kawan yang budiman, marilah kita pulang ke tempat masing-masing. Saya tahu betapa pilu hati kita, namun apa daya?". Anggota rombongan KSKPKO kemudian berkemas. Kemudian mereka berdiri dan menyanyikan lagu Padamu Negri dan Syukur secara bersama-sama dengan khidmat. Seusai meluapkan kepedihan dan kenestapaan, pimpinan rombongan KSKPKO menghampiri pejabat teras Pemda Jateng dan secara simbolik mereka menyerahkan makanan, obat-obatan, tali-temali dan perlengkapan lain yang dengan susah payah telah dikumpulkan selama beberapa waktu. Selanjutnya KSKPKO meminta agar barang-barang tersebut bisa disumbangkan kepada rakyat di Kedung Ombo.

Anggota rombongan KSKPKO yang berasal dari berbagai kota kemudian berpisah. Beberapa hari kemudian, mereka berkumpul kembali dan mengadakan serangkaian pertemuan untuk mengevaluasi serta menentukan langkah lanjutan.

Aksi KSKPKO Ke Empat

Segala upaya resmi KSKPKO untuk membantu meringankan penderitaan rakyat Kedung Ombo agaknya memang sudah buntu. Mendagri Rudini yang semula menaruh simpati dan menjanjikan kemudahan ijin bagi Tim Sukarelawan KSKPKO ternyata juga tidak bisa memenuhi janjinya. Para pejabat yang berkompeten seperti Dandim

Boyolali dan Gubernur Jateng malah sengaja menghindari bertemu dengan KSKPKO. Beberapa aktivis KSKPKO di Jogja, Salatiga dan Semarang malah mendapat pemanggilan-pemanggilan untuk menghadapi pemeriksaan dan interogasi. Dan setelah muncul ucapan Suharto saat di Mrica, terjadi keseragaman kebijakan serta pernyataan dari pejabat baik di pusat dan di daerah. Sebagai reaksi atas sikap pemerintah, KSKSPKO bersepakat mengadakan sebuah aksi sekali lagi. [29]

Kali ini aksi yang digelar di Jakarta sebagai puncak keprihatinan KSKPKO. Dipilih model tirakatan di TMP kalibata sebagai simbol ketidak-percayaan mahasiswa terhadap semua pejabat yang masih hidup. KSKPKO juga sudah tidak lagi mempercayai lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif yang telah membisu dan hanya menonton kebingungan, sementara penderitaan 35.000 rakyat di daerah genangan Waduk Kedung Ombo semakin memilukan. Partai-partai politik juga sibuk dengan pertikaian intern. Karena itu pula, KSKPKO memilih untuk mengadukan persoalan kesewenang-wenangan kepada para pahlawan sebagai orang yang gugur dalam upaya perjuangan memerdekakan Indonesia menjadi sebuah negara adil makmur.

---

[29] Para pejabat pemerintah pusat dan daerah secara resmi melarang kelompok-kelompok yang berniat memasuki lokasi genangan untuk membantu penduduk di daerah genangan. Setelah ucapan Soeharto pada 23 Maret 1989, muncul isyu santer tentang pasukan Kopassus diturunkan dari markasnya di Kartasura ke lokasi genangan Kedung Ombo. Mereka mendapat perintah untuk membuat 'shock" orang-orang yang tidak mau pindah dengan model Petrus (penembakan misterius). Mereka akan masuk ke daerah genangan dengan pakaian premanala pemburu untuk men'sukabumi'kan tokoh-tokoh pembangkang di Kedung Ombo dan mempertontonkan jenazahnya agar penduduk menjadi ketakutan. Namun, konon akhirnya pasukan tersebut ditarik kembali ke barak sebelum sempat bergerak, karena muncul serangkaian aksi-aksi mahasiswa yang cukup keras.

Karena upaya berdialog dengan yang masih hidup telah menemui kegagalan, sebagai simbol dan sekaligus sindiran KSKPKO memilih cara-cara yang berbau mistis. Pada tanggal 29 Maret 1989 pk 09.00 wib 8 orang anggota KSKPKO (dari 13 orang yang direncanakan) yang merupakan wakil dari Jakarta, Bogor, Salatiga dan Jogja mendatangi kantor Mendagri Rudini. Mereka berpakaian hitam-hitam, berikat kepala kain hitam sebagai lambang berduka cita. Rombongan KSKPKO dan beberapa wartawan yang telah menunggu di kantor Mendagri Jl. Merdeka Selatan segera bergabung dengan anggota KSKPKO yang berpakaian hitam-hitam yang memasuki halaman Depdagri diiringi petugas keamanan dan intel.

Kedelapan orang mahasiswa anggota KSKPKO berpakaian hitam-hitam tersebut segera menempelkan spanduk hitam dengan tulisan putih "Sama Juga Bohong" di dinding kaca sebelah barat kantor utama Depdagri. Setelah itu salah seorang di antara mereka membacakan sebuah mosi tidak percaya untuk Menteri Rudini. Ini simbol ketidakpercayaan KSKPKO pada semua lembaga eksekutif.[30]

Pembacaan mosi tidak percaya tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Sumpah Mahasiswa yang berbunyi :

> Kami mahasiswa-mahasiswi Indonesia dengan ini mengaku:
> bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan
> berbangsa satu, bangsa yang gandrung keadilan
> berbahasa satu, bahasa kebenaran.

Selesai pembacaan, rombongan KSKPKO segera meninggalkan lapangan Depdagri, meskipun pihak Depdagri memberitahukan bahwa Menteri ingin bertemu dengan KSKPKO untuk

[30] Lihat Kompas, 30 Maret 1989.

berdialog. Mendagri saat itu sedang memberikan pengarahan pada rapat konsultasi PKK di kantor Depdagri. Rombongan KSKPKO yang berpakaian hitam-hitam dan rombongan lain segera berpencar menjadi beberapa kelompok kecil.

Pada pk. 12.00 kedelapan mahasiswa yang berpakaian hitam-hitam muncul di pelataran TMP Kalibata, Jakarta Selatan yang hanya berjarak kurang lebih 3 km dari kantor Mendagri. Mereka langsung menemui penjaga TMP dan meminta ijin memasuki lokasi pemakaman. Kepala penjaga tampaknya ragu-ragu untuk memberikan ijin masuk. Terjadi tarik urat leher antara Satpam TMP dan rombongan KSKPKO yang kemudian segera membentangkan sebuah spanduk bertuliskan "Tirakat Keprihatinan Untuk Rakyat Kedung Ombo: Dialog Dengan Pahlawan". Spanduk ini bukti bahwa niat rombongan KSKPKO adalah sekedar berziarah dan mengadakan tirakatan.

Kemudian datang seorang petugas berpakaian preman dengan membawa *handy talky.* Ia mengaku dari Teritorial Mampang Prapatan. Dengan simpatik mempersilakan rombongan KSKPKO memasuki halaman TMP, asalkan tidak mengganggu tata tertib dan ketentuan yang ada. Puluhan mahasiswa Jakarta yang datang secara berombongan segera menggabungkan diri dengan rombongan yang telah berada di dalam. Mereka kemudian melaku-kan upacara dan doa di bawah sebuah pohon Kamboja .Seorang prajurit bersenjatakan SS-1 dan aparat keamanan berpakaian preman mengawasi mereka.

Selesai dengan upacara kecil tersebut, rombongan KSKPKO mengambil tempat di tengah-tengah pelataran TMP Kalibata. Mereka membentuk sebuah lingkaran kecil. Mereka mulai melakukan upacara tirakatan di tengah sengatan terik matahari. Dimulai dengan mengheningkan cipta kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa dan menyanyikan lagu Syukur. Pada saat lagu Syukur dinya-

nyikan bersama, salah seorang mahasiswa yang berpakaian hitam-hitam bangkit membacakan puisi berisi pengaduan kepada arwah para pahlawan. KSKPKO menumpahkan seluruh kekecewaan terhadap ketidakmampuan birokrasi pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan tanpa mengorbankan kepentingan *wong cilik*. Mereka juga menyatakan kekecewaan terhadap kekakuan dan ketidaktanggapan aparat Pemda Jateng dalam menangani dan menjalankan roda pembangunan di Kedung Ombo.

Renungan yang merupakan bagian akhir dari upacara pembukaan, di akhiri dengan pernyataan dan himbauan kepada semua orang yang bersimpati kepada rakyat Kedung Ombo untuk ikut bertirakat dengan KSKPKO selama 7 hari 7 malam. Ajakan ini disambut para mahasiswa yang baru datang. Kemudian mereka melakukan ziarah keliling dan menaburkan bunga dari makam ke makam yang lain.

Hanya selang beberapa menit, aparat militer dan kepolisian mulai berdatangan. Ada yang mengaku dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan, Polsek Pasar Minggu, Kodim Jakarta Selatan, Koramil Pasar Minggu, Komando Garnisun Ibukota, POM ABRI dan Marinir. Mereka memanggili anggota KSKPKO dan para mahasiswa yang masih berada di tengah areal makam para pahlawan. Salah seorang perwira mulai berteriak : "Saya kasih waktu lima menit,... kalian sudah harus keluar dari lokasi ini !". Massa yang datang semakin bertambah banyak. Menurut rencana para mahasiswa dari berbagai kota akan datang ke TMP Kalibata secara bergelombang untuk ikut melakukan tirakat. Selebaran dan undanagan memang telah dikirimkan ke kampus-kampus beberapa hari sebelum upacara dilakukan.

Kerumunan mahasiswa yang bertambah banyak mengakibatkan petugas menjadi marah dan berteriak-teriak memerintahkan agar para mahasiswa segera bubar dan meninggalkan lokasi TMP.

Namun KSKPKO menolak meninggalkan areal TMP dan mencoba terus bertahan. Mereka merasa tidak melanggar peraturan yang ada. Bahkan mereka telah melaporkan diri dan mengisi buku tamu sesuai prosedur. Situasi menjadi tegang, apalagi kemudian 4 buah truk militer berisi pasukan bersenjata lengkap datang dan siap melakukan perintah untuk membubarkan massa.

Keadaan berkembang menjadi semakin kacau, tatkala beberapa perwira militer dan kepolisian berteriak-teriak, berebut memberikan instruksi. Para petugas mulai mendorong-dorong mahasiswa dan KSKPKO sambil melemparkan berbagai tuduhan. Rombongan mahasiswa yang melihat pihak aparat mulai bersikap kasar, mencoba mengalah. Mereka bergerak menuju pagar TMP Kalibata dan kemudian duduk berjongkok, bertahan.

Para petugas segera mengurung rapat. Para perwira dari berbagai kesatuan yang hadir segera mengadakan rapat. Tak lama kemudian mereka mulai mendekat ke rombongan mahasiswa dan membentak-bentak : "Kalian dari mana? Tujuan kalian mau apa? Siapa pemimpin kalian? Apa motivasi kalian mengaduk-aduk tempat terhormat ini?" Bentakan dilanjutkan " Tahu!!,.... saya saja masuk areal ini harus melepas tanda pangkat dan topi saya. Kalian telah menghina para pahlawan!". Pada saat yang sama, petugas dari Teritorial Mampang Prapatan yang mengijinkan rombongan KSKPKO masuk ke lokasi TMP, ditempeleng oleh seorang perwira militer berpangkat Letkol, karena dianggap telah lalai dalam menjalankan tugas.

Rombongan mahasiswa dan KSKPKO yang kelelahan mulai emosi. Mereka membalas berteriak : "Kalian ini bagaimana sih? Kok sepertinya tidak ada koordinasi. Satu bertanya, semua ikut bertanya!". Mahasiswa yang lain manyahut: "Kami jadi bingung, mau jawab yang mana?". Petugas yang mendapat jawaban seperti itu, menjadi kehilangan akal. "Pokoknya, kalian harus segera me-

ninggalkan tempat ini", kata seorang perwira yang kontan dijawab oleh seorang mahasiswa, "Lho,... Bapak-bapak ini gimana sih. Kok komandonya kacau? Tadi katanya tidak boleh di dalam,... kalau di luar boleh. Kok sekarang diusir?". Seorang mahasiswa lain yang semenjak semula berdiam diri, secara spontan berteriak : "Mau apa sih kalian membentak-bentak seperti itu? Memangnya kami ini apa? Kami bukan maling, kami bukan pencuri !"

Petugas kemudian merubah strategi."Sekarang, kalian ikut kami dulu," kata petugas berpakaian polisi. "Tidak mau! Kami bukan maling, kami mau di sini!", teriak mahasiswa. Akhirnya sikap petugas melembut. "Adik-adik,... kami tidak bermaksud melarang orang berziarah atau bertirakat di sini. Silakan saja,..... tapi harus mau mengikuti prosedur yang ada. Siapapun, termasuk Kepala Negara kalau akan mengadakan acara di sini harus meminta ijin dari komando Garnisun Ibukota," ucap seorang perwira berseragam hijau dengan nada lembut. Seorang petugas polisi kemudian membujuk : "Mari, kalian ikut saya ke Polres Jakarta Selatan untuk mengurus prosedural perijinan memasuki TMP Kalibata ini." Bujukan petugas tersebut dijawab oleh para mahasiswa: "Baik, ... kalau itu maksudnya." Kedelapan mahasiswa berpakaian hitam hitam dan tiga orang anggota KSKPKO lainnya naik kendaraan umum yang disewa petugas.[31] Sisa rombongan yang lain menyusul ke Polres Jakarta Selatan, sebagian mengkontak perwakilan KSKPKO di beberapa kota.

Insiden hampir saja terjadi tatkala para mahasiswa tiba di Polres Jakarta Selatan. Agaknya jajaran Polres Jakarta Selatan baru saja melakukan razia terhadap pedagang asongan dan beberapa maling. Petugas Polres mengira rekan-rekannya yang datang bersama rombongan KSKPKO yang berpakaian hitam-hitam itu mungkin

31) Lihat: Pos Kota, 30 Maret 1989

baru saja menangkap gerombolan penjahat. Rombongan KSKPKO dibentak dan didorong-dorong, kemudian diperintahkan agar berjajar dua-dua dan berjalan jongkok dengan tangan di atas kepala. Seorang mahasiswa balas membentak: "Apa-apaan ini? Sok tahu lu!". Salah seorang mahasiswa mengambil ancangan memukul ketika Provos datang membubarkan petugas polisi yang sebenarnya tidak mengetahui permasalahan sesungguhnya itu. Sebelas orang mahasiswa itu diperiksa dan dimintai keterangan selama kurang lebih 8 jam secara terpisah oleh petugas dari Kepolisian dan Kodam V Jayakarta. Kesimpulan, aparat memang tidak berniat untuk mengeluarkan ijin tirakatan 7 hari 7 malam yang dijanjikan kepada KSKPKO.

Sekitar pk. 17.00 wib, 50 mahasiswa dan aktivis pemuda yang mendengar rekan-rekan mereka ditahan berdatangan ke Polres Jakarta Selatan . Mereka bergabung dengan rombongan KSKPKO yang semenjak siang duduk bergerombol di seberang jalan di depan Polres Jaksel. Sambil menunggu, mereka meminta agar bisa bertemu dengan rekan-rekannya yang sedang diinterogasi. Mereka menyatakan akan tetap bertahan sebelum rekan-rekannya dibebaskan. Kasatserse Polres Jakarta Selatan Lettu Alex Tangyong berjanji tidak akan menyakiti anggota KSKPKO yang sedang diinterogasi dan segera melepas mereka begitu keterangan yang dicari dianggap telah lengkap.

Pada sekitar pk. 20.30 Wib, kesebelas mahasiswa telah selesai menjalani proses interogasi dan bergabung dengan rombongan mahasiswa serta aktivis pemuda yang semakin banyak berdatangan, muncul undangan dari Kapolres Jakarta Selatan, Letkol F Arwien dan pimpinan Garnisun Ibukota Letkol Santosa untuk berdialog. Mahasiswa yang telah mendapat kesimpulan, bahwa petugas melarang rencana tirakatan hanya menanggapi undangan tersebut tanpa bersemangat. Namun akhirnya banyak di antara anggota rombongan KSKPKO merasa malas mendengarkan pembicaraan

kedua petugas yang lebih mirip ceramah itu, apalagi didapatkan kesan petugas mau menang sendiri. Seorang mahasiswa kemudian berkata : "Percuma berdialog dengan mereka, karena mereka hanya mau mendengarkan omongannya sendiri !", sambil mengajak rekan-rekannya pulang. Dan secara serentak rombongan KSKPKO, mahasiswa serta aktivis pemuda meninggalkan Polres Jakarta Selatan.

Dengan demikian, baru dua jam dari rencana tirakatan selama tujuh hari tujuh malam itu telah dibubarkan oleh aparat keamanan. Padahal rencana akbar tersebut diperkirakan akan diikuti oleh sekitar 5.000 mahasiswa dan intelektual dari berbagai kota di Jawa secara bergelombang. Sementara itu, semenjak sore TMP Kalibata telah dijaga oleh dua peleton pasukan marinir bersenjata lengkap. Rombongan mahasiswa dari Bandung, Bogor dan Jogja yang pada petang harinya datang ke TMP Kalibata untuk bergabung dengan rekan-rekannya, menjadi kebingungan melihat situasi di sekitar TMP. Mereka baru mengetahui duduk persoalannya, ketika bergabung dengan anggota KSKPKO di beberapa pos di Jakarta, yang di antaranya telah ditunggui oleh beberapa petugas intel.

Aksi Diam-diam

Selain aksi yang dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat, mulai aksi pertama sampai dengan aksi ke empat, KSKPKO juga melakukan sebuah aksi yang sifatnya diam-diam. Dalam penyusunan skenario pertama kali, KSKPKO sengaja melakukan pemilahan antara aksi untuk membentuk opini dan aksi diam-diam yang sengaja dirahasiakan.

Aksi diam-diam tersebut dilakukan dengan cara penyusupan menembus satgaspam secara berkala dan hanya melibatkan kelompok kecil. Dalam aksi tersebut dilakukan koordinasi pemantauan keadaan penduduk di daerah genangan dan penyampaian barang-barang yang dibutuhkan penduduk seperti tali-temali, makanan,

pakaian dan obat-obatan serta vitamin. Setiap kali penyusupan, anggota KSKPKO selalu membawa obat-obatan untuk dibagikan kepada penduduk yang memerlukannya. Barang dan uang berjumlah ratusan ribu yang berhasil dikumpulkan KSKPKO di beberapa kota disampaikan kepada penduduk dengan cara yang sama atau lewat sebuah LSM di Solo. [32] Semua sumbangan dalam bentuk uang selalu dijadikan barang terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada penduduk yang membutuhkannya.

Aksi penyusupan ini berjalan cukup rapi, karena sampai detik-detik terakhir tidak pernah tercium oleh pihak aparat keamanan.[33] Selain itu juga karena adanya sistem intelejen tandingan yang digunakan oleh penduduk yang bertahan di daerah genangan. Beberapa anggota KSKPKO juga berhasil memandu wartawan asing yang ingin melihat daerah genangan, yang secara formal sulit mendapatkan perijinannya.

KSKPKO juga mendampingi warga Kedung Ombo yang bertahan di lokasi genangan di daerah Boyolali dan Sragen untuk hadir dalam dengar pendapat dengan Komisi X DPR Pusat pada tanggal 29 Juli 1989. Dalam pertemuan yang menggunakan fasilitas SKEPHI tersebut, KSKPKO menyampaikan menyampaikan sebuah pernyataan berisi tuntutan. Pada intinya KSKPKO menegaskan kembali tuntutan pertamanya dan meminta agar pihak legislatif mengevaluasi pembangunan yang berlangsung di Waduk Kedung Ombo.

---

[32] Lihat: Tempo, 25 Maret 1989

[33] Aksi diam-diam ini sama rapinya oleh beberapa LSM yang punya komitmen untuk terus membantu rakyat Kedung Ombo yang terancam kesusahan. Anggapan ini bisa dibalik, bahwa sebenarnya pihak Satgaspam malah mengetahui tapi sengaja membiarkan karena bila terjadi penangkapan malah akan memunculkan sorotan masyarakat kembali terhadap persoalan Kedung Ombo

Aksi diam-diam yang dilakukan KSKPKO mencakup juga upaya membentuk jaringan kerja dengan LSM dan kelompok masyarakat yang memiliki keprihatinan atas keadaan orang-orang yang bertahana di daerah genangan Waduk Kedung Ombo. Ketika rombongan Romo Mangunwijaya secara nekad ke daerah genangan meskipun sebelumnya dilarang oleh pihak aparat Pemda Sragen, dengan cepat KSKPKO ikut bergabung untuk memberikan dukungan dan mengantisipasi tekanan yang diperkirakan bakal muncul.[34] Aksi diam-diam ini berlanjut dalam bentuk kegiatan monitoring. Beberapa orang anggota KSKPKO secara rutin melakukan pengamatan terhadap situasi dan kondisi penduduk di daerah genangan.

Pertemuan Dengan Bupati Boyolali M. Hasbi

Rangkaian aksi yang dilakukan KSKPKO membawa dampak dipanggilnya para aktivis mahasiswa yang dianggap menjadi pimpinan KSKPKO di beberapa kota. Mereka ada yang diminta menghadap ke Polres, Kodim atau Korem setempat untuk diinterogasi. Aparat militer berusaha mengorek keterangan tentang pimpinan KSKPKO, organisasi, sistem komunikasi dan koordinasi antar kota dan pendanaan. Semua gerak-gerik aktivis mahasiswa yang dianggap menjadi pimpinan KSKPKO diawasi secara ketat. Berbagai tekanan dicoba dilakukan oleh aparat, baik kepada diri si aktivis maupun lewat pimpinan setiap universitas, terutama perguruan tinggi negeri yang mahasiswanya banyak menjadi anggota KSKPKO. Pimpinan uninersitas di beberapa kota juga mendapat panggilan-panggilan atau telepon dari aparat keamanan setempat dan Kodam IV di Semarang.

[34] Untuk lebih jelasnya, lihat tulisan Romo Mangun Selanjutnya: Insiden di Sragen.

Bentuk pemanggilan-pemanggilan tersebut di antaranya adalah diundangnya para aktivis KSKPKO dari Salatiga, Semarang dan Yogyakarta untuk datang ke Daninteldam IV/Diponegoro di Pudak Payung, Semarang. Di sana pihak Kodam IV Diponegoro memperlakukan mahasiswa relatif dengan baik dan memberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan semua permasalahan.[35] Dalam pemanggilan-pemanggilan ke Pudak Payung yang dilakukan secara terpisah itu, para aktivis mahasiswa mengajukan usul diadakannya sebuah pertemuan yang melibatkan semua pihak yang tersangkut dalam kasus Kedung Ombo. Mulai dari rakyat di daerah genangan, Pemda, KSKPKO, Kelompok Romo YB Mangunwijaya, LBH, GPS, YAPHI dan beberapa LSM lain.

Usulan tersebut ditanggapi oleh Kodam IV Diponegoro. Pada 26 April 1989 Kodam IV mengundang pihak Pemda Boyolali dan aktivis KSKPKO untuk bertemu di kantor Pemda Boyolali. Undangan yang disampaikan kepada KSKPKO secara mendadak itu akhirnya hanya dihadiri oleh 8 orang anggota KSKPKO dari Semarang dan Salatiga, sedangkan wakil KSKPKO Yogyakarta tidak ada yang datang. Dari pihak Pemda Boyolali hadir semua pimpinan Muspida Pemda Boyolali antara lain Bupati M Hasbi, Dandim Letkol Drajad Budi Santoso, Kapolres Letkol Pol Dai Bachtiar, Ketua Kajari Mulyono SH, sedangkan pihak Kodam diwakili oleh staf intelnya, Letkol Yahya S.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati M Hasbi menjelaskan keadaan terakhir di Kedung Ombo dan kekhawatirannya terhadap penduduk yang terus mencoba bertahan, karena pada musim penghujan bulan Nopember - Desember air diperkirakan akan naik sampai

[35] Hanya aktivis KSKPKO Yogyakarta yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari petugas, karena dianggap tidak mau bersikap terbuka

elevasi 90. Ia mengakui bahwa masih ada sejumlah masalah yang mengganjal, namun pemerintah terus berupaya terus untuk segera menyelesaikannya. M Hasbi menyatakan keberatan pemerintah atas niat KSKPKO untuk membantu penduduk yang bertahan di kawasan waduk, karena kan mengakibatkan keirihatian penduduk yang telah bertransmigrasi ke Bengkulu. Dan lebih dari itu, menurut M Hasbi penduduk akan merasa mendapat restu untuk tetap tinggal di Kedung Ombo.

Sedangkan KSKPKO menyampaikan tiga buah tuntutan. Pertama, buka kembali kawasan Kedung Ombo untuk umum. Kedua, segera realisasikan janji pemerintah untuk memberikan tanah-tanah milik Perhutani. Ke tiga, segera bikin pertemuan paripurna yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam kasus Kedung Ombo. Tuntutan tersebut diajukan karena adanya hambatan bagi setiap orang yang ingin mengunjungi dan melihat daerah genangan dari dekat. Sementara pemblokadean terhadap daerah Kedung Ombo telah memacetkan roda perekonomian setempat.

Dialog dengan Bupati Boyolali diakhiri dengan peninjauan rombongan KSKPKO ke lokasi genangan dengan diantar oleh aparat militer. Kunjungan ini kemudian berlanjut selama beberapa kali dengan mendapat pengantaran gratis. Sekaligus pengawasan dari Pemda Boyolali. Tapi masyarakat awam yang ingin memasuki lokasi genangan masih menemui banyak hambatan.

Kelompok Romo YB Mangunwijaya

Terbentuknya Kelompok

Bermula dari kedatangan penduduk Kedung Ombo yang berada di daerah pegunungan Kendeng Tengah ke Pura Mangkunegaran Solo. Penduduk Kedung Ombo yang tanahnya terkena Proyek Waduk Kedung Ombo itu merasa masih memiliki ikatan batin dengan kerabat mangkunegaran yang merupakan keturunan dari Pangeran Sambenyawa, junjungan mereka.[36] Orang-orang yang datang ke Mangkunegaran itu mengadukan sekaligus menyerahkan nasib mereka kepada kerabat Mangkunegaran. Mereka menyatakan siap untuk mati tenggelam di tanah kelahirannya. Tersentuh oleh rasa kemanusiaan dan kesetiakawanan sosial, pihak kerabat Mangkunegaran berjanji untuk membantu sebisa mungkin, mengentas nasib orang-orang di daerah genangan yang sedang dirundung kesedihan karena tanah mereka tergenang air Waduk Kedung Ombo.

Kerabat Mangkunegara kemudian mencoba menghubungi Romo YB Mangunwijaya yang sedang diopname di RS Elizabeth Semarang untuk bersama-sama membantu mengentas warga di daerah genangan yang dirundung kemalangan. Ajakan tersebut segera disetujui Romo YB Mangunwijaya yang mengajukan sebuah persyaratan, yaitu hanya akan menolong anak-anak saja yang diperkirakan berjumlah sekitar 3.500 orang. Ia membuat sebuah surat himbauan kepada pribadi-pribadi yang mungkin tertarik untuk membantu anak-anak di daerah genangan Kedung Ombo.[37] Turut menan-

[36] Tapi hal ini dibantah oleh KGPA Mangkunegara (KGP Jiwo Kusumo) pada saat Jumenengan Sri SUltan Hamnegkubuwono X di Yogyakarta. Dikatakannya, bahwa Kedung Ombo dan daerah sekitarnya tidak pernah menjadi bagian dari Mangkunegara. Demikian pula dengan rencana aksi sosial untuk penduduk di daerah genangan, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Mangkunegaran. Ia bahkan menyatakan: "Saya menduga ada orang yang sengaja mempolitisasi kesan seolah-olah saya mendukung aksi sosial di Kedung Obo" (lihat: Surabaya Post, 11 Maret 1989).

[37] Surat himbauan itu kemudian dimuat sebagai iklan oleh Harian Kedaulatan Rakyat pada 27 Pebruari 1989, yang segera mendapat tanggapan dari pihak aparat pemerintah antara lain dari Kaditsospol ABRI Letjen Harsudiono Hartas, Mendagri Rudini dan Menko Kesra, Soeparjo Rustam. Ketiganya menyatakan memberikan dukungan terhadap niat Romo Mangunwijaya untuk membantu orang Kedung Ombo, asalkan murni untuk kepentingan sosial

datangani surat himbauan itu antara lain, Abdul Hakim G Nusantara dari YLBHI, Soemedi dari LBH Semarang yang pada saat itu tengah menjenguk Romo YB Mangunwijaya dan Yayak A Yatmaka dari kelompok Samin Yogyakarta.

Sekeluar dari opname di RS Elizabeth Semarang, Romo Mangun segera melakukan kunjungan ke daerah genangan Kedung Ombo di Kecamatan Kemusu. Romo Mangun menyaksikan sendiri bagaimana blokade militer dan pemandangan menyayat di daerah genangan.[38] Di mana rumah-rumah penduduk terisolasi oleh genangan air yang terus meninggi. Pengalaman tersebut, membuat Romo Mangun semakin bertekad untuk melaksanakan niatnya secepat mungkin, berpacu dengan waktu dan ketinggian air.

Banyak orang yang kemudian mencuriggari niat Romo Mangun sebagai sebuah manuver politik yang sengaja dilakukan tatkala pemerintah berupaya mengosongkan daerah genangan. Bahkan kemudian muncul isyu, Romo Mangun berniat menjalankan misi penyebaran agama di Kedung Ombo.[39] Romo Mangun sendiri menanggapi isyu-isyu yang menyerang dirinya itu dengan mengibaratkan bahwa dirinya mendengar *ada sapi kecemplung sumur nyuwun tulung.* Ia hanya berniat membantu anak-anak yang mungkin terkena cacingan, korengan atau kurang makan tanpa disertai pretensi apa-apa.

---

kemanusiaandan tidak digunakan untuk manuver politik atau kepentingan yang lain. (Wawasan, 1 Maret 1989, Suara Merdeka, 3 Maret, Wawasan, 3 Maret 1989)

38) Kedaulatan Rakyat, 6 Maret 1989

39) Romo Mangun tak ambil peduli dengan isyu-isyu yang bermunculan. Bahkan ia mengirim surat Pembaca di Kedaulatan rakyat (dimuat 4 Maret 1989) berisi ajakan untuk bersolidaritas kepada anak-anak Kedung Ombo. Isyu-isyu tersebut tampaknya sengaja dilontarkan oleh orang-orang yang tidak menghendaki kehadiran Romo Mangun di daerah genangan Waduk Kedung Ombo.

Romo Mangun juga mengandaikan, apabila ada kebakaran apakah perlu meneliti dulu siapa yang kebakaran, agamanya apa dan lain-lainnya? Menurut Romo Mangun, rumah yang terbakar tersebut ada anak-anak yang harus ditolong. Romo Mangun berharap agar langkah kemanusiaan yang diambilnya tidak ditafsirkan macam-macam, apalagi sebagai usaha menandingi pemerintah seperti yang dikatakannya kepada para wartawan:

> "Saya dan teman-teman ke Kedung Ombo tidak ditunggangi oknum lain, atau bahkan unsur pewaris paham yang menentang pemerintah. Kita ini justru mau melaksanakan penghayatan dan pengamalan Pancasila, mulai dari Sila Pertama hingga yang terakhir."[40]

Romo Mangun merasa bahwa langkahnya adalah legal, tidak subversif, ataupun aneh-aneh. Apa yang dilakukannya bahkan sangat sesuai dengan kehendak pemerintah. Juga merupakan konsekuensi dari semangat kesetiakawanan sosial yang diperingati setiap tanggal 20 Desember.

Ajakan Romo Mangun cs mendapat banyak tanggapan positif dari masyarakat. Puluhan relawan-relawati mendaftarkan diri ke tempat-tempat seperti yang tercantum dalam iklan. Profesor Slamet Raharjo yang pada saat itu belum bergabung dengan Romo Mangun menyarankan, agar sebaiknya KSKPKO bergabung saja dengan kelompok Romo Mangun yang juga memberikan perhatian terhadap kasus Kedung Ombo. Menurut Prof Slamet, niat Romo Mangun yang memiliki sasaran pada anak-anak terlantar akan dilengkapi oleh KSKPKO sehingga sasarannya akan menjadi lebih luas dan lebar.[41]

---

40) Suara Merdeka, 28 Pebruari 1989.

41) Prof Slamet Raharjo sebagai ahli pendidikan, melihat keinginan kelompok mahasiswa untuk membantu rakyat Kedung Ombo

Hanya dalam beberapa hari saja telah terkumpul buku, alat tulis, makanan, obat-obatan, pakaian, tenda, tikar, selimut, uang dan lain-lain. Bahkan di pos Yayasan Palamarta Indonesia di Mangkuneraga Solo berhasil terkumpul tujuh ton beras, satu ton gula pasir, dan 12 pak pakaian. [42] Sebagian mahasiswa anggota KSKPKO juga menyatakan bergabung dengan Romo Mangun Cs, bersamaan dengan bergabungnya sejumlah dosen-dosen Undip Semarang dan Pimpinan Pondok Pesantren Pabelan Muntilan, Kyai Hamam Djafar.[43] Mereka bergabung mengatasnamakan pribadi tanpa menyangkutpautkan dengan posisi sebagai dosen, mahasiswa, dokter atau posisi lain dalam masyarakat.

Pelarangan Gubernur Jateng

Upaya Romo Mangun dalam mengurus permohonan ijin kepada Pemda Jateng untuk membantu anak-anak di Kedung Ombo sesuai

---

sangat penting untuk proses pembentukan jiwa lewat sebuah tahapan pendidikan positip yang tidak diperoleh di bangku kuliah, antara lain dengan langsung mengamalkan Pancasila di lapangan ketimbang melulu mendengarkan teori Pancasila dalam bentuk perkuliahan. (Wawasan, 2 Maret 1989)

[42] Lihat Kompas, tanggal 6 Maret 1989.

[43] Bergabungnya Kyai Hamam Djafar yang juga merupakan tokoh MUI Jateng tersebut, berhasil menetralisir sebagian isyu dan kecurigaan terhadap rencana kemanusiaan Romo Mangun. Tapi pimpinan Pondok Pesantren Pabelan tersebut kemudian mendapat tekanan aparat militer yang khawatir melihat figur Kyai yang akan mengajak 'kelompok Islam' untuk membantu rakyat Kedung Ombo. Kyai Hamam Djafar bahkan sempat mendapat panggilan menghadap ke Kodim Magelang. Ia dihadapkan pada pilihan untuk meneruskan niat bergabung dengan Romo Mangun Cs, atau "setia" kepada Pancasila. Beberapa santri Pabelan dihubung-hubungkan dengan peristiwa Way Jepara, Lampung Tengah yang meletus pada tanggal 8 Pebruari 1989. Siaran resmi pemerintah menyebutkan kerusuhan di Lampung tersebut sebagai gerakan esktrem kanan, Islam Fisabilillah.

prosedur, sempat terhambat selama beberapa waktu. Hal ini diakibatkan selalu tertundanya rencana dan penjadwalan pertemuan dengan Gubernur Jateng HM Ismail. Alasan pihak Pemda adalah karena padatnya kegiatan Gubernur. Keadaan ini membuat kelompok Romo Mangun yang diwakili oleh Kyai Hamam Djafar, Ketua PMI Jateng Suwarno SH dan Ketua I Angkatan '45 Prof.Slamet Sahardjo MA, serta Romo Mangun sendiri bersepakat untuk langsung mencoba menemui Gubernur Jateng guna memulai aksi kemanusiaan di Kedung Ombo.

Namun niat tulus Romo Mangun Cs agaknya memang harus menemui jalan buntu, karena Gubernur Jateng HM Ismail yang ditemui di ruang kerjanya tidak mengijinkan Romo Mangun Cs pergi ke Kedung Ombo. [44] Romo Mangun yang hanya ditemani oleh Prof Slamet Raharjo MA, sekeluar dari ruang kerja Gubernur Ismail tidak bisa menyembunyikan kesedihannya atas keputusan tersebut. Ia mengatakan :

> "Saya tidak bermaksud mencampuri urusan Pemda tapi demi kemanusiaan saja. Saya juga tidak bermaksud menghasut atau memfitnah rakyat di sana agar berbuat sesuatu yang mengganggu kewibawaan pemerintah". [45]

Sebagai tindak lanjut dari upaya menolong anak-anak di Kedung Ombo yang telah dilarang oleh Gubernur, Romo Mangun bertekad akan terus berusaha memperoleh jalan yang baik. Tekad Ro-

---

[44] Kyai Hamam Djafar dan Suwarno SH akhirnya tidak bisa ikut mendampingi Romo Mangun dan Slamet Raharjo menemui Gubernur HM Ismail, karena kehadiran mereka sengaja dihambat. Mereka berdua bahkan mendapat intimidasi halus dari beberapa pihak agar membatalkan rencana bergabung dengan Romo Mangun.

[45] Surabaya Post, 11 Maret 1989

mo Mangun untuk membantu anak-anak Kedung Ombo dalam mantap masa depan mereka telah bulat. Ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan 3.500 anak-anak dari prasangka yang tidak baik, amarah dan rasa dendam yang bisa muncul dengan perilaku beragam di masa datang.

Sementara itu, pihak Gubernur lewat Karo Humas Drs Soeparman R menolak memberikan alasan penolakan pemberian ijin kepada Kelompok Romo Mangun. Pihak Pemda hanya menghendaki agar bantuan yang dibawa Romo Mangun dan relawan lainnya dialihkan ke tempat penampungan permanen bagi penduduk asal Kedung Ombo di Desa Kayen Kecamatan Juwangi. Atau diserahkan saja ke asrama yatim piatu dan rumah jompo. Gubernur HM Ismail menyatakan, bahwa rencana aksi kemanusiaan Romo Mangun bisa mendatangkan perasaan iri kepada masyarakat di sekitar Kedung Ombo. Mereka akan merasa tidak senang, sebab mengapa hanya anak-anak di daerah genangan saja yang mendapat perhatian. Ia juga khawatir, niat Romo Mangun justru akan memperburuk keadaan dan mengundang persoalan baru apabila penduduk setempat, termasuk kepala desa, camat, atau pihak Koramil tersinggung dan kemudian bereaksi. [46]

Diliputi rasa kecewa dan sedih yang mendalam, pada tanggal 11 Maret 1989 Romo Mangun mengirimkan sebuah surat kepada Mendagri Rudini. Ia menjelaskan posisi, latar belakang, dan orang-

[46] Gubernur HM Ismail mengatakan: "Saya lebih senang kalau Romo Mangun mengalihkan aksi sosialnya ke tempat lain. Masih banyak tempat lain yang lebih memerlukan perhatian daripada di Kedung Ombo. Seharusnya Romo Mangun mendukung proyek, bukan malah memanas-manasi penduduk yang terkena proyek" (Surabaya Post, 11 Maret 1989). Namun pada kesempatan lain , HM Ismail mengatakan bahwa penolakan terhadap niat bakti sosial Romo Mangun Cs karena dinilainya niat Romo Mangun tidak murni dan sekedar cari popularitas pribadi. (Lihat: Editor, 25 Maret 1989)

orang yang terlibat dalam kelompok yang diberi nama PDK-AKO (Panitia Darmakarya Bagi Anak-anak Kedung Ombo). Menurut Romo Mangun kehadirannya analog dengan dokter atau petugas palang merah untuk menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan tanpa memandang kawan maupun lawan, orang baik ataupun penjahat, agama, ras, golongan maupun aliran politik yang dianut. Romo Mangun juga menyatakan, bahwa kelompoknya telah meminta agar kalangan LBH dan kelompok yang berafiliasi badan politik, keluar dari jalur darma karyanya. Ia menyampaikan kekhawatirannya kepada Mendagri, bahwa penolakan Gubernur Jateng akan menyebabkan kredibilitas dan citra baik bangsa Indonesia akan merosot di dunia internasional. Dengan ditolaknya kaum tua yang relatif moderat untuk berkesetiakawanan sosial, kemungkinan besar akan muncul unsur-unsur yang lebih radikal.

Pelarangan niat berdarmakarya Romo Mangun Cs. oleh Gubernur Jateng, membuat kasus Kedung Ombo semakin mencuat. Apalagi dengan munculnya berbagai tanggapan di media massa. Mendagri Rudini yang tadinya mendukung niat Romo Mangun kemudian jadi berbalik. Ia menyetujui tindakan HM Ismail, yang sebagai seorang Gubernur dianggap punya wewenang penuh untuk menjaga stabillitas daerahnya. Menteri Rudini menganggap Gubernur Jateng HM Ismail adalah orang yang paling tahu keadaan di Kedung Ombo. Semua keputusan yang diambilnya tentu telah memakai pertimbangan yang cukup mendalam. Sedangkan Menko Polkam Sudomo dalam menanggapi pelarangan Gubernur Jateng, memberikan janji akan menanyakan langsung kepada perihal alasan pelarangan tersebut kepada HM Ismail.

Pemberitaan-pemberitaan media massa, mambuat mendagri Rudini merasa terpojok sehingga kemudian ia meminta agar dirinya tidak diadu domba dengan Gubernur Jateng dalam masalah pelarangan tersebut. Keputusan yang diambil Gubernur Jateng mendapat

tanggapan positip dari Menko Kesra Soepardjo Rustam yang tadinya juga mendukung niat Romo Mangun Cs. [47]

Dengan didahului beredarnya isyu, pada tanggal 21 Maret sebuah harian ibukota memberitakan bahwa Romo Mangun akan dipanggil menemui Mendagri Rudini dan Mensesneg Moerdiono. Romo Mangun akan diajak membicarakan kemungkinan melaksanakan niatan mengadakan bakti sosial di Kedung Ombo yang telah ditolak oleh Gubernur Jateng. Romo Mangun sendiri memang sedang bersiap-siap untuk ke Jakarta memenuhi panggilan tersebut. Namun kemudian, muncul pernyataan dari Rudini dan Moerdiono bahwa pihaknya tidak pernah merasa memanggil Romo Mangun. [48]

Dukungan Dari Mahasiswa Semarang

Pelarangan Gubernur Jateng ini membuat relawan-relawati yang sebelumnya telah menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan Romo Mangun menjadi diliputi tanda tanya. Relawan-relawati itu telah mendaftarkan diri lewat berbagai pos pertolongan di Solo, Semarang, Salatiga dan Jogja. Mereka kecewa atas sikap Pemda yang begitu saja menolak tanpa memberi alasan secara rinci. Kelompok yang kecewa termasuk juga Kyai Hamam Djafar beserta para santri dari Pondok Pesantren Pabelan yang telah bersiap-siap pergi ke Kedung Ombo dengan berbagai resiko yang harus mereka hadapi.

Setelah sempat mengirimkan surat untuk bertemu dengan Gubernur dan tidak mendapat tanggapan, pada tanggal 14 Maret

[47] Menko Kesra juga meminta agar jangan membantu penduduk yang tidak mau pindah. Ia mengatakan: "Kalau kita membantu atau mengantar makanan kepada orang-orang yang belum mau pindah, seolah-olah membenarkan supaya mereka jangan pindah". (Kompas, 17 Maret 1989).

[48] Jawa Pos, 23 Maret 1989.

1989, 8 orang mahasiswa dari Kelompok Karya Bakti Mahasiswa Untuk Masyarakat Kedung Ombo mendatangi kantor Gubernur Jateng. Mereka mewakili 65 mahasiswa Semarang akan bergabung dengan kelompok Romo Mangun untuk menyampaikan sebuah pernyataan sikap. Mereka menyayangkan tidak diijinkannya aksi kemanusiaan Romo Mangun. Mereka beranggapan bahwa aksi kemanusiaan itu merupakan perwujudan nyata dari pengahyatn dan pengamalan Pancasila dan juga merupakan langkah nyata dari semangat kesetiakawanan sosial. Kelompok tersebut meminta Gubernur segera menuntaskan permasalahan yang muncul di Kedung Ombo secara bijaksana dan manusiawi antara lain dengan cara melakukan penanganan khusus terhadap kesehatan dan kelangsungan pendidikan anak-anak yang berada di daerah genangan.

Delegasi mahasiswa Semarang tersebut akhirnya diterima Kadit Sospol Jateng, Kol Inf Misnadi dan Karo Humas Sekwilda Jateng Drs.Soeparman di ruang kerja. Gubernur Ismail menolak untuk ditemui dengan alasan sibuk. Kedua pejabat Pemda Jateng tersebut menyatakan tetap melarang pihak manapun untuk memasuki kawasan genangan tanpa ijin. Termasuk kelompok mahasiswa dan LBH.

Diterima Bupati Boyolali dan Ketua DPRD Tk I Jateng

Meskipun secara resmi Gubernur Jateng telah melarang pihak manapun untuk membantu rakyat Kedung Ombo yang tidak mau pindah dan memilih bertahan di daerah genangan, sumbangan para donatur terus mengalir ke pos pengumpul sumbangan di Yogyakarta, Solo, Salatiga dan Semarang. Bahkan di beberapa perguruan tinggi di Jawa Tengah dibuka kotak sumbangan untuk rakyat Kedung Ombo, seperti yang juga dilakukan oleh Senat Mahasiswa FISIP Unair Surabaya. [49] Sampai dengan tanggal 16 Maret 1989, di

[49] Surabaya Post, 20 Maret 1989.

beberapa pos telah terkumpul uang sekitar Rp 8 Juta dan di pos Yogyakarta terkumpul 500 kg beras, beberapa kotak Supermie, uang, dan sejumlah bacaan anak-anak. [50] Sedangkan di pos Solo ter-kumpul uang sebesar Rp 300 ribu, 1 kwintal gula, 5 karung pakaian, selimut dan beberapa barang lain.

Romo Mangun mendapat informasi tentang anak-anak Kedung Ombo yang sangat membutuhkan bantuan, terutama yang paling mendesak obat-obatan, berniat untuk terus menampung semua bentuk sumbangan meskipun pos di Solo mendapat tekanan dari pihak aparat. Salah satu pimpinan pos di Solo, Yayak sempat kerepotan dan berniat mengembalikan sumbangan yang telah diterimanya atau menyalurkannya pada pihak lain yang lebih membutuhkan. [51] Kesimpangsiuran itu membuat Romo Mangun kemudian memberikan jaminan pada pihak penyumbang, bahwa semua barang-barang sumbangan yang telah terkumpul akan segera sampai kepada yang berhak. Romo Mangun yang merasa telah mendapat kepercayaan masyarakat, berjanji akan mencari jalan terbaik untuk bisa menyampaikan sumbangan kepada pihak yang memerlukannya.

Secara nekad, Romo Mangun mencoba masuk ke lokasi genangan. Ia mencoba menyamar dan bersembunyi di dalam sebuah mobil proyek yang biasa keluar masuk. Ia ingin menyaksikan sendiri anak-anak terlantar di daerah genangan yang ingin ditolongnya. Namun penyamaran Romo Mangun terungkap karena penjagaan memang ekstra ketat.

Hal tersebut mengakibatkan pihak Pemda Boyolali menjadi sewot. Pemda beranggapan bahwa Romo Mangun tidak beritikad

[50] Kedaulatan Rakyat, 17 Maret 1989.

[51] Jawa Post, 15 Maret 1989.

baik dan sengaja main kucing-kucingan. Tetapi hal ini dibantah oleh Romo Mangun lewat Surat Pembaca di mana ia menyatakn bahwa ia sama sekali tidak pernah main kucing-kucingan, [52] karena di Klewor ia datang secara legal malahan diantar oleh camat dan sempat pula bertemu dengan Dandim Boyolali.[53]

Keinginan untuk beraksi sosial dari berbagai kelompok dan serangkaian aksi unjuk rasa KSKPKO serta usaha nekad Romo Mangun untuk memasuki lokasi genangan merupakan cerminan dari menggebu-gebunya keinginan masyarakat untuk membantu rakyat Kedung Ombo. Menanggapai hal itu Bupati Boyolali memberikan pernyataan bahwa pihaknya bersedia mengadakan dialog dengan siapa saja setiap saat. Bupati M Hasbi merasa yakin bahwa orang-orang ingin melakukan bakti sosial di Kedung Ombo belum mendapat informasi yang akurat tentang keadaan sebenarnya di daerah genangan.

Ajakan dialog Bupati Boyolali ini ditanggapi oleh Romo Mangun. Pada 13 Maret 1989, Romo Mangun datang ke kantor Bupati, dengan diantar oleh pimpinan gereja Katholik di Boyolali Romo Sulistyo. Dalam dialog empat mata yang berlangsung satu jam tersebut, M Hasbi menjelaskan tentang makna pembangunan Waduk Kedung Ombo dan keadaan rakyat di daerah genangan yang tetap mendapat perhatian Pemda. Baik kesehatannya maupun pendidi-

[52] Seorang pejabat Pemda Boyolali yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan: "Belum lama ini pastur tersebut bersama rombongan menggunakan sebuah mobil masuk wilayah Kedung Ombo secara tidak fair. Yang mendaftarkan diri kepada petugas untuk masuk adalah sepasang suami istri dan seorang sopir. Tetapi setelah melewati petugas, ternyata dalam mobil terdapat Romo Mangun. Padahal waktu mendaftarkan tidak muncul dan tidak didaftarkan pada petugas. Entah sembunyi di mana". (*Kedaulatan Rakyat*, 23 Maret 1989).

[53] *Kedaulatan Rakyat*, 23 Maret 1989.

kannya. Sedangkan Romo Mangun selain menyatakan keinginannya untuk datang ke Kedung Ombo juga banyak memberikan pandangan terhadap pemecahan masalah bagi warga Kedung Ombo yang belum mau pindah. Terjadi perbedaan pendapat di antara mereka berdua. Tapi baik M Hasbi maupun Romo Mangun sama-sama menyatakan puas dengan pertemuan tersebut. Malah Bupati M Hasbi memberikan lampu hijau atas keinginan Romo Mangun untuk membantu anak-anak di Kedung Ombo. Namun ia meminta waktu untuk mengkonsultasikannya terlebih dulu dengan Gubernur Jateng.

Prof Slamet Rahardjo yang juga tergabung dalam kelompok Romo Mangun (PDK-AKO) pada tanggal 11 April 1989 mencoba menemui Ketua DPRD Tk I Jateng. Kepada Ketua DPRD ia menjelaskan latar belakang kedatangannya untuk memenuhi permintaan Romo Mangun dan kawan-kawan yang tidak dapat hadir. Sekaligus melaksanakan anjuran Mendagri Rudini untuk membawa permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh lembaga eksekutif ke legislatif. Prof Slamet berharap, DPRD bisa membantu niat bakti sosial kelompok Romo Mangun yang telah ditolak oleh Gubernur Jateng. Hal ini perlu dikerjakan segera, karena bisa mengurangi kemungkinan terjadinya korban lebih banyak lagi.

Namun sekali lagi, harapan Prof Slamet Rahardjo dan anggota PDK-AKO yang lain sia-sia, karena Ketua DPRD hanya bisa memberikan informasi serta menganjurkan agar menghubungi pihak eksekutif. Kelompok Romo Mangun dianjurkan untuk bekerja sama dengan pemerintah agar tidak terjadi suatu kegiatan yang saling tumpang-tindih. [54)]

Tak berapa lama kemudian, Bupati Boyolali memeprbolehkan kelompok Romo Mangun ikut serta dalam program guru kunjung.

[54)] Lihat: Kedaulatan Rakyat, 12 April 1989

Sebuah kebijakan baru Pemda Boyolali untuk menolong anak usia sekolah di daerah genangan Kedung Ombo yang telah "mogok" belajar cukup lama. Secara bergantian, sejumlah guru SD yang sebagian besar adalah mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Romo Mangun hidup selama beberapa waktu di daerah genangan. Di sana mereka mengajar dalam kelas-kelas yang dibangun secara darurat.

Insiden Sragen

Insiden diawali dari sekelompok mahasiswa Katholik yang mendatangi Romo Mangun untuk meminta tolong agar ia mau mengantar mereka memberikan bantuan kepada orang-orang di daerah genangan Kedung Ombo lewat jalan air. Kelompok mahasiswa Solo yang terdiri dari para pecinta alam itu berperahu-ria, melakukan pendalaman iman sambil menolong sesama yang sedang kesusahan. Niat baik anak-anak muda tersebut disambut baik oleh Romo Mangun.

Pada 3 Juni 1989, Romo Mangun mengantar sepuluh mahasiswa yang berniat menyalurkan bantuan kepada penduduk di Desa Pilangrembes dan Cengklik. Mereka datang ke Desa Kaliwuluh, Kecamatan Sumber Lawang Kabupaten Sragen dengan membawa tiga buah perahu dan sebuah rakit. Menurut rencana, perahu dan rakit tersebut akan ditinggalkan buat orang-orang di desa terpencil yang memebutuhkannya.

Tetapi, ketika mereka tengah menyampaikan barang-barang bantuan, muncul aparat Pemda dan aparat keamanan. Aparat langsung menyatakan melarang kegiatan tersebut karena tidak ijin terlebih dahulu. Kasdim Sragen, Mayor Aang Haryono yang datang menyusul Camat dan Danramil menyatakan pihaknya masih membuka kemungkinan bagi diteruskannya niat para mahasiswa tersebut. Asalkan para mahasiswa mengurus perijinannya terlebih dahulu. Dan untuk sementara ketiga perahu dan sebuah rakit yang dibawa

rombongan diamankan di halaman sebuah rumah milik pamong desa. [55]

Para mahasiswa Solo tersebut kemudian berusaha mengurus perijinan yang dibutuhkannya, namun tak juga kunjung keluar. Agaknya, memang sengaja dihambat. Pejabat yang berwewenang setiap kali didatangi, selalu 'kebetulan' tidak ada di tempat. Baru pada 10 Juni, para mahasiswa berhasil menemui aparat Pemda Sragen yang secara lisan mengijinkan pemakaian perahu-perahu untuk bermain di sekitar Kaliwuluh asalkan tidak dipinjamkan kepada penduduk atau untuk membantu orang di daerah genangan. Sementara itu Romo Mangun mencoba menemui Bupati Boyolali untuk menjajagi adanya kemungkinan untuk membawa perahu-perahu dan dioperasikan di wilayah Boyolali. Bupati Boyolali ternyata tidak keberatan atas permintaan Romo Mangun. [56]

Pada 24 Juni 1989 para mahasiswa datang ke Kaliwuluh ternyata menemukan perahu-perahu mereka sudah tidak ada lagi. Perahu dan rakit ternyata sudah dipindah ke Kecamatan Sumber Lawang. Di kantor Kecamatan perahu dan rakit ditemukan telah menjadi kepingan-kepingan. Bagian-bagian utama perahu telah dilepas.

---

[55] Sebelumnya, aparat kemanan sempat secara kasar membentak-bentak rombongan dan memerintahkan agar membawa barang-barangnya ke luar lokasi atau barang-barang tersebut akan disita. Bahkan kemudia aparat keamanan mengeluarkan ancaman akan membakar barang-barang lain yang dibawa beserta perahu dan rakit. Romo Mangun dan para mahasiswa hanya bisa bersikap pasrah dan merelakan perahu-perahunya dibakar kalau itu memang dikehendaki oleh petugas, namun dengan syarat mereka boleh menyaksikan penghancuran barang-barang yang mereka bawa tersebut. Lihat juga "Dilarang Membantu Orang Kesusahan?" Surat pembaca Arief Budiman dalam Kompas, 20 Juni 1989.

[56] Lihat: Editor, No. 42, 24 Juni 1989.

Romo Mangun dan para mahasiswa sangat kecewa atas tindakan aparat yang mengingkari janji, yaitu tidak akan merusak perahu dan rakit sementara perijinan sedang diurus. Mereka memutuskan akan memasangi kembali kepingan-kepingan perahu dan rakit untuk diceburkan ke genangan Waduk Kedung Ombo, meskipun menghadapi berbagai tekanan. [57]

Pada 18 Juni 1989, Romo Mangun beserta sekitar 70 orang suster, frater, mahasiswa dan pelajar mendatangi kantor Kecamatan Sumber Lawang. Setelah semua kepingan dipasangi kembali, perahu dan rakit diangkat secara beramai-ramai. Rombongan secara beriringan bergerak lambat ke arah tempat wisata Gunung Kemukus yang berjarak kurang lebih 4 kilometer, sambil berkali-kali beristirahat. Rombongan sempat makan siang di pertigaan jalan raya menuju ke Kemukus.

Rombongan yang dipimpin oleh Romo Mangun tersebut mendapat pengawalan 35 orang mahasiswa anggota KSKPKO yang sengaja datang untuk memberikan dukungan dan berjaga-jaga terhadap kemungkinan akan terjadinya sesuatu terhadap Romo Mangun. Rombongan KSKPKO memakai tanda pengenal khusus di dada sebelah kiri dan sengaja memisahkan diri dari rombongan Romo Mangun yang telah kelelahan memikul beban yang cukup berat. Ang-

---

[57] Pada malam 17 Juni 1989, Gereja Katholik di Sumber Lawang dikepung oleh beberapa aparat militer bersenjata lengkap. Romo Mangunwijaya sedang memimpin sebuah misa untuk umat Khatolik di Sumber Lawang diminta untuk segera meninggalkan Sragen pada malam itu juga. Setelah melalui perdebatan seru antar petugas dengan koster, Romo Mangun menemui pihak aparat militer dan menyatakan bahwa ia menolak permintaan petugas yang datang tanpa surat perintah dan alasan yang jelas. Romo Mangun menyatakan bahwa dirinya tidak akan tunduk di bawah kata-kata atau perintah seorang Danramil, Dandim atau Gubernur sekalipun. Ia hanya tunduk pada semangat kesetiakawanan sosial dan Pancasila.

gota KSKPKO ramai-ramai menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sambil meneriakkan yel-yel untuk mengobarkan semangat.

Beberapa anggota militer bersenjata lengkap yang tadinya diperkirakan akan menghadang mereka dan menggunakan kekerasan malah terlihat duduk-duduk dalam beberapa warung kecil di sebelah kiri-kanan jalan raya. Mereka sama sekali tidak mengganggu rombongan Romo Mangun dan KSKPKO. Beberapa orang di antaranya hanya mengawasi dan mengikuti barisan dari jarak jauh.

Tanpa halangan yang cukup berarti para suster, frater, mahasiswa dan pelajar yang menggotong perahu dan kepingan-kepingannya berhasil menyusun kembali dan menceburkannya ke genangan Waduk Kedung Ombo di kaki Gunung Kemukus. Perahu-perahu dan rakit itu kemudian dinaiki beberapa orang dan dibawa ke wilayah genangan Boyolali, sedangkan sebagian anggota rombongan yang lain kembali ke kotanya masing-masing. Perahu-perahu tersebut dipakai oleh para sukarelawan untuk membantu rakyat di daerah genangan.

Kelompok LSM

LSM sebenarnya adalah kelompok yang pertama kali membantu rakyat Kedung Ombo. Beberapa LSM, bekerja dan melakukan upaya konsientisasi. Mereka bekerja di tengah-tengah rakyat untuk menyadarkan hak-hak mereka. Para aktivis LSMinilah yang sebenarnya banyak membantu penduduk dalam menetralisir beberapa bentuk tekanan yang dilancarkan aparat kepada rakyat yang dianggap membangkang. Terutama LSM-LSM di Solo. Salah satunya yang menonjol adalah YAPHI.

Hanya saja, beberapa LSM yang melakukan pendampingan kepada rakyat Kedung Ombo, belakangan menjadi kocar-kacir tatkala aparat juga melancarkan tekanan kepada LSM, terutama menjelang penggenangan waduk. Tercatat hanya Lembaga Pembela Hak-hak Asasi Manusia yang pada 28 Januari 1989 mengirimkan surat pernyataan kepada Mendagri Rudini. LPHAM menyatakan keprihatinan terhadap penggenangan Waduk Kedung Ombo. Penggenangan yang dilakukan merupakan cerminan dari kebijakan pembangunan yang tidak secara arif memperhatikan kemungkinan jatuhnya korban fisik, sosial dan ekonomi di kalangan rakyat.

Sebagian LSM memilih meninggalkan kasus Kedung Ombo yang dianggap telah menemui jalan buntu, sedang yang lain mencoba untuk terus 'bergerak', tapi secara diam-diam. Sebagian lagi tampil menjadi kekuatan pelobi. Namun banyaknya LSM yang mencoba 'mena-ngani' kasus Kedung Ombo dengan cara pandangnya sendiri-sendiri, di kemudian hari menimbulkan munculnya kelompok-kelompok di daerah genangan yang masing-masing tokohnya berafiliasi pada orang tertentu. [58)]

Ketika Romo Mangun menyatakan niatnya untuk membantu anak-anak Kedung Ombo, sebagian LSM mendukung dan mencoba bergabung. Tapi, kemudian dengan alasan 'strategi' Romo Mangun meminta agar orang-orang dari LSM yang dianggap oposan oleh pemerintah mengundurkan diri dari kelompoknya. Sementara itu beberapa LSM yang bergerak di bidang hukum seperti LBH, YAPHI dan GPS terus mencoba mendampingi penduduk dalam urusan litigasi.

YLBHI mencoba menarik perhatian masyarakat terhadap kasus yang terjadi di Kedung Ombo dengan mengadakan sebuah diskusi panel. Diskusi bertemakan "Dimensi Sosial dan Kemanusiaan

---

[58)] LPU UKSW, *Perkembangan Resettlement Penduduk Waduk Kedung Ombo*, 23 Maret 1989.

Dalam Pelaksanaan Pembangunan, Studi Kasus Waduk Kedung Ombo" diselenggarakan pada 17 Maret 1989 di Jakarta. Diskusi tersebut mencoba untuk membahas aspek-aspek hukum, sosial dan kemanusiaan pembangunan Waduk Kedung Ombo. Serta merumuskan bentuk-bentuk partisipasi warga negara yang bisa dilakukan untuk membantu penduduk Kedung Ombo.

Peranan LSM yang paling menonjol (yang tampak di permukaan) adalah dari kelompok INGI. Sebuah kelompok LSM merupakan forum komunikasi antara LSM Indonesia dan LSM luar negeri. Mayoritas anggotanya terdiri dari LSM negara-negara yang tergabung dalam IGGI.[59] Forum komunikasi yang berdiri di tahun 1985 ini dalam konprensinya yang ke V di Niewport Belgia yang berlangsung pada tanggal 24 hingga 26 April 1989, mengangkat kasus Kedung Ombo sebagai salah satu agenda.[60] Dengan demikian kasus Kedung Ombo yang tadinya baru merupakan sebuah kasus berskala nasional, diangkat INGI menjadi sebuah kasus internasional. Namun perlu dicatat, bahwa INGI bukanlah satu-satunya LSM Indonesia yang menginternasionalkan kasus pembangunan di Kedung Ombo.[61]

Dalam konprensi yang diikuti oleh delapan belas LSM dari Indonesia tersebut, dihasilkan sebuah *Aide Memoire* yang berisi lima belas buah rekomendasi untuk IGGI dan Bank Dunia. Di antara

59) Sejarah pembentukan INGI secara lengkap pernah ditulis oleh Ratna Saptari. Lihat: Ratna Saptari, Konprensi INGI Di Belanda, Tanah Air Th 1 No 2, Edisi Januari 1987, hal 73.

60) Dalam konprensi sebelumnya, yaitu Konprensi INGI ke IV yang berlangsung pada 25 hingga 28 April 1988 di Zeewolde Belanda sebetulnya Kedung Ombo juga termasuk dalam agenda pembicaraan sebagai sebuah studi kasus.

61) Pada pertemuan tahunan Bank Dunia di Berlin yang diadakan pada September 1989, Agus Purnomo dari WALHI membawakan

rekomendasi tersebut, diangkat masalah partisipasi masyarakat yang dilalaikan pemerintah dan terjadinya kemerosotan kondisi hak-hak asasi manusia seperti yang terjadi di Kedung Ombo. Dalam surat yang ditanda tangani oleh Abdul Hakim G Nusantara dan Peter Kardus yang dikirimkan kepada Presiden Bank Dunia, Barber Conable, INGI meminta agar Bank tetap konsisten pada kebijakannya sendiri mengenai pemukiman kembali penduduk. Serta lebih memperhatikan masalah sosial kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembangunan Waduk Kedung Ombo. INGI meminta agar Bank Dunia tidak mencoba menutup mata terhadap situasi yang terjadi di Kedung Ombo. Ada lima butir langkah penyelesaian yang dian-jurkan oleh INGI kepada Bank Dunia untuk menyelesaikan perma-salahan di Kedung Ombo.[62]

Surat INGI ke Bank Dunia tersebut kemudian menimbulkan kehebohan, ketika ketika Presiden Soeharto dalam Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekuin Di Bina Graha pada tanggal 5 Juli 1989 marah besar.[63] Presiden Soeharto kemudian mengeluarkan sembilan buah petunjuk sehubungan dengan kegiatan LSM yang dianggap merugikan pembangunan nasional. Dalam salah satu petunjuknya, Presiden Soeharto meminta agar departemen dan instansi yang bersangkutan, khususnya Departemen Dalam Negeri, melakukan pende-

makalah tentang kasus Kedung Ombo dan Domuga. Sedangkan pihak LSM luar negeri pada saat dilakukan peresmian penggenangan Waduk Kedung Ombo banyak yang menyampaikan keprihatinannya kepada Bank Dunia yang membiayai 70% dari seluruh biaya pembangunan Waduk Kedung Ombo. Ada pula yang gencar melakukan kampanye untuk menkan Bank Dunia.

62) Agar lebih jelas, lihat Lampiran C. Surat, Pernyataan dan dokumen lainnya.

63) Konon, Pak Harto merasa malu dengan akibat yang ditimbulkan Aide Memoire INGI pada Konprensi ke V dan surat yang dikirimkan ke Bank Dunia tersebut, karena dalam kunjungan delegasi Bank

katan dan pembinaan kepada LSM dan orang-orang yang mengikuti pertemuan INGI. Pak Harto mengingatkan agar nantinya mereka menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya itu sangat merugikan pembangunan bangsa Indonesia.

Penyesalan pemerintah terhadap kegiatan LSM yang dianggap menjelekkan bangsa Indonesia ini diucapkan oleh Pangab ABRI Jendral TNI Try Sutrisno kepada para wartawan seusai persidangan. Kekesalan yang sama juga diungkapkan menteri KLH Prof DR Emil Salim pada pembukaan sebuah seminar di Bandung. Emil Salim beranggapan, forum INGI seharusnya tidak digunakan untuk mengungkapkan masalah interen yang bisa mempengaruhi bantuan IGGI terhadap Indonesia.

Menurut Emil Salim, apabila persoalan lingkungan hidup yang ditangani oleh LSM merembet ke aspek politik, seharusnya juga diselesaikan lewat jalur politik. Yaitu melalui jalur lembaga perwakilan yang bisa meneliti persoalan secara lebih benar dan obyektif. LSM tidak mempunyai hak untuk mendesakkan kepentingannya kepada pihak lembaga perwakilan dan beranggapan bahwa aspirasinya saja yang benar. Apabila LSM memang salah dalam menilai suatu persoalan lingkungan, mereka harus menerimanya dengan hati yang lapang.

Jendral Try Sutrisno menggambarkan tindakan LSM itu sebagai hal yang tragis, karena muncul pada saat berbagai kemajuan telah dicapai oleh Indonesia selama ini. Seharusnya LSM mensyukuri

---

Dunia ke Indonesia, Pak Harto sempat ditanya tentang kasus Kedung Ombo . Demikian pula tatkala Soeharto diundang PBB untuk menerima penghargaan sehubungan dengan keberhasilan program KB di Indonesia. Beberapa tokoh yang ditemui pak Harto sempat bertanya tentang kasus Kedung Ombo. Padahal Pak Harto sendiri pada tanggal 23 Maret 1989 telah mengatakan, bahwa daerah Kedung Ombo dulunya adalah basis PKI dan mungkin kasus pembangkangan penduduk di Kedung Ombo terjadi karena hasutan sisa-sisa PKI.

kesejahteraan yang telah ada dan terjaminnya keamanan di Indonesia. Try Sutrisno mengatakan :

> "Di mana rasa kebangsaannya ? Rasa cinta Tanah Airnya ? Buka-buka semua, urusan dalam kita sendiri disampaikan kepada orang luar ! Sebaiknya semua pihak yang bergaul dengan luar negeri secara aktif memperkenalkan Indonesia. Kasih kesan yang benar tentang Indonesia, sebab kalau orang mau menjelek-jelekkan Indonesia secara subyektif, akhirnya akan terbuak kedoknya." [64]

Tanggapan Masyarakat [65]

Media massa mempunyai andil yang cukup besar dalam mengangkat Kasus Kedung Ombo ke permukaan, secara meluas. Media massa juga memuat pernyataan-pernyataan para tokoh masyarakat sehubungan dengan kasus Kedung Ombo. Media yang sama digunakan pemerintah untuk menutupi kenyataan di daerah genangan dan menetralisir komentar yang dianggap menyudutkan.

Namun, peranan media massa menjadi terbatas dan tidak efektif ketika ada larangan resmi maupun himbauan-himbauan tak resmi untuk memuat semua pemberitaan tentang Kedung Ombo, termasuk serangkaian aksi yang dilakukan KSKPKO. Wartawan juga tidak bebas untuk masuk-keluar daerah genangan yang dijaga ekstra ketat. Media massa akhirnya hanya bisa memuat ulasan dan melakukan wawan-cara dengan para tokoh masyarakat.

---

[64] *Kompas*, 8 Agustus 1989

[65] Tanggapan masyarakat yang dikutip merupakan tanggapan/komentar dari para intelektual, kalangan agama, birokrat yang tidak mewakili pemerintah, termasuk para wakil rakyat yang selama kasus Kedung Ombo memberikan kesan ingin 'menjewer' pemerintah. Tanggapan masyarakat yang ditulis ulang di sini sengaja dipilah-pilahkan berdasarkan topik.

Secara garis besar tanggapan-tanggapan yang muncul bisa dibagi menjadi dua. Yaitu yang menganggap bahwa apa yang terjadi di Kedung Ombo sudah 'keterlaluan' sehingga aksi-aksi mahasiswa, keinginan Romo Mangun untuk membantu rakyat, tindakan LSM Indonesia adalah wajar atau malah harus dilakukan demi pembangunan itu sendiri. Pihak yang lain adalah pendapat terhadap aksi-aksi kelompok masyarakat dan ornop (baca : LSM) sebagai tindakan yang tidak proporsional, tanpa melihat dan mengaitkan dengan bencana di daearh genangan yang menjadi sebab munculnya berbagai aksi tersebut. Yang menarik, hampir semua pihak (kecuali Pemda Jateng dan Boyolali) tidak ada satupun yang bisa menolak niat karya bakti kelompok Romo Mangun untuk membantu anak-anak terlantar di daerah genangan.

Tentang Pembangkangan Rakyat

Meskipun penggenangan telah dilakukan dan air dengan cepat menggenangi rumah-rumah penduduk dan memutuskan sarana perhubungan, penduduk tetap enggan pindah. Mereka milih untuk menggeser rumah secara beringsut. Menanggapi hal itu, Dr Arief Budiman, pengajar PPS UKSW berpendapat bahwa langkah pemerintah dalam menghadapi rakyat yang terkena proyek Waduk Kedung Ombo seharusnya bertumpu pada aspek keadilan. Karena hanya hal tersebut yang bisa menjadikan rakyat bisa paham terhadap permasalahan yang terjadi. Aspek keadilan itu bisa meliputi harga ganti rugi tanah dan pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk melunakkan sikap alot penduduk yang enggan pindah. [66]

---

[66] *Wawasan*, 19 Januari 1989.

Apabila pemerintah tidak segera mengantisipasi apa yang tengah terjadi di Kedung Ombo dengan penekanan aspek keadilan, di masa-masa mendatang peristiwa Kedung Ombo akan menimbulkan trauma bagi penduduk. Arief Budiman menilai pembangkangan yang terjadi di Kedung Ombo sebagai contoh unik rakyat kecil yang menjadi berani karena terpojok. Untuk mengatasi persoalan di Kedung Ombo, pemerintah seharusnya mengijinkan organisasi-organisasi non pemerintah membantu penduduk. Kasus Kedung Ombo oleh pemerintah hanya dilihat antara pembangkang dan penurut, dengan pendekatan: saya berkuasa, kamu menurut atau tidak. Walaupun yang terjadi si pembangkang sedang mempertahankan haknya. Pendapat serupa juga dilontarkan oleh pendeta Broto Semedi dari Salatiga yang berharap agar pemerintah memperhatikan rasa dasariah rakyat yang berusaha mempertahankan tanahnya, selain meninjau kembali harga ganti rugi tanah. Menurut Broto Semedi, "Siapapun orang, jabatan atau strata sosial yang berbeda akan menjerit bila merasa sakit."

"Persoalan muncul karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap orang kecil," demikian Arief Budiman. Ia beranggapan bahwa pemerintah seharusnya secara bijaksana melihat apakah penduduk yang dipindahkan itu kelak akan meikmati hasil pembangunan waduk. "Apabila mereka tidak ikut menikmati, sebaiknya pemberian ganti rugi untuk mereka lebih manusiawi. Apalagi rakyat tidak mempunyai lobi di pemerintah untuk menyampaikan aspirasinya, karena partai-partai politik yang ada sekarang tidak lagi mewakili rakyat kecil. Wakil mereka di legislatif juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga rakyat kecil cuma bisa menerima dengan terpaksa."

Kurangnya perhatian terhadap *wong cilik* yang masih terdapat di jaman pembangunan di kalangan para penguasa atau pemerintah serta segenap anggota masyarakat yang menjadi sebab utama mun-

culnya persoalan Kedung Ombo," demikian pendapat Dr Hamid Abdullah. Dia mengajak melihat karakteristik istilah *wong cilik* yang biasanya menjadi penganut budaya pasrah dan *nrimo*, namun dalam kenyataan sejarah Indonesia selalu merupakan kekuatan sosial. Dalam sikap pasrah dan *nrimo* yang hanya tampak di atas permukaan itu sebetulnya terkandung sebuah dendam sosial yang bertumpuk-tumpuk selama puluhan tahun dan baru akan meledak bila ada suatu kondisi yang memungkinkannya terjadi. Oleh karena itu kita semua seharusnya memperhatikan dengan seksama dilema kehidupan yang dihadapi oleh *wong cilik* seperti hak-hak mereka yang sering dikorbankan dengan alasan yang kurang rasional, digusur kesana-kemari tanpa memikirkan kompensasi yang layak bagi hidup mereka bersama keluarganya. Menurut Hamid Abdullah, apabila masalah yang ada tidak segera dipecahkan, ada kemungkinan akan muncul sebuah gerakan sosial atau protes yang nekad, karena *wong cilik* seringkali bisa dijadikan obyek politik secara efektif oleh kelompok yang tidak bertanggungjawab.[67]

Sedangkan tuduhan terhadap rakyat yang membandel sebagai orang yang anti Pancasila dan anti pembangunan ditanggapi oleh Ketua DPD Golkar Boyolali, Drs Sri Mulyanto sebagai sesuatu yang tidak selayaknya. Ia mengatakan : "Sama sekali mereka tidak ada niat menentang pemerintah. Mereka cuma belum sadar." [68] Sikap penduduk menurut Sri Mulyanto yang juga Ketua Fraksi ABRI DPRD Boyolali itu, cukup wajar dan tidak bisa dikatakan sebagai pembangkang atau penghambat pembangunan. Nada serupa juga muncul dari Romo YB Mangunwijaya yang beranggapan, bahwa

---

[67] Hamid Abdullah, "*Bicara Soal Wong Cilik*", Wawasan, 23 MAret 1989.

[68] Wawasan, 25 Januari 1989.

keruwetan yang muncul bersamaaan dengan penggenangan Waduk Kedung Ombo adalah suatu hal yang wajar dan tidak bisa dikonotasikan sebagai ada kaitannya dengan tendensi politik.

Ucapan Ketua DPRD Tk.II Golkar Boyolali yang orang daerah rupanya berbeda dengan ucapan orang pusat, yaitu Ketua MPR / DPRRI, Kharis Suhud yang menganggap persoalan Kedung Ombo merupakan masalah pemerintah. Untuk itu DPR mempercayai dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah, terutama pemerintah daerah yang diyakini bisa mengadakan musyawarah. Kalaupun ganti rugi dirasa kurang oleh penduduk, seharusnya dilakukan perundingan. [69]

Tanggapan orang pusat agaknya memang seragam. Misalnya pendapat anggota DPR Drs Moh Husnie yang menilai pembangkangan rakyat Kedung Ombo lebih dikarenakan ganti rugi tanah masih jauh di bawah pasaran harga tanah di sekitarnya. Karena itu pemerintah harus mempertimbangkan besar ganti rugi yang telah ditetapkan. Sedangkan Sekjen DPP Partai Persatuan Indonesia yang juga wakil Ketua komisi X DPR-RI berharap pemerintah pusat dapat melakukan pengawasan yang cermat dan ketat terhadap pelaksanaan proyek Kedung Ombo, agar rakyat kecil tidak menjadi korban permainan oknum-oknum. Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Sardjito Dharsoeki menyayangkan penggenangan waduk yang dilaksanakan sementara masih ada ribuan penduduk di daerah genangan. Menurutnya, tidak ada alasan lain, pemerintah harus memberikan bantuan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku karena masalah yang menyangkut rakyat kecil.

Persoalan di daerah pedesaan, semacam masalah registrasi dan penguasaan tanah dilihat oleh guru besar IPB, Soediono MP

---

[69] Wawasan, 17 Maret 1989

Tjondronegoro sebagai sering mengakibatkan birokrasi tidak bisa bergerak cepat. Status penguasaan tidak jelas dan benturan antara hukum adat dan hukum negara juga tidak bisa diselesaikan dengan segera. Kecuali untuk proyek besar (pusat) dengan SK Menteri atau SK Presiden. Dualisme di lapangan itu menghambat pelaksanaan dan seringkali golongan lemah yang tampil sebagai pembangkang hanya dijadikan pion. Golongan lemah yang masih bermukim di atas sebidang tanah miliknya tetapi tidak menguasai tanahnya, praktis tidak punya pilihan karena ganti rugi tidak mencukupi untuk memulai hidup di tempat baru. [70]

Ajakan berkontemplasi muncul dari Slamet Sutrisno. Staf P3PK UGM itu melihat perlunya kesadaran bahwa pemerintah seringkali tiba pada suatu dilema pembangunan, yang untuk memecahkannya tidak bisa hanya ditempuh dengan berpikir teknis, ekonomis dan eksak. Dilema-dilema yang rumit mesti diselesaikan terutama oleh pikiran cerdas dan perasaan bijak. Dan itu hanya dapat dipenuhi dengan tersedianya aparat pemerintah yang bermutu tinggi. [71]

Tentang Penolakan Pemda Jateng terhadap Niat Bakti Sosial Kelompok Romo Mangun

Berbagai reaksi yang cukup keras bermunculan sehubungan dengan penolakan Gubernur HM Ismail terhadap niat Kelompok Romo Mangun dan mahasiswa yang mau membantu orang-orang di Kedung Ombo, terutama anak-anak terlantar. Penolakan tersebut dianggap tidak segaris dengan gerakan solidaritas sosial yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Entah ada unsur kesengajaan atau tidak, Ketua Himpunan Pekerja Sosial, Ny. Sitti Hardyanti Rukmana justru menyampaikan ucapan selamat secara khusus kepada Romo Mangun dan para mahasiswa, setelah munculnya pelarangan Gubernur Jateng. Ia menyatakan rasa terharunya atas partisipasi Romo Mangun dan para mahasiswa yang merupakan manifestasi pengamalan Pancasila. [72]

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, A Malik Fadjar Msc menyesalkan pelarangan Gubernur Jateng. Menurut Malik Fadjar, seharusnya tidak perlu ada kecurigaan terhadap upaya kemanusiaan Romo Mangun. Karena motifnya telah jelas, yaitu berangkat dari amanat hati nurani. Lagi pula anak-anak di daerah genangan adalah mahluk-mahluk tak bersalah. Anak-anak tersebut perlu diselamatkan dari bencana kejiwaan sebagai manusia pendendam, hanya akibat kurang kentalnya komitmen terhadap kemanusiaan. Di masa mendatang, hal tersebut akan memunculkan dendam atau sakit hati akibat ketersingkiran secara politis, ekonomi atau kebudayaan. [73]

Menanggapi saran Gubernur Jateng agar Romo Mangun melakukan bakti sosial di Kayen, A Malik Fajdar berpendapat sebagai hal yang tidak tepat karena inti permasalahan justru Kedung Ombo membutuhkan penanganan segera. Sebagai seorang muslim, ia mengatakan seharusnya tidak mencurigai apa yang dilakukan sahabat yang non muslim. Konsep solidaritas sosial Islam tidak mengenal pemilahan tembok keyakinan, isme atau unsur primordialisme. Anjuran masyarakat untuk membantu sesama lewat lembaga pemerintah juga tidak segaris dengan pengembangan partisipasi rakyat.

---

[70] Sediono MP Tjondronegoro, *"Benturan Pembangunan"* Editor No 30, 25 MAret 1989.

[71] Slamet Sutrisno, *"Dari Kedung Ombo Sampai Gubuk Derita"*, Wawasan, 17 Pebruari 1989.

[72] Surabaya Post, 16 Maret 1989

[73] Kompas, 14 Maret 1989.

Apalagi pembangunan selama ini selalu didengung-dengungkan sebagai pembangunan semesta yang melibatkan rakyat dan pemerintah. "Jadi, seharusnya kemenangan partisipasi rakyat tidak perlu dibaca pemerintah sebagai menjatuhkan wibawanya," demikian pendapat Dr Lukman Sutrisno. Sudah waktunya sikap saling mencurigai diakhiri, karena kalau sifat seperti itu diterus-teruskan akan menyebabkan rakyat enggan ikut campur. Akibatnya, selain mematikan partisipasi, juga akan mematikan kretivitas rakyat sebagai unsur utamanya. Pelarangan Gubernur Jateng menurut menilaian Lukman Sutrisno merupakan hal yang tidak taktis dan hanya melihat persoalan Kedung Ombo secara hitam putih saja.[74)]

Dr Lukman Sutrisno khawatir apabila setiap usaha dari bawah selalu dicurigai, nantinya akan menimbulkan kerugian pada pihak pemerintah sendiri. Sikap represif yang kurang berhati-hati dari aparat akan menjadi bumerang bagi aparat. "Rakyat akan melihat, bahwa kita mulai ingkar terhadap hasil pencerdasan bangsa yang kita bikin sendiri. Demokrasi Pencasila yang berbeda dengan demokrasi liberal tidak menghenndaki ada pihak yang menang dan kalah. Justru setelah kenyang ditatar P-4, kenapa ada perjuangan melaksanakan doktrin Pancasila dihambat?"

Sedangkan anggota DPR dari fraksi PDI, Soetardjo Soerjoguritno menghimbau agar Romo Mangun tidak putus asa dalam berjuang untuk menolong anak-anak di Kedung Ombo. Ia percaya, sikap Romo Mangun akan membangkitkan solidarits sosial, baik antar aparat pemerintah yang formal maupun non formal untuk menolong rakyat yang menderita. Sebuah himbauan juga dilontarkan Soetardjo kepada Pemda Jateng agar membuka pintu selebar-lebarnya atas uluran tangan cinta kasih anggota masyarakat yang

74) Kedaulatan Rakyat, 14 Maret 1989

timbul dari lubuk hati yang dalam, yang niscaya akan membantu pemerintah dalam melaksanakan salah satu tujuan Panca Krida Kabinet Pembangunan Nasional.[75)] Ia berpendapat, kurang tepat keinginan melakukan bakti sosial Romo Mangun ditanggapi secara politis. Anggota DPR dari Fraksi Karya Pembangunan, Albert Hasibuan SH juga menyayangkan pelarangan Pemda Jateng yang dianggapnya kurang sesuai dengan konsep pengayoman yang harus dikembangkan pemda terhadap rakyat yang membutuhkannya. Pelarangan tersebut, menggambarkan kurangnya pemahaman terhadap aspek solidaritas sosial yang justru perlu dikembangkan saat ini.[76)]

Menurut Albert Hasibuan SH, pemerintah bertanggung jawab untuk mencari alternatif lain yang lebih baik agar penyelesaian masalah penduduk yang belum bersedia meninggalkan wilayah yang akan tenggelam benar-benar memuaskan. Dan alternatif apapun harus tetap melibatkan Romo Mangun. Senada dengan Lukman Sutrisno, Albert Hasibuan berpendapat bahwa alasan pelarangan oleh pihak Pemda Jateng harus dijelaskan secara terbuka agar tidak muncul berbagai tafsiran negatif.

Tanggapan keras muncul dari budayawan Mochtar Lubis. Ia menilai tindakan Gubernur Jateng tersebut sangat memalukan di mata dunia. Suatu tragedi kemanusiaan yang cukup kejam. Seharusnya Pemda Jateng bisa bercermin pada amanat bangsa di mana peningkatan kesejahteraan itu pada dasarnya untuk masyarakat kelas bawah. Menurut Mochtar Lubis, kalangan elit Jateng itu barangkali tengah mengalami krisis kasih sayang, sehingga tidak bisa melihat anak-anak dari segi manusianya. Kalangan elit Jateng lebih

75) ***Kedaulatan Rakyat***, 16 Maret 1989.

76) ***Kompas***, 15 Maret 1989.

banyak melihat dari unsur lain yang mengerdilkan nilai kemanusiaan anak.[77]

Bagi Mochtar Lubis, penolakan Gubernur Jateng tersebut merupakan '*test case*' bagi Mendagri Rudini yang biasa melontarkan pernyataan-pernyataan yang memihak orang kecil. Keputusan untuk tidak memberi ijin Romo Mangun Cs memasuki Kedung Ombo itu telah menunjukkan betapa birokrasi di Indonesia tidak bisa kreatif, inventif, inovatif, manusiawi atau menunjukkan solidaritas sosial. Untuk itu sebagai aparat tertinggi di jajaran Depdagri, Rudini harus berani mengoreksi 'kebobrokan' Gubernur Jateng dalam menjalankan demokrasinya. Apabila Rudini tidak mampu mengarahkan Gubernur Jateng, orang menilai bahwa Rudini hanya bisa bicara tapi tak bisa menunjukkan kata-katanya dalam wujud yang nyata.

Mungkin betul, seperti apa yang dikatakan oleh pengarang dan novelis Arswendo Atmowiloto, bahwa yang kurang pada kita semua adalah mengurangi ketakutan dan kebegoan. Juga bisa mendengarkan rintihan dan tangisan orang. Akibatnya ketika persoalan harga ganti rugi, pendekatan, penjelasan arti dan tujuan pembangunan gagal menemukan momentumnya. Yang terjadi adalah menutup diri untuk bertahan.[78]

Pernyataan yang agak berbeda muncul dari Ketua MUI Jateng KH Muslich yang mengatakan bahwa umat Islam Jateng sejak lama telah melakukan usaha-usaha meringankan beban warga terlantar di Kedung Ombo, baik yang masih bertahan maupun yang telah pindah. Hanya saja jalur pemberian itu berbeda, yaitu lewat Ormas, Korpri, Parpol, Golkar juga ABRI. KH Muslich juga menyatakan

[77] Terbit, 16 Maret 1989.

[78] Arswendo Atmowiloto, "Ternyata Kedung Ombo Menyisakan Luka dan Menyadarkan Bahwa Kita Masih Bego", Monitor, No 124/III, 21 Maret 1989

bahwa pihaknya dalam memberikan sedekah tidak pernah gembar-gembor yang dikatakannya sebagai: " Dalam memberi bantuan itu kita benar-benar menjauhkan diri dari sifat riya (menyombongkan diri). Justru kalau ada pihak lain yang bermaksud membantu dengan pamer, kemungkinan mempunyai pamrih tertentu." [79] Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan apakah bantuan yang diberikan itu pada akhirnya sampai ke tujuan atau tidak, karena yang penting justru dalam niat memberikan bantuan itu ditandai dengan rasa ikhlas, tanpa pamrih.

Tentang Aksi Mahasiswa Sehubungan Dengan Kasus Kedung Ombo

Menanggapi keinginan mahasiswa untuk membantu orang-orang di Kedung Ombo (rencana Tim Sukarelawan KSKPKO dan mahasiswa Semarang), Pembantu Rektor III Undip Ir Marwoto Kusumopradono menyatakan keinginan tersebut bukan merupakan hal yang aneh dan istimewa. Apa yang dikerjakan mahasiswa itu merupakan ekspresi yang murni tanpa didorong oleh pihak lain. Ia menganjurkan agar dalam merealisasikan kegiatan tersebut, para mahasiswa didampingi oleh konsultan atau pembimbing.[80] Sedangkan Dirjen Dikti Prof Sukaji Ranuwiharjo menegaskan, bahwa mahasiswa tidak dibenarkan melakukan bakti sosial di Kedung Ombo dengan mem-bawa-bawa nama universitasnya, karena tindakan itu belum tentu disetujui oleh mahasiswa lain di kampusnya. Mahasiswa yang mau membantu berdasarkan keprihatinan pribadi dan tidak mengatasnamakan suatu lembaga, menurut Sukadji boleh-boleh saja, mungkin bukan hanya mahasiswa tapi juga semua orang.

[79] Kedaulatan Rakyat, 14 April 1989

[80] *Suara Merdeka,* 16 Maret 1989.

Apabila mahasiswa mau melakukan kegiatan yang bersifat terorganisasi dan menjurus ke kegiatan politik praktis, mereka bisa melakukannya melalui organisasi politik yang ada.[81)]

Rektor Untag Semarang Drs Hari Soeharno melihat keikutsertaan mahasiswa dalam persoalan Kedung Ombo justru karena ketidaktahuan terhadap masalah yang ada. Para mahasiswa itu lebih dilihat karena dorongan rasa emosional saja. Mereka mencoba membuktikan, bahwa masyarakat kampus masih memikirkan persoalan masyarakat. Mahasiswa sebagai kaum intelektual yang bisa berpikiran luas, menurut Hari Soeharno, selayaknya menghormati wewenang seseorang atau instansi yang sedang menangani satu permasalahan. Jadi mahasisa jangan terus menerjang arus, karena hal itu justru akan memperburuk keadaan dan mengundang kerawanan sosial. Seharusnya mahasiswa yang mempunyai keinginan melakukan pengabdian, bukan hanya melakukannya di Kedung Ombo saja karena masih banyak persoalan lain yang membutuhkan keikutsertaan mahasiswa. Rektor Untag itu juga berharap agar mahasiswa terlalu percaya pada pihak-pihak yang bermaksud merongrong kewibawaan pemerintah.[82)]

Pemda Jateng seperti telah diketahui, memperbolehkan mahasiswa untuk mengadakan aksi sosial, tapi hanya di desa Kayen yang menjadi penampungan para penduduk yang tanahnya terkena proyek Waduk Kedung Ombo. Kebijakan tersebut sangat didukung oleh Rektor IKIP Negeri Semarang Dr Retmono yang berpendapat bahwa sebagai orang tua yag baik seharusnya orang-orang di daerah genangan tidak hanya berpikir untuk kepentingannya sendiri. Mahasiswa jangan menambah kesalahan dan sikap keras kepala penduduk dengan memberi bantuan.

[81)] Kedaulatan Rakyat, 17 Maret 1989

[82)] Wawasan, 18 Maret 1989

Tanggapan terhadapa aksi turun ke jalan yang dilakukan mahasiswa di tiga kota sehubungan dengan kasus Kedung Ombo yang di tahun 1989 bersama-sama dengan beberapa aksi mahasiswa lainnya seakan-akan menjadi titik balik anggapan yang ada terhadap mahasiswa sekarang hanya berada dalam menara gading. Sejarawan Dr Kuntowijoyo berpendapat justru aksi-aksi mahasiswa itu merupakan wujud kepedulian mereka terhadap persoalan bangsa negara terhadap sesuatu yang tak mungkin dihindari dalam sejarah. Aksi-aksi mahasiswa menandakan cara berpikir mereka semakin realistis. Mereka tidak puas hanya berkutat dengan ilmu yang mereka pelajari tanpa tahu persoalan-persoalan penting dan mendasar yang dihadapi masyarakat serta bangsanya. Pergeseran gerakan mahasiswa ke masalah-masalah sosial mungkin disebabkan mahasiswa sekarang sadar bahwa berjuang dengan langgam nyerempet politik membutuhkan energi besar dan melelahkan, sedangkan hasilnya minim.

Mahasiswa mempunyai semangat, romantika dan *vested interest*. Dengan kata lain, gerakan yang dilakukan mahasiswa lebih murni jika dibandingkan mereka yang sudah tidak muda lagi. Demikian pendapat mantan Angkatan '66, Marsilam Simanjuntak. Mahasiswa ibarat pengeras suara, mereka menjadi medium guna menyaringkan problematika masyarakat. Hal yang sering diperdengarkan mahasiswa, yang lazimnya memang jelas persoalannya, sering menimbulkan bising bagi mereka yang terganggu. Menurut Marsilam, sudah saatnya mempercayai unsur kesungguhan dalam gerakan mahasiswa yang telah mau menyediakan diri secara sukarela untuk menyampaikan amanat masyarakat. Beberapa pelanggaran yang ada dalam aksi-aksi mahasiswa sama sekali bukan merupakan unsur kesengajaan.[83)]

[83)] Jakarta-jakarta, No 144, 9 April 1989

Tokoh aksi Malari, dr Hariman Siregar menganggap mahasiswa merupakan satu-satunya institusi yang sangat berperan di saat lembaga-lembaga lain mati. Demonstrasi sebenarnya adalah bentuk darurat dari kontrol. Dengan demikian aksi-aksi mahasiswa adalah sesuatu yang normal. Mumpung masih mahasiswa, punya kebebasan melancarkan kritik sosial. Namun mantan aktivis mahasiswa, Ashadi Siregar menilai spontanitas mahasiswa sekarang justru semakin menurun, termasuk semangat juang yang semakin melempem akibat budaya konsumtif dan merosotnya kepekaan terhadap lingkungan.[84]

Sedangkan Eky Syachrudin yang merupakan tokoh eksponen '66 melihat kemunculan protes mahasiswa dewasa ini merupakan suatu perkembangan baru. Sebelumnya kehidupan mahasiswa *adem-ayem* saja. Mungkin mahasiswa telah sembuh dari trauma peristiwa Malari. Hal tersebut merupakan kemajuan, khususnya setelah sekian lama mahasiswa tertidur oleh adanya NKK BKK. Aksi mahasiswa dinilai Eky sebagai sebuah kristalisasi di dalam kehidupan mahasiswa itu sendiri. Kendati masih memanfaatkan berbagai momentum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Namun Eky menganggap apa yang dilakukan oleh para mahasiswa itu bukan hal yang ideal, karena mahasiswa idealnya adalah belajar. Hal ini karena organisasi politik yang ada memang belum sepenuhnya mampu menjadi mediator dari berbagai kepentingan. Jadi apa yang dilakukan mahasiswa untuk mengambil alaih peran orpol adalah suatu hal yang wajar.[85]

Dalam ungkapan yang berbeda, Ketua PP Muhammadiyah, Drs M Habib Chirzin berpendapat, gerakan mahasiswa lebih bersifat

[84] Ibid.

[85] Kedaulatan Rakyat, 19 Maret 1989.

panggilan hati nurani. Kepedulian mahasiswa terhadap kehidupan sosial dan lingkungannya yang kurang serasi, pada dasarnya merupakan ciri yang melekat pada diri mahasiswa dalam kedudukannya sebagai calon intelektual. Kalau mahasiswa diam, justru semua pihak harus merasa khawatir dan prihatin. Oleh sebab itu, munculnya gerakan mahasiswa atau bentuk aksi protes jangan dihadang dengan kekerasan. Peran pimpinan kampus, penyelenggara pemerintahan dan pihak keamanan sebagai orang tua dalam menghadapi gerakan mahasiswa seharusnya *tut wuri handayani*. Kegusaran para mahasiswa hanya bisa dijembatani lewat sebuah komunikasi yang terbuka dan dialog yang jujur.[86]

Apa yang dikatakan oleh Ketua PP Muhammadiyah tersebut, menurut pengamat sosial Drs Tadjuddin Noer Effendi MA akan memberi keuntungan berupa penyiapan barisan intelektual yang *committed* pada masalah-masalah sosial. Tadjuddin berpendapat justru dengan adanya NKK BKK, yang muncul adalah semakin tajamnya kesadaran kritis mahasiswa terhadap persoalan sosial, bukan hanya berkutat pada politik praktis. Pematangan komitmen mahasiswa sekarang terhadap orang kecil yang tertindas dilihat Tadjuddin antara lain dari banyaknya para aktivis yang terjun dalam berbagai LSM dan aksi-aksi yang lebih merupakan solidaritas. Aksi-aksi mahasiswa sekarang berbeda dengan generasi pra NKK yang berobsesi pada kegiatan politik praktis, berebut kursi Dema dan terkotak-kotak dalam gerakan mahasiswa seperti GMNI, HMI, PMKRI, yang dulunya lebih mengarah ke politik praktis. Hal tersebut yang membedakan aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa sekarang dengan kakak-kakak mereka.

[86] *Ibid*

Di jaman pra NKK aksi-aksi mahasiswa lebih condong membentuk politikus. Pola geraknya di antara kampus dan DPR. Di jalan-jalan mereka hanya mencari pengakuan dan terlihat politikus yang dilahirkannya adalah politikus yang kering komitmen sosial. Sedangkan aksi generasi NKK terlihat cenderung melahirkan kekuatan intelektual bak air bah yang kuat. Mereka menyoroti ketimpangan-ketimpangan sosial meskipun masih tanggung, masih impulsif dan reaktif. Menurut Tadjuddin, mungkin karena pengaruh langsung dari banyaknya buku-buku terjemahan yang sering dibahas aktivis mahasiswa dalam kelompok-kelompok studi. Hal yang sama juga dilihat pengajar UGM Amir E Siregar dan Dr Lukman Sutrisno yang sama-sama menilai bahwa tingkat kemampuan berpikir kritis dan analisis yang cukup, maju pesat dan berbeda jauh dengan mahasiswa dari generasi sebelumnya. Kekritisan para mahasiswa itulah yang menuntut mereka untuk membantu memecahkan persoalan-persoalan masyarakat.

Sedangkan Ketua Umum PB HMI Ir Herman Widyananda dan Wakil Sekjen DPP PPP Drs Hoesni Thamrin berpendapat aksi protes yang lancarkan mahasiswa akhir-akhir ini tentunya bukan sekedar sok aksi-aksian. Herman melihatnya lebih disebabkan para mahasiswa yang jenuh terhadap pranata perguruan tinggi yang tidak banyak membuka peluang aktivitas-kretivitas. Berkaitan dengan hal itu, Herman mengingatkan agar kepekaan mahasiswa tersebut segera dijawab. Mau tidak mau perguruan tinggi harus dibenahi lagi untuk membuka kebebasan akademis, kampus dan mahasiswa sendiri. Sementara itu, Hoesni Thamrin yaang mantan Ketua Umum KAPPI di tahun 1966 menyatakan yang menunggangi aksi mahasiswa ini adalah kepentingan rakyat kecil yang sering diperlakukan tidak adil. Mahasiswa sebagai kekuatan moral merasa terpanggil untuk ikut memperjuangkan penderitaan rakyat. Apabila para mahasiswa itu kemudian dinilai tidak mempunyai konsep tentang

jalan keluarnya adalah wajar, karena mereka belum terlalu banyak memiliki pengalaman. Alasan mahasiswa miskin konsep tidak patut dijadikan alasan bagi pejabat yang tidak mau menerima protes mereka. Toh sebenarnya telah jelas, masyarakat telah dirugikan.[87]

Pengamat politik dari FISIP UGM, Dr Sofyan Effendi meramalkan kegiatan mahasiswa yang bersifat lokal maupun nasional akan terus bermunculan selama tiga tahun mendatang, karen ada banyak ketimpangan yang memang harus diluruskan oleh kelompok intelektual muda sebagai perwujudan dari tanggung jawab mereka. Beberapa kasus penindasan terhadap masyarakat kelas bawah selama ini tidak bisa diperjuangkan para wakil rakyat. Hal itu dilihat Sofyan sebagi salah satu pendorong munculnya aksi mahasiswa. Ada juga kemungkinan lain, yaitu mahasiswa ingin berperan secara lebih aktif menjelang suksesi kepemimpinan nasional dan ini kelihatannya mendapat angin dari kalangan militer. Sofyan memastikan gerakan mahasiswa nantinya akan mampu menjadi gerakan yang bersifat nasional.[88]

Sedangkan Pembantu Dekan I FISIP UI, Drs Dwi Susanto MA melihat gerakan mahasiswa sebagai keharuan sejarah. Masyarakat yang membutuhkan penyaluran aspirasi memang menuntut kevokalan mahasiswa. Tidak adil apabila mencoba menyalurkan aspirasi yang tercetus menjadi gerakan hanya melalui surat pengaduan ke Kotak Pos 5000. Baik Sofyan Effendi maupun Dwi Susanto sama-sama sependapat, gerakan mahasiswa merupakan sebuah perwujudan dari partisipasi politik.[89]

---

87) Surabaya Post, 25 Maret 1989.

88) Terbit, 28 Maret 1989.

89) *Ibid*

Heri Akhmadi, mantan aktivis ITB tahun '78 beranggapan gerakan mahasiswa yang ada sekarang lebih murni dibanding aksi-aksi demontrasi angkatannya atau angkatan-angkatan sebelumnya. Gerakan yang ada sekarang oleh Heri dinilai punya kemiripan dengan gerakan angkatannya yaitu lugas, spontan dan apa adanya. Cuma generasi sekarang kurang beruntung, karena tidak mempunyai organisasi formal dan situasi politik tidak menguntungkan. Oleh sebab itu mahasiswa sekarang dituntut untuk lebih bekerja keras. Heri Akhmadi menyatakan kekagumannya terhadap aksi-aksi mahasiswa, karena ternyata mahasiswa sekarang bisa mengadakan konsolidasi tanpa fasilitas dan kekuasaan seperti yang dulu ia dan kawan-kawannya melakukannya dalam aksi tahun '78. Dengan kekuasaan itu, mahasiswa dulu pergi berdemonstrasi ke Jakarta dengan memakai mobil universitas dan dapat dukungan pimpinan universitas.[90]

Munculnya keresahan sosial yang bersumber karena dampak sosial proyek dan program pemerintah sendiri dilihat Ketua IPSM Drs Dawam Rahardjo sebagai sebab aksi mahasiswa. Menurut Dawam, pemerintah memang berkepentingan untuk memelihara dan mempertahankan stabilitas politik. Namun stabilitas politik tersebut akan sulit dicapai apabila program-program pemerintah tidak mampu melaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan keresaha sosial.

Penilaian positip terhadap berbagai aksi mahasiswa yang semakin gencar diberikan oleh Direktur LSP Adi Sasono. Ia berpendapat gerakan yang terjadi sekarang membuktikan mahasiswa tetap merupakan kelompok masyarakat yang peka dan sekaligus menumbangkan kekhawatiran yang ada bahwa mahasiswa telah menjadi kelompok yang apatis. Turunnya mahasiswa untuk memperjuang-

[90] Jakarta-Jakarta No 144, 9 April 1989

kan kepentingan yang bertemakan keadilan sosial merupakan sebuah pertanda gagalnya lembaga perwakilan rakyat untuk mewakili aspirasi masyarakat. Sebuah pertanda yang selayaknya membuat semua pihak bermawas-diri. Sedangkan Kepala BP-7 Pusat Oetojo Oesman melihat keberanian mahasiswa maupun kelompok masyarakat yang menanyakan kebijakan pemerintah bukan perbuatan negatip, melainkan justru jadi petunjuk makin timbulnya rasa tanggungjawab berbangsa dan bernegara.[91]

Beberapa pihak khawatir dengan aksi-aksi mahasiswa yang frekuensinya semakin meningkat, terutama di beberapa tempat seperti Jogja, Bandung dan Jakarta. Apalagi aksi-aksi mahasiswa tersebut melibatkan banyak mahasiswa dari kota-kota lain yang sebelumnya dikenal sebagai 'mahasiswa baik-baik', yang di tahun '78 dikenal sebagai kelompok 'banci'. Beberapa pihak beranggapan aksi-aksi mahasiswa sudah menjadi liar, berani mengeluarkan kata-kata yang langsung menyinggung presiden dan juga meneriakkan semangat anti militer. Menanggapi hal tersebut, Albert Hasibuan SH mengingatkan para mahasiswa agar dalam menyampaikan protes bersikap dewasa dan benar.

Komentar keras muncul dari Ketua Umum KNPI, Drs Didiet Hariyadi Priyoutomo yang menyatakan bahwa ia mengetahui gerakan mahasiswa yang menyangkut Kedung Ombo ada yang membiayai, bahkan ia mengaku mempunyai bukti-buktinya.[92] Didiet mengatakan, yang memberi dana adalah salah satu negara Eropa

[91] Terbit, 29 Maret 1989.

[92] Pernyataan Ketua KNPI ini disesalkan oleh banyak pihak. Salah satunya adalah para mahasiswa yang tergabung dalam Gemapaksi (Gerakan Mahasiswa Pembela Keadilan Sosial) yang merasa dongkol. Mereka menantang Didiet untuk membuktikan ucapannya, atau mencabut pernyataannya lewat media massa. Gemapaksi yang pernah mengadakan aksi ke Depdagri untuk

sedangkan pusat gerakan ada di Salatiga. Beberapa orang maha-
siswa yang seharusnya di Salatiga, apabila bergerak ke Jakarta akan
menyebabkan Jakarta menjadi panas. Hal tersebut menurut Didiet
adalah konsep desa mengepung kota, sebuah konsep yang harus
dicurigai. Lebih lanjut Didiet mempertanyakan aksi-aksi KSKPKO
yang dianggap telah brutal, teriak-teriak di halaman kantor, menun-
ding aparat, meludahi. Bukankah itu bukan etika Indonesia, itu bu-
kan etika orang beragama? tanya Didiet kepada wartawan dengan
nada tinggi. Karena itu, ia menganjurkan semua pihak tidak menang-
gapi aksi mahasiswa.

Tetapi ucapan Ketua KNPI yang berkesan ***ngawur*** tersebut
ditanggapi oleh berbagai pihak. Wakil Ketua DPR Soekardi dan Wa-
kil Ketua MPR Soeprapto sama-sama meminta agar KNPI tidak ber-
prasangka dahulu. Mereka berdua beranggapan gerakan mahasiswa
masih dalam batas kewajaran dan belum brutal. KNPI seharusnya
tidak mengecewakan perjuangan mahasiswa, tapi malah sebaliknya
harus mampu menjadi wadah penyalur aspirasi dan mendu-
kungnya.[93] Soeprapto beranggapan munculnya aksi mahasiswa
justru merupakan pertanda gagalnya KNPI menjadi wadah penyalur
aspirasi kaum muda serta tidak adanya komunikasi antara KNPI
dengan mahasiswa. Sedangkan anggota FPDI Aberson Siheloho
menyatakan, mestinya Ketua KNPI berbicara hati-hati apalagi KNPI
kurang berfungsi dan tidak mampu menjadi penyalur aspirasi kaum
muda. Ucapan Didiet disesalkan oleh Aberson, karena pejabat peme-
rintah malah memberikan tanggapan secara positip terhadap aksi
mahasiswa.

membela para penambang pasir di Mojokerta yang perahunya dibakari aparat, menggugat KNPI yang mengklaim dan mengatas namakan mahasiswa Indonesia dalam pertemuan dengan Mendagri. Mereka juga berencana membuat mosi tidak percaya buat KNPI. Lihat: *Suara Indonesia,* 19 April 1989.

93) Jawa Pos, 19 April 1989

Wakil Sekretaris FKP Marzuki Darusman juga memberikan pernyataan senada dengan Soekardi dan Soeprapto. Ia melihat aksi mahasiswa lebih sebagai ungkapan tanggungjawab warga nega-ra, lain tidak. Ia juga menyatakan, bahwa mendukung aksi yang dilancarkan mahasiswa dan apa yang mereka perjuangkan pada prinsipnya sama dengan perjuangan FKP. Apa yang dipersoalkan mahasiswa, semestinya tidak menjadi masalah bagi KNPI, tapi kenapa pihak KNPI malah mengecam.

Aksi-aksi mahasiswa yang oleh sementara pihak dianggap telah brutal dan tidak terkendali ditanggapi Ketua DPR/MPR Kharis Suhud dengan mengingatkan semua pihak agar waspada. Terutama pada kegiatan yang mencoba-coba untuk memecah belah pihak ABRI dengan kampus. Tentang aksi-aksi itu sendiri, Kharis Suhud mensi-nyalir mungkin saja ada unsur penunggangan tapi mungkin pula mahasiswa bergerak atas nurani sendiri. Untuk menangkalnya diperlukan pengertian. Walaupun keadaan yang dialami sekarang memang sulit, Kharis Suhud berharap semua pihak menghadapi aksi mahasiswa dengan sikap lunak. Pengertian dan kerjasama an-tara ABRI yang berfungsi sebagai dinamisator dan kampus sebagai pusat lahirnya pemikiran-pemikiran baru sangat diperlukan dalam perjalanan bangsa Indonesia kini dan masa mendatang.[94]

Sedangkan Ketua Fraksi PDI, Drs Soeryadi melihat penanga-nan secara sangat hati-hati harus diprioritaskan terhadap kegiatan kampus yang merupakan bagian terdepan tempat penggodogan kader-kader pimpinan bangsa. Kejelasan tentang keterlibatan pihak luar dalam aksi-aksi mahasiswa sebaiknya diproses lewat saluran hukum. Soeryadi melihat munculnya sejumlah aksi mahasiswa bela-kangan dikarenakan tidak semua usul yang dilontarkan masyarakat

94) Suara Merdeka, 11 April 1989

dapat diselesaikan melalui saluran DPR. Terkadang DPR hanya mampu mengaspirasikan suara masyarakat, tapi penyelesaiannya lambat dan seringkali pula tak kunjung beres. Soeryadi mengakui bahwa sistem politik yang sedang berjalan ini memang tidak memungkinkan bagi DPR untuk menyelesaikan seluruh masalah yang ditanganinya. Bahkan seringkali tidak mampu menyelesaikannya, misalnya masalah pembangunan Waduk Kedung Ombo. Kemampuan infrastruktur politik untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul di tengah masyarakat juga masih lemah. Menurut Soeryadi, mungkin akibat terlalu kuatnya posisi eksekutif.

Aksi unjuk rasa menurut Sekretaris Fraksi Karya Pembangunan, Rachmat Witoelar, terjadi akibat kurangnya kepercayan masyarakat terhadap lembaga tinggi negara. Untuk itu, keterbukaan pemerintah melalui pejabat akan membantu penyelesaian berbagai masalah. Meskipun semua pihak harus berwaspada, tetapi jangan dulu cepat berprasangka. Sebagai anggota DPR, Rachmat Witoelar menyatakan kesedihannya karena dijauhi dan tidak dipercaya oleh mahasiswa.[95)]

Lain lagi dengan anggota Fraksi PDI Aberson Marle Sihaloho. Ia lebih melihat belum terciptanya mekanisme yang efektif untuk menyalurkan aspirasi dari kaum muda sekarang ini yang menjadi penyebab utama aksi-aksi. KNPI yang ada sekarang, menurut Aberson lahir dan di arahkan untuk loyal dan taat kepada suatu organisasi kekuatan sosial-politik tertentu. KNPI tidak bisa mandiri dalam menyalurkan aspirasi politik. Para mahasiswa yang melakukan aksiaaksi justru tidak di*onderbouwi* oleh kekuatan Sosial-politik tertentu.[96)]

[95)] Media Indonesia, 12 April 1989

[96)] Kedaulatan Rakyat, 12 April 1989

Wakil rakyat sekarang memang ibarat kue serabi yang terjepit. Ungkapan ini diungkapkan oleh Wakil Sekretaris FKP Bidang Umum, Krissantono dalam menanggapi aksi-aksi mahasiswa. Aksi-aksi mahasiswa justru lebih bisa menyuarakan kebutuhan rakyat dibandingkan dengan wakil rakyat yang suaranya sudah parau akibat omongan dan usulannya berkali-kali tidak langsung ditanggapi oleh eksekutif. Hal itulah yang membuat DPR seperti kue serabi terjepit. Dari bawah dituntut omong dengan cepat dan kongkret sedang dari atas diatur mekanisme yang tidak memungkinkan untuk berbuat sesuai tuntutan tersebut.[97)] Bila tidak pandai, bisa-bisa kue serabi itu akan menjadi gosong dan tidak enak dimakan. Krissantono sendiri menyatakan, FKP senantiasa berusaha menjaga agar jangan sampai 'kue serabi' tersebut menjadi gosong sambil tetap gigih memperjuangkan tuntutan rakyat. Sekaligus mendorong secara perlahan agar mekanisme dibuat semakin terbuka.

Seorang wakil PPP, Drs Yusuf Syakir secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap aksi-aksi mahasiswa. Baginya mahasiswa saat ini jangan ditakut-takuti dengan berbagai dalih.[98)] "Seharusnya pemerintah dan juga DPR mau melakukan dialog dengan mahasiswa, demikian pendapat Wakil Sekretaris FKP Drs Bomer Pasaribu yang menghimbau agar para pejabat pemerintah tidak saling melontarkan pandangan yang bertentangan hingga memberikan kesan mereka panik dengan adanya aksi mahasiswa.[99)] Bomer juga mengatakan di bidang sosial-ekonomi pemerintah telah memberikan peluang melalui deregulasi dan debirokratisasi yang terbukti menumbuhkan percepatan proses demokrasi dalam bidang

---

[97)] Surabaya Post, 15 April 1989

[98)] Suara Indonesia, 27 Maret 1989

[99)] Wawasan, 21 April 1989

tersebut. Seyogyanya hal yang sepadan dilakukan pula dalam kehidupan politik agar tidak terjadi kesenjangan antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan politik. Menurut Bomer, budaya pengendalian dan pengaturan harus diubah menjadi budaya melayani dan mendorong, baik di lingkungan birokrasi pemerintah maupun kampus.

Tanggapan-tanggapan lain yang bermunculan, umumnya semua memberi angin kepada aksi-aksi mahasiswa yang dianggap bisa mendorong terjadinya suatu perubahan, yaitu demokratisasi. Mantan Pangkopkamtib Jendral Pur Soemitro meminta agar pemerintah segera melakukan keterbukaan.[100] Gubernur Lemhanas Mayjen Soebijakto juga menyatakan keyakinannya terhadap tujuan baik dari para mahasiswa yang melakukan aksi-aksi karena mahasiswa adalah orang baik-baik dan bukan kriminal.[101] Hanya fraksi ABRI yang tidak memberikan tanggap-an secara jelas, kecuali Sundoro Samsyuri yang secara pribadi menilai aksi mahasiswa masih dalam batas kewajaran dan belum sampai pada tingkat yang menghawatirkan.[102] Fraksi ABRI kemudian membentuk Tim kecil yang terdiri dari tiga orang yang bertugas untuk mengumpulkan data dan keterangan sambil melihat dari dekat permasalahan yang berkembang di Kedung Ombo.

Tentang LSM Yang Dianggap Tidak Patriotik

Berbagai tanggapan muncul terhadap tuduhan pemerintah kepada LSM yang dianggap menjelek-jelekan Indonesia di mata inter-

[100] Suara Pembaruan, 30 Maret 1989

[101] Kompas, 17 April 1989

[102] Surabaya Post, 21 April 1989

nasional Antara lain dari Dr Arief Budiman yang berpendapat bahwa LSM sama sekali tidak bermaksud menjelek-jelekan bangsa sendiri. LSM hanya memberi masukan komplementer atas apa yang telah dilakukan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang bertitik berat pada kepentingan rakyat kecil. Jadi sama sekali tidak bisa disalahkan, apabila LSM melakukan upaya mempengaruhi kebijakan negara maju untuk memberikan bantuan yang betul-betul menjawab realitas kebutuhan masyarakat Indonesia. Arief Budiman menghimbau agar pemerintah mendefinisikan kembali fungsi LSM dan menjabarkan kembali apa yang disebut konsep politik. "Kalau ada rakyat digusur, apakah LSM harus diam saja? Apakah kalau LBH membela kasus Subversif akan disebut sebagai berpolitik?", tanya Arief atas tuduhan pemerintah bahwa LSM telah berpolitik.[103]

Sedangkan Abdul Hakim G Nusantara sebagai ketua INGI Indonesia menyatakan, LSM hanya minta negara maju agar lebih memperhatikan kepentingan dunia ke tiga. Dan sama sekali tidak bisa diartikan sebagai menjelek-jelekan, apalagi menghambat pembangunan. LSM hanya mau menyatakan bahwa seharusnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dijadikan keprihatinan yang bersifat nasional dan tidak dilihat dari sudut yang sempit saja. Gugatan INGI kepada Bank Dunia seharusnya tidak semata-mata dianggap sebagai masalah Indonesia, tapi juga masalah negara-negara berkembang lainnya.[104]

Partisipasi LSM dalam mempengaruhi kebijakan negara pemberi bantuan, menurut Abdul Hakim justru akan meningkatkan kredibilitas Indonesia di tingkat Internasional. Pernyataan ini juga diperkuat Romo YB Mangunwijaya. Ia menganggap keberadaan dan

[103] Kompas, 9 Agustus 1989

[104] *Ibid*

peran LSM telah mendapat pengakuan internasional sebagai kekuatan ke empat dalam kehidupan negara, setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam hubungan internasional yang kontemporer, pembangunan bukan hanya monopoli pemerintah, tapi juga masyarakat termasuk LSMnya. Dengan demikian sulit diterima adanya himbauan agar LSM tidak mencampuri urusan di luar bidangnya, mengingat bidang yang satu berkaitan dengan bidang yang lain.

Direktur LP3ES, Aswab Mahasin lebih melihat timbulnya pandangan negatif terhadap LSM dikarenakan kurangnya pengertian antara pemerintah, LSM dan lembaga donor pemberi bantuan pembangunan sehingga timbul iritasi. Menurut Aswab, keberadaan LSM di berbagai forum tidak mungkin ditiadakan, karena LSM adalah fenomena internasional. Peranan LSM selalu berhubungan dengan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya internasional untuk membantu rakyat kecil. Diakui oleh Aswab, mungkin memang tidak bisa dihindari munculnya masalah politik, namun perlu diingat bahwa LSM sama sekali bukan organisasi politik atau organisasi massa yang melakukan kegiatan politik praktis. Kadar ancaman terhadap stabilitas politik dari LSM boleh dibilang tidak ada. Satu-satunya politik yang dilakukan LSM hanyalah politik pembangunan, dalam arti mengupayakan pembangunan yang memberi manfaat kepada rakyat kecil.[105)]

Ketua Umum PBNU, H Abdurrahman Wahid mengibaratkan LSM dan pemerintah seperti mata uang. Apa yang dilakukan LSM sesungguhnya untuk melengkapi apa yang dikerjakan pemerintah. Jadi kalau memang ada ganjalan antara LSM dengan pemerintah seharusnya ada dialog sebelum vonis dijatuhkan. Hal tersebut akan mengkondisikan pendewasaan sikap keterbukaan. Menurut Abdur-

105) Kompas, 10 Agustus 1989

rahman Wahid, apa yang dilakukan INGI di Belgia bukan merupakan sebuah pertemuan gelap karena pihak Dubes Indonesia di Belgia dan Belanda mengetahuinya dan menerima laporan. Demikian juga dengan Mendagri dan Menlu, semua laporan telah disampaikan oleh peserta INGI Indonesia kepada mereka. [106)]

Tanggapan keras muncul dari anggota DPR Fraksi PDI, Yachya Nasution. Ia menghimbau aparat yang berwenang agar menindak, atau paling tidak memberikan sanksi kepada LSM yang telah merusak citra Indonesia di luar negeri. Menurut Yachya, apa yang telah dilakukan segelintir manusia di Belanda itu adalah sebuah hal yang tidak dapat dibenarkan. Apalagi pada saat ini semua orang bersusah-payah mengharumkan citra Indonesia di luar negeri. [107)]

ooOoo

106) Jawa Pos, 9 Agustus 1989

107) *Ibid*

ROMO MANGUN DKK. MENGIMBAU

Kami memanggil dengan penuh kepercayaan
relawan-relawati cintawan
DEMI 3500 ANAK TERLANTAR
di KEDUNGOMBO
yang sedang digenangi.
Untuk bergilir menolong mereka
sebagai abang - kakak - guru - pengasuh dsb.
Kami tidak punya modal apa-apa. Maka
maaf pembiayaan transpor dan hidup sehari-hari
selama ± 1 s/d 2 minggu setiap angkatan ditanggung
sendiri:
Hubungilah koordinator kami :
di - Panti Putra Mangkunegaran Solo
Telefon .. 5628 (0271).
- JL. Sidobali UH II / 1389 Yogyakarta
. JL. Imam Bonjol 206 Semarang
Telefon 285690

R.S. Elisabet Semarang. 23 Feb '89.
Penuh harapan,
ttd. 1/ Y.B. MANGUNWIJAYA
2/ ABDUL HAKIM G. NUSANTARA.
3/ SOEMAN
4/ SETYAWAN.
5/ S.T. WIYONO
6/ YAYAK A. YATMAKA

Y.B. MANGUNWIJAYA
S.T. Wiyono
YAYAK A. YATMAKA

Ajakan dan Panggilan dari Kelompok Romo Mangun kepada masyarakat untuk membantu anak-anak terlantar di Kedung Ombo yang dimuat sebagai iklan dalam harian Kedaulatan Rakyat tanggal 27 Pebruari 1989
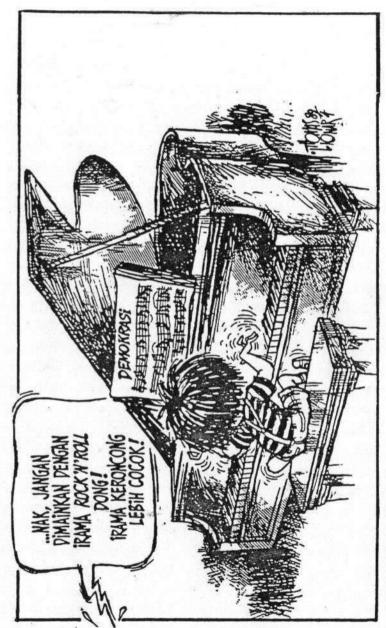
SUARA PEMBARUAN
15 APRIL 1989

Pemerintah cukup dipermalukan oleh pemberitaan tentang pembangunan Waduk Kedung Ombo yang ternyata menimbulkan kesengsaraan rakyat serta munculnya serangkaian aksi mahasiswa. Oleh karena itu, pemerintah mencoba melakukan upaya tandingan guna menetralisir pandangan negatif yang muncul. Langkah tandingan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengisolir dan menakut-nakuti penduduk agar segera cepat pindah, membuat pemberitaan yang menyatakan tidak ada penangkapan dan orang yang terlantar di Kedung Ombo, mendorong adanya bakti sosial tandingan. Juga penekanan terhadap aktivis mahasiswa dan aktivis LSM yang dianggap telah mempermalukan Indonesia di luar negeri.

Mengisolir dan Menakuti-nakuti Penduduk

Seperti telah disebut dalam Bab terdahulu, menjelang penggenangan waduk diresmikan, pemerintah membentuk Satuan Tugas Pengamanan 0724 yang dikoordinasikan di bawah Dandim Boyolali, Letkol Drajad Budi Santoso. Satgaspam ini juga bertujuan untuk membantu penyelamatan harta benda dan orang-orang di daerah genangan dari ancaman bahaya tenggelam. Namun yang terjadi kemudian, Satgaspam malah memperlakukan keadaan tertutup bagi seluruh kawasan genangan Waduk Kedung Ombo. Dengan demikian lalulintas untuk masuk-keluar Kedung Ombo tidak bebas lagi. Pos-pos penjagaan didirikan dimana-mana secara berlapis-lapis. Personil yang bertugas memakai seragam hijau loreng dan bersenjata lengkap. Mereka sering menakut-nakuti penduduk setempat. Kehadiran Satgaspam yang tadinya secara resmi dimaksudkan untuk membantu penduduk, ternyata lebih berfungsi sebagai penonton yang mengawasi penduduk saat bekerja membongkari hartabenda mereka.

Pemerintah meneruskaan upaya-upaya penekanan yang dulu

pernah dilakukan untuk memaksa agar penduduk maau pindah, apalagi setelah terbetik kabar bahwa di bulan Maret pihak Bank Dunia akan mengunjungi daerah genangan. Aparat mendatangi rumah-rumah penduduk yang telah cap jempol atau menerima uang ganti rugi dan penghuninya diminta untuk segera pindah.[2] Petugas berseragam lengkap mendatangi rumah-rumah penduduk pada tengah malam dan memberitahu agar keesokan harinya penduduk pindah. Truk-truk pengangkut akan disediakan oleh aparat. Rumah-rumah penduduk yang tidak mau pindah juga digedor pada saat penghuninya sedang lelap tertidur dan beberapa petugas bersenjata langsung menerobos masuk, memaksa penduduk agar menandatangani surat ganti rugi. Terkadang penganiayaan dialami oleh penduduk yang menolak cap jempol atau membubuhkan tanda tangannya.[3] Beberapa kali juga dilakukan latihan militer bersama yang melibatkan personil dari beberapa batalyon di dekat lokasi pemukiman penduduk di daerah genangan. Latihan perang-perangan tersebut tidak membuat gentar penduduk yang terus mencoba bertahan.

---

[2] Beberapa saksi mata dan aktivis KSKPKO menyaksikan dengan mata kepala sendiri terjadinya evakuasi secara besar-besaran di Desa Klewor yang berlangsung selama seminggu. Antara tanggal 3 hingga 10 Maret 1989.

[3] Intimidasi dan penangkapan oleh aparat Satgaspam terhadap penduduk yang bertahan dan tidak mau menerima ganti rugi ini disanggah oleh Dandim Boyolali (Kompas, 25 Maret 1989). Ia menyatakan tidak merasa mengeluarkan instruksi seperti itu kepada anak buahnya. Bila hal itu terjadi, menurut Dandim Boyolali, mungkin dilakukan oleh oknum petugas dan mungkin terjadi hanya karena perbedaan persepsi. Penangkapan terhadap penduduk yang dituduh mencuri kayu semata-mata karena berkaitan dengan tindakan kejahatan. Pernyataan Dandim ini kemudian menimbulkan pertanyaan, yaitu semenjak kapan Satgaspam (militer) mengurusi pencurian kayu. Kok bukan polisi hutan?!

Dengan demikian kejadian yang pernah menimpa penduduk sebelum waduk digenangi, kembali terulang. Penduduk di daerah pedalaman yang relatif lebih kompak dan lebih radikal merasa lebih aman dibandingkan mereka yang berada di sekitar sabuk hijau. Aparat militer sendiri agak enggan untuk memasuki pemukiman penduduk di pedalaman.

Beberapa tokoh perlawanan rakyat Kedung Ombo mendapat panggilan untuk menghadap ke Polsek atau Koramil setempat. Mereka mendapat berbagai intimidasi, baik mental maupun fisik. Dalam surat panggilan yang diberikan, mereka dipanggil karena kasus penipuan. Tetapi ketika di Polsek atau Koramil mereka dikenai tuduhan baru, telah mengundang dan menyebarkan berita bohong kepada mahasiswa.

Berbagai cara terus dilakukan agar penduduk pindah, baik karena terpaksa maupun sukarela. Antara lain dengan melepaskan beberapa ular sawah (phyton) ukuran besar di daerah genangan agar penduduk ketakutan dan pindah. Kemudian pihak aparat pura-pura mendatangkan lima orang pawang ular dari Solo untuk menyelamatkan penduduk dari kemungkinan serangan atau patukan ular.[4] Namun cara tersebut hanya membuat cemas kaum ibu dan anak-anak kecil, karena kaum laki-laki yang sebagian besar tahu muslihat tersebut justru mencari si pawang untuk *digebugi* ramai-ramai.[5]

Bantuan-bantuan dari berbagai pihak untuk penduduk di daerah genangan berupa makanan, tenda, obat-obatan dan perahu diblo-

[4] Surabaya Post, 24 Januari 1989.

[5] Pawang ular "gadungan" yang sengaja didatangkan dari Solo tersebut akhirnya ketakutan dan tidak berani memasuki daerah genangan, karena selalu dikejar-kejar dan dicari oleh penduduk yang marah.

kir. Sementara penduduk telah mulai makan gaplek. Strategi untuk membuat penduduk lapar, putus asa dan kemudian menyerah ini agaknya mirip dengan taktik 'Benteng Stelsel' yang digunakan kolonial Belanda. Pemblokiran ini nantinya malah menimbulkan beberapa aksi.

Penekanan terhadap penduduk masih terus berlanjut, meskipun nantinya Satgaspam telah ditarik dari daerah genangan. Penekanan yang cukup berat dan menimbulkan beban kejiwaan kepada penduduk Kedung Ombo adalah dijatuhkannya vonis oleh Presiden Soeharto[6], yaitu Kedung Ombo adalah basis PKI dan kemungkinan masih ada sisa-sisa PKI yang berusaha mempengaruhi rakyat di sana. Ucapan presiden tersebut segera menyebar secara meluas di daerah genangan dan menimbulkan kekhawatiran setiap orang yang mencoba bertahan. Mereka cukup tahu apa konsekuensi ucapan presiden tersebut. Bertahun-tahun mereka telah menyaksikan sendiri bagaimana perlakuan aparat terhadap rakyat yang KTPnya dicap ET.

Bukan hanya itu, vonis 'PKI dan sisa-sisanya' tersebut cukup efektif untuk menimbulkan kepanikan kepada sebagian orang yang tadinya bersimpati dan memberikan bantuan kepada rakyat Kedung Ombo. Mereka takut akan kemungkinan terkena getah gara-gara membantu PKI. Hal yang sama juga menimpa sebagian aktivis yang tadinya menggebu-gebu ingin membantu rakyat Kedung Ombo.

[6] Banyak orang yang menyesalkan ucapan Pak Harto ini, yang sebelumnya diharapkan bisa membantu penyelesaian kasus Kedung Ombo. Ada beberapa orang yang menilai, ucapan presiden tersebut merupakan perlambang akan jatuhnya pemerintahan Soeharto. Pendapat ini terutama muncul dari kalangan paranormal.

Pengalihan Perhatian

Untuk menetralisir pemberitaan tentang adanya ribuan anak sekolah yang menjadi terlantar karena genangan air, pemerintah memberikan bantahan lewat koran. Kepala Depdikbud Kabupaten Boyolali Drs Moh Said bahkan mengatakan sama sekali tidak ada hambatan terhadap kelangsungan proses belajar-mengajar anak-anak di Kecamatan Kemusu. Karena anak-anak SD yang bangunan gedungnya tergenang sudah pindah ke sekolah lain. Anak-anak itu tidak ketinggalan dalam mengikuti pelajaran.

Memang, semenjak Romo Mangun mengumumkan niat karya baktinya untuk membantu 3.500 anak-anak di daerah genangan, simpati masyarakat kepada rakyat Kedung Ombo terus bertambah, terutama kepada anak-anak kecil yang sama sekali tidak mengerti politik atau kebijakan pembangunan yang membuat oraang tua mereka dituduh sebagai pembangkang. Dan orang nalar orang yang sehat lebih percaya kepada adanya anak-anak terlantar, karena persoalan anak-anak yang pindah ke sekolah lain seperti yang dikatakan pihak Depdikbud Boyolali tidak akan sesederhana seperti itu. Apalagi semua keluarga di daerah genangan sibuk menyelamatkan harta benda masing-masing. Terlantarnya pendidikan anak-anak usia sekolah di daerah genangan ini mendapat perhatian masyarakat, ketika sebuah harian ibukota memuatnya.[7]

Ribut-ribut soal anak-anak sekolah yang terlantar ini membuat Bupati Boyolali M Hasbi membuat pernyataan dan memberikan

[7] Lihat *"Mereka Yang Tersisa Di Kedung Ombo"*, Kompas, 21 Maret 1989 yang berisi tentang seorang gadis kecil (8 Th) kelas II SD yang menangis karena tak bisa bersekolah. Banyak sekolah yang meliburkan kelasnya, terutama kelas persiapan sampai dengan kelas III yang muridnya masih kecil-kecil.

jaminan, bahwa warga Kedung Ombo tidak ada yang terlantar seperti yang sedang ramai dibicarakan masyarakat luas. Menurutnya, kesan terlantar hanya muncul dari orang-orang yang sebenarnya tidak tahu keadaan waduk yang sebenarnya. Demikian pula dengan berita tentang adanya 3.500 anak-anak terlantar yang membutuhkan pertolongan, adalah hal yang sama sekali tidak benar. Bupati Boyolali beranggapan pihak-pihak yang mempersoalkan situasi di daerah genangan sama sekali tidak tahu permasalahan. Karena itu ia menyatakan membuka diri kepada semua orang yang membutuhkan informasi. M Hasbi menegaskan, bahwa pihak yang paling mengetahui keadaan Kedung Ombo cuma dirinya, juga Camat dan Lurah.[8] Sedangkan Menko Kesra Soepardjo Rustam menyatakan belum pindahnya orang-orang Kedung Ombo dari daerah genangan melulu dikarenakan adanya orang-orang yang tidak percaya bahwa tempatnya akan betul-betul tergenang air. Menko Kesra tidak melihat rendahnya harga ganti rugi sebagai salah satu masalah penyebab yang dipersoalkan oleh penduduk.[9]

Usaha mengalihkan perhatian Romo YB Mangunwijaya yang nekad meneruskan niat mengadakan bakti sosial di Kedung Ombo meskipun telah dilarang oleh Gubernur Jateng, dilakukan oleh Gubernur Bengkulu Soeprapto. Ia menantang Romo Mangun untuk menjadi pahlawan lagi dengan memelopori dan mengajak warga Kedung Ombo bertransmigrasi ke Bengkulu. Menurut Soeprapto, sia-sia saja memberikan bantuan kepada mereka yang mencoba ber-

[8] Hal yang sama juga dikatakan oleh HM Ismail. Ia menyatakan adanya anak-anak terlantar sebagaimana dikatakan Romo Mangun adalah omong kosong. Masalah Kedung Ombo menjadi berkembang karena adanya oknum-oknum yang ingin menjadi pahlawan kesiangan. Lihat:Editor, 25 Maret 1989.

[9] Suara Pembaruan, 17 Maret 1989.

tahan di daerah genangan, karena kalau air naik dan memenuhi waduk, penduduk yang dibantu akhirnya akan pindah juga. Soeprapto menyatakan bahwa di Bengkulu hidup para transmigran dari Wonogiri ternyata jauh lebih enak dibandingkan ketika mereka masih tinggal di tempat asalnya. Apalagi di tempat yang baru telah tersedia listrik dan fasilitas lain. Gagasan Gubernur Bengkulu ini mendapat sambutan baik dari Wapres Sudharmono SH, tapi tidak dari kelompok Romo Mangun.

Sementara itu, kedatangan warga Kabupaten Boyolali yang tanahnya terkena proyek Waduk Kedung Ombo di Bengkulu di sambut oleh pejabat setempat dengan disertai pengalungan bunga. Kalau lazimnya pejabat yang mendapat kalungan bunga, maka baru kali ini rakyat (transmigran lagi) yang dikalungi bunga oleh pejabat. Suatu kejadian yang langka dan berkesan terlalu berlebih-lebihan. Para transmigran itu adalah orang-orang tergusur yang membutuhkan tanah, bukan acara protokoler seperti pengalungan bunga dan sebagainya.[10]

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan cara meliput pemberitaan tentang keberhasilan transmigran asal Kedung Ombo di Muko-muko Bengkulu pada acara Berita Nusantara TVRI. Wawancara seolah-olah dilakukan dengan para pionir transmigran yang

[10] Pada kenyataannya, para transmigran asal Kedung Ombo ini justru menghadapi banyak masalah. Antara lain tanah garapan yang belum siap. Sebagian besar tanah garapan yang disediakan masih berupa hutan, karena belum diratakan oleh pihak pemborong seperti yang ada di daerah pemukiman SP V. Belum lagi munculnya gangguan dari kawanan babi hutan dan tidak adanya sarana perhubungan yang cukup memadai, yang secara psikis membuat para transmigran merasa dirinya dibuang dan dikucilkan. Lihat: *"Mengikuti Transmigran Kedung Ombo"*, Suara Merdeka 11, 12 dan 13 April 1989.

serba sehat dan berseri-seri. Para pionir yang berbicara di depan kamera dengan cukup lancar itu, menghimbau rekan-rekannya agar mengikuti jejak mereka yang telah hidup tentram di tanah pemukiman baru. Liputan lewat TV juga dilakukan terhadap keadaan di daerah pemukiman baru yang disediakan pemerintah di Kayen. Gambar-gambar yang ditayangkan menunjukkan 'kemakmuran' para warga Kayen dengan berbagai ternak yang dimilikinya, serta keberhasilan panen kacang panjang.[11] Hal tersebut agaknya sengaja dilakukan untuk menciptakan citra negatip terhadap penduduk yang bertahan di daerah genangan sebagai orang-orang bandel yang bodoh. Karena sebenarnya pemerintah telah berbaik hati menyediakan sebuah pemukiman yang layak dan lahan yang cukup subur bagi mereka yang tergusur.

Apalagi kemudian Kabid Penerangan Kanwil Departemen Transmigrasi juga menyatakan adanya oknum-oknum masyarakat setempat yang dengan sengaja menutup informasi tentang transmigrasi kepada penduduk. Menurutnya, hal itu karena menginginkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu. Menurut pihak Departemen Transmigrasi, hal tersebut baru teratasi setelah aparat pemerintah memberikan informasi secara langsung kepada penduduk. Tercatat yang sudah diberangkatkan dari wilayah Kabupaten Boyolali sebanyak 1.671 KK meliputi 436 KK ke daerah Sumatera Selatan, 383 KK ke Bengkulu (350 KK

[11] Hal ini menyebabkan KSKPKO membuat poster bertuliskan Jangan Tipu Rakyat Dengan TV pada waktu aksi di Sruwen dan di Semarang. Banyak orang mengetahui bahwa di Kayen yang tanahnya tandus berkapur dan sulit air tak memungkinkan tumbuhan lunak seperti kacang panjang bisa tumbuh. Dalam pertemuan dengan Bupati Boyolali, delegasi KSKPKO juga meminta agar "tipuan berita" yang dilakukan pemerintah terhadap kenyataan di Kayen jangan terlalu berlebihan, karena bisa mengundang apatisme pihak-pihak yang tadinya akan membantu.

ke Muko-muko dan 33 KK di luar daerah Muko-muko), 366 KK ke Jambi, 87 KK ke Riau, 9 KK ke Lampung, 6 KK ke Aceh, 60 KK ke Kalimantan Selatan, 10 KK ke Kalimantan Barat dan 155 KK ke Irian Jaya. Sedangkan Kabupaten Sragen yang telah mengikuti transmigrasi sebanyak 2.253 KK dan hanya tinggal 71 KK yang belum diberangkatkan, karena masih harus menunggu giliran.[12] Sedangkan Gubernur Bengkulu Soeprapto, menyatakan penduduk Kedung Ombo yang telah bertransmigrasi ke Muko-muko telah mencapai 500 KK. Keterangan para pejabat tersebut berbeda jauh dengan data hasil pemantauan yang dilakukan oleh sebuah lembaga penelitian di Salatiga.[13]

Pemerintah juga berusaha mengimbangi niat kelompok-kelompok yang terus bertekad membantu penduduk di daerah genangan dan sama sekali tidak mengindahkan anjuran Pemda untuk membantu penduduk di pemukiman baru Kayen. Lewat kelompok-kelompok yang diorganisir oleh KNPI dan AMPI, ratusan mahasiswa dikerahkan untuk melakukan kegiatan bakti masyarakat di Desa Kayen. Publikasi dan penayangan gambar lewat TVRI dilakukan secara besar-besaran terhadap kegiatan tersebut.

Lewat siaran TVRI "Berita Nusantara" ditunjukkan bagaimana para mahasiswa yang memakai seragam jas kuning melakukan pengobatan gratis, menyerah-terimakan ayam dan kambing, bibit rumput gajah, kelapa hibrida, pohon jeruk kepada penduduk Kayen. Juga ditayangkan pula gambar-gambar yang menunjukkan bagai-

[12] Wawasan, 1 April 1989.

[13] Hasil pemantauan LPU UKSW sampai dengan tanggal 14 April 1989 ternyata menyatakan dari daerah Boyolali dan Sragen yang bertransmigrasi baru 432 KK, sedangkan yang pindah ke pemukiman baru di Kayen baru ada 32 KK. Lihat : *LPU UKSW, Kedung Ombo dan Resettlement Monitoring Study, Weekly Special Report No. II*, April 1989.

mana trampil dan tidak canggungnya para siswa yang bekerja membersihkan mesjid, balai desa dan gedung sekolah dasar di desa Kayen.[14] Namun upaya tersebut menimbulkan kesan berlebih-lebihan, karena daerah pemukiman Kayen pada saat itu hanya dihuni oleh 32 KK.[15]

Hal yang sama juga dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa dari IKIP Semarang. Aktivitas "resmi" para mahasiswa ini mendapat dukungan sepenuhnya dddari rektornya, Dr Retmono, yang sejak semula menanggapi aksi KSKPKO secara sinis.

Meredam Aksi Mahasiswa

Untuk mengatasi kemungkinan munculnya aksi-aksi mahasiswa lanjutan, pemerintah berusaha meredam penyebaran informasi tentang terjadinya serangkaian aksi mahasiswa yang berkaitan dengan masalah Kedung Ombo. Cara yang dilakukan adalah dengan memberikan himbauan kepada redaksi-redaksi setiap media massa agar tidak memuat berita tentang aksi-aksi KSKPKO. Ketika melancarkan

[14] Berita-berita ini ditanggapi dengan sinis oleh para aktivis mahasiswa dan masyarakat yang bersimpati kepada rakyat Kedung Ombo yang terus bertahan di daerah genangan. Pemberitaan propagandais tersebut menimbulkan kesan, bahwa pemerintah mau mengaburkan permasalahan struktural yang tengah terjadi dengan pemecahan model bersedekah. Kebutuhan para petani yang tergusur tersebut sebenarnya tidak tercukupi hanya dengan penyediaan tanah yang berukuran 1.000 m persegi per KKnya atau dengan pemberian ayam dan kambing. Wakil Gubernur Soeparto beranggapan bahwa pengabdian para mahasiswa yang diprakarsai KNPI dan AMPI tersebut justru sangat tepat, karena bisa memberikan motivasi kepada masyarakat yang berada di pemukiman baru. Menurut beberapa sumber, para mahasiswa yang ikut dalam karya bakti di Kayen adalah mereka yang tergabung dalam ormas-ormas tertentu yang sengaja dimobilisir untuk kepentingan pemerintah.

[15] Wawasan, 3 dan 10 April 1989.

aksi pertamanya di tiga kota, tercatat hanya majalah Editor dari Jakarta dan harian Kedaulatan Rakyat terbitan Yogyakarta yang "berhasil" memberitakannya. [16]

Upaya pemerintah tersebut agaknya cukup efektif, meskipun pers dan siaran radio di luar negeri memberitakan aksi KSKPO. Aksi para mahasiswa yang tergabung dalam KSKPKO tadinya dilakukan dengan harapan agar bisa menarik perhatian masyarakat luas. Pemberitaan bisa menjadi sesuatu kekuatan penekan. Tapi hal ini berhasil dipatahkan, paling tidak untuk sementara waktu. Namun pemerintah tidak berdaya untuk melarang pers memuat komentar dan tanggapan tokoh-tokoh masyarakat, berkaitan dengan aksi mahasiswa yang bermunculan hampir di beberapa kota secara serentak. Apalagi kemudian kalangan aparat pemerintah sendiri melontarkan pernyataan tentang aksi mahasiswa yang menyangkut berbagai persoalan. Pemberitaan komentar-komentar dan tanggapan tersebut sama halnya dengan memberitkan terjadinya aksi mahasiswa.

Kalaupun pemberitaan tentang aksi-aksi KSKPKO telah "dilarang", [17] namun tidak halnya dengan pemberitaan tentang situasi

[16] Kedua media yang terbit Selasa Pagi ini beruntung bisa menurunkan berita tentang aksi KSKPKO meskipun sempat "mendapat telpon". Media lain yang akan memuat berita yang sama pada hari Selasa sore dan Rabu pagi tidak bisa menurunkan berita tersebut. Sedangkan harian Terbit yang terbit sore di Jakarta, Senin 6 Pebruari 1989 langsung memuat berita dan aksi duduk KSKPKO di Depdagri, namun baru tercetak sekitar 10.000 eksemplar datang enam petugas dari Dinas Penerangan Kodam V Jaya. Mereka meminta proses pencetakan segera dihentikan dan pemberitaan tentang aksi KSKPKO dicabut. Sumber: Dokumentasi KSKPKO, lihat juga Neraca Hak Azasi, Vol. 4.

[17] Larangan dan himbauan lewat telpon ini seringkali tidak jelas. Setiap kali redaksi menanyakan sumber atau instansi yang

daerah genangan Waduk Kedung Ombo. Beberapa media massa terkemuka di ibukota mengangkat persoalan Kedung Ombo sebagai laporan utamanya. Kemudian diikuti dengan laporan utama tentang fenomena aksi-aksi mahasiswa. [18]

Ketika kemudian muncul serangkaian aksi KSKPKO lanjutan, akibat penolakan pemberian ijin masuk daerah genangan, pihak aparat militer lewat Puspen Hankam mengirimkan sepucuk memo kepada para pemimpin redaksi. Memo yang ditandatangani oleh seorang perwira berpangkat mayor tersebut, meminta agar tidak meyiarkan pemberitaan tentang Kedung Ombo sampai ada penjelasan lebih lanjut dari Pagdam IV Diponegoro. Tidak ada keterangan lanjutan, kapan Pangdam IV akan memberikan penjelasan.

Pemerintah yang melihat pers terus memanas-manasi masyarakat dengan pemberiataan tentang Kedung Ombo, akhirnya merasa harus menghentikannya. Pada tanggal 25 April 1989, lewat Menteri Penerangan H Harmoko, enam pemimpin redaksi media massa ibukota yaitu Kompas, Terbit, Media Indonesia, Tempo, Editor dan Jakarta-jakarta diminta menghadap dan secara lisan mendapat peringatan keras atas gencarnya pemberitaan tentang aksi-aksi mahasiswa.

melarang, biasanya pesawat telpon di seberang langsung ditutup. Namun pada umumnya pimpinan redaksi takut dengan pelarangan-pelarangan yang sebenarnya ilegal dan tak mempunyai dasar hukum tersebut. Mungkin dikarenakan pengalaman pembreidelan di masa lampai yang melumpuhkan beberapa penerbitan di Indonesia, dimana selalu didahului dengan adanya "telpon-telpon gelap".

[18] Tercatat majalah Tempo dan Editor, 25 Maret 1989 mengangkat kasus Kedung Ombo sebagai laporan utama. Majalah Jakarta-Jakarta, 9 April 1989 mengangkat aksi mahasiswa sebagai laporan utama. Sedangkan surat kabar semacam Kompas, Suara Pembaruan, Media Indonesia, Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat dan Wawasan hampir setiap hari memuat pemberitaan yang berhubungan dengan Kedung Ombo.

Terhitung mulai 26 April 1989, para pemimpin redaksi diminta oleh Menteri Penerangan untuk bertindak bijaksana. Mereka diminta untuk tidak memuat sama sekali ulasan ataupun komentar tentang aksi-aksi mahasiswa lagi.

Suara dari pihak pemerintah (baca: eksekutif) dalam hal aksi mahasiswa memang tidak menyatu. Pangab Jendral Try Sutrisno yang menjabat sebagai Ketua Bakorstranas menganggap, tidak perlu ada pelarangan terhadap aksi mahasiswa. Menurutnya, aksi-aksi mahasiswa justru menunjukkan adanya dinamika masyarakat yang sehat dan wajar di sebuah negara yang stabil untuk mempercepat pembangunan di segala bidang. Menurut Pangab, unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa itu boleh-boleh saja, asal tidak semrawut.[19] Namun, tatkala pejabat pemerintah masih ragu-ragu untuk memberikan penilaian terhadap aksi mahasiswa, secara mengejutkan Walikota Semarang, H Imam Soeparto Tjakrajoeda SH, menyatakan bahwa demonstrasi merupakan tindakan memaksa kehendak orang lain yang identik dengan pola pikir komunis.[20]

Menko Polkam Sudomo yang semula bersikap lunak terhadap aksi mahasiswa, secara mengejutkan tiba-tiba menuduh bahwa aksi

[19] Kata-kata Pangab Try Sutrisno yang diucapkan pada waktu pembukaan Kursus Reguler XXII Lemhanas di Jakarta ini di kemudian hari diralat secara resmi lewat siaran Puspen ABRI pada tanggal 10 April 1989 dimana dipertegas tentang pelarangan demonstrasi sesuai Pengumuman Pangkopkamtib No. Peng-001/kopkam/i/1970 tanggal 20 Januari 1970 yang sampai kini masih dinyatakan berlaku.

[20] Lihat Suara Merdeka, 13 April 1989. Hal ini menimbulkan pertanyaan, kok berani-beraninya seorang walikota membuat pernyataan sedemikian keras, melebihi Gubernur bahkan Pangab serta wakil rakyat. Beberapa orang menilai, Walikota Semarang sengaja dijadikan tumbal untuk memojokkan mahasiswa.

mahasiswa ternyata tidak murni lagi sebagai gerakan mahasiswa. Kesimpulan ini didapat berdasarkan penelusuran yang dilakukannya, di mana aksi-aksi mahasiswa yang ada ternyata menyerupai peristiwa Malari 1974 dan Gelombang Mahasiswa di tahun 1978. Sudomo juga menyatakan, bahwa pihak yang menyeponsori aksi-aksi mahasiswa telah diamankan oleh yang berwajib dan sedang dalam pengusutan.[21]

Menurut Sudomo, dalam modus operandi aksi mahasiswa yang mempersoalkan pembangunan Waduk Kedung Ombo, ternyata yel-yel yang diteriakkan mirip dengan aksi menjelang Malari. Aksi mahasiswa yang mendatangi kantor Gubernur Jateng beberapa waktu yang lalu (maksudnya aksi KSKPKO ke tiga, *pen*) itu telah melontarkan yel-yel yang mendiskreditkan pemerintah dan menghina Gubernur Jateng beserta Presiden. Untuk itu, Menko Polkam telah meminta agar Mendikbud mengisolasi 5 orang mahasiswa yang dianggap menjadi pimpinan KSKPKO.[22] Langkah Menko Polkam tersebut diikuti oleh PR I UI, Prof Dr MK Tadjudin, yang berjanji akan menindak tegas setiap mahasiswa UI yang mencoba-menco-

[21] Tapi pernyataan Sudomo ini kemudian diralatnya sendiri ketika 8 orang mahasiswa mewakili 72 penghuni asrama mahasiswa UI Daksinapati mendatangi kantor Menko Polkam untuk meminta penjelasan sehubungan dengan pernyataan dan tuduhan terhadap aksi mahasiswa. Menko Polkam meralat dengan mengatakan, bahwa ucapannya beberapa waktu yang lalu itu terbatas untuk aksi-aksi mahasiswa yang ada hubungannya dengan Kedung Ombo. Sudomo mengakui bahwa ia hanya mendapat laporan dari seorang rektor di Jateng (Suara Merdeka, 13 April 1989).

[22] Permintaan Sudomo ini langsung ditolak oleh Mendikbud Fuad Hassan yang menganggap apa yang dilakukan para mahasiswa yang ikut aksi sama sekali tidak dalam hubungannya dengan masalah akademis. Lagipula, dalam peraturan universitas tidak dikenal adanya sanksi isolasi. Fuad Hassan juga menyatakan, pihaknya tidak menemukan bukti-bukti bahwa aksi mahasiswa ada yang mendalangi. Dan lagi menurut mendikbud setiap warga negara dijamin

ba ikut berdemonstrasi.

Perkembangan aksi mahasiswa yang dianggap semaking gawat, membuat Presiden Soeharto memerintahkan Menko Polkam agar segera menghubungi Mendikbud Fuad Hassan guna mengumpulkan rektor seluruh Indonesia untuk membahas berbagai aksi mhasiswa. Pertemuan rektor itu diharapkan dapat memperteguh tanggungjawab rektor. Termasuk kegiatan mahasiswanya serta menegaskan kembali konsep depolitisasi kampus. Soeharto juga berharap, agar Menko Polkam bisa menjelaskan persoalan pembangunan nasional yang baru saja memasuki Repelita V.

Sudomo yang sebelumnya telah ditolak usulannya untuk mengisolasi pimpinan KSKPKO oleh Fuad Hassan, seusai menghadap dan melaporkan tugas-tugasnya kepada kepala negara di Istana Merdeka[23] menyatakan, ia akan segera menemui Mendikbud untuk membicarakan masalah penugasan yang diembanya dari Presiden Soeharto.[24] Sudomo menekankan pentingnya peranan rektor, dekan dan dosen dalam membina mahasiswa. Apabila ada mahasiswa yang melakukan tindakan bertentangan dengan hukum, tidak cocok dengan demokrasi Pancasila dan melanggar konstitusi, maka

haknya untuk mengeluarkan pendapatnya tentang apapun (Kedaulatan Rakyat, 11 April 1989). Fuad Hassan malah mereduksi aksi mahasiswa dengan menyamakannya seperti perkelahian pelajar, tidak ada yang istimewa (*Kedaulatan Rakyat*, 20 April 1989), karena itu ia menolak permintaan Sudomo untuk memanggil rektor seluruh Indonesia.

23) Kedatangan Sudomo menemui Pak Harto, juga dalam rangka untuk meminta maaf sehubungan dengan ucapannya mengenai perlunya suatu konsensus nasional bila di masa mendatang muncul lebih dari seorang calon presiden (Kompas, 15 April 1989). Pak Harto marah dengan ucapan Sudomo yang dianggap terlalu lancang mengomentari soal suksesi.

24) Perintah Pak Harto lewat Sudomo ini juga ditampik oleh Mendikbud, karena pertemuan rektor telah ada dalam agenda Depdikbud sendiri. Menurut Fuad Hassan, seorang rektor tidak mungkin di-

yang bertanggung jawab pertama adalah rektor, dekan dan dosen yang berkewajiban untuk mendidik mahasiswa.

Menurut Sudomo, seluruh kehidupan kampus termasuk kegiatan mahasiswanya se-hari-hari merupakan tanggungjawab rektor yang diibaratkannya se-bagai komandan batalyon. Kalau ada anak buahnya yang melaku-kan kesalahan, maka komandannya yang harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, Menko Polkam meminta agar para rektor membim-bing dan membina mahasiswa sampai menyadari sepenuhnya tentang tanggung jawab masa depan, sebagai calon pemimpin dan penerus bangsa. Hal ini dihubungkan dengan kecenderungan mahasiswa sekarang, yang menurut Menko Polkam, kurang menda-pat informasi, bahkan sering menerima informasi yang salah. Para rektor dimintanya agar berani menindak mahasiswa yang melaku-kan tindakan tidak benar dan melakukan kegiatan tanpa ijin. "Kalau pun tidak bisa lagi, mungkin bisa digunakan sanksi akademis," ujar Sudomo.

Dalam melakukan upaya meredam aksi mahasiswa, ternyata terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Kalau Sudomo minta agar para pemimpin aksi mahasiswa diisolasi, maka Mendagri Rudini melakukan cara pendekatan dengan berdialog.[25] Lewat acara dialog yang diselenggarakan oleh KNPI di kantor KNPI Jl Rasuna Said yang dihadiri pimpinan organisasi pemuda dan tokoh mahasiswa, Mendagri Rudini menyatakan, perkembangan di masa men-

minta bertanggung jawab atas segala perilaku warga akademik di luar batas kewenangannya dengan mengatakan: "Seorang rektor dapat mengenakan sanksi akademis, namun pasti tidak mungkin menilang dosen atau mahasiswa yang melanggar aturan lalu lintas". (Kedaulatan Rakyat, 20 April 1989).

25) Dalam perkembangannya, Mendagri Rudini akhirnya menjadi orang yang selalu dijadikan sasaran kekesalan mahasiswa. Rudini memang mengesankan memberi angin dan mengakomodasikan munculnya aksi-aksi mahasiswa lewat pernyataan-pernyataannya yang membela wong cilik, meskipun secara resmi ia selalu menya-

datang menuntut generasi muda sebagai motor yang menghidupi dan menggerakkan jalannya kehidupan demokrasi di Indonesia. Rudini meminta agar generasi muda selalu konsisten dengan tekad bangsa untuk semakin memantapkan pertumbuhan demokrasi Pancasila. Artinya penyaluran aspirasi dan kepentingan tidak dilakukan secara demonstratif, melainkan melalui jalur-jalur tatanan yang benar dan diungkapkan lewat bahasa serta sopan santun bangsa Indonesia.

Dialog Rudini-mahasiswa ini mendapat sambutan positip dari berbagai pihak. Termasuk anggota DPR yang menilai cara Rudini merupakan langkah positip yang dapat menumbuhkan suasana dan sikap yang akan merangsang keberanian masyarakat untuk menyampaikan ide-ide maupun pikiran-pikirannya. Namun tidak demikian halnya dengan kelompok aktivis mahasiswa yang ikut aksi. Mereka memilih boikot acara KNPI tersebut.[26]

Langkah Rudini ini kemudian ditiru Sudomo. Ia menyatakan kesediaannya untuk berdialog dengan 8 mahasiswa UI yang semula berniat mempertanyakan tuduhan Sudomo terhadap aksi-aksi mahasiswa. Dalam pertemuan tersebut Sudomo mengoreksi kata-katanya

---

takan ketidasetujuannya terhadap aksi-aksi yang demonstratif dan dapat menimbulkan kekacauan. Sebagian mahasiswa berpendapat, bahwa aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa harus terus ditujukan kepada Rudini. Hal ini sesungguhnya justru akan mendorong dan memperkuat posisi Rudini.

[26] Kesediaan para pejabat untuk berdialog dinilai oleh aktivis mahasiswa adalah upaya meredam aksi mahasiswa setelah tidak dimungkinkannya pemakaian kekerasan. Timbul kesan, pertemuan itu sengaja diatur sedemikian rupa sehingga seolah-olah mahasiswa yang hadir adalah para aktivis demonstran yang tidak mengetahui permasalahan secara jelas. Para aktivis mahasiswa yang sebenarnya justru menjadi sinis, karena kemudian muncul klaim bahwa KNPI mempunyai banyak massa di kalangan mahasiswa. Para mahasiswa juga tidak percaya bahwa dialog akan menghasilkan suatu perubahan, karena birokrasi yang ada terlalu kaku untuk mau mengubah kebijakan yang pernah diambilnya.

dengan menyatakan, bahwa gerakan mahasiswa dirasakannya masih normal, murni dan belum membahayakan. Sudomo mengakui bahwa ia hanya ingin memperingatkan mahasiswa agar berhati-hati dan jangan sampai ada pihak ketiga yang membonceng.[27]

Upaya "simpatik" Sudomo tersebut dilanjutkannya dalam sebuah kunjungan mendadak ke IKIP Jakarta. Dalam dialog yang dihadiri sekitar 500 mahasiswa itu, Sudomo meralat pernyataannya. Sudomo menyatakan, dirinya tidak pernah menyatakan aksi mahasiswa didalangi, melainkan menyatakan aksi-aksi mahasiswa mempunyai potensi untuk ditunggangi. Sudomo juga menyatakan akan menuntut Harian Media Indonesia yang dianggap telah mengadu domba antara ia dengan Fuad Hassan dan mahasiswa.[28]

Model dialog dengan bahan pembicaraan yang rada nyerempet-nyerempet sekali lagi dilakukan Sudomo pada saat ceramah untuk Gerakan Mahasiswa Kosgoro di Wisma Mas Isman, Jakarta. Dalam ceramah itu, Sudomo mengajukan alternatif lain yaitu apabila mahasiswa memang bertujuan menyampaikan pesan kepada pemerintah, sebaiknya meminta rektor untuk mengundang menteri dari instansi terkait ke kampus guna memberikan penjelasan yang dibutuhkan. Sudomo juga menilai, selama ini pimpinan universitas telah salah menafsirkan pengertian NKK/BKK, sehingga timbul kesan NKK/BKK dimaksudkan untuk membungkam mahasiswa.

Sekali lagi, Sudomo mendapat tanggapan positif dan tepuk tangan riuh. Tapi, sebagian orang malah melihat forum dialog seper-

---

[27] Wawasan, 15 April 1989

[28] Dalam sebuah kesempatan saat memberikan pengarahan di depan para rektor, sebetulnya Sudomo mengatakan bahwa aksi-aksi mahasiswa ditunggangi (Lihat Wawasan, 21 April 1989). Namun, ancaman Sudomo akhirnya toh harus membuat Pemimpin Redaksi Harian Media Indonesia sowan ke Menko Polkam untuk meminta maaf.

ti itu sekedar katup pelepas ketegangan saja. Sementara itu, upaya peredaman aksi-aksi mahasiswa terus dilanjutkan dengan memanggil, menginterogasi dan memberikan penjelasan pengawasan secara ketat kepada setiap aktivis KSKPKO. Terutama yang dianggap sebagai pimpinan serangkaian aksi.

Kalaupun aksi-aksi mahasiswa yang berkaitan dengan Kedung Ombo telah terhenti untuk sementara waktu, maka aksi-aksi mahasiswa yang baru terus bermunculan di beberapa kota diikuti dengan terjadinya kekerasan.[29] Digunakannya kekerasan oleh militer yang menyebabkan jatuhnya beberapa orang korban tersebut, menimbulkan kebencian mahasiswa terhadap ABRI dan memunculkan aksi-aksi solidaritas di beberapa kota. Dalam setiap aksi yang dilakukan, para mahasiswa mempunyai sebuah "lagu wajib" dan yel-yel bernada mengejek militer yang selalu diteriakkan.[30] Melihat gelagat yang membahayakan ini, Puspen ABRI mengeluarkan siaran pers yang ditandatangani oleh Kapuspen ABRI, Brigjen TNI Nurhadi. Ia menegaskan kembali, bahwa perbuatan mengungkapkan isi hati atau perasaan yang dilakukan dalam bentuk demonstrasi atau unjuk

[29] Catatan kekerasan yang digunakan oleh militer dalam menangani aksi mahasiswa di tahun 1989 adalah ketika terjadi aksi mahasiswa IAIN Gunung Jati Bandung pada tanggal 18 Maret, aksi mahasiswa berkaitan dengan kasus Kacapiring di Bandung tanggal 12 April, aksi mahasiswa sehubungan dengan kenaikan tarif listrik di Senayan tanggal 8 Juni dan aksi mahasiswa di Jogja sehubungan dengan divonisnya dua orang aktivis kelompok studi pada tanggal 8 September.

[30] Syair lagu wajib tersebut antara lain : ...Kalau tak becus jadi ABRI, jadi saja Menwa. Kalau tak becus jadi Menwa jadi saja Hansip. Kalau tak becus jadi hansip, jadi saja pramuka...dst. Gejala munculnya kebencian mahasiswa terhadap ABRI membuat Ketua DPR/MPR RI, Kharis Suhud yang juga sesepuh ABRI mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai setiap usaha yang bertujuan memecah-belah ABRI dengan kampus (Suara Merdeka, 11 April 1989).

rasa secara demonstratif, termasuk dalam bentuk kegiatan yang dilarang menurut ketentuan yang berlaku sama sekali tidak dibenarkan[31]. Acuan ketentuan pelarangan melakukan demonstrasi ini adalah pengumuman Pangkopkamtib tahun 1970 yang belum dicabut.

Siaran pers Puspen ABRI itu selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mahasiswa atau siapa saja anggota masyarakat tidak dilarang melakukan protes ataupun menunjukkan, mengungkapkan, menyampaikan perasaannya tentang sesuatu hal, sepanjang tindakan tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan norma, aturan, ketentuan dan tatanan atau sistem yang berlaku.

2. Dengan demikian, suatu tindakan yang dilakukan untuk mengungkapkan perasaan, apakah itu berupa keprihatinan, rasa simpati, rasa setia kawan, rasa kecewa, rasa bingung, rasa gembira, dan lain-lain yang disampaikan dalam bentuk temu muka, minta penjelasan, mengajukan usul, melepas kekecewaan atau apapun bentuknya sama sekali tidak dilarang apabila semua itu dilakukan mengikuti semua norma, aturan, ketentuan, dan tatanan atau sistem yang berlaku.

3. Khusus terhadap perbuatan mengungkapkan isi hati atau perasaan, yang dilakukan dalam bentuk demonstrasi atau unjuk rasa secara demonstratif, yang termasuk di dalam bentuk kegiatan yang dilarang menurut ketentuan tentang larangan melakukan demonstrasi, sebagaimana tertuang dalam pengumuman Pangkopkamtib No Peng-001/Kopkam/I/1970 tanggal 22 Januari 1970, yang hingga saat ini belum dicabut, jelas merupakan tindakan yang tidak dibenarkan.

[31] Lihat: Suara Merdeka, 11 April 1989. Pelarangan tersebut dikomentari oleh Suara Pembaruan dalam rubrik Sasaran sebagai berikut: Demonstrasi tetap dilarang. Tetap dilarang. Kecuali... demonstrasi membuat kue, demonstrasi merangkai bunga, demonstrasi bakar sate dan lain-lain yang enteng-enteng. (Suara Pembaruan, 14 April 1989).

Pemanggilan Tokoh-tokoh LSM

Mendagri Rudini yang telah mendapat tugas dari Soeharto untuk melakukan pembinaan terhadap para peserta Konprensi ke V INGI, mengundang LSM untuk menghadiri pertemuan yang diadakan di Kantor Depdagri pada 12 Agustus 1989. Rudini bermaksud meminta penjelasan dan keterangan dari para peserta INGI Indonesia mengenai aktivitas mereka selama di Belgia. Sekaligus memberikan teguran, apabila LSM terbukti melakukan kesalahan.

Pertemuan dihadiri oleh 16 orang tokoh dan pimpinan 10 LSM terkemuka di Indonesia. Ketua Umum PBNU Abdurrahman Wahid datang sebagai individu. Juga hadir wakil dari BAIS, BAKIN, dan Sekretariat Negara. Dalam pertemuan tersebut Mendagri Rudini menyatakan bahwa masalah Hak-hak Asasi Manusia sebagaimana dirumuskan dalam *Aide Memoire* INGI dapat mengakibatkan reputasi pemerintah Indonesia di mata internasional buruk. Rumusan surat INGI ke Bank Dunia, menurut Rudini, juga telah menyakiti banyak pejabat pemerintah Indonesia.

Sedangkan dari pihak LSM, dalam pertemuan itu menjelaskan INGI sama sekali tidak pernah bermaksud menghentikan atau membatasi bantuan luar negeri ke Indonesia. Sebagai sebuah forum, anggota INGI bersama-sama mendiskusikan dan menyepakati suatu kebijakan-kebijakan bantuan dari negara-negara maju yang tergabung di dalamnya dapat memenuhi kebutuhan nyata dari kelompok yang dirugikan di Indonesia. Adapun amsalah hak-hak asasi manusia, merupakan sebuah fenomena global yang bukan hanya terjadi di Indonesia. Jadi sama sekali LSM Indonesia tidak mempunyai tujuan menjelek-jelekkan, karena model pembangunan yang bertujuan mewujudkan hak-hak asasi manusia sebetulnya sejalan dengan GBHN. Perwakilan LSM yang hadir juga menyatakan, dengan keterlibatan mereka dalam INGI selama lima tahun justru selalu mencoba

memberikan sumbangan positip pada pembangunan Indoneisa. Hal ini bisa dilihat dari peserta INGO non Indonesia yagn selalu memainkan peranan secara moderat.

Mendagri Rudini menutup pertemuan dengan menyatakan, pihaknya bisa mengerti duduk persoalan yang sebenarnya. Ia berjanji untuk melakukan dialog secara teratur dengan LSM-LSM, mungkin melalui sebuah forum. Kesalahan yang dilakukan LSM, menurut Rudini, hanya merupakan suatu kealpaan di tengah upaya membela bangsa yang dikatakannya sebagai: "Mereka sebetulnya ingin membangun bangsaini. Mereka adalah patriot bangsa yang ikut menetralisir pendapat asing yang menjelekan bangsa. Hanya saja, mereka lemah dalam memilih kata-kata bahasa Inggris di forum internasional, sehingga menimbulkan penafsiran yang merugikan bangsa sendiri."[32)]

Mendagri Rudini meminta, agar pimpinan LSM sebagai kader bangsa, tidak mendukung setiap usaha yang merusak reputasi pemerintah Indonesia pada tingkat dunia dan menerapkan prinsip *Right or Wrong is My Country*. Rudini berharap agar semua bisa menghormati pemimpin dan juga para pemimpin terdahulu. Cara rakyat Philipina memperlakukan Presiden Marcos tidak boleh terjadi di Indonesia.[33)]

[32)] Ucapan Mendagri Rudini ini menimbulkan kesan, aktivis LSM yang ikut Konprensi INGI ke V adalah orang-orang yang sembrono dan tidak menguasai bahasa Inggris secara fasih (Lihat Jawa Pos, 13 Agustus 1989)

[33)] Semboyan "Benar atau Salah, Negaraku!" Mendagri ini banyak menjadi bahan perbincangan masyarakat. Komentar menarik muncul dari fisikawan yang juga ketua PPS UKSW Dr Liek Wilardjo. Ia mengambil analogi tokoh Wibisana, Sanjaya, Karna dan Bisma dalam cerita pewayangan. Wibisana membelot, meninggalkan negara dan kakaknya serta membuka semua rahasia

Setelah kasus *Aide Memoire* INGI, pemerintah kelihatannya memberikan perhatian ekstra kepada LSM. Bahkan ada tanda-tanda pemerintah ingin melakukan kontrol terhadap LSM, terutama penerimaan dana LSM dari donor luar negeri. Pengetatan pengawasan terhadap LSM juga dilakukan pemerintah lewat UU No 8 Tahun 1985 tentang keormasan, meskipun sebenarnya LSM tidak bisa diklasifikasikan sebagai ormas. UU tentang keoramasan sendiri, tampaknya akan segera diganti oleh pemerintah.

Melunaknya Sikap dan Cara Penanganan Pemerintah

Keseriusan pemerintah untuk segera membenahi kekusutan yang terjadi di Kedung Ombo sebetulnya telah dimulai Mendagri Rudini. Pada saat memenuhi undangan Mendagri, KSKPKO mencoba menyampaikan keinginan penduduk yang ingin tinggal di tanah sekitar waduk yang termasuk dalam wilayah Perhutani,[34] serta menyerahkan sebagian bukti-bukti penyelewengan kepada Rudini. Tampaknya, Rudini memang sungguh-sungguh berkeinginan menyelesaikan kasus Kedung Ombo. Termasuk dengan mengijinkan kelompok Romo Mangun untuk membantu anak-anak di daerah genangan. Namun, sebagian langkah Rudini mengalami benturan dengan

dan kelemahan Alangkadirja, karena ia lebih mencintai kebenaran dibandingkan cintanya kepada tanah air. Liek Wilardjo berpendapat, bahwa di dunia etika tidak ada dikotomi hitam-putih. Yang ada hanyalah abu-abu dengan nuansa keabu-abuan yang sangat malar. Selengkapnya lihat Liek Wilardjo, *"Benar atau Salah, negaraku?"*, Kompas, 2 September 1989)

[34] Lihat kembali Bab III (Pertemuan Dengan Mendagri Rudini). Keinginan penduduk tersebut sebetulnya telah lama muncul dan pernah diutarakan dalam pertemuan dengan anggota Komisi A DPRD Tk. II Jateng pada tanggal 19 Pebruari 1987.

aparat Pemda setempat yang secara hirarki sebetulnya berada di bawahnya.

Dimulai dengan janji Rudini kepada KSKPKO untuk memutasikan aparatnya yang terlibat dalam penyelewengan di Kedung Ombo, Mendagri menurunkan tim khusus yang segera dibentuknya. Seminggu kemudian, Bupati Boyolali memanggili para pamong desa yang dianggap melakukan penyelewengan uang ganti rugi milik penduduk.[35] Para pelaku penyelewengan uang ganti rugi bernilai puluhan juta tersebut banyak yang menjadi ketakutan, halnya oknum perangkat Desa Genengsari. Ia mencoba mengumpulkan penduduk dan berupaya memecahkan masalah secara musyawarah, sebelum permasalah tersebut ditangani oleh pihak berwajib.

Tanpa disangka oleh siapapun, Pemda Jateng yang tadinya keras kepala menolak semua uluran tangan pihak yang akan membantu rakyat Kedung Ombo, tiba-tiba menyatakan kesediaannya untuk memenuhi permintaan penduduk Kedung Ombo. Mereka bersedia untuk berdialog dan membicarakan keinginan orang-orang Kedung Ombo dan tawaran Gubernur HM Ismail untuk menempati kawasan hutan milik Perhutani di sekitar waduk.[36] Kebijakan ini cukup mengejutkan. Apalagi dulunya pemerintah bersikeras, bahwa penduduk harus pindah ke Kayen atau bertransmigrasi ke luar Jawa.

[35] Wawasan, 25 Pebruari 1989.

[36] Konon perubahan sikap Gubernur Jateng disebabkan tekanan dari Presiden yang memberikan waktu dua bulan kepada HM Ismail untuk menuntaskan permasalahan Kedung Ombo, atau tidak akan dipilih menjadi Gubernur kembali. Sebelum Gubernur Jateng menyatakan kesediaan menerima perwakilan rakyat Kedung Ombo, pada 28 Maret 1989 Jaswadi mewakili penduduk Kedung Ombo mengirimkan surat kepada Gubernur Jateng yang berisi tentang keinginan mereka terhadap suatu musyawarah yang mungkin bisa menyelesaikan persoalan di Kedung Ombo.

Bahkan Gubernur Jateng menjanjikan akan melengkapi pemukiman baru yang diinginkan penduduk tersebut dengan berbagai fasilitas seperti sekolah, mesjid, air bersih dan lain-lainnya.

Namun pihak Perhutani Unit I Jateng yang sama sekali belum pernah dihubungi secara langsung oleh Gubernur Jateng, menyatakan tekadnya untuk menjaga keutuhan dan kelestarian hutannya sebagaimana ditegaskan Menteri Kehutanan. Kahumas Perhutani Unit I Jateng menyatakan, salah satu kawasan hutan yang lokasinya dekat denga Proyek Waduk Kedung Ombo, yaitu kawasan KPH Telawa yagn diminati orang Kedung Ombo, merupakan daerah kritis yang memerlukan penanganan secara serius. Tempat tersebut, menurut Perhutani, tidak cocok untuk pemukiman penduduk. Hal ini karena kondisi teritorialnya merupakan daerah tandus dan gersang dengan tanah-tanah kapur yang sangat kering sepanjang tahun. Keberatan pihak Perhutani akan tanahnya yang mau dirampas Pemda Jateng dimunculkan lewat kekhawatiran, apabila KPH Telawa dan sekitarnya dijadikan tempat penampungan penduduk akan terjadi peningkatan kerawanan.

Sementara itu, pihak Departemen Kehutanan menyatakan bahwa lahan di sekitar Waduk Kedung Ombo merupakan hutan produksi. Apabila Pemda Jateng berniat menjadikannya sebagai tempat pemukiman, terlebih dahulu harus meminta persetujuan Perhutani Unit I Jateng. Departemen Kehutanan mengingatkan, secara prinsip Perum Perhutani tidak melakukan penjualan lahan hutan miliknya. Kalau pihak Pemda membutuhkannya, Pemda harus menukarnya dengan perbandingan 1 ha hutan diganti dengan 2 atau 3 lahan bukan hutan.

Sementara Pemda Jateng masih mencoba menghubungi Perhutani Unit I Jateng, Kanwil Depdikbud Jateng juga tak mau kalah ikut membuat gebrakan baru. Pada pertengahan April 1989, pihak Kanwil Depdikbud Jateng menurunkan Satgas Guru Kunjung untuk

mengajar 94 anak sekolah dasar di daerah genangan yang mogok sekolah. Surat pengangkatan Satgas diberikan kepada 12 orang guru yang berasal dari sekolah dasar sekitar Kedung Ombo. Guru-guru itu selain mengajar di tempatnya semula juga akan menjadi guru terbang bagi anak-anak yang mogok sekolah. Para guru kunjung itu dua sampai tiga kali dalam seminggu mengunjungi pemukiman penduduk. Mereka mengajar di sekolah-sekolah yang dibangun secara darurat. Namun Kanwil Depdikbud Jateng lewat Kasubag Penerangan, Drs Iman Santoso, tetap menolak anggapan masyarakat tentang banyaknya anak-anak usia sekolah yang terlantar di daerah genangan. Apa yang dilakukan Depdikbud Jateng, semata-mata agar orang tua anak-anak tersebut menjadi sadar dengan perhatian yang telah diberikan pemerintah selama ini dan bersedia pindah atau bertransmigrasi.

Kelompok Romo Mangun yang semenjak semula ingin membantu anak-anak Kedung Ombo, menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Depdikbud untuk ikut serta mengadakan program guru kunjung. Niat Romo Mangun ini mendapat dukungan Bupati Boyolali M Hasbi.

Tawaran Baru Di Kayen

Lobi Pemda Jateng pada pihak Perhutani belum ada hasilnya, namun Bupati Boyolali M Hasbi tiba-tiba memberi tawaran baru kepada penduduk yang bersedia pindah dan tinggal di Kayen, berupa penambahan tanah seluas 1.000 meter persegi untuk setiap KK. Dengan demikian setiap KK yang pindah di Kayen, yang semula hanya mendapat 1.000 meter persegi, sekarang mendapatkan 2.000 m persegi.

Tawaran baru M Hasbi tersebut disampaikan kepada rakyat Kedung Ombo di daerah genangan lewat selebaran yang disebar

pada 6 April 1989 dengan helikopter pinjaman dari sebuah perusahaan yang mengelola PIR persusuan di Boyolali, PT Mentrust. Selebaran-selebaran yang dicetak sebanyak 15 ribu lembar itu dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Jawa dengan nomor 593.8/00784 dan 500 / 00794 dan langsung ditandatangani oleh Bupati Boyolali M Hasbi. Selebaran itu antara lain berbunyi:

> "Demi Allah, dibangunnya Waduk Kedung Ombo, pemerintah tidak bermaksud menyengsarakan masyarakat". Selebaran itu juga berisi himbauan kepada warga yang masih bersedia mengambil ganti rugi agar segera mengurus ke Kantor Pengadilan Negeri Boyolali dan segera pindah dari areal genangan. Sedangkan masyarakat yang telah menerima ganti rugi, tetapi masih berada di areal genangan secara iklas diminta untuk segera pindah. Apabila ada warga yang berminat transmigrasi, diminta agar secepatnya melaporkan diri kepada aparat pemerintah atau Satgaspam yang terdekat.

Lewat selebaran itu, M Hasbi meminta agar penduduk yang telah pindah, tidak kembali ke areal genangan atau sabuk hijau. Meskipun air waduk akan surut karena adanya permintaan aliran air pertanian dari daerah pantai utara dan mulai berkurangnya curah hujan. Hal ini disebabkan kenaikan permukaan air di tahun 1990 akan lebih cepat dan akan mencapai elevasi 92,50 m.

Tawaran Bupati Boyolali ini disambut dengan gembira oleh 35 KK yang telah berada di pemukiman Kayen. Ada 12 KK lagi yang kemudian menyatakan diri akan pindah ke Kayen. Sebagian besar sisanya, memilih terus bertahan di daerah genangan karena tanah seluas 2.000 m persegi yang tandus dan miskin air tidak menarik minat mereka.

Tawaran Baru Di Muko-Muko

Tawaran baru juga diberikan kepada penduduk yang mau bertransmigrasi ke Muko-Muko Bengkulu. Khususnya kepada mereka yang mau mengikuti program transmigrasi pola swakarsa yang jumlahnya dibatasi hanya 400 KK. Penduduk dijanjikan akan diberi fasilitas transportasi dengan pesawat terbang, biaya hidup selama 1 tahun dan lahan seluas 2 hektar serta rumah semi permanen ukuran 5 x 6 m. Semua bantuan tersebut berasal dari dana Banpres, Deptrans, Proyek Waduk Kedung Ombo, Pemda Tk. I Jateng dan Bengkulu, Yayasan Dharmais serta Yayasan Sosial Soegijapranata Semarang.

Di Jakarta, Kabag Humas Departemen PU Soepardjo menyatakan, bahwa pemerintah menyediakan dana sebesar 7 juta rupiah bagi setiap KK Kedung Ombo yang bersedia bertransmigrasi ke Muko-Muko. Dari Rp 7 juta, sekitar Rp 5 juta merupakan tanggungan pemerintah untuk pembuatan jaringan irigasi per hektar di pemukiman baru. Sedangkan sisanya Rp 2 juta untuk ganti rugi tanah yang terkena proyek Waduk Kedung Ombo seluas 0,5 hektar.

Kedua tawaran tersebut sebenarnya bukan merupakan tawaran baru, karena kalau dikaji lebih lanjut biaya hidup selama beberapa waktu, biaya transportasi, perumahan dan lahan garapan merupakan kewajiban pemerintah yang harus diberikan kepada transmigran. Hanya saja kebijakan lama yang dikemas secara baru itu kemudian lebih mampu menarik beberapa KK untuk ikut bertransmigrasi. Tawaran yang betul-betul baru datang dari Presiden Soeharto yang pada 21 April memberikan bantuan sebesar Rp 2 milyar untuk pembangunan lahan dan perumahan warga di Muko-Muko.

Tapi tawaran baru ini pada kenyataannya tidak diimbangi dengan kesiapan pemukiman para transmigran di Muko-Muko, sebagaimana digembar-gemborkan oleh Pemda Jateng dan Pemda Bengkulu. Dari tanah pembagian yang sementara baru diberikan 1

ha, tiga perempat bagian yang menjadi tanggungan pemerintah ternyata belum seluruhnya dikerjakan oleh pemborongnya. Hal seperti ini terjadi di daerah pemukiman SP V yang telah ditempati oleh sekitar 450 KK warga asal Kedung Ombo selama 5 bulan.

Alternatif Pemukiman Baru

Kepastian penduduk akan mendapat tanah pemukiman di sekitar waduk didapat setelah pada 6 April 1989. Saat itu, delapan orang wakil penduduk Kedung Ombo yang dipimpin oleh Jaswadi bertemu dengan Gubernur Jateng HM Ismail. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur berjanji akan memberikan tanah seluas 1.000 m persegi setiap KK, disusul dengan sisa tanah dari keseluruhan luas tanah yang terkena proyek di daerah sekitar sabuk hijau. Untuk itu, Gubernur meminta agar kedelapan wakil penduduk Kedung Ombo tersebut menginventarisasi jumlah KK yang masih bertahan di daerah genangan, yang belum pernah menerima ganti rugi.[37]

Dengan demikian, selain mengabulkan permintaan ganti rugi tanah yang luasnya sepadan dengan luas tanah yang tenggelam telah disetujui, permohonan penduduk agar diberi bukti pemilikan tanah berupa leter D atau leter C juga dikabulkan. Semua ongkos pemindahan rumah serta ganti rugi tanaman (*karang kitri*) yang telah tenggelam akan dipikul oleh pemerintah atau dibebankan kepada pihak

[37] Selanjutnya 8 orang penduduk yang menemui Gubernur Jateng tersebut beserta orang-orang yang diwakilinya diberi nama sebagai Kelompok Delapan. Dalam perkembangannya mereka membuat suatu wadah yang dinamai sebagai Paguyuban Masyarakat Kemusu Boyolali (PMKB). Delapan orang yang menjadi pimpinan Kelompok Delapan adalah Jaswadi dan Yadi dari Nglanji, Ngadimin, Senen dan Demis dari Ngrakum, Sutikno dan Ratno dari Kemusu serta Jimin dari Bawu. Kemudian dinamakan juga sebagai Kelompok Sembilan dengan masuknya Mulyono sebagai wakil dari Nglanji.

proyek. Hanya saja harus menunggu teknis pelaksanaan lebih lanjut yang akan dilakukan oleh Bupati Boyolali.

Meskipun masih harus menunggu hasil perundingan Pemda Jateng dengan pihak Perhutani, penduduk yang sebelumnya telah berbulan-bulan capai dikejar-kejar air menyambut janji Gubernur dengan suka-cita. Beberapa orang penduduk Kemusu yang pernah menjadi anggota grup ketoprak Siswo Budoyo, diperkuat oleh personil dari grup Panca Budaya pada malam Jumat, 27 April 1989, menggelarkan sebuah pertunjukan ketoprak dengan lakon Baru *Klinthing, Dumadining Rawa Pening*. Pertunjukan ketoprak yang diprakarsai oleh Kelompok Delapan dan berlangsung di Ngrakum Baru itu mengungkapkan pengalaman-pengalaman penduduk selama dikejar air genangan dan sindiran-sindiran terhadap kesengsaraan yang mendatangi mereka.

Dari hasil pendapatan sementara dan seleksi Tim Panitia Pembebasan Tanah yang diketuai Kabag Pemerintahan Pemda Boyolali Aris Munandar, pada pertengahan Mei dinyatakan ada 201 KK yang memiliki hak untuk mendapatkan jatah kapling di areal pemukiman baru di kawasan hutan KPH Tlawah, Kedung Lele. Para penduduk yang telah mendapat kapling segera mengangkat rumahnya beramai-ramai ke tempat pemukiman baru. Di tempat baru tersebut juga didirikan sebuah Balai Pertemuan PMKB. Adanya titik temu antara rakyat Kedung Ombo dengan pemerintah ini disambut dengan upacara selamatan dan pemotongan tumpeng oleh Bupati Boyolali di Balai Pertemuan PMKB.

Sambil menunggu Gubernur HM Ismail yang sedang mencari *impen*[38] nama bagi lokasi pemukiman baru penduduk Kedung Om-

[38] Lihat: Wawasan, 16 Mei 1989. Menunggu *impen* atau wangsit biasanya dilakukan oleh orang Jawa dengan cara berpuasa atau bertapa untuk memperoleh pemahaman supernatural/paranormal yang dapat membimbing langkah-langkah berikutnya yang akan

bo, dua buah buldozer didatangkan dari Semarang. Mesin-mesin itu bertugas meratakan tanah di kawasan Perhutani yang bakal menjadi tempat pemukiman baru. Pemda Jateng menyediakan lahan pengganti bagi 350 hektar tanah. Tanah pengganti itu diambil dari Perhutani yang terletak di daerah kecamatan Andong dan Kemusu, milik Pemda Boyolali.

Bertempat di Balai Pertemuan PKMB, pada Selasa tanggal 30 Mei 1989 pk. 18.30 WIB, Gubernur HM Ismail memimpin upacara selamatan. Hal ini menandakan dimulainya pembanguan pemumikan baru pada areal hutan milik Perhutani. Gubernur memeberi nama tempat pemukiman bekas areal hutan milik Perhutani KPH Tlawah di Desa Kedunglele tersebut sebagai Kedungmulyo. Sedangkan pemukiman baru di sebelah timur waduk bekas areal Perhutani KPH Grenjengan yang masih dalam taraf pembabatan dinamai sebagai Kedungrejo. Dalam sambutannya Gubernur HM Ismail mengatakan :

> "Menurut wangsit dan mimpi yang saya peroleh, Kedungmulyo punya makna besar. Yaitu pengorbanan warga yang terkena proyek Kedung Ombo merupakan langkah yang teramat mulia. Mereka ini layak disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Sedangkan Kedungrejo, sebagai pemukiman baru diharapkan kelak menjadi rejo dan murah pangan". [39]

Ucapan Gubernur Jateng itu segera disambut gemuruh tepuk tangan masyarakat yang tumpah ruah memenuhi tempat upacara selamatan. Apalagi ketika Gubernur Jateng menyatakan, warga setempat tak perlu lagi mempromosikan Waduk Kedung Ombo pada

diambil. Bila impen telah datang, 'orang Jawa' percaya bahwa hidupnya akan berubah secara drastis.

[39] Kompas, 1 Juni 1989.

masyarakat berbagai daerah, karena berita tentang Waduk Kedung Ombo telah tersiar ke mana-mana. Tak hanya secara nasional melainkan juga ke dunia internasional. Upacara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Gubernur HM Ismail yang kemudian diserahkan kepada Bupati Boyolali M Hasbi dan diserahkan lagi kepada penduduk yang paling tua Daseri (70 th) yang mewakili 76 KK peserta relokasi tahap pertama. Selepasa pemotongan tumpeng, para pejabat dan masyarakat duduk berbaur dan makan bersama secara lesehan di atas gelaran tikar. Seakan-akan semua orang lupa pada pertikaian yang pernah terjadi. Substansi permasalahan telah dijawab dengan perhelatan nasi tumpeng.

Acara kemudian diteruskan denagn hiburan yang menampilkan bintang tamu penyanyi keroncong Waljinah, grup penari Didik Nini Thowok, Gito-Gati dan bintang-bintang ketoprak yang menampilkan lakon Mas Karebet[40]

Malam itu bekas hutan Kedunglele menjadi pasar malam di mana semua orang bergembira, melupakan kisah sedih. Mereka seakan-akan telah memaafkan pemerintah, karena mereka tak lagi dikejar-kejar air. Bisa menempati tanah di sekitar waduk, bagi sebagian orang yang percaya mitologi berarti merupakan tanda datangnya jaman kemakmuran.

Pemerintah secara resmi menganggap Kasus Kedung Ombo telah terselesaikan dengan adanya tawaran pemukiman baru bagi penduduk yang tidak mau pindah, sebagai tambahan tawaran bertransmigrasi dan pindah ke Kayen. Demikian pula dengan pihak media massa. [41] Namun apa memang telah tuntas? Tidak tahu!

[40] Mas Karebet adalah nama lain dari Joko Tingkir, seorang tokoh legenda yang menjadi adipati di Pajang dengan gelar Adipati Adiwijaya.

[41] Lihat *"Kedung Ombo : Sampai Di sini"*, Editor No. 37, 20 Mei 1989; *"Masalah Ganti Rugi Waduk Kedung Ombo Sudah Tuntas"*,

Karena masih ada ribuan penduduk di daerah genangan dan dua ribu KK yang belum menerima ganti rugi. Hutan yang sedang dibabati juga belum bisa segera ditempati, apalagi ditanami. Tanah-tanah pemukiman seluas 350 hektar yang dijanjikan mungkin tidak cukup untuk mengganti seluruh tanah penduduk yang telah tenggelam oleh genangan air waduk. Mungkin juga penduduk yang telah pindah ke Kayen atau Bengkulu akan cemburu dan kembali ke Kedung Ombo. Dan yang paling penting, tidak setiap penduduk di daerah genangan mengetahui secara persis kebijakan Pemda Jateng. Sedangkan mereka yang tahu tentang ganti rugi telah dihimbau oleh pemerintah agar tidak terlalu banyak bicara sebelum penyelesaian ganti rugi. Masalah yang rumit tersebut masih ditambah dengan adanya ratusan KK yang sebelumnya telah menerima ganti rugi secara terpaksa, namun masih tinggal dan bertahan di daerah genangan.

Kasus Kedung Ombo memang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menggelar lakon kelompok Mas Karebet. Janji-janji pemerintah kepada rakyat Kedung Ombo terlalu banyak. Dan mungkin juga terlalu muluk, dibandingkan dengan kemampuan birokrasi untuk menyelesaikannya secara cepat. Karena itu, ketidakpastian kembali muncul di daerah genangan. Sebagian besar penduduk menyimpan kekhawatiran bahwa pemerintah tidak akan mampu merealisasikan janji-janjinya.

Situasi Terakhir (Sampai Dengan Akhir Pebruari 1990)

Ternyata tidak semua rakyat Kedung Ombo di daerah genangan menyambut kebijakan baru yang ditawarkan Gubernur HM Ismail.

Tajuk Harian Wawasan, 18 Mei 1989 dan juga *"Tawa Ceria Mengakhiri Drama Di Kedung Ombo"*, Suara Merdeka, 26 Mei 1989.

Sebagian besar menyatakan menolak ke pemukiman baru karena status pemilikan tanah belum jelas. Dalam pelaksanaannya, ternyata setiap KK hanya menerima tanah seluas 1.000 m persegi sisa yang lain seperti yang pernah dijanjikan belum ada kepastian kapan akan direalisasikan. Mereka menunggu teman-temannya yang telah pindah ke Kedungmulyo dan Kedungrejo, sambil menunggu saat yang tepat untuk pindah.

Tampilnya Kelompok Delapan sebagai mitra perundingan yang sejajar dengan Gubernur Jateng, membuat kelompok tersebut menjadi sebuah kelompok elitis yang menguasai informasi langsung dari pemerintah. Beberapa orang pimpinan Kelompok Delapan malah bersikap dan bergaya sebagai seorang pejabat. Dalam membuat usulan-usulan kepada pemerintah, Kelompok Delapan tidak lagi mengadakan musyawarah atau meminta masukan dari rakyat yang diwakilinya. Cara perjuangan Kelompok Delapan yang selalu mengambil inisiatif langsung mengajukan tuntutan-tuntutan kepada Pemda Tk I dan Tk II tanpa melibatkan banyak orang ini menyebabkan mereka terjebak dalam janji-janji pemerintah. Tapi, mereka tidak punya keberanian untuk menagih janji-janji itu kembali secara tegas. Apalagi kemudian Kelompok Delapan hanya memperjuangkan orang yang tadinya belum menerima uang ganti rugi yang bersedia pindah ke pemukiman Kedungmulyo dan Kedungrejo. Hal ini menyebabkan keutuhan rakyat Kedung Ombo mulai mencair. Muncul berbagai friksi.

Sebelumnya, di kalangan rakyat Kedung Ombo yang bertahan di daerah genangan sebetulnya ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang sama sekali menolak menerima ganti rugi uang dan tawaran bertransmigrasi. Kelompok ini hingga akhir Januari 1990 masih berjumlah 1.096 KK.[42] Sedangkan kelompok ke dua merupakan kelompok yang terpaksa menyatakan kesediaannya untuk menerima ganti rugi karena takut dan tidak kuat meng-

rejo. Wakil orang-orang Kemusu akhirnya bersikap pasif dalam aktivitas Kelompok Delapan. Sementara Kelompok Delapan berupaya memperbaiki dan meningkatkan kondisi di pemukiman baru, wakil Kemusu mencoba kembali menghubungi beberapa LSM yang dulu pernah membantu mereka untuk menuntut pemerintah. Hal yang sama juga dilakukan oleh kelompok-kelompok yang bertahan di daerah genangan dan yang telah menerima uang ganti rugi. Mereka kembali melakukan kontak dengan lembaga atau orang panutannya.

Kelompok Delapan yang menempati daerah pemukiman baru juga mempunyai banyak masalah. Rekan-rekan yang memilih bertahan di daerah genangan, menuduh mereka sebagai orang-orang yang telah berkhianat pada komitmen "berjuang bersama sampai berhasil" dan berkolaborasi dengan Gubernur Ismail. Se-dangkan dari pihak pemerintah kelihatannya juga masih menaruh curiga pada kelompok yang dulu pernah jadi pembangkang tersebut. Dalam beberapa acara yang diselenggarakan pemerintah di Kedungrejo, pimpinan Kelompok Delapan tidak dilibatkan. Sementara itu janji Gubernur Jateng juga belum direalisasi. Hal ini semakin membuat posisi Jaswadi Csterjepit.[44] Warga Kedungmulyo dan Kedungrejo menagih janji Kelompok Delapan yang pernah menga-takan bahwa penduduk akan mendapat tanah yang luasnya sama dengan yang pernah mereka miliki sebelumnya bersama sertifikatnya. Kesulitan pangan juga mulai membayangi setiap penduduk, yang selama ini

---

[44] Sampai 27 Januari 1990, penduduk di Kedungrejo, Kedungmulyo dan juga Kayen ternyata belum menerima sertifikat tanah seperti yang dijanjikan oleh Gubernur akan direalisasikan pada anggaran tahun 89/90. Sisa tanah yang dijanjikan juga belum direalisasikan, karena pembukaan tanah Perhutani ternyata berjalan sangat lambat. Sedangkan sebagian pemindung yang dijanjikan akan mendapat tanah seluas 500 m persegi per KKnya dengan persyaratan telah membayar biaya pengurusan sertifikat, ternyata juga belum mendapatkan apa-apa.

lebih banyak menggantungkan diri pada sum-bangan kelompok-kelompok yang mengadakan bakti sosial.

Beberapa kesulitan dan tuduhan yang menyudutkan Kelompok Delapan tersebut akhirnya juga membuat sikap dan pandangan mereka terhadap orang-orang yang nekad bertahan di daerah genangan menjadi berbeda. Penduduk yang telah menempati pemukiman baru di Kedungmulyo dan Kedungrejo beranggapan, orang-orang yang terus bertahan itu justru berupaya menghambat dan menjegal terobosan-terobosan yang mereka coba lakukan selam ini.

Setelah setahun lebih, semenjak peresmian penggenangan Waduk Kedung Ombo, ternyata permasalahan sama sekali belum beres. Rakyat Kedung Ombo justru dihadapkan pada persoalan-persoalan baru yang pelik. Sementara air seolah-seolah tak mau mengerti apakan permasalahan di kawasan waduk telah beres atau belum. Elevasi air yang pernah mencapai angka sekitar 57 m pada bulan September 1989, ternyata naik kembali dan mencapai angka 84,5 m dan kemudian tiba-tiba melonjak 88,45 m.[45]

Genangan air merupakan masalah baru bagi rakyat Kedung Ombo yang sebelumnya adalah mayoritas petani. Setelah menelan 8 korban jiwa pada awal Juni 1989, maka korban terus berjatuhan. Di antaranya adalah 5 penduduk Desa Genangsari yang mati tenggelam, gara-gara perahu lesung bekas tempat menumbuk padi yang mereka tumpangi terbalik pada tengah malam di perairan Desa Ngrakum. Bersama 3 penduduk Genengsari lainnya, kelima korban tersebut pada malam naas itu sebetulnya bermaksud pulang ke desanya, usai menghadiri sebuah resepsi pernikahan di desa Ngrakum. Terbatasnya transportasi yang sangat vital di daerah genangan Kedung Ombo ini nantinya mendorong beberapa pihak untuk memberikan perahu kepada penduduk. Namun aparat setempat selalu mempersulitnya.

Air memang menjadi masalah, tapi yang jelas karena air pulalah Waduk Kedung Ombo mulai dikunjungi oleh para turis domestik dan orang-orang yang berjiwa pedagang serta pencari ikan dari daerah lain. Kalau para turis domestik yang umumnya adalah orang-orang desa sekitar waduk yang ingin melihat "pemandangan laut" yang sangat jarang mereka saksikan, para pedagang datang untuk mendirikan warung-warung kecil. Insting pedagang mereka mengatakan bahwa sebentar lagi Waduk Kedung Ombo akan ramai dibanjiri para wisatawan seperti tempat penginapan dan perahu. Hal yang sama juga diikuti oleh para pedagang asongan yang ramai menjajakan barang dagangannya di daerah sekitar pintu waduk. Muncul pula isyu adanya orang dari luar daerah yang akan menjadi juragan perahu di Kedung Ombo, yang mungkin mau meniru apa yang telah ada di daerah Gunung Kemukus. Di kawasan Kemukus telah bermunculan persewaan sepeda air berbentuk angsa raksasa.

Mungkin peresmian Waduk Kedung Ombo telah ditunggu-tunggu oleh sebagian penduduk di sebelah utara waduk. Namun tidak demikian halnya dengan orang-orang di sebelah selatan. Baik yang di Sragen maupun Boyolali, yang tanahnya terkena proyek. Semakin lama peresmian waduk, berarti semakin tersedia kesempatan untuk mencari upaya hukum. Atau upaya lain untuk mengembalikan apa yang menjadi hak-hak penduduk sebagai pemilik sah atas tanah yang digunakan untuk proyek.

Menghadapi isyu akan diresmikannya Waduk Kedung Ombo pada bulan Mei 1990, [46] hampir semua kelompok-kelompok yang

---

[45] Lihat Suara Merdeka, 14 Maret 1990. Hal ini menyebabkan sebagian besar penduduk di Klewor dan Kemusu harus membongkar dan mengangkati rumah serta harta benda mereka.

[46] Sebelumnya sempat beredar isyu pada awal Maret 1990 Waduk Kedung Ombo akan diresmikan oleh Presiden Soeharto.

tadinya terpecah-pecah mempunyai sikap sama, yaitu mereka akan mengadakan suatu aksi, entah apa. Tentunya ancaman penduduk yang tanahnya terkena proyek ini akan benar-benar dilaksanakan apabila pemerintah tidak sungguh-sungguh berusaha menyelesaikan Kasus Kedung Ombo secara tuntas. Janji-janji pemerintah yang diobral kepada rakyat Kedung Ombo yang merasa hidupnya telah dipepet selama bertahun-tahun mungkin akan menjadi bumerang bagi Pemda setempat.[47]

Daerah Genangan Waduk Kedung Ombo

Gambaran situasi terakhir di daerah genangan sekilas tampak tenang-tenang. Tidak ada aparat militer bersenjata lengkap (anggota Satgaspam). Mereka telah ditarik dari sebagian besar pos-pos yang ada di daerah genangan kira-kira semenjak pertengahan September 1989 yang lalu. Hanya ada petugas Satpam di pos-pos dekat pintu waduk. Tukang ojek cukup bebas mengantarkan tamu-tamu yang masuk-keluar daerah genangan. Pemeriksaan dan wajib lapor di pos dekat pintu waduk hanya dikenakan kepada setiap pengunjung yang datang berkendaraan roda empat atau yang gerak-geriknya dinilai petugas cukup mencurigakan. Petugas Satpam memang memperketat penjagaannya karena ada kabar datangnya pencari ikan dari luar kota yang membawa bom.

Namun gambaran suasana tenang tersebut sebenarnya semu. Apabila kita memasuki daerah pemukiman yang ada di dalam wilayah genangan akan ditemukan wajah-wajah penduduk yang tegang dan mencurigai setiap orang asing yang datang. Ibarat api dalam

[47] Warga yang paling nekad seperti Kedungpring bahkan menyatakan siap untuk berkalangtanah (mati) demi membela dan mempertahankan apa saja yang tersisa pada mereka.

sekam Emosi penduduk di daerah genangan sepertinya siap untuk meledak dan menghancurkan setiap orang asing yang membuat kesalahan di pemukiman mereka. [48] Keadaan ini menyadarkan bahwa daerah yang tengah dimasuki ini adalah sebuah daerah konflik.

Meskipun tidak ada lagi aparat militer berseragam, ternyata intel ada di mana-mana. Malahan mungkin jaringan intelijen lebih luas dibandingkan dahulu. Orang-orang yang tadinya dicap sebagai PKI, justru direkrut dan dimasukkan dalam bagian sistem intelijen. Mereka wajib melaporkan setiap tamu asing yang datang atau gerak-gerik yang mencurigakan.[49] Petugas intel berpakaian preman juga sering berpatroli di daerah genangan, terutama di pemukiman seperti di Kedungmulyo dan Kedungrejo. Sedangkan para pejabat pemerintah setiap kali melakukan kunjungan ke daerah genangan selalu tampil 'low Profile' dan melakukan pendekatan persuasif untuk membujuk penduduk agar segera mau pindah ke luar dari daerah genangan.

Memang bisa dikatakan keadaan orang-orang Kedung Ombo sekarang relatif lebih baik daripada di tahun-tahun 1987 atau 1988 yang lalu di mana militer masih sering melakukan latihan perang-perangan,[50] penggedoran pintu-pintu rumah penduduk pada tengah

[48] Sekitar bulan Agustus 1989 ada sekelompok mahasiswa dan dosen yang mengaku datang dari Salatiga. Mereka mendatangi pemukiman penduduk dan mengatakan akan melakukan penelitian serta membantu penduduk. Penduduk yagn dalam kondisi sangat peka dan mudah tersinggung menjadi marah dengan kelompok yang dianggapnya tidak mempunyai keberpihakan yang jelas. Rombongan yang mengaku datang dari Salatiga itu kemudian dikejar-kejar oleh penduduk sambil dibawakan klewang sehingga ketakutan dan lari. Ketika rombongan tersebut menaiki perahu dan meninggalkan pemukiman malah perahunya terbalik.

[49] Konon orang-orang itu mau melakukan tugasnya karena berharap cap PKI atau ET yang disandangnya akan 'dibersihkan' kembali oleh pemerintah, seperti sedia kala.

malam dan sebagainya. Namun bukan berarti sama sekali tidak ada tekanan. Hanya saja tekanan itu muncul dalam bentuk yang lain, seperti bahaya kelaparan, penyakit atau provokasi-provokasi yang dilakukan oleh beberapa oknum. Seperti misalnya yang terjadi pada awal Januari 1990. Saat itu seorang Kepala Desa dibantu oleh beberapa orang mengadakan pengrusakkan terhadap kuburan para leluhur warga dengan alasan akan dipakai untuk pembangunan sebuah Balai Desa. Untung insiden tidak terjadi, meskipun sebagian besar penduduk yang marah telah mengambil pacul, parang dan clurit.

Di daerah genangan saat ini masih ada 529 KK yang mencoba terus bertahan, antara lain 48 KK di Kedungpring, 80 KK di Mlangi, 150 KK di Kemusu, 70 KK di Klewor dan 37 KK berada di Tremes. Sebagian dari mereka ada yang telah menerima ganti rugi seperti halnya para warga Mlangi yang hampir kesemuanya telah menerima uang ganti rugi, tapi memilih bertahan. Kebanyakan dari mereka ini mencoba berpegang pada kata-kata aparat Kecamatan dan Kelurahan yang pernah mengatakan agar penduduk mengambil ganti ruginya terlebih dahulu, karena kalau air nantinya tidak sampai ke rumah dan masuk ke dalam rumah, penduduk akan diperbolehkan menempati untuk selamanya dengan cara mengajukannya lagi ke pemerintah dan hanya akan dikenai biaya sebesar 10 %. [51] Mereka

[50] Namun ada berita bahwa pada akhir tahun 1989 beberapa personil militer melakukan latihan perang di dekat lokasi pemukiman di Kedungpring. Sumber: Laporan KSKPKO Semarang, *Perang Membentang Di Kedung Ombo*, 5 Januari 1990.

[51] Di tahun 1987, Panitia Pembebasan Tanah dan penduduk pernah membuat pernyataan bersama yang berisikan apabila tanah penduduk nantinya tidak tergenang air, akan dikembalikan kepada pemilik semula. Sumber : Wawancara dengan penduduk Kedung Ombo, 20 dan 21.1.1990. Lihat juga Wawasan, 30 Mei 1989.

berharap air tak akan menyentuh tempat tinggal mereka. Kelompok yang lain berniat akan mengembalikan uang ganti rugi yang pernah diterima dan menggantinya dengan tanah salah satunya adalah Tirtorejo (54 th) seorang penduduk Dukuh Guyuban, yang telah menerima uang ganti rugi atas tanah miliknya seluas 3.000 m persegi.

Sedangkan warga Kedungpring mempunyai tuntutan yang paling tinggi, selain menginginkan ganti rugi tanah yang sepadan dengan luas dan kesuburan tanah yang pernah mereka miliki sebelumnya, juga menuntut ganti rugi uang sebesar Rp 10.000,- per m perseginya untuk tanah yang telah tenggelam dan kerugian harta benda serta spiritual selama lebih dari setahun hidup terlunta-lunta. Kelompok para orang tua umumnya tetap menuntut diadakannya musyawarah ulang, karena musyawarah yang terdahulu dianggap cacat dan menyepelekan masyarakat.

Penduduk yang memilih bertahan kebanyakan menempati tanah-tanah yang cukup tinggi. Sebagian besar di antaranya telah melakukan penggeseran rumah beberapa kali sampai tidak ada lagi tanah yang bisa ditempati, kecuali mulai memasuki tanah milik Perhutani. Mandor hutan setempat yang agaknya iba melihat keadaan penduduk mentolerir kehadiran para pengungsi itu, bahkan meminjamkan perahu-perahu milik Perhutani untuk dipakai penduduk.

Di antara semua tempat pemukiman orang-orang yang memilih bertahan di daerah genangan, keadaan Kedungpring yang paling menyedihkan. Penduduk menempati rumah-rumah darurat yang lebih tepat dikatakan sebagai gubug berukuran 2 - 6 m. Beberapa rumah bahkan ditinggali secara bersama oleh 2 atau 3 KK. Kalau pada pertengahan tahun'89 warga Kedungpring sehari-harinya hanya makan nasi jagung dengan lauk sambal, sekarang mereka mulai makan gaplek. Gambaran di Kedungpring ini ternyata juga terjadi di tempat pemukiman lainnya.

Rawan Pangan, Wabah Penyakit dan Bencana Alam

Kenekadan rakyat Kedung Ombo yang memilih terus bertahan di daerah genangan sampai tuntutan yang mereka perjuangkan berhasil akhirnya memang membawa mereka pada sebuah pilihan yang serba sulit. Keluar dari daerah genangan pada kondisi yang ada sekarang sama saja dengan kalah. Sementara bertahan dan memperjuangkan tuntutan membawa konsekuensi simpanan hasil panen sebelum peresmian penggenangan yang selama ini menjadi andalan rakyat habis. Untungnya pada musim kemarau tahun 1989 ketika air genangan waduk menyusut, sebagian penduduk mencoba menanam padi, jagung, kedelai dan beberapa tanaman palawija di tanah-tanah 'baru' yang ditinggalkan air atau di tanah-tanah milik Perhutani dengan seijin mandor hutan setempat. Beberapa jenis tanaman yang usianya relatif singkat, seperti jagung telah berhasil dipanen, namun sisanya keburu tenggelam akibat naiknya kembali permukaan air genangan secara cepat.

Kenaikan air secara mendadak ini juga menimbulkan kerugian materi yang cukup besar kepada penduduk, seperti yang dialami oleh seorang warga Mlangi, Trimo yang harus kehilangan uang sekitar Rp 150.000,-. Uang tersebut telah dikeluarkannya untuk tenaga, pembelian benih dan obat-obatan selama menunggu panen tiba. Tapi akhirnya musnah bersama padi yang telah siap dipanen.

Keadaan rawan pangan hampir merata di semua daerah genangan. Kecuali untuk Klewor dan Kemusu Kulon yang masih memiliki persediaan jagung dan sedikit beras untuk dimakan selama beberapa bulan mendatang.[52] Untuk mengatasi keadaan yang

[52] Sebagian besar warga Klewor dan Kemusu Kulon memang masih bisa bercocok tanam di tegalan atau sawah yang belum pernah tergenang air sama sekali, karena tanah di kedua tempat ini memang cukup tinggi.

berlarut-larut ini, penduduk mencoba bekerja menjual jasa dengan menjadi tukang perahu, membuat arang atau mencari ikan dengan cara mengail dan menjaring dan dijual dan ditukarkan dengan nasi jagung dan sayuran di kota terdekat. Sistem penjualan ikan yang dilakukan pen-duduk sangat sederhana, seperti yang ada di Pasar Kemusu di mana ikan tidak dijual sesuai dengan beratnya tapi dijual secara rentengan. Setiap renteng berisi 7 atau 8 ekor ikan sebesar tangan dihargai hanya Rp 200,-. Penduduk yang paling jago menangkap ikan adalah penduduk Kedungwiyu yang sehari bisa mendapatkan uang Rp 2.000,- dari hasil menjual ikan tangkapan. Sebagian penduduk yang lain, yang berada di tempat terpencil secara nekad mencoba meme-tik padi-padi yang telah tenggelam dari atas sebuah rakit, atau de-ngan cara menyelam.

Keadaan rawan pangan yang sebenarnya sudah mulai terjadi pada Mei 1989 ini di beberapa dukuh cukup parah. Apalagi pemerintah sebelumnya hanya memperbolehkan kelompok-kelompok yang ingin melakukan bakti sosial untuk melaksanakannya di tempat pemukiman baru, terutama di Kayen. Keadaan rawan pangan yang bisa menyebabkan munculnya konflik baru ini membuat Gubernur Jateng HM Ismail pada tanggal 16 Juni 1989 menyatakan membuka tangan bagi setiap usaha yang bertujuan untuk membantu warga Kedung Ombo, baik yang ada dalam wilayah Sragen maupun Boyolali.

Namun himbauan Gubernur Jateng ternyata tidak mendapat sambutan masyarakat atau kelompok dermawan yang berpikir lebih aman kalau tidak membantu orang yang dituduh sebagai PKI.[53]

[53] Bandingkan dengan para pengusaha (kongkomerat) yang secara *mencolok jor-joran* menyumbang korban banjir di Semarang yang terjadi pada awal Januari 1990. Hal yang sama juga terjadi ketika Gn. Kelud meletus di awal Pebruari 1990. Sangat ironis sekali, rakyat Kedung Ombo justru terlunta-lunta hampir selama setahun mereka menderita kelaparan karena tanahnya digenangi untuk

Apalagi keterbukaan Pemda Tk I Jateng ini tidak diikuti oleh jajaran aparat di bawahnya, yang malah terkesan kaku, mempersulit dan birokratis.[54)] Beberapa kelompok memang mencoba membantu mengatasi keadaan rawan pangan rakyat Kedung Ombo di daerah genangan dengan memberikan bantuan pangan, obat-obatan dan vitamin. Antara lain kelompok mahasiswa Solo, KSKPKO, Kelompok Mangkunegaran dan Kelompok Romo Mangun. Yang paling intensif terlibat secara terus-menerus adalah Sayap Ibu dan Kelompok Romo Mangun, yang bahkan menyumbangkan beberapa perahu untuk dipakai penduduk. Kelompok Romo Mangun mempunyai tiga buah pos yang berfungsi sebagai pos komando bagi usaha-usaha palang merah yang dilakukannya. Yaitu sebuah di Kedungpring dan dua lainnya di pemukiman baru yang berada di luar daerah genangan, Balairejo dan Sidomulyo. Tenaga medis datang 3 hari sekali di pos-pos tersebut. Kelompok Romo Mangun juga mencoba merintis pengembangan budi daya ikan air tawar untuk penduduk setempat.

Penderitaan rakyat Kedung Ombo di daerah genangan seakan-akan memang tidak pernah berhenti. Setelah kelaparan hampir setahun lamanya, mulai muncul wabah penyakit seperti penyakit kulit, cacingan, penyakit perut dan influensa. Hal ini timbul karena masalah sanitasi di pemukiman darurat juga bukan merupakan hal yang paling penting untuk penduduk. Juga karena tidak adanya air bersih, sehingga sebagian besar penduduk memanfaatkan air genangan untuk mandi, masak, mencuci dan minum. Pemukiman-pemu-

pembangunan Waduk Kedung Ombo yang listriknya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri di Jateng dan mengairi beribu-ribu hektar sawah di sebelah utara Jateng.

54) Sikap tak bersahabat ini terutama ditunjukkan oleh aparat militer setempat terhadap para mahasiswa. Karena sikap aparat yang sama pula muncullah insinden Sragen. Tenaga sukarela Kelompok Romo Mangun juga pernah ditolak memasuki daerah genangan.

kiman darurat yang terdiri dari rumah-rumah tanpa ventilasi memadai dan lubang dimana cahaya bisa masuk itu memang tidak mempunyai fasilitas sekolah, puskesmas, tempat ibadah atau sumur seperti layaknya sebuah tempat pemukiman.

Letak rumah-rumah darurat yang berada di lereng-lereng Perhutani juga menimbulkan masalah baru. Kawasan ini selalu menjadi lintasan 'angin gunung' dan 'angin lembah' yang berkecepatan cukup tinggi. Angin kencang ini seringkali merusakkan tanaman dan rumah-rumah darurat. Kejadian yang paling parah adalah pada bulan Januari menjelang tahun baru Imlek, di mana angin bertiup selama kurang lebih 10 hari dan merobohkan atap-atap dan dinding rumah. Sampai-sampai Posko yang didirikan Kelompok Romo Mangun di Kedungpring ikut ambruk. Sedangkan di air, angin kencang menimbulkan badai yang mengakibatkan naiknya gelombang yang kemudian bergulung-gulung menghempas dan membalikkan apa saja yang dijumpainya. Penduduk yang tengah melakukan penyeberangan ke tempat lain seringkali terjebak di tengah-tengah badai ini, bahkan ada perahu yang ditumpangi penduduk yang baru pulang dari pasar terbalik.[55)]

Di beberapa tempat pemukiman yang kondisi tanahnya labil seperti di Guyuban, seringkali terjadi tanah longsor. Apa lagi tempat pemukiman berada di lereng dengan kecuraman yang cukup besar. Memang tanah longsor yang selama ini terjadi belum menimbulkan korban jiwa. Namun penduduk selalu dicekam perasaan was-was terhadap keselamatan anak-anak kecil yang suka bermain-main tanah tanpa bisa mengenali daerah-daerah bahaya.

55) Kejadian yang terjadi pada 21 Januari 1990 ini tidak menimbulkan korban jiwa, karena penumpangnya berhasil membalikkan perahu kembali secara cepat.

Anak-anak Usia Sekolah Terlantar

Tekad bulat penduduk untuk terus bertahan di daerah genangan yang tidak mempunyai fasilitas sekolah, mengakibatkan anak-anak usia sekolah terlantar. Hanya penduduk Klewor yang beruntung, karena bisa dikataka sarana fisik sama sekali belum berubah, termasuk gedung sekolah.

Sebagian anak-anak Mlangi dan Tremes masih bersekolah ke desa-desa terdekat antara lain ke Klewor dan Genangsari. Sedangkan anak-anak yang berada di tempat pemukiman terpencil untuk sementara memang tidak bisa bersekolah. Sebagian masalah terlantarnya anak-anak usia sekolah ini terpecahkan dengan adanya Kelompok Romo Mangun yang mengadakan program guru kunjung di beberapa tempat. Antara lain seperti tempat penampungan anak-anak usia TK di Balerejo yang didirikan Kelompok Romo Mangun bersama Sayap Ibu. Secara bergantian para tenaga guru sukarela mengajar di sekolah-sekolah darurat. Anak-anak dari desa lain juga ikut menjadi anggota kelompok belajar di Balerejo. Hal ini karena orang tua mereka, seperti juga umumnya penduduk Kedung Ombo, memang punya keinginan untuk tidak menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah pemerintah.[56]

Daerah Pemukiman Baru Di Dekat Genangan Waduk Kedung Ombo

Kelompok yang tinggal di tempat ini adalah kelompok yang menerima tawaran Gubernur Jateng HM Ismail beberapa waktu

[56] Penduduk masih menyimpan sisa kebencian terhadap para guru sekolah pemerintah yang dulunya pernah ikut menekan mereka agar pindah dari daerah genangan. Mereka tidak mau menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah dimana guru-guru yang pernah menekan itu masih mengajar.

yang lalu, yang kemudian dituangkan lewat SK Gubernur No. 5/ 33.B/120/1989. Kelompok ini bernaung di bawah PMKB yang dipimpin oleh tokoh-tokoh Kelompok Delapan. Mereka yang menempati pemukiman Kedung Mulyo ada 593 KK yang dibagi dalam 3 blok, masing-masing 168 KK di blok A dipimpin oleh Jaswadi, Blok B dengan 125 KK dipimpin oleh Damis dan Blok C berjumlah 300 KK dipimpin oleh Yadi dan Ngadimin. Sedangkan di Kedungrejo telah bermukim 80 KK di bawah pimpinan Senen. Jumlah warga Kedungrejo akan bertambah denga bergabungnya 140 KK warga Banger yang tengah menyelesaikan prosedur pengkaplingan tanah. Untuk tinggal di kedua tempat pemukiman baru itu, penduduk harus mengeluarkan biaya Rp 200,- per m perseginya.

Di dua pemukiman baru ini telah tersedia beberapa fasilitas semacam puskesmas, mesjid, balai desa, pasar, sumur, jalan beraspal dan sekolah meskipun belum semuanya fungsional.[57] Bahkan telah ada organisasi pemuda Karang Taruna, yang selain melakukan kegiatan olah raga dan kerja bakti, kegiatan rutin anggotanya adalah membantu mengukuri kapling-kapling bersama petugas tanpa mendapat imbalan apapun.

Warga Kedungmulyo dan Kedungrejo beberapa kali menerima bantuan berbagai kelompok antara lain PMI, Keluarga Dirjen Pengairan dan Dinas Pertanian yang memberikan peralatan pertanian, benih, pupuk, beras. Dinas Perikanan Jateng malah memberikan sumbangan 3 buah keramba untuk warga Kedungmulyo. Memang, para warga Kedungmulyo dan Kedungrejo sepertinya dianakemaskan oleh Pemda Jateng yang berusaha menyelesaikan Kasus Kedung Ombo. Antara lain dengan cara mencukupi semua kebutuhan penduduk di kedua pemukiman tersebut.

[57] Pasar Kedungmulyo yang diresmikan pada 15 Pebruari 1990 hanya dibuka pada hari pasaran Wage dan Legi. Sedangkan pasar di Kedungrejo belum fungsional.

Namun sebetulnya permasalahan di Kedungmulyo dan Kedungrejo bisa dikatakan masih jauh dari selesai. Selain proses penyertifikatan tanah yang belum dimulai sama sekali dan lahan yang masih berupa hutan, ternyata masih ada beberapa puluh KK yang belum mendapatkan tanahnya. Mereka terpaksa menumpang di rumah tetangga atau saudaranya. Dengan kata lain, lahan yang disediakan Pemda Jateng ternyata tidak seimbang dengan banyaknya penduduk yang mendaftarkan diri untuk tinggal di kedua tempat pemukiman baru. Bantuan-bantuan dari beberapa instansi yang sifatnya sementara itu juga menimbulkan sebuah ketergantungan.

Untuk mempertahankan agar asap dapur tetap mengepul. akibat persediaan pangan hasil sumbangan semakin menipis, penduduk menjuali ternak atau barang berharga lainnya. Kaum ibu menanami pekarangan rumah mereka dengan kacang, kedelai, jagung atau singkong, sementara sebagian kaum laki-laki mencoba menggarap sawah pasang surut di tepi waduk yang oleh pemerintah hanya dibatasi 1.200 m persegi untuk setiap KK, atau pergi mencari ikan seperti yang dilakukan oleh orang-orang di daerah genangan. Namun sebagian usaha bercocok tanam yang dilakukan penduduk belum bisa dinikmati dengan segera, karena panen membutuhkan waktu. Karena itu pula, sebagian penduduk berinisiatif mencari pekerjaan di kota. Dan hal terakhir ini tentu saja membawa konsekuensi upaya pembukaan kawasan hutan untuk lahan pertanian menjadi semakin terkatung-katung.

Program guru kunjung Kanwil Depdikbud Jateng ternyata juga tidak pernah menyentuh pemukiman baru yang keberadaan-

[58] Pemborong yang bertugas mengerjakan perataan lahan bekas hutan milik Perhutani bekerja sangat lamban. Beberapa alat berat seperti buldozer, hanya bekerja selama beberapa hari saja, kemudian menganggur sampai berminggu-minggu karena alasan persediaan bahan bakar habis. Lihat : Suara Merdeka, 13 Nopember 1989.

nya sebenarnya telah diakui pemerintah. Untuk mengatasi anak-anak usia sekolah yang terlantar, [59] PMKM memprakarsai berdirinya kelompok belajar-kelompok belajar di Kedungmulyo dan Kedungrejo khususnya untuk anak-anak usia TK sampai kelas III SD. Anak-anak kelas IV ke atas yang cukup besar tetap melanjutkan pendidikannya dengan bersekolah ke Genengsari dan Klewor. Sebuah tempat yang kira-kira berjarak 8 km dari ke dua tempat pemukiman baru, dengan melewati hutan dan menyeberangi genangan air.

Kelompok belajar yang didirikan PMKB tersebut melibatkan 8 orang pemuda-pemudi lulusan SLTA warga setempat. Mereka adalah Lasmi (lulusan SMEA), Marno (SMEA), Sumiarsi (SPG), Sumarni (SPG), Suparno (SMKK), Cahyo Arianto (STM), Eni Yuliati (SPMA) dan Sri Purwanti (SPG) yang secara bergiliran mengajar tanpa mendapat bayaran. Tempat-tempat yang digunakan adalah sebuah rumah penduduk dengan bangku-bangku seadanya. Sebagai pertanggungjawaban prestasi sekolah anak didik, kelompok belajar membuat rapor darurat dangan mesin ketik bantuan dari seorang anggota KPS (Keluarga Penulis Semarang). Rapor ditandatangani oleh guru yang bersangkutan dan disahkan oleh Jaswadi sebagai pemuka masyarakat setempat sekaligus pimpinan PMKB.

Gedung sekolah yang baru berdiri, masing-masing sebuah di Kedungmulyo dan sebuah di Kedungrejo masih menganggur karena muncul masalah pemberian nama SD menjelang peresmiannya. Pihak Dinas P dan K Kabupaten Boyolali memberikan nama SD Genengsari IV untuk sekolah yang berlokasi di Kedungmulyo dan SD Ngrakum II untuk yang berada di Kedung-rejo. Sedangkan pen-

[59] Anak-anak usia sekolah di Kedungmulyo dan Kedungrejo berjumlah sekitar 300 orang. Kurang lebih 200 orang di antaranya masih berada pada usia sekolah antara TK sampai kelas III SD.

duduk bersikeras menolak pemberian nama dari Dinas P dan K itu, mereka menghendaki agar nama SD disesuaikan dengan nama desanya masing-masing dan tidak menggunakan nama daerahlain.[60]

Kekhawatiran penduduk Kedungmulyo dan Kedungrejo terhadap nasib anak-anak mereka yang belajar dalam kelompok belajar PMKB pada awal Januari mulai muncul, ketika Kepala Dinas P dan K Kabupaten Boyolali Pudjo Saputro menyatakan akan mengangkat 10 tenaga guru untuk ditempatkan di pemukiman baru, menggantikan 8 orang guru sukarelawan yang tela mengajar selama ini. Tentu saja pengedropan guru dari P dan K tidak mendapat sambutan dari penduduk yang menyangsikan kemampuan mereka dalam membimbing anak-anak Kedung Ombo dengan baik.[61] Para orang tua murid menginginkan anak-anaknya tetap diajarkan oleh guru lamanya yang mengajar di kelompok belajar milik PMKB. Namun hal ini agaknya muskil. Ke 8 guru sukarelawan itu memang akan tersingkir mungkin karena dianggap tidak kualifaid. P ihak PGRI Jateng menanggapi keinginan para orang tua murid de-ngan memperbolehkan guru-guru tersebut tetap mengajar asalkan memiliki SIM (Surat Ijin Mengajar) yang dikeluarkan oleh kantor pusat di Jakarta.

Dalam masalah surat menyurat yang menyangkut legalitas dari penduduk seperti lumrahnya warga negara Indonesia di desa-

[60] Penduduk menolak pemberian nama dari P dan K ini sebagai simbol tetap kuatnya semangat perlawanan mereka. Nama Kedungmulyo dan Kedungrejo menurut anggapan penduduk mempunyai makna historis dari kemenangan perlawanan mereka, dimana akhirnya pemerintah memberikan ganti rugi tanah. Alasan formal dari penolakan yang diberikan penduduk adalah pemberian nama yang salah akan mengakibatkan datangnya sebuah memala (malapetaka).

[61] Perlu diketahui, di masa lampau di masa pembebasan tanah guru yang juga pegawai negeri ikut menekan penduduk.

desa lain? Misalnya saja surat pernikahan, surat jalan atau surat pindah. Penduduk harus bersabar, karena pemerintahan desa belum ada. Mereka harus mensinkronkan dengan jadwal petugas dari Kecamatan yang datang secara berkala ke tempat pe-mukiman. Hal yang sama juga terjadi untuk orang-orang sakit.

Di Luar Daerah Genangan

Beberapa pemukiman baru bermunculan, seiring dengan naiknya air yang menenggelamkan desa-desa yang berada di wilayah genangan. Beberapa temapt pemukiman baru yang berada di luar daerah genangan antara lain di Balerejo dan Sidomulyo. Keadaan di pemukiman-pemukiman baru yang dihuni oleh puluhan KK itu tidak jauh berbeda dengan pemukiman di dalam daerah genangan, karena secara resmi belum ditangani oleh pemerintah. Semua rumah masih berada dalam keadaan darurat dan belum ada fasilitas semacam sekolah, tempat ibadah ataupun sumur. Jalan menuju ke tempat pemukiman-pemukiman semuanya baru merupakan jalan setapak. Tempat tinggal penduduk jadi satu dengan kandang hewan piaraan seperti ayam, kambing atau sapi yang menjadi kekayaan terakhir mereka.

Sebagian besar penduduk Balerejo membangun rumah-rumahnya di atas tanah milik orang lain (milik penduduk Desa Grogol) dengan status sebagai pemindung. Mereka berkewajiban menyerahkan setengah dari hasil bercocok tanamnya kelak kepada si pemilik tanah. Sedangkan penduduk Sidomulyo, yang sebagian besar berasal dari Desa Sendangsari dan Ngrakum, menempati tanah-tanah milik Perhutani dengan seijin pemerintah setempat. Mereka yang mendapat ijin tinggal di Sidomulyo adalah mereka yang belum menerima uang ganti rugi.

Mata-pencarian penduduk antara lain dengan bercocok tanam di tanah milik Perhutani sebagai imbalannya mereka harus ikut memelihara tanaman milik Perhutani yang jaraknya cukup jauh dari tempat pemukiman. Kesempatan untuk bercocok tanam di tanah Perhutani juga dibatasi, yaitu hanya boleh sampai pada usia tanaman kayu jati berumur 4 - 5 tahun, selebihnya dilarang. Sebagian lagi banyak mengandalkan bantuan makanan dari kelompok LSM, Romo Mangun dan Sayap Ibu yang banyak mendirikan sekolah-sekolah darurat.

Penduduk di pemukiman baru di luar daerah genangan seperti di Balerejo dan Sidomulyo tidak mau pindah ke Kayen atau ke Kedungmulyo dan Kedungrejo, meskipun keadaan di sana lebih jelek. Mereka masih berharap akan bisa kembali ke tempat tanah kelahirannya semula bila suatu saat nanti air waduk surut.

Sedangkan Kayen, yang merupakan pemukiman baru yang dibangun pemerintah memang tidak diminati oleh rakyat Kedung Ombo yang telah setahun lebih dikejar-kejar air. Dari tanah 400 kapling yang disediakan proyek, ternyata hanya dihuni oleh 47 KK. Penduduk Kayen sama sekali tidak merasa iri dengan 'saudara tiri' mereka yang ada di Kedungmulyo dan Kedungrejo yang menjadi 'anakmas' baru bagi Pemda Jateng. Karena pemerintah telah memberikan tambahan tanah. Kalau dulunya setiap KK hanya menerima 1 kapling, sekarang mereka mendapat tambahan sebuah kapling lagi per KKnya. Total keseluruhan tanah yang didapat setiap KK di Kayen menjadi 2.000 meter persegi.

Mungkin orang-orang Kedung Ombo benar, bahwa orang yang pindah ke Kayen adalah mereka yang *nrimo* dan *manut*. Warga Kayen pada kenyataannya memang tidak banyak tuntutan. Mereka bahkan merasa mendapat perhatian besar dari pemerintah yang telah membangun pasar, sekolah, balai karya, puskesmas, mesjid, sumur dan jalan-jalan mulus beraspal serta berbagai bantuan. Seolah-olah apa saja yang menjadi kebutuhan orang Kayen akan selalu dicukupi pemerintah. Belum lagi bantuan dari KNPI, AMPI, PGRI dan DPD Golkar yang berupa bahan makanan, ternak dan alat pertanian. Warga Kayen mempunyai cukup kebanggaan bisa mensukseskan pembangunan yang akhirnya membuat mereka menerima penghargaan dari pemerintah.

Beberapa organisasi juga muncul di Kayen antara lain LKMD, Karang Taruna dan Kelompok Tani yang dibagi menjadi dua. Tunas Harapan untuk kaum tani laki-laki yang dipimpin oleh seorang guru yang menjadi pemuka masyarakat di Kayen, [62] Sadi Dwijowiyono dan Sekar Arum untuk kelompok tani wanita yang dipimpin oleh istri Sadi. Kelompok Tani tersebut mencoba mengembangkan peternakan ayam kampung yang kini telah berkembang dan mencapai jumlah 900 ekor. Yang 200 ekor di antaranya dititipkan pada sebuah sekolah untuk dipelihara oleh para murid.

Pendidikan anak-anak bagi orang Kayen juga bukan masalah, karena telah ada sebuah SD dengan nama SD Kayen IV di mana Sadi juga menjadi salah satu tenaga pengajarnya. Upaya memenuhi kebutuhan sendiri dilakukan penduduk dengan cara bertani. Tanah Kayen yang keras bercampur kapur itu diolah dan dicoba ditanami jagung dan kedelai yang pada awal Januari 1990 yang lalu telah mulai bisa dipanen. Penduduk Kayen juga mencoba menanam tembakau yang diperkirakan akan bisa dipanen pada pertengahan bulan Mei 1990 mendatang.

---

[62] Sadi merupakan tokoh yang dianggap berjasa oleh Pemda, karena ketika proyek menawarkan tanah ganti rugi di Kayen, ia banyak berperan mempengaruhi penduduk lain sehingga bisa membawa 47 KK sampai dengan akhir Februari 1990.

Namun orang-orang yang manut itu sedikit was-was, karena ternyata sertifikat bukti pemilikan atas tanah-tanah yang mereka tinggali selama ini belum juga keluar. Meskipun mereka telah mengeluarkan uang Rp 160,- untuk setiap m perseginya. Surat pemilikan tanah bagi orang-orang yang sudah tidak memiliki apa-apa lagi, terlebih bekas petani, memang merupakan sebuah benda yang tak ternilai.

oo0oo

BAB V

RENUNGAN DAN EVALUASI

Model Pembangunan Yang Eksklusif Dan Tidak Partisipatif

Pelaksanaan pembangunan Waduk Kedung Ombo selama ini seolah-olah mengguncang-guncang kesadaran kita semua, bahwa kenyataan seringkali tidak seindah seperti mimpi-mimpi tentang keberhasilan pembangunan itu sendiri. Pembangunan ternyata mirip keping uang yang bermata dua, salah satunya adalah sebuah sisi suram. Tragisnya, sisi suram justru menimpa dan menjadi tanggungjawab kelompok masyarakat yang diidealkan akan disasar dan dimajukan oleh program-program pembangunan. Pembangunan Waduk Kedung sepertinya mensahkan adanya kelompok yang harus menjadi kurban, harus mengalah 'demi pembangunan' atau harus menyingkir 'demi kepentingan umum'.

Mungkin pembangunan (tepatnya: sebuah kasus pembangunan) yang terjadi di Kedung Ombo mewakili banyak kasus pembangunan di tanah air yang tidak bisa muncul ke permukaan karena keburu diredam. Yaitu adanya kepentingan pemerintah yang harus diprioritaskan dan adanya orang-orang yang selama ini tertinggal dalam pembangunan, kurang pendidikan, suaranya kurang vokal didengar yang selalu berkesan : melawan dan memberontak. Ada banyak kasus selama beberapa tahun terakhir ini yang mempunyai pola sama, yaitu penggusuran orang-orang kecil seperti misalnya G. Balak, P. Panggung di Lampung, kasus lapangan golf di Cimacan, kasus Belangguan di Situbondo, kasus pariwisata di Parang Gupito, Kasus Majalengka, kasus Sumenep.

Dalam semua kasus penggusuran yang terjadi, penduduk selalu memperlihatkan sikap mempertahankan tanah-tanah miliknya secara mati-matian. Untuk mau mengerti logika "para pembangkang" tersebut sangat sederhana, karena mereka memakai logika petani "Saya telah bertahun-tahun tinggal di tanah milik nenek moyang saya sendiri, mengapa tiba-tiba saya harus pindah dengan alasan yang tidak jelas dan kurang saya mengerti?" Mungkin benar, jargon-jargon pembangunan yang selama ini didengung-dengungkan oleh pemerintah terlalu abstrak untuk bisa dimengerti oleh *wong cilik*. Atau sebaliknya, pembangunan yang direkayasa secara sentralistis tersebut tidak pernah melibatkan partisipasi dan kepentingan masyarakat setempat.[1] Sehingga ketika pelaksanaan pembangunan

[1] Kepentingan umum" seringkali justru mengorbankan kepentingan "umum" yang terkena, karena "umum" yang diuntungkan oleh adanya proyek seringkali berbeda dengan "umum" yang tertimpa proyek. Pihak yang lebih dominan, seringkali memaksakan pengertian "umum"nya kepada pihak yang lemah. Dengan demikian nilai-nilai "kepentingan umum" yang dipakai adalah nilai-nilai milik yang kuat (baca: Penguasa).

dimulai yang terjadi adalah kebingungan, sikap enggan, bahkan sikap menolak dari kelompok masyarakat yang merasa dirugikan oleh adanya proyek pembangunan tersebut.

Model-model pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat mengakibatkan rakyat sekedar menjadi obyek. Dalam kasus Kedung Ombo, rakyat diminta agar pindah dari tanah-tanah miliknya yang akan dipakai untuk keperluan proyek. Mereka tidak punya pilihan lain, kecuali harus bertransmigrasi atau pindah ke tempat pemukiman baru yang telah disediakan Pemda. Rakyat tidak diberi kesempatan untuk menawar atau mewakili diri mereka dalam proses musyawarah, karena langsung disodori surat pernyataan kesediaan menerima ganti rugi uang sebesar yang telah ditetapkan dalam SK Gubernur. Dengan demikian rakyat Kedung Ombo langsung disodori dengan cetak biru proyek yang telah jadi.[2]

Tidak dilibatkannya masyarakat setempat secara dini ini menjadi salah satu sebab munculnya pembangkangan orang-orang Kedung Ombo yang bertekad tidak akan pindah Terutama kelompok orang berusia lanjut yang merasa harga dirinya diinjak-injak. Lihat saja bagaimana orang-orang Kedung Ombo menolak kehadiran Tim Pembebasan Tanah yang datang untuk mengumpulkan data pemi-

[2] Contoh lain adalah alasan perlunya Program KB Nasional yang dikatakan pemerintah akan menyebabkan sedikitnya sekolah yang diperlukan, makin rendahnya ongkos-ongkos pemerintah, makin sedikitnya mulut yang harus disuapi, mengurangi pengangguran dst.nya, tetapi tidak pernah ada alasan yang terarah kepada kemajuan atau emansipasi rakyat. Dalam pelaksanaannya, untuk mengejar target para wanita usia subur dipanggil oleh lurah (militer) untuk dipasangi IUD oleh regu-regu keliling yang mengunjungi desa demi desa, sehingga muncul istilah "Ibu-ibu sudah dispiralkan". Demikian juga dengan program BUUD-KUD, yang selain memberi tambahan pekerjaan dan penderitaan kepada rakyat, ternyata membuat harga beras semakin melonjak. Lihat: Niels Mulder, ***Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa***, PT Gramedia, Jakarta, 1984, hal 106.

likan tanah, bangunan dan *karangkitri* milik penduduk. Namun pemerintah bukannya kemudian mencoba memperbaiki keadaan dan melakukan pendekatan kepada penduduk. Malah aparat melakukan intimidasi dan melemparkan berbagai tuduhan seperti "anti Pancasila" atau "Penghambat Pembangunan". Beberapa pimpinan rakyat Kedung Ombo justru ditangkapi dan dikenai "proses pembinaan" di kantor Polsek, Koramil, Polres atau Kodim, yang secara tidak langsung merupakan sebuah ancaman mengerikan bagi orang desa.[3]

Dengan demikian apa yang menimpa orang-orang Kedung Ombo yang memilih terus bertahan meskipun harus terlunta-lunta, bukan sepenuhnya kesalahan atau kebodohan mereka. Tapi merupakan kesalahan pemerintah dan aparat-aparatnya yang bukannya memberikan penerangan atau menyediakan alternatif pemukiman dengan tanah yang memadai bagi seorang petani tapi malah mengejar-ngejar, memberi cap PKI kepada orang-orang yang tidak sependapat dengan pemerintah. Atau mempertentangkannya dengan Pancasila sebagai sebuah ideologi negara.

Tapi juga harus dimengerti, bagaimana aparat desa dan keamanan setempat mendapat tekanan dari pejabat di tingkat lebih atas, sehingga dalam mengejar target waktu dan jumlah tanda tangan/cap jempol berbagai cara dilakukan oleh aparat yang dikemudian hari oleh pemerintah dianggap sebagai oknum. Untuk mengejar target jumlah penduduk yang bersedia menerima ganti rugi. Para

[3] Bagi kebanyakan orang-orang desa di Indonesia, khususnya Jawa, "dunia luar" masih merupakan tempat yang berbahaya dan Kodim merupakan sumber bahaya yang nyata, setidak-tidaknya semenjak tahun '65 di mana ada banyak orang yang diKodimkan karena dituduh terlibat PKI dan banyak yang tidak pernah pulang kembali. Lihat : R. William Liddle, Evolusi dari Atas: Pemimpin Nasional & Pembangunan Daerah Di Indonesia dalam Sartono Kartodirdjo, Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial, LP3ES, 1984.

aparat menghalalkan segala cara Termasuk dengan memanipulasi daftar hadir menjadi daftar kesediaan menerima atau membayar orang untuk mengambil ganti rugi penduduk yang membandel.

Begitu pula ketika ada kelompok masyarakat mencoba membantu orang-orang yang bertahan di daerah genangan. Niat baik mereka langsung ditolah oleh pemerintah dan malah dicurigai sebagai pencari popularitas murahan, mau mengacau, memanas-manasi petani atau sebagai ektremis yang mencoba membantu sisa-sisa PKI yang selama ini telah menghasut penduduk dan memojokkan pemerintah. Begitu gampang membuat ciut nyali masyarakat yang tadinya menggebu-gebu ingin membantu penduduk Kedung Ombo dengan menyangkut-pautkannya dengan ideologi. Penduduk Kedung Ombo yang tidak mau pindah dari tanahnya dianggap sebagai penganut ideologi komunis yang di masa lalu selalu mempersoalkan tanah dan reformasi agraris. Dengan demikian, orang yang membantu penduduk yang bertahan di daerah genangan adalah orang yang membantu PKI. Sebuah penyederhanaan logika, yang ternyata cukup efektif. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan tujuan pembangunan yang salah satunya adalah berusaha meningkatkan dan melibatkan partisipasi rakyat.

Demikian juga dengan LSM, dianggap berpolitik karena mencoba mempermasalahkan hukum dan hak azasi yang tidak dihormati. Pos tempat penampungan barang-barang sumbangan untuk rakyat Kedung Ombo dikepung dan ditutup oleh petugas, seperti lazimnya tempat penyimpanan barang terlarang. Orang yang beritikad baik dicurigai, diawasi. Aparat pemerintah sepertinya menderita paranoid. Kelompok masyarakat yang ingin menyumbangkan bantuan untuk rakyat Kedung Ombo dianjurkan untuk menyerahkan barangnya kepada Departemen Sosial atau melaksanakan keinginannya ke Kayen, sesuai kebijakan pemerintah. Pemerintah berhak menentukan semua ukuran baik-jelek, benar-salah. Apa yang

terjadi di masyarakat sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah untuk menanganinya. Upaya dari pihak swasta, termasuk swadaya dari masyarakat dicurigai sebagai usaha menandingi pemerintah. Dengan demikian sentralisasi pembangunan yang berlangsung juga meliputi monopoli penafsiran nilai-nilai normatif.

Apabila dilihat lebih lanjut, tampak apa yang telah terjadi di Kedung Ombo bertentangan dengan tujuan pembangun an yang pernah dirumuskan sebagai Trilogi Pembangunan dalam GBHN rumusan MPR 1978. Di mana pembangunan merupakan upaya untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hasil-hasil pembangunan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan lahir dan batin ternyata tidak dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata.

Kasus pembangunan Waduk Kedung Ombo akhirnya berhasil menelanjangi dan membuat transparan sebagian sistem serta mekanisme politik yang ada di Indonesia saat ini, di mana banyak lembaga-lembaga yang tidak fungsional sebagai mestinya. Para wakil rakyat hanya bingung, merasa terjepit seperti kue serabi dan tak mampu melakukan apa-apa. Fungsi kontrol macet. Di saat-saat genting, di mana peranan partai politik dibutuhkan ternyata tidak muncul uluran tangan dari satupun partai politik yang lebih disibukkan dengan perti kaian interennya. Artinya, rakyat hanya mendapat perhatian sekali dalam lima tahun, yaitu pada saat menjelang pemilihan umum di mana suara-suara mereka saling diperebutkan untuk memenangkan kursi.[4] Kontrol terhadap pers begitu kuat, cukup dengan

[4] Di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen mayoritas penduduknya adalah orang-orang Marhaenis yang memasang gambar foto Almarhum Soekarno di hampir setiap rumah-rumah mereka. Pada Pemilu tahun 1987 kebanyakan penduduk Miri beralih menjadi Golkar dan untuk pertama kalinya Golkar merebut kemenangan secara mutlak di kecamatan tersebut. Namun kemudian, ternyata rakyat ditekan oleh orang-orang yang pernah didukungnya. Lihat: LPTP

mengangkat gagang pesawat telpon, seseorang yang menga-ku sebagai aparat keamanan atau pejabat telah mampu menimbul-kan kecemasan pihak pengelola pers. Apa yang pernah dikatakan budayawan Mochtar Lubis mungkin ada benarnya :

> "Banyak masalah mendasar kita hadapi dewasa ini. Kita menempuh jalan sesat sudah cukup lama. Keadaan sekarang tidak menentu, mengambang tidak karuan. Yang kita rasakan saat kini antara lain adalah tidak sesuainya apa yang dikatakan dengan apa yang jadi kenyataan. Jika kita dengarkan pidato para pemimpin pemerintah kita, rasanya jelas apa yang dikatakan. Tak satupun isi pidato itu yang bertentangan dengan keinginan kita, baik tentang Pancasila, hak azasi manusia, masalah pemerataan, demokrasi dan sebagainya. Hanya saja, yang dikatakan dalam pidato tak kelihatan dalam praktek. Bahkan kita merasakan bahwa hak-hak kita sebagai warga negara -yang dijamin UUD- tidak dilaksanakan dengan baik."[5]

Perekayasaan pembangunan secara sentralistik membuat kebijakan yang dihasilkan bersifat *"top-down"*. Aparat daerah yang seharusnya lebih mengerti situasi dan bisa langsung berhadapan dengan rakyat, seringkali bersikap "tinggal menunggu" juklak (petunjuk pelaksanaan) atau juknis (petunjuk teknis) dari pusat, yang sesuai dengan petunjuk "Bapak ......". Dengan demikian, di desa

dan Pusat Penelitian UNS, Laporan Penelitian Aksi Restrukturisasi Sosial Pada Masyarakat Di Sekitar Genangan Waduk Kedung Ombo, Surakarta, 1989. Begitu pula dengan penduduk Kemusu yang pernah membantu para Jurkam Golkar pada saat menjelang Pemilu 1982, KTPnya di cap ET gara-gara menolak menerima uang ganti rugi. Dengan demikian rakyat cuma berfungsi sebagai pemberi suara (voter). Setelah Pemilu usai, rakyat tak diperlukan lagi. Lihat:Loekman Soetrisno, *Membahayakan, Kerjasama Massa Periferal Dengan Intelektual,* Prisma No. 11, LP3ES, 1985.

[5] Mochtar Lubis (dialog), *Rebut Kembali Rasa Percaya Diri*, Prisma No. 6, LP3ES, 1985.

seorang lurah hanya menjadi wakil pamong praja, bukannya menjadi wakil rakyat yang telah memilihnya. Sedangkan rakyat hanya menjadi sekedar alat mobilisasi.

Pengawasan kelancaran pelaksanaan pembangunan yang direkayasa secara sentralistik tersebut semakin sulit dengan adanya kecenderungan dari aparat di daerah yang sering membuat laporan-laporan ABS (Asal Bapak Senang) untuk menciptakan kesan tentang keberhasilan mereka dalam melaksanakan program pembangunan pemerintah.[6] Akhirnya antisipasi pemerintah pusat seringkali menjadi meleset, karena persoalan yang timbul di lapangan tidak dilaporkan secara benar.

Perekayasaan pembangunan yang sentralistik juga mengakibatkan pemerintah menjadi pihak yang paling dominan dan menentukan dalam berbagai kehidupan yang menyangkut ekonomi, sosial, budaya dan kehidupan bernegara.[7] Masyarakat hampir tidak diberi peluang. Dan secara birokratis pemerintah memonopoli semua pengambilan keputusan. Perberlakuan politik massa mengambang ikut pula menempatkan pemerintah menjadi satu-satunya "*patron*". Sedangkan pemerintah pada kenyataannya lebih menonjolkan peranannya sebagai stabilisator dibandingkan dengan tugasnya sebagai fasilitator.[8]

---

[6] Kesalahan cukup fatal yang terjadi dalam pembangunan Waduk Kedung Ombo adalah diputuskannya hanya sebuah pilihan (option) bagi penduduk yang tanahnya terkena proyek, yaitu bertransmigrasi. Keputusan tersebut diambil karena adanya sebuah laporan ke Bank Dunia di tahun 1983 yang menyatakan bahwa 75 persen penduduk menyukai dan setuju bertransmigrasi. Lihat kembali juga "*Manipulasi Pemberitaan*" pada Bab II.

[7] Mochtar Lubis, *op cit.*

[8] Tumbuhnya birokrasi sentralistis dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain implikasi dari diterapkannya pola pembangunan yang mengacu pada strategi pertumbuhan, adanya faktor budaya dan

Mungkin karena itu pula solidaritas sosial menjadi lemah. Komunikasi yang seharusnya terjalin di antara kelompok-kelompok masyarakat, menjadi beku. Pemerintah sepertinya sibuk berbicara sendiri dengan berbagai seruannya, namun tidak ada yang mendengarkannya. Tekanan dan usaha memaksakan ketertiban, membuat rakyat menarik diri ke dalam lingkungan loyalitas dan kepercayaan yang malahan semakin kecil. Apa yang dilakukan dan diprakarsai kelompok di luar pemerintah diabaikan begitu saja, atau malah dicurigai, sehingga timbul apatisme dan sikap acuh tak acuh bahkan kekhawatiran pada rakyat. Para kritisi dan penggerak alternatif bagi jalan pembangunan menjadi takut dan bungkam, karena ancaman dan tuduhan yang berlebih-lebihan sebagai penghambat atau penentang pembangunan. NU (Nahdatul Ulama) yang merupakan kelompok Islam dengan massa terbanyak telah menarik diri dari kehidupan politik. Langkah NU tersebut merupakan gejala umum dari kelompok-kelompok yang merasa tidak ada artinya terlibat dalam pembangunan, yang kemudian memilih lebih baik menarik diri dan menjadi penonton saja.

Organisasi-organisasi formal juga lumpuh. Partai politik yang dianggap bisa tampil sebagai kekuatan oposisi digembosi. Pemberlakuan peraturan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus)

---

sejarah kekuasaan yang berkonsep Jawa, serta dominasi peran militer dalam kegiatan politik dan ekonomi yang telah menciptakan birokrasi militer. Lihat :Yunida Pangastuti, *Birokrasi Sentralistis Dan Faktor-faktor Penyebabnya, Sebuah Ilustrasi Pembangunan Waduk Kedung Ombo,* Kritis No. 1 Th. IV, Juli 1989. Hal yang lain adalah keberhasilan pemerintah membuktikan bahwa pernah ada ancaman terhadap kekuasaan negara yang menjadi legitimasi diberikannya wewenang yang besar kepada pemerintah untuk menjaga stabilitas. Diperbesarnya wewenang alat-alat pemerintah ini memungkinkan negara untuk turut campur dalam segala segi kehidupan kemasyarakatan. Lihat: Jan Breman, *Rezim Baru di Asia: Negara Lembek Dalam Peralihan Menjadi Negara Kuat,* Prisma No. 3, LP3ES, 1981.

telah membuat kegiatan para mahasiswa yang dulunya kreatif-inovatif menjadi rekreatif-karitatif. Hanya organisasi-organisasi massa yang para pengurusnya didrop dari pusat yang masih berjalan, meskipun tertatih-tatih dan tidak mempunyai basis massa. Orang-orang yang terlibat pada akhirnya sebagian besar adalah orang-orang yang sekedar mencari nilai tambah untuk mencapai kedudukan tertentu yang lebih tinggi. Cetak biru gerakan solidaritas sosial yang sebenarnya produk pemerintah sama sekali tidak mengakar di masyarakat dan lebih mirip sebuah pameran rasa kasihan dari kelompok tertentu terhadap orang-orang miskin dan cacat. Kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk menolong orang-orang miskin dan cacat malah mengesankan sekedar "pesta" atau kosmetik saja, tanpa dilandasi oleh komitmen politik. Departemen Sosial yang seharusnya mengambil peran utama, malah sibuk mengurusi undian berhadiah SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah). Di kampung dan di desa masyarakat merasa tidak butuh organisasi-organisasi yang kehadirannya seringkali dipaksakan. Kalaupun rakyat tidak menentangnya, semata-mata karena adanya sebuah organisasi ada kemungkinan mereka akan mendapatkan dana dan bantuan lain dari pusat.[9]

Akhirnya wajar kalau pembangunan eksklusif yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat akan memunculkan pembangkangan-pembangkangan. Rakyat yang telah apatis dan pasrah akan selalu menjawab "ya" terhadap usul-usul dan rencana-rencana pemerintah,

[9] Makanya tak salah kalau muncul lecehan-lecehan terhadap program kegiatan dan organisasi formal tersebut seperti perkumpulan ibu-ibu PKK diakronimkan sebagai ***perkumpulan Perempuan Kurang Kerjaan***, KUD (Koperasi Unit Desa) disebut sebagai ***Kon Untal Dhewe*** (suruh telan sendiri saja), LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) dikatakan sebagai ***Lembaga Korupsi Masyarakat Desa***, program KB (Keluarga Berencana) disebut sebagai ***progam Kebiri***, dan seterusnya.

sambil secara pasif menolak menjalankan perintah. Dan dalam penolakan itulah dapat ditemukan sisa-sisa terakhir partisipasi yang sebenarnya, yaitu ketidaksetujuan secara sembunyi-sembunyi. Rakyat yang tidak mempunyai keberanian untuk mengungkapkan ketimpangan yang terjadi menyebabkan proses interaksi menjadi semu dan tertutup. Untuk mengungkapkan ketidakpuasan yang ada, rakyat kemudian berbicara menurut bahasanya sendiri yang berupa aksi-aksi mogok kerja, merusak/membongkari kembali bangunan yang telah jadi, atau tidak menghadiri undangan pertemuan.[10] Dalam kasus Kedung Ombo, penduduk di wilayah Sragen dan Boyolali yang terpaksa (baca : dipaksa !) menerima ganti rugi ternyata juga memilih terus bertahan di daerah genang-an yang telah menjadi beberapa pemukiman liar. Mereka terbebas dari ikatan-ikatan birokrasi desa, karena lurah, ketua RT dan organisasi-organisasi 'bentukan pemerintah' lainnya telah 'hilang' dan bubar.

Tidak terwakilinya kebutuhan rakyat miskin dalam penyelenggaraan pembangunan seringkali menimbulkan penafsiran negatif terhadap pembangunan itu sendiri. Arti lain bukan pensejahteraan tapi penyengsaraan dan pemiskinan. Dalam beberapa kasus, kerja go-tong royong secara sukarela yang harus dilakukan oleh orang-orang desa yang kurang makan atas nama pembangunan membuat rakyat bernostalgia tentang kembalinya jaman Jepang di mana rakyat harus ikur ***romusha*** atau kembalinya jaman ***cultuur stelsel*** di mana rakyat diwajibkan menanam tumbuhan tertentu untuk disetorkan kepada perusahaan-perusahaan Belanda. Bahkan sekarang ada

[10] LPTP dan Pusat Penelitian USN, ***op cit.*** Baca juga Hotman M Siahaan, ***Dinamika Masyarakat Desa Terhadap Kekuasaan***, Kompas 23 Maret 1989. Hotman menilai penduduk Kedung Ombo yang tidak berdaya berhadapan dengan struktur dan kekuasaan yang menghimpitnya, melakukan pembelotan kultural dengan cara bertahan di daerah genangan.

anggapan bahwa hama yang ditakuti petani dewasa ini bukan lagi tikus, ular sawah, burung gelatik atau wereng dan kutu loncat, melainkan 'mesin pembangunan' yang bukan hanya menghabiskan tanaman saja tetapi juga tanah-tanah milik petani. Anggapan seperti ini tentunya merugikan pemerintah sendiri.

Serba Terburu-buru ban Terlalu Yakin

Karena dikejar-kejar target waktu, kemungkinan membengkaknya biaya pembangunan dan ancaman mundurnya salah satu pihak donor apabila pelaksanaan pembangunan waduk berlarut-larut, maka pemerintah akhirnya membuat beberapa kesalahan dengan memaksakan beberapa kebijakan tanpa adanya fleksibilitas sesuai dengan persiapan yang telah ada. Pembukaan lahan di Muko-muko belum dikerjakan, sarana transportasi juga belum memadai ketika orang-orang Kedung Ombo telah diberangkatkan bertransmigrasi. Hal ini menambah citra negatif transmigrasi di mata masyarakat dan penduduk Kedung Ombo. Apalagi ada kesan pemerintah tidak menganggap persoalan tersebut sebagai sebuah persoalan yang cukup serius dan hanya berkonsentrasi pada upaya pengosongan areal genangan. Sepertinya pemerintah tidak mau mencoba kembali memberikan penyuluhan secara simpatik dan mengajak para wakil penduduk dari setiap desa di daerah genangan untuk meninjau dan menyaksikan sendiri pemukiman transmigrasi di Muko-muko. Terjadi juga kekacauan koordinasi antara wilayah penerima dan wilayah pengirim. Akibatnya nasib penduduk yang telah mendaftarkan diri untuk bertransmigrasi menjadi terkatung-katung.[11]

[11] Koordinasi yang kacau tersebut mengakibatkan tenggang waktu antara pemberitahuan dan saat pemberangkatan menjadi terlalu pendek. Dalam situasi tersebut penduduk terpaksa menjual barang-barangnya dengan harga sangat murah. Namun yang terjadi

Aparat yang bekerja di calon daerah genangan tidak mempunyai bekal pengetahuan dan kecakapan yang cukup memadai untuk bisa melakukan pendekatan persuasif serta simpatik kepada penduduk. Mereka lebih banyak mengandalkan kekuasaan dan kedudukan yang dimilikinya sebagai "orang pemerintah". Untuk mengejar target waktu, semua cara akhirnya dihalalkan untuk dipakai, termasuk digunakannya cara-cara kekerasan. Hak azasi tidak dihormati lagi, beberapa peraturan dan perundang-undangan yang seharusnya dijadikan prosedur standar ternyata diabaikan sama sekali. Hasil penelitian dan analisa dampak sosial beberapa institusi, yang juga memberikan alternatif pemecahan serta berbagai rekomendasi, tidak banyak dijalankan.

Persiapan alih profesi penduduk yang bakal bertempat tinggal di sekitar daerah genangan sama sekali juga belum dilakukan. Penaburan benih ikan baru dilakukan oleh Keluarga Dirjen Pengairan pada tanggal 14 Agustus 1989 lewat program bakti sosial, setelah Pemda Jateng memperbolehkan penduduk menempati tanah milik Perhutani. Pemerintah juga tidak melakukan upaya untuk mengadaptasikan penduduk dengan lingkungan air. Sarana-sarana umum seperti transportasi air juga tidak dipersiapkan secara dini.[12]

kemudian, keberangkatan diundur sampai beberapa bulan. Penduduk yang telah tidak mempunyai barang-barang lagi, akhirnya harus menginap di rumah saudara/tetangga, sedangkan uang ganti rugi telah habis untuk mengongkosi hidup sehari-hari. Lihat: *LPU UKSW, Perkembangan Resettlement Penduduk Waduk Kedung Ombo*, 23 Maret 1989 dan juga *LPTP dan Pusat Penelitian UNS, op cit.*

[12] Secara resmi di daerah genangan hanya tersedia dua perahu karet milik Satgaspam 0724. Itupun kemudian salah satunya menganggur, karena motornya pecah gara-gara tersangkut batang pepohonan yang berada di bawah permukaan air. Sumber: Dokumentasi KSKPKO, 13 Mei 1989.

Sama sekali tidak ada upaya penyelamatan barang-barang atau monumen-monumen sejarah yang sebenarnya punyai arti besar bagi perkembangan arkeologi dan ilmu sejarah di Indonesia. Tempat dan makam-makam yang dianggap keramat oleh penduduk setempat sama sekali tidak diurusi oleh pemerintah yang hanya memberikan sejumlah uang ganti rugi yang relatif kecil dan tidak cukup untuk membiayai pemindahannya. Hal itu oleh kaum berusia lanjut setempat dianggap sebagai sebuah penghinaan.

Dalam pelaksanaan pembangunan Waduk Kedung Ombo, sepertinya pemerintah tidak memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki cara-cara pendekatan yang selama bertahun-tahun dilakukan. Pemerintah juga tidak mencoba menunda jadwal peresmian penggenangan sampai semua permasalahan ganti rugi terselesaikan secara tuntas dan daerah genangan betuk-betul telah kosong.[13] Pemerintah justru berkeyakinan bahwa penduduk yang bertahan di daerah genangan akan segera menyerah dengan adanya kepungan air, segera setelah peresmian penggenangan dilaksanakan.

Sikap terlalu yakin diri yang mungkin muncul karena pemerintah terlalu mendominasi semua sektor kehidupan bernegara tersebut, akhirnya menjadi bumerang yang menghantam balik pemerintah. Sikap yang terlalu yakin dan bersike-ras kepada kebijakan transmigrasi terus ditunjukkan oleh pemerintah sampai dengan minggu-minggu terakhir bulan April 1989. Kecaman, koreksi dan keprihatinan masyarakat di dalam dan di luar negeri yang frekuensinya memuncak antara bulan Januari hingga April 1989 diacuhkan begitu

---

[13] Bagi Pemda Jateng, proyek Waduk Kedung Ombo dianggap sebagai ujian di mana prestise dan kewibawaan dipertaruhkan (lihat: Suara Merdeka, 22 Juni 1988). Pemerintah sama sekali tidak berniat merubah keputusan atau menaikkan harga ganti rugi (lihat: Suara Merdeka, 27 Pebruari 1989) dan hanya memprioritaskan target jumlah penerima ganti rugi (lihat: Kompas, 5 Juli 1987).

saja.[14] Pemerintah dalam bahasanya, menganggap solidaritas yang ditunjukkan masyarakat cuma merupakan gangguan dan belum merupakan ancaman. Dengan enak dan mudahnya, pemerintah malah mencoba menyudutkan orang-orang dan kelompok yang sebenarnya justru mencoba memberikan peringatan kepada pemerintah.[15]

Sikap terlalu yakin ini akhirnya justru harus dibayar mahal. Secara materi, terjadi pembengkakan biaya yang harus dipikul pemerintah. Secara "moril" pemerintah harus menanggung rasa malu, karena terpaksa harus "menjilat air ludah"nya sendiri. Kapling-kapling tanah yang telah dipersiapkan untuk 400 KK di Kayen ternyata mubasir, karena kekurangan peminat. Pembebasan tanah milik Perum Perhutani untuk daerah pemukiman memakan biaya cukup besar yang mungkin tidak pernah diestimasi oleh pemerintah sebelumnya. Demikian pula dengan tawaran baru - tawaran baru untuk membujuk agar penduduk bersedia pindah yang sebelumnya tidak pernah tercantum dalam anggaran proyek.

---

[14] Di luar negeri, Tapol merupakan salah satu lembaga yang paling intensif melakukan upaya advokasi terhadap rakyat Kedung Ombo. Tapol mempersalahkan Bank Dunia yang sebagai penyandang dana terbesar Proyek Waduk Kedung Ombo dianggap turut bertanggung jawab dan tidak boleh begitu saja cuci tangan atas keadaan yang terjadi di Kedung Ombo. Pada tanggal 14 Januari 1989, Tapol mengirimkan sebuah surat protes keras kepada Presiden Bank Dunia, Barber Conable dan dilanjutkan dengan sebuah surat terbuka. Tapol juga menghimbau setiap orang atau kelompok yang prihatin dengan kasus Kedung Ombo agar ikut memberikan tekanan kepada Bank Dunia. Sangat menarik apabila mengikuti surat-menyurat antara Tapol dan pimpinan Bank Dunia yang dimulai semenjak 29 Desember 1988, yang kemudian diikuti oleh beberapa LSM di luar negeri.

[15] Orang-orang yang berniat membantu penduduk Kedung Ombo dituduh hanya sekedar mencari popularitas murahan, WTS (*Waton Suloyo*), WTA (*Welas Tanpo Asih*) dan lain-lain.

Biaya yang ditanggung pemerintah masih akan terus membengkak karena mau tidak mau, dengan masih banyaknya orang-orang yang masih bertahan di dae-rah genangan pemerintah harus mengupayakan penyelesaian yang cukup memuaskan. Bila tidak mungkin akan muncul konflik baru. Sementara itu, aksi solidaritas yang ditunjukkan masyarakat di dalam dan di luar negeri, termasuk aksi-aksi mahasiswa, membuat pemerintah terpaksa memberikan tanah kepada rakyat Kedung Ombo yang selama tujuh tahun (terhitung semenjak tahun 1982) dipaksa dengan berbagai cara agar "ambil dan pindah".

Dengan berubahnya kebijakan yang selama bertahun-tahun diterapkan secara kaku, pemerintah secara implisit memberikan pengakuan bahwa apa yang diyakini dan dikerjakan di Kedung Ombo selama ini salah. Pandangan mata dunia internasional terhadap Orde Baru tentunya juga akan terpengaruh oleh pembangunan Waduk Kedung Ombo yang ternyata tidak menghormati hak-hak azasi. Hal tersebut tentunya juga akan mempengaruhi penilaian negara-negara donor dalam pemberian bantuan dana, yang nantinya akan berpengaruh kepada kelajuan pembangunan di Indonesia.

Sikap tak acuh terhadap setiap umpan balik masyarakat, yang sekali lagi akibat terlalu yakin diri, akhirnya membuat pemerintah tidak mampu dan tidak cukup peka untuk membaca atau mendeteksi fenomena serta gejolak yang tengah terjadi di masyarakat. Cara penanganan pemerintah terhadap aksi-aksi mahasiswa yang salah, akhirnya justru akan menimbulkan kebencian kaum muda terhadap ABRI. Hal ini tentunya akan merusak upaya pembentukan pengertian manunggalnya ABRI - Rakyat yang selama ini dikerjakan pemerintah lewat .paberbagai kegiatan yang bertujuan merebut simpati rakyat seperti AMD (ABRI Masuk Desa) dan sebagainya. [16] Belum lagi friksi-friksi di antara rakyat dan aparat pelaksana pembangunan

ataupun di dalam tubuh pemerintah sendiri yang akan dapat mengurangi konsentrasi pelaksanaan cita-cita pemba- ngunan di Indonesia.

Tidak Sesuai Dengan Prosedur Standar Menurut Peraturan Mendagri No. 15 Tahun 1975

Dalam pelaksanaan pembangunan Waduk Kedung Ombo sebetulnya ada dua prosedur standar yang harus dipergunakan sebagai acuan oleh aparat pemerintah, yaitu Permendagri No. 15 Th. 1975 sebagai peraturan perundang-undangan yang telah ada.[17] Serta Petunjuk Teknis Bank Dunia No. 80 yang menjadi pedoman kebijakan bagi semua proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia.

---

[16] Ukuran yang dipakai adalah nilai-nilai di tahun 1945 yang agaknya telah bergeser, karena di tahun 1945 rakyat dan tentara bahu-membahu menghadapi musuh yang sama, sama-sama menderita, sama-sama merasa terancam oleh suatu kekuatan yang lebih besar dan menindas. Sedangkan sekarang, kondisi dan status sosial tentara jauh lebih baik dibandingkan dengan rakyat kebanyakan orang-orang desa. Seringkali kehadiran tentara menimbulkan tekanan baru bagi penduduk desa.

[17] Dalam hal ini, Peraturan Mendagri No. 15 Th. 1975 sengaja dipakai sebagai acuan perundang-undangan yang dianggap telah mapan, meskipun secara perundang-undangan sebetulnya bisa dianggap bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) yang oleh beberapa pihak dianggap 'berbau kiri'. Dalam UU Pokok Agraria No. 5 Th. 1960 yang sebetulnya masih merupakan landasan hukum dan politik pertanahan di Indonesia, tidak dikenal adanya pembebasan tanah malahan secara tegas menolak konsep negara sebagai pemilik tanah. Istilah pembebasan tanah baru dipergunakan dalam Permendagri No. 15 Th. 1975. Sebenarnya masih banyak UUPA, namun yang berkaiatan langsung dengan kejanggalan proses pembebasan tanah di Kedung Ombo adalah Permendagri No. 15 Th. 1975. Acuan lain yang tidak dipatuhi adalah UU No. 4 Th. 1982 tentang pokok pengelolaan lingkungan hidup serta Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang analisa dampak lingkungan.

Permendagri No. 15 Tahun 1975 dan No. 2 Tahun 1976 yang mengatur tentang ketentuan tata cara pembebasan tanah untuk mengurus pembebasan tanah yang akan dipakai untuk keperluan atau kepentingan umum. Tugas panitia yang keanggotaannya terdiri dari para pejabat Pemda Tingkat II, Kepala Kantor Ipeda/Ireda, pejabat dari instansi yang memerlukan tanah, Kepala Dinas PU Pemda Tingkat II, Kepala Kecamatan. Kepala Desa, Pejabat Kantor Sub Direktorat Agraria Pemda Tingkat II dan diketuai oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Pemda Tingkat II setempat tersebut bertugas antara lain : [18]

> Mengadakan inventarisasi serta penelitian terhadap keadaan tanah, tanam-tanaman dan bangunan yang ada di atasnya. Panitia juga bertugas untuk mengadakan perundingan dengan para pemegang hak atas tanah dan bangunan/tanaman, menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak, Membuat berita acara pembebasan tanah disertai fatwa atau pertimbangannya. Menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak.

Prosedur terpenting selanjutnya yang berkaitan dengan pembebasan tanah adalah penentuan besar ganti rugi. Dalam melakukan penaksiran, Panitia Pembebasan Tanah harus mengadakan musyawarah dengan para pemilik hak atas tanah dan benda yang berada di atasnya berdasarkan harga umum setempat, dengan memperhatikan lokasi dan faktor-faktor strategis lain yang dapat mempengaruhi harga tanah.[19]

---

[18] Permendagri No 15 Th. 1975, pasal 2 dan pasal 3. Untuk lebih jelasnya baca G Kartasapoetra, RG Kartasapoetra SH, Ir AG Kartasapoetra, *Masalah Pertanahan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta 1986, hal. 132.

[19] *Ibid.*, pasal 6.

Dalam kasus Kedung Ombo, Gubernur Tk I Jateng langsung mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan besarnya ganti rugi tanpa melewati proses musyawarah dengan penduduk. Lampiran surat keputusan Gubernur Jateng itu juga tidak menyertakan keterangan tempat pemukiman baru bagi penduduk kecuali rincian harga ganti rugi. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 13 Permendagri No 15/1975.

Dalam beberapa pertemuan di tahun 1982 yang diadakan di balai desa-balai desa, antara lain di Nglanji Kecamatan Kemusu, Lurah hanya memberikan penjelasan tentang rencana proyek Waduk Kedung Ombo. Pertemuan hanya dihadiri oleh aparat dari Kecamatan dan Kabupaten. Selama pertemuan berlangsung tidak ada acara perundingan mengenai ganti rugi dan pemukiman kembali penduduk yang terkena proyek. Dan setelah itu tidak ada pertemuan lanjutan lagi. [20] Kecuali pemaksaan-pemaksaan Panitia kepada penduduk agar menerima ganti rugi uang. Penyuluhan yang dilakukan oleh sebuah tim gabungan di beberapa desa, tidak hanya melakukan pe-maksaan, tapi juga menakut-nakuti dengan membacakan sebuah undang-undang subversif.

Sebenarnya Permendagri No 15/1975 sebagai suatu prosedur standar pembebasan tanah mempunyai banyak kelemahan, karena dalam susunan panitia pembebasan tanah, anggotanya *notabene* semua merupakan unsur pemerintah. Kepala Desa yang juga sudah dipegawainegerikan tentunya akan lebih mewakili kepentingan pemerintah atau pihak pembebas. Dengan demikian tidak ada lagi orang yang mewakili pemegang hak dalam proses perundingan penetapan besar ganti rugi. Dialog atau negosiasi seringkali dikuasa-

---

[20] Nursyahbani Katjasungkana, *Lembaga Pembebasan Tanah Dalam Tinjauan Hukum dan Sosial*, Prisma No. 4, LP3ES, 1989.

kan kepada pihak ke tiga, sehingga akhirnya besar uang ganti rugi yang dibayarkan oleh pembangun/pembebas tanah berbeda dengan yang diharapkan dan diterima oleh penduduk. Sementara pihak ke tiga dan para spekulan mendapat keuntungan, antara pembangun dan penduduk terjadi perselisihan. Dan biasanya pihak penduduk yang gampang kebagian salah.[21]

Dalam mekanisme musyawarah seharusnya diberlakukan prinsip kesetaraan, terutama dalam proses tawar-menawar besar ganti rugi. Namun pada kenyataannya, prinsip kesetaraan ini sulit ditemukan. Salah satu pihak, dalam hal ini adalah pihak yang memerlukan tanah sering memiliki sumber daya yang berlebih dan akses politik yang lebih dominan. Pihak ini biasanya mengandalkan predikat membawa "misi yang lebih besar", yang pada akhirnya justru sering dijadikan dalih saja. Semakin besar nilai ketidaksetaraan akan diikuti dengan semakin mengecilnya nilai musyawarah. Semakin kuatnya posisi salah satu pihak, akan semakin besar kemung.pakinan terjadinya dominasi oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah, sehingga musyawarah pada prakteknya lebih sering menjadi penyuluhan atau pengarahan. Mereka yang tidak setuju dengan pengarahan tersebut dianggap sebagai pembangkang atau penentang kebijakan pemerintah.[22]

[21] Risfan Munir, *"Ganti Rugi Pembebasan Lahan"*, Kompas 12 Mei 1989.

[22] Eko Nuryanto SH dan Dadang Tri Sasongko SH, *"Tahapan Kritis Dalam Pembebasan Tanah"*, Surya 16 Desember 1989. Contoh yang cukup mencolok adalah kasus Belangguan, Situbondo di mana tanah milik penduduk dibebaskan untuk areal Pusat Latihan Tempur Marinir TNI AL dan tanah di Majalengka, Jabar yang diakui penduduk sebagai miliknya secara turun-temurun yang akan dipakai untuk kepentingan TNI AU. Ratusan penduduk dari kedua daerah ini berbondong-bondong ke Jakarta untuk mengadukan nasibnya ke DPR dan Depdagri, karena merasa diteror. Ketika pulang dari Jakarta di antara mereka ada yang mendapat panggilan untuk menghadap ke Koramil. Di Belangguan penduduk banyak yang takut dan kemudian mengungsi masuk hutan bersama anak-anak mereka.

Panitia Pembebasan Tanah umumnya juga tidak mempertimbangkan lokasi dan faktor-faktor strategis lainnya. Panitia justru seringkali memakai harga dasar patokan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Seharusnya penduduk yang tanahnya akan dibebaskan telah mengetahui harga pasaran tanah di daerah sekitarnya yang akan berguna untuk membantu orang-orang desa dalam tawar-menawar dengan pihak pembeli.[23] Sehingga tidak terjadi penawaran secara sepihak yang terlalu rendah atau pembodohan oleh pihak pembeli yang punya status sosial lebih baik.

Mungkin selain pembenahan dan konsistensi pelaksanaan prosedur pembebasan tanah yang sesuai dengan Permendagri No 15 Th 1975, agaknya peraturan itu sendiri perlu ditinjau atau dicabut. Sebab ternyata hanya berpihak kepada pemilik modal atau pemerintah untuk mengambil alih tanah rakyat dengan mengatas namakan "kepentingan umum" atau "kepentingan pembangunan".

Menurut Petunjuk Teknis Bank Dunia No. 80

Petunjuk Teknis Bank Dunia No. 80 yang diterbitkan di tahun 1988 ini sebenarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari suatu petunjuk interen bagi staf Bank Dunia di bulan Pebruari 1980.

[23] Cara seperti ini diterapkan di Jepang. Sedangkan di Israel, semua harga tanah diterapkan secara administratif oleh pemerintah dengan ketentuan harga tanah di kota-kota baru lebih rendah daripada di wilayah perkotaan yang telah berkembang. Lihat: Patrick McAusian, Tanah Perkotaan Dan Perlindungan Rakyat Jelata, Gramedia, Jakarta 1986. Contoh pembelian tanah dengan harga yang sangat rendah terjadi di Wonogiri (bulan Juli 1989) di mana tanah rakyat dibeli dengan harga Rp 50,-/meter persegi oleh pihak swasta untuk dijadikan daerah wisata. Pembebasan tanah dilakukan dengan jalan

Pihak Bank Dunia memang mencoba membuat sebuah rumusan terpadu dalam menangani pemukiman penduduk yang terpaksa pindah karena tanahnya terkena proyek-proyek yang dibiayai Bank Dunia. [24] Sekaligus untuk membela secara lebih baik kepentingan penduduk yang terkena dampak negatip proyek Bank Dunia. Dengan menyadari banyaknya kesusahan dan penderitaan yang ditimbulkan oleh adanya pemindahan penduduk secara terpaksa, Bank Dunia sebenarnya telah mengajukan prasyarat pertama. Yaitu sedapat mungkin harus dihin-dari terjadinya pemindahan penduduk atau harus dilakukan upaya penekanannya serendah mungkin dan alternatif pembangunan lainnya harus dicari.

Penduduk yang tergusur oleh suatu proyek raksasa terpaksa melepaskan hak-hak mereka atas berbagai kekayaan tak bergerak selain rumah dan tanah seperti misalnya kesempatan-kesempatan ekonomi, sarana-sarana umum, tanaman yang telah siap panen, pepohonan dan lain-lain. Biasanya, berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur pencabutan hak-hak rakyat atas tanah atau benda lain demi kepentingan umum, digunakan untuk menentukan penilaian serta ganti rugi terhadap harta benda yang hilang. Namun undang-undang yang ada diakui Bank Dunia seringkali telah usang, atau peraturan pelaksanaannya kurang terinci, sehingga lebih sering mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat.[25] Karena tanpa tanah baru, biasanya mereka akan terdampar

penekanan yang melibatkan oknum-oknum setempat. Harga ganti rugi oleh pihak swasta yang akan membeli dianggap telah memadai. Kasus ini akhirnya berke-panjangan sampai sekarang.

[24] Michael M. Cernea, *Involuntary Resettlement in Development Project Policy Guidelines in World Bank - Financed Projects. The World Bank*, Washington DC, 1988. Buku ini telah selesai diterjemahkan oleh George Y. Aditjondro dan akan diterbitkan oleh YLBHI.

[25] Lihat kembali perangkat-perangkat lunak di bidang hukum tentang pembebasan tanah yang kurang memadai dan sudah

di perkampungan-perkampungan gelandangan yang kumuh, yang justru bertentangan dengan tujuan proyek pem-bangunan.

Dengan kesadaran itu, Bank Dunia menjalankan kebijaksan *tanah-diganti dengan tanah* kepada penduduk yang tanahnya diambil untuk proyek. Itu kalau prasyarat pertama tidak dapat dipenuhi. Pemberian ganti rugi dalam bentuk uang menurut Bank Dunia mempunyai tiga kelemahan. Pertama, prosedur ganti rugi biasanya mengacu pada nilai pasar yang berlaku, padahal kenyataannya perolehan dari para pemilik yang kaya akan dapat jauh melebihi nilai pasar tersebut. Kedua, berbagai jenis kekayaan tak berwujud nyata, yang sukar untuk dinilai dalam bentuk uang seperti kedekatan dengan kerabat, tempat ibadah atau tempat yang punya nilai-nilai budaya tertentu, kesempatan kerja dll. Ke tiga, modal produksi yang bagi kelompok orang miskin tidak bisa digantikan dengan barang pengganti yang nilainya sama.

Sebuah syarat penting yang harus dipenuhi dalam menjalankan kebijakan *tanah diganti tanah*, yaitu minimal mengembalikan taraf hidup penduduk yang telah dipindahkan pada tingkatan yang sama seperti sebelum proyek dibangun dengan memperhitungkan kenaikan taraf hidup penduduk yang mungkin terjadi. Dan sebisa mungkin harus diusahakan supaya para pemukim baru tersebut dapat berintegrasi di tengah-tengah penduduk lama. Baik secara ekonomis maupun sosial dan harus pula menyediakan kemungkinan-kemungkinan agar para pemukim baru tersebut nantinya dapat mapan dan mandiri dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Bank Dunia secara khusus mengharuskan agar penduduk

kadaluwarsa dibandingkan kasus-kasus tanah yang bermunculan dalam dekade 80an terakhir.

yang bakal tergusur dimintai pendapatnya sehubungan dengan aspek-aspek sosial dan ekonomi dari berbagai pilihan pemukiman kembali yang telah dirancang, karena keputusan yang diambil pemerintah akan sangat menentukan masa depan orang-orang yang tergusur. Pelibatan rakyat ini diperlukan untuk memperbaiki pengertian para perencana tentang kebutuhan pemukim, sumber-sumber daya mereka dan alternatif lain yang lebih dikuasai penduduk. Konsultasi dengan penduduk itu sendiri nantinya akan dapat menghindarkan kesalahan-kesalahan yang harus dibayar mahal, mengurangi keengganan penduduk untuk pindah, mengurangi perasaan penduduk yang merasa 'disingkirkan', memperpendek masa transisi dan mempercepat adaptasi dengan pemukim baru. Untuk itu penyebaran informasi tentang relokasi yang akan datang, tentang hak-hak para pemukim, prosedur ganti rugi, pilihan yang tersedia merupakan sebuah syarat mutlak bagi keikutsertaan para calon pemukim.

Begitu juga dengan penduduk asli yang akan ketempatan dan menjadi tuan rumah para pemukim baru. Peranan mereka harus disertakan, minimal dimintai pendapat. Hal ini untuk menghindari kemungkinan kecemburuan sosial dan sengketa pembagian sumber daya alam yang tiba-tiba menjadi terbatas karena harus dipakai bersama. Dengan demikian harus ada konsensus bersama antara ketiga pihak yang terlibat dalam proyek, yaitu kelompok masyarakat yang hendak dipindahkan, masyarakat asli yang akan menjadi tuan rumah dan pemerintah/pihak proyek.

Sekarang bagaimana dengan pelaksanaan pembangunan Waduk Kedung Ombo? Agaknya mulai dari awal pelaksanaan pembangunannya, apa yang terjadi di Kedung Ombo sudah *amburadul*. Prosedur pelaksanaan proyek sudah jauh berbeda dengan petunjuk Teknis Bank Dunia No. 80. Pemukiman kembali bukannya melibatkan partisipasi rakyat yang akan dipindahkan, apalagi konsesus berdasarkan musyawarah, tapi malahan rakyat dipaksa menerima

ganti rugi yang besarnya diputuskan secara sepihak oleh pemerintah. Dan ternyata kondisi penduduk yang tanahnya terkena proyek, baik yang berada di pemukiman baru maupun yang bertahan di daerah genangan bisa dikatakan belum sebaik keadaan dan taraf hidup sebelum ada pelaksanaan proyek. Bahkan bisa dikatakan muncul fenomena ketergantungan kepada pihak pemerintah, khususnya para penduduk yang berada di pemukiman baru disebabkan belum tersedianya lahan yang cukup memadai untuk diolah dan ditanami. Sedangkan mereka yang bertahan di daerah genangan malah tidak mempunyai apa-apa lagi. Mereka sepenuhnya menggantungkan diri kepada bantuan kelompok masyarakat serta LSM yang bersimpati kepada mereka.

Apa yang bisa dilakukan Bank Dunia sebagai pihak penyandang dana terbesar dalam pembiayaan pembangunan Waduk Kedung Ombo? Kelihatannya pihak Bank Dunia memang tidak bisa berbuat banyak seperti pengakuan dalam Petunjuk Teknis No.80 di mana seringkali prosedur yang secara khusus telah dirancang justru dilanggar oleh staf Bank Dunia sendiri, juga staf dari badan-badan negara peminjam. Ketika penyimpangan terjadi, justru yang dilakukan adalah mengkompromikannya dengan kebijakan Bank Dunia. Dalam kasus Kedung Ombo malah pimpinan Bank Dunia lebih banyak membela pemerintah Indonesia dibandingkan rakyat yang tergusur.

Bank Dunia sebetulnya bisa mempertegas perumusan dan pelaksanaan serta perjanjian hukum serupa di masa-masa mendatang terhadap negara peminjam sambil membantu keluarga-keluarga yang tergusur untuk menata hidup mereka kembali, membangun basis ekonomi mereka sampai mampu mandiri serta membangun kembali jaringan-jaringan kesetiakawanan sosial yang telah hancur. Tekanan-tekanan tertentu sebenarnya bisa diberikan oleh Bank Dunia.

Dalam kasus Kedung Ombo, ternyata Bank Dunia berangga-

pan transmigrasi merupakan sebuah alternatif valid. Dan apa yang telah dilakukan oleh Pemda Jateng dengan memberikan tanah milik Perhutani sebagai tempat pemukiman baru beserta fasilitasnya telah memadai. Bank Dunia tidak mencoba melihat bagaimana hancurnya kehidupan rakyat yang harus pindah, atau bagaimana prosedur-prosedur Bank Dunia sendiri ternyata dilanggar.Bank Dunia hanya melihat kasus Kedung Ombo dari belahan yang terjadi di wilayah Boyolali, sedangkan di wilayah Sragen dianggap menjadi otoritas pemerintah Indonesia sepenuhnya. [26] Sebuah sikap yang aneh. Apakah hal itu juga menyiratkan bahwa Bank Dunia ternyata tidak mengutamakan kepentingan orang-orang dari lapisan bawah dalam proyek-proyek yang dibiayainya.

Perlunya Demitologi Pembangunan Waduk Besar

Selama ini kegunaan dan keuntungan sebuah waduk selalu digembar-gemborkan oleh banyak pemerintah, sebagai bermanfaat bagi banyak orang. Seolah-olah sebuah waduk besar bisa mendatangkan kemakmuran, bisa meningkatkan pendapatan rakyat, dan sebagainya. Pemitologian manfaat pembangunan sebauh dam besar telah dimulai lewat kurikulum sekolah anak-anak tingkat usia sekolah dasar. Fungsi dam yang antara lain untuk irigasi, pembangkit listrik tenaga air, pengendalian banjir, perikanan, pariwisata dan penyediaan air mi-num telah menjadi hafalan yang sangat melekat kepada setiap anak sekolah. Demikian juga halnya dengan Waduk Kedung Ombo, yang selalu disebut-sebut mempunyai banyak manfaat yang akan

[26] Pandangan Bank Dunia ini tercermin dari surat pimpinan Bank Dunia untuk kawasan Asia, Russel J Cheetham kepada pimpinan INGI tanggal 15 Desember 1989. Bank Dunia berharap penyiapan tanah Perhutani untuk pemukiman penduduk bisa rampung pada awal tahun 1990 guna menuntaskan kasus Kedung Ombo.

dinikmati masyarakat luas dan karena itu pula 5.268 KK atau kurang lebih 30.000 jiwa harus merelakan tanahnya untuk kepentingan cita-cita luhur pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

Tapi sesungguhnya pada kenyataannya, fakta-fakta dan beberapa aspek yang menyangkut pembangunan sebuah waduk seringkali disembunyikan serta ditutup-tutupi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan waduk-waduk besar telah membuktikan hal yang sebaliknya dari apa yang selama ini dipropagandakan oleh banyak pemerintah. Antara lain kerusakan ekologi secara besar-besaran, penderitaaan rakyat kecil, munculnya wabah penyakit dan kemiskinan yang menimpa mereka yang justru seharusnya memperolah manfaat paling banyak dari sebuah proyek pembangunan.

Pembangunan waduk-waduk di dunia telah menggusur puluhan juta penduduk di dunia. Mereka yang kehilangan tempat tinggal dan tanahnya kemudian terlantar kebanyakan adalah orang-orang desa yang hidup sebagai petani tradisional di lembah-lembah yang cukup subur. Misalnya saja bendungan Aswan di Mesir telah menggusur lebih dari 100.000 jiwa, Waduk Yacyreta di perbatasan Argentina dan Paraguai menggusur 45.000 jiwa, Waduk Danjiangkao di Cina yang rampung pada pertengahan tahun 70an mencapai 383.000 jiwa, [27]Waduk Volta di Ghana menggusur 78.000 penduduk dari lebih 700 kota dan desa, Waduk Kianji di Nigeria sebanyak 42.000 jiwa, Waduk Karibia 50.000 jiwa, Waduk Keban di Turki 30.000 jiwa, Waduk Ubolratana di Thailand 30.000 jiwa dan proyek The Pa Mong di Vietnam telah mencabut 450.000 jiwa dari tempat tinggalnya.

Waduk terbesar yang sedang dibangun di Cina yaitu Waduk

[27] Michael M. Cernea, *op cit.*

Sanxia yang membendung sungai Yangtse akan menggusur sekitar tiga juta jiwa, dan menghabiskan dana sebesar 12 milyar dollar US. Rencana pembangunan Dam Tiga Ngarai di Cina menggusur 1.400.000 jiwa. Di Brasil, enam rencana proyek listrik-hidro diperkirakan akan menenggelamkan antara 91.000 - 351.000 hektar tanah-tanah suku Indian.[28]

Pengosongan tanah untuk pembangunan waduk dengan cara menggusur penduduk seringkali mengakibatkan kehancuran atau hilangnya sejarah dan kebudayaan sekelompok masyarakat yang tentunya tak dapat dinilai dengan uang. Proyek listrik-hidro Altamira di Brazil akan menyingkirkan 5.400 orang Indian dari lebih 10 komunitas yang tinggal di sepanjang Sungai Xingu, termasuk suku Xikrin, Asurini, Parcikana, Kurarao dan Kapayo yang sangat terkenal, termasuk juga Taman Nasional Xingu.[29] Dengan demikian budaya asli orang-orang Indian yang seringkali menjadi sumber penelitian para akademisi tersebut hancur bersamaan dengan tidak diberikannya tanah pengganti oleh pemerintah Brazil, tak ada lagi sisa tanah bagi komunitas Indian yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan "dunia lama"nya

Penutupan pintu waduk menyebabkan matarantai ekosistem terputus, serta hilangnya tanah dan kehidupan binatang liar di daerah hulu. Juga hilangnya garam mineral dan bebatuan akibat erosi di daerah hilir. Ada beberapa jenis binatang air yang tidak dapat lagi melakukan migrasi dari daerah hilir ke daerah hulu yang biasanya dilakukan pada musim-musim tertentu, karena adanya pintu waduk yang tingginya rata-rata mencapai 30 - 40 meter dan diperlengkapi oleh turbin air. Sebagai contoh adalah ikan-ikan Salmon di California yang tak bisa lagi menuju ke daerah hulu yang menjadi tempat mereka bertelur dan tempat di mana ada banyak organisma mikro yang dapat dimangsa.[30] Bendungan Larona yang membendung danau terbesar di Sulawesi, Towuti, semenjak awal 1977 telah memotong siklus migrasi ikan *masapi* (sidat) yang biasanya bertelur di laut. Dan setelah menetas, anak-anak ikan *masapi* berenang lagi ke udik lewat sungai. Dengan demikian, jenis ikan *masapi* di Towuti mengalami ancaman kepunahan.[31] Beberapa jenis ikan seperti *sepat Jawa* dan mujair juga sulit ditemukan lagi di Towuti.[32]

Tim dari Universitas Pajajaran menyatakan bahwa pembangunan Waduk Kedung Ombo akan memutus jalur migrasi beberapa spesies ikan dan organisma lain seperti belut dan udang galah.[33] Penutupan pintu waduk juga akan mengakibatkan berkurangnya

---

28) Edward Goldsmith dan Nicholas Hildyard, *The Social & Environmental Effect of Large Dams*, Sierra Club Books, San Francisco, 1984.

29) Ecoforum (A journal of the Environment Liaison Centre), Vol. 12 No. 384, Nairobi, Kenya, 1987. Bandingkan juga dengan hancurnya sejarah Trah Serang dan Gagatan, serta benda-benda bersejarah bersamaan dengan tenggelamya rumah penduduk oleh genangan air waduk Kedung Ombo.

30) Edward Goldsmith dan Nicholas Hildyard, *op cit.*, hal, 92 - 96. Ada beberapa data dari dam-dam besar di mana bibit ikan ditebar di genangan tak mampu menembus hancurnya populasi ikan dan organisma mikro. Danau Nasser merupakan salah satu contoh di mana orang berharap akan menangkap 50 sampai dengan 100 ribu ton ikan pertahun, namun nyatanya hanya kurang dari 5 ribu ton. Hal tersebut dikarenakan banyak jenis ikan yang mati gara-gara membusuknya pepohonan dan tanaman lain yang tergenang air, sementara beberapa jenis ikan buas yang memangsa sesama ikan malah bermunculan. Lihat : *"Untung Rugi Buat Siapa?"*, Tempo, 29 Mei 1976.

31) Buletin Bina Desa, 1 April 1980.

32) George Junus Adotjondro, *The Case of Towuti : "Development" Versus Nature Conservation?* Oktober 1981 (belum diterbitkan).

33) Pajajaran University (Institute of Ecology), *Environmental Impact Analysis of The Kedung Ombo Dam* (Final Report) Bandung, 1984.

aliran sungai yang membawa sedimentasi ke laut, Daerah hilir menjadi berkurang kesuburannya, seperti yang terjadi di Sungai Amu Daria di Uni Sovyet. Sebelum pembangunan dam, setiap tahunnya sekitar 40 ton sedimen dibawa aliran sungai tersebut ke setiap hektar tanah di aliran delta (hilir).

Pembangunan bendungan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya banjir ternyata juga menimbulkan suatu kerugian. Banjir alami, seperti halnya banjir tahunan di hilir Bengawan Solo ternyata juga mempunyai fungsi lain, yaitu membersihkan endapan garam di bawah permukaan tanah yang dapat mematikan akan tanaman.[34]

Waduk ternyata juga mengakibatkan hilangnya air dalam jumlah yang sangat besar. Di daerah-daerah yang berudara panas dan kering, terjadi penguapan air waduk dan saluran-saluran yang berhubungan secara besar-besaran. Di Mesir, Danau Nasser kehilangan minimal 15 milyar meter kubik per tahun akibat penguapan. Jumlah tersebut sebetulnya bisa dipakai untuk mengairi 2 juta hektar lahan pertanian. Tumbuh dan berkembangnya beberapa jenis plankton, ganggang dan beberapa tumbuhan yang mengambang di permukaan air semakin membantu penguapan air lewat permukaan daunnya. Penurunan air di berbagai waduk akibat penguapan berkisar antara 114 - 300 cm setiap tahunnya.

Ditambah lagi dengan adanya faktor rugi pada sistem jaringan irigasi yang cukup besar seperti bocornya jaringan air akibat kesalahan konstruksi saluran atau pemakaian berlebihan yang memboroskan cadangan air. Dari studi yang pernah dilakukan ICID

[34] Di Mesir, setelah pembangunan Waduk Nasser dan Aswan, diperlukan 1,56 juta ton pupuk untuk menyuburkan kembali daerah hilir Sungai Nil. Untuk itu, pemerintah Mesir terpaksa menaikkan anggaran tahunannya yang melonjak $ 100 juta hanya karena berakhirnya banjir tahunan tersebut. Lihat: Tempo, 29 Mei 1976.

(*International Commission On Irrigation and Drainage*) di tahun 1967 terbukti antara 13,1 sampai 19,15% air telah hilang sepanjang saluran Bari Doab di Uttar Pradesh. Sedangkan di Punjab malah mencapai 366 %. Di beberapa negara Asia Tenggara, pemborosan ini berkisar antara 50 sampai 80 %.[35]

Waduk juga dapat menyebabkan terjadinya proses erosi di daerah aliran sungai yang dibendung. Dengan adanya erosi tersebut, lumpur yang terbawa oleh aliran sungai akan mengendap di waduk dan menyebabkan pendangkalan yang akan membuat turbin PLTA tidak dapat berputar karena pertumbuhan gulma air yang berlebihan seperti eceng gondok. Biomas yang terbentuk oleh gulma air akan mengendap di waduk. Pertumbuhan gulma air dapat dipacu oleh kesuburan air yang disebabkan oleh mineral dalam lumpur dan limbah dari pemukiman, retoran serta hotel.[36] Dengan demikian akan terjadi proses penghancuran ekosistem secara alamiah dari ekosistem danau menjadi ekosistem daratan baru.

Luasnya genangan air pada sebuah waduk akan menyebabkan pola tanam berubah. Demikian juga dengan ekosistem yang ada sebelumnya. Perubahan ekosistem ini melibatkan sejumlah organisma mikro, serangga dan beberapa bentuk kehidupan binatang lainnya yang harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Kelembaban udara di sekitar waduk yang meningkat karena adanya pe-

[35] Edward Goldsmith dan Nicholas Hildyard, *op cit.*, hal 63 - 67.

[36] Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta 1985. Waduk Gajahmungkur yang ditargetkan bisa operasional selama 100 tahun ternyata mengalami erosi yang menunjuk angka di atas 1,2 mm per tahun, angka toleransi sedimen yang masuk kantung lumpur per tahun. Menurut penelitian, tingkat sedimentasi di Waduk Gajahmungkur mencapai 4,5 mm sampai 8,55 mm per tahun. Dengan demikian Waduk Gajahmungkur diramalkan hanya akan berumur 15 - 27 tahun. Lihat : Kompas, 9 April 1989.

nguapan air genangan, memungkinkan berkembangnya beberapa jenis binatang hama yang tadinya tak bisa hidup akibat udara kering. Berkembangnya beberapa jenis serangga penggenggu secara luar biasa tersebut menyebabkan pemekaian pestisida semakin meningkat. Dengan demikian penduduk dihadapkan pada dua masalah, yaitu masalah hama tanaman dan serangga pengganggu lainnya serta masalah efek samping penggunaan pestisida yang cenderung berlebihan, sehingga selain merugikan manusia juga dapat menghancurkan populasi ikan.

Genangan air waduk yang relatif tenang, ternyata bukan hanya mempengaruhi kehidupan burung dan binatang lain Tetapi juga jamur, protozoa, bakteri dan organisma mikro yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti *Plasmodium malariae, P. vivax, P. ovale* dan *P. facciparum* yang menyebabkan penyakit malaria. Nyamuk anopheles yang menyebarkan penyakit malaria ternyata bertelur dan berkembang biak dengan sangat baik di genangan air waduk yang membuat sebagian daerah genangan menjadi rawa-rawa. Di tahun 1981, WHO juga menemukan ratusan spesies nyamuk, termasuk anopheles yang kebal terhadap insektisida, yang diduga berasal dari daerah sekitar waduk.[37] Beberapa spesies parasit yang menyebabkan penyakit *schistosomiasis* seperti *s. haemotobium, s. mansoni* dan *s. japoni* juga berkembang baik dengan baik di genangan waduk yang sering dipakai untuk mandi, cuci dan masak oleh penduduk setempat. Larva-larva dari parasit tersebut masuk lewat kulit manusia dan ikut peredaran darah masuk ke tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia, mereka mengeluarkan sejenis

[37] Akibat pemakaian insektisida dan pestisida yang tidak terkontrol dan berlebihan. Lihat: Edward Goldsmith dan NIcholas Hildyard, *op cit.*, hal. 63 - 67.

toksin yang akan menyebabkan diare, pembesaran limpa dan hati.

Penyakit lain yang sering diketemukan berkembang di lingkungan waduk adalah penyakit kaki gajah (*filariasis*) dan kebutaan sungai (*onchocerciasis*). Pada 1977, diketahui lebih dari 250 ribu penduduk di Uni Sovyet menderita kaki gajah. Penyebabnya nyamuk-nyamuk pembawa penyakit *filariasis* yang hidup dan berkembang pada jaringan irigasi besar. Sedangkan kebutaan sungai banyak diketemukan lembah sungai Amerika Tengah dan Amerika Selatan serta Afrika. Di lembah Sungai Volta, sekitar 70.000 penduduk sekarang mengalami kebutaan dan satu juta lainnya mengalami gangguan penglihatan akibat *onchocerciasis*. Masih ada beberapa penyakit lain yang ditimbulkan oleh adanya air genangan waduk yang untuk pencegahannya lebih lanjut dibutuhkan ongkos yang sangat mahal, sedangkan korban-korban telah dan sedang berjatuhan cukup banyak.[38]

Munculnya berbagai gempa bumi dahsyat di beberapa negara oleh banyak seismolog dan geolog dihubungkan dengan adanya pembangunan waduk-waduk besar di sekitarnya. Terkurungnya air dalam volume yang besar oleh bangunan waduk menyebabkan struktur geologi menjadi labil dan mudah retak. Sedikit tekanan kecil saja pada struktur tanah dapat menyebabkan tanah bergeser dan menimbulkan gempa tektonik.[39] Hal tersebut dikarenakan air le-bih mudah meneruskan getaran dibandingkan tanah yang

[38] *Ibid.*, hal. 86 - 90.

[39] Ada 33 gempa bumi besar yang menimbulkan korban jiwa cukup banyak yang ternyata ada hubungannya dengan pembangunan waduk-waduk besar. Dua puluh tiga di antaranya adalah gempa bumi besar yang pernah terjadi di India, Cina, Amerika Serikat, Rhodesia, Uni Sovyet, Selandia Baru, Perancis, Australia, Turki, Italia dan Spanyol. *Ibid.*, hal. 101 - 119. Perlu juga diketahui, Kedung

mempu-nyai struktur lebih padat. Danau buatan manusia seperti waduk dan danau alam bisa memancing pelepasan energi potensial di daerah-daerah perbenturan lempeng-lempeng kerak bumi yang kemudian menimbulkan gempa bumi. Bangunan dan seluruh waduk yang tidak memenuhi bestek atau persyaratan lain seringkali juga .pamenimbulkan banjir bandang di daerah-daerah yang terletak di muara.[40]

Di Indonesia, terjadinya gempa di Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, di tahun 1977 yang mengguncang dan mengakibatkan empat retakan pada bangunan bendung penutup Kedungkancil juga diduga merupakan buntut dari gempa laut di selatan Nusa Tenggara pada 19 Agustus 1977. Para ahli geologi ITB juga pernah mengusulkan peninjauan kembali lokasi Waduk Cimanuk di Kabupaten Sumedang setelah sebuah gempa bumi di tahun 1975 menghancurkan puluhan rumah penduduk di Cibadak. Para ahli geologi terse-but khawatir,

Ombo berada cukup dekat dengan Gunung Merapi yang masih aktif bekerja. Para ahli, sebagaimana dikutip majalah The Unesco Courier Edisi Mei 1976 menyatakan bahwa kegiatan seismik yang berarti dapat terjadi di dekat sebuah waduk apabila tinggi bendungan mencapai lebih dari 100 meter dan volume airnya lebih dari satu milyar meter kubik.

[40] Terjadinya banjir kanal yang merenggut korban jiwa dan menggenangi ribuan hektar sawah di Kabupaten Demak pada akhir Januari 1990 diduga karena jebolnya bendungan pembagi air Waduk Kedung Ombo, Klambu Kiri yang melintasi wilayah Kecamatan Karanganyar dan Gajah di Kabupaten Demak. Lihat: Kedaulatan Rakyat 26 dan 29 Januari 1990. Penutupan pintu Waduk Kedung Ombo ternyata juga membuat Desa Tanjung anyar, Samiroto, Gendangalas mengalami kekeringan total. Petani dari ketiga desa tersebut akhirnya nekad membobol tanggul dan merusak saluran tersier untuk mendapatkan air. Pola tanam para petani di daerah Kabupaten Grobogan, Demak, Kudus juga berantakan akibat ditutupnya pintu Waduk Kedung Ombo.

karena waduk yang baru direncanakan itu terletak di daerah rawan gempa sehingga bisa mengundang gempa di daerah aliran Sungai Cimanuk.[41]

Masih ada banyak kerugian lain dibalik mitos-mitos tentang manfaat sebuah waduk besar, yang pada kenyataannya justru sedikit saja menghasilkan tambahan pangan. Dalam jangka panjang, waduk ternyata juga dapat mengubah tanah yang subur menjadi sebuah gurun pasir garam. Industri-industri yang beroperasi dengan listrik yang dihasilkan oleh waduk ternyata mengurangi kemampuan daerah sekitarnya untuk menghasilkan pangan, karena rusaknya lahan pertanian dan munculnya pollusi asap serta limbah industri lainnya. Waduk ternyata juga tidak memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi upaya pengendalian banjir, karena hutan yang menjadi gundul, tata kota yang salah dan rapuhnya konstruksi tanggul lebih merupakan faktor dominan penyebab timbulnya banjir. Dam-dam besar di dunia telah membuktikan ketidakmampuannya untuk mencegah dan mengendalikan banjir.[42]

Mungkin kini saatnya kebijakan pembangunan waduk dipertanyakan kembali, karena kelihatannya memang ada orang-orang yang berkepentingan dengan dibangunnya sebuah waduk meskipun ideologi pembangunan waduk selama ini selalu bersembunyi di balik kata-kata "demi kesejahteraan masyarakat". Hal ini bisa dikaitkan

[41] Lihat: *"Bumi Goncang Karena Bendungan?"*, Tempo, 1 Oktober 1977.

[42] Edward Goldsmith dan Nicholas Hildyard, *op cit.*, hal. 122, 123. Pembangunan Waduk Kedung Ombo akhirnya malah mengakibatkan ratusan hektar hutan milik Perum Perhutani harus "digunduli" untuk digunakan sebagai pemukiman dan lahan garapan penduduk yang menolak pindah ke Kayen atau bertransmigrasi. Hal ini akan dapat menyebebkan banjir di kemudian hari.

dengan bagaimana waduk-waduk yang dibangun dibanyak negara ternyata tidak bisa mensejahterakan orang-orang miskin yang sebetulnya disasar oleh pembangunan waduk tersebut. Yang terjadi justru proses pemiskinan. Birokrasi menejemen yang kacau ditambah dengan keroposnya sistem akibat korupsi seringkali menjadi faktor utama terjadinya kekurangan pangan, banjir dan beberapa bencana lain yang kemudian dijadikan alasan untuk membangun sebuah waduk.

Vijay Paranjpye, seorang peneliti dari India menyatakan bahwa keuntungan ekonomis waduk-waduk besar di India yang dikemukakan pemerintah ternyata terlalu dilebih-lebihkan. Kerugiannya sengaja diperkecil untuk mendapatkan nisbah keuntungan/kerugian sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Perencanaan Pusat India. Menurut Paranjpye, apabila kerugian dan keuntungan yang dicantumkan adalah hal yang sebenarnya, maka waduk-waduk di India tentunya telah ditolak oleh komisi Perencanaan karena secara ekonomis tidak dapat diteruskan. [43] Belum lagi kerahasiaan dan ketertutupan pemerintah dalam hal yang berhubungan dengan masalah donatur, menyebabkan fungsi kontrol dan penilaian dampak lingkungan menjadi sulit diketahui kebenarannya. Biaya pembangunan waduk di dunia ternyata selalu meleset dari anggaran yang telah disusun sebelumnya dan membengkak jauh melampaui perkiraan sebelumnya.[44]

Pembangunan sebuah waduk jarang memberikan manfaat se-

[43] Ecoforum, *op cit.*

[44] Pembangunan Waduk Kedung Ombo sebagaimana dikatakan oleh Pimpro Pengembangan Jratunseluna Ir. Sunarno ternyata telah menghabiskan biaya sebesar Rp 500 milyar. Lihat: Yogya Post, 24 Nopember 1989.

cara langsung kepada masyarakat miskin di desa-desa. Yang beruntung justru perusahaan multinasional dan perusahaan-perusahaan milik orang tertentu yang berhasil memenangkan tender pembangunannya. Atau penduduk kota-kota besar dan para politisi yang memperoleh komisi dari proyek-proyek pembangunan waduk. Padahal orang-orang desa yang tanahnya dipakai untuk proyek telah memikul beban yang berat untuk proyek tersebut. Antara lain kehilangan rumah, sawah dan nilai-nilai yang mereka junjung tinggi. [45] Dibandingkan dengan penduduk setempat yang biasanya hanya akan menjadi tenaga kasar, ternyata waduk lebih banyak memberikan keuntungan dan kesempatan kerja kepada ahli teknik, ekonom dan orang-orang sekolahan dari kota. Sistem irigasi ternyata hanya memperkaya para petani berdasi yang membeli sebagian besar tanah dan sawah milik orang desa. Pengelolaan obyek wisata ternyata seringkali melibatkan kaum bermodal dari kota Penduduk setempat hanya menjadi "tukang" yang bekerja untuk para juragan dari daerah luar, pedagang asongan atau penjual jasa lainnya. Kehadiran pekerja proyek yang terdiri dari kaum laki-laki yang kebanyakan bertempat tinggal cukup jauh dari lokasi proyek selama waktu yang cukup lama biasanya mengundang datangnya WTS-WTS dari kota terdekat. Begitu pula kalau waduk telah menjadi obyek wisata. Hal ini membawa dampak berupa porak-porandanya nilai-nilai norma dan akhlak penduduk setempat, terutama anak-anak dan kaum remaja.

Pembangunan sebuah waduk ternyata seringkali dipakai oleh seorang penguasa untuk kepentingan-kepentingan politiknya. Seperti halnya Bendungan Aswan yang digunakan oleh Gamal Abdul

[45] Otto Soemarwoto, *op cit.*,hal 340.

Nasser untuk memperoleh dukungan rakyat Mesir.[46] Waduk besar seperti Kedung Ombo ternyata bukan sekedar saran pengairan, melainkan juga bisa berfungsi sebagai suatu pengontrol sejumlah manusia (petani) yang tergantung pada air waduk itu, serta sejumlah manusia (konsumen) yang tergantung pada pangan yang dihasilkan oleh para petani itu.

Hal ini dapat dibuktikan dari sejarah awal pembangunan waduk dan saluran-saluran raksasa si India pada jaman penjajahan Inggris di mana hanya dalam sepuluh tahun saja Inggris telah berhasil menjinakkan suku bangsa di perbatasan India yang telah berhasil dijinakkan oleh angkatan bersenjata kolonial di daerah itu selama setengah abad.

Di samping kontrol terhadap sejumlah besar penduduk yang tergantung dari air, ternyata pembangunan sarana-sarana irigasi raksasa adalah merupakan sarana pemasaran semen produksi perusahaan-perusahaan konglomerat asing dan domestik yang sudah mengalami kelimpahan produksi. Akhirnya, pembangunan waduk besar yang pada umumnya terlalu mahal untuk dibiayai oleh negeri-negeri berkembang itu sendiri, juga merupakan sarana yang empuk untuk menambah ketergantungan pada lembaga-lembaga keuangan internasional.[47]

Alternatif pembangunan waduk-waduk berukuran kecil seperti yang dilakukan di Zimbabwe serta menghidupkan kembali sistem irigasi tradisional mungkin bisa dijadikan jawaban pemecahan atas kebutuhan tenaga listrik dan air irigasi. Sekaligus upaya mengatasi

[46] Edward Goldsmith dan Nicholas Hildyard, *op cit.*, hal 242 - 250.

[47] George Junus Aditjondro, ***Mengapa Kampanye Kedung Ombo Berhasil? Apanya yang berhasil? Dan Apa Betul berhasil? Suatu Catatan Awal Untuk Diskusi Lebih Lanjut***, Makalah untuk kalangan terbatas (belum dipublikasikan), Salatiga, 22 Januari 1990.

kerugian yang ditimbulkan oleh sebuah waduk besar. Listrik sebenarnya cukup dibangkitkan dengan sebuah bendungan kecil dan turbin yang kecil pula seperti PLTM (Pusat Listrik Tenaga Mikrohidro) di Saguling dan Cirata. PLTM mempunyai potensi yang cukup besar untuk sumber energi di daerah pedesaan.[48] Sistem irigasi tradisional yang pernah ada di Mesopotamia atau sistem Subak di Bali yang sangat menunjang ekologi dan tidak memotong siklus hidup suatu ekosistem mungkin bisa dipakai sebagai proyek percontohan. Namun, sistem tersebut tentunya tidak akan diterima begitu saja. Khususnya oleh orang-orang dan pihak-pihak yang diuntungkan oleh pemba-ngunan waduk-waduk besar selama ini.

Gerakan Petani Tradisional

Pandangan stereotip tentang petani sebagai orang yang *nrima*, pasrah, pasif, fatalistis, enggan berubah, tidak rasional ternyata buyar begitu melihat apa yang terjadi di Kedung Ombo. Ternyata sejarah memang menunjukkan kaum petani selalu terlibat dalam proses perkembangan sosial seperti halnya revolusi Rusia, Cina, Vietnam, Mexiko dan Aljazair atau beberapa pemberontakan petani yang pernah muncul pada Abad XVII di Rusia, Cina dan Muangthai.[49] Di Indonesia sendiri pada Abad XIX dan awal Abad XX tercatat beberapa kali gerakan dan pemberontakan yang melibatkan rakyat petani. Tidak jarang pergolakan atau kerusuhan yang kemudian muncul itu diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang bersifat agresif dan radikal, yang mencerminkan ledakan ketegangan,

[48] Otto Soemarwoto, *op cit.*

[49] Henry A Landsberger dan YUG Alexandrov, ***Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial***, CV. Rajawali. Jakarta, 1984.

pertentangan dan permusuhan yang terjadi di lingkungan masyarakat pedesaan. Akibat yang ditimbulkan cukup menggoncangkan masyarakat dan pemerintah pada masa itu. Semuanya menunjukkan bahwa gerakan-gerakan yang didukung oleh kaum tani merupakan kekuatan sosial yang besar bagi masyarakat pedesaan. Sekaligus merupakan aktifitas kolektif yang ditujukan untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap keadaan yang merugikan mereka.[50]

Gerakan dan pemberontakan petani pada umumnya merupakan reaksi spontan terhadap perubahan-perubahan sosial yang serba mendadak yang mengakibatkan munculnya frustasi dalam kehidupan petani. Munculnya penetrasi peme-rintahan kolonial yang semakin kuat di Indonesia pada permulaan Abad XIX menyebabkan tatanan kehidupan masyarakat tradisional hancur. Dalam konsep Jawa, sebelumnya tidak dikenal konsep pemilikan tanah, karena tanah beserta isinya adalah milik raja. Seorang raja berhak menyerahkannya kepada siapa saja dan berhak pula menariknya kembali bila sudah tiba waktunya atau bila dianggap perlu. Orang yang mendapat kepercayaan diserahi tanah wajib memberi upeti berupa hasil bumi kepada raja. Rakyat patuh kepada raja, karena raja dianggap mendapat anugerah *wahyu kedaton* dari Tuhan yang harus dijaganya dengan baik.[51] Demoralisasi, munculnya peceklik dan kesengsaraan yang menimpa rakyat menunjukkan tanda-tanda dari hilangnya *wahyu kedaton* seorang raja, makanya seorang raja akan selalu berusaha sebaik mingkin memimpin negara dan mensejahterakan rakyatnya dengan cara sesering mungkin mendekatkan diri dengan Tuhannya. Konsep ini berantakan setelah kolonial Belanda memperkenalkan sistem ekonomi keuangan, faktor-faktor produksi seperti tanah, perdagangan tenaga buruh dan hasil bumi, pelaksanaan sistem perpajakan dan diperkenalkannya bentuk penguasaan tanah baru berupa tanah-tanah partikelir. Petani juga dibebani kewajiban untuk menjalankan kerja rodi (*heerendiensten*)[52] dan sistem tanam paksa atas dasar ***cultur stelsel***. Sitem yang digunakan oleh kolonial Belanda tersebut menimbulkan beban penderitaan rakyat.[53]

Perdagangan dan industri pertanian rakyat juga menimbulkan diferensiasi struktural dalam masyarakat, sehingga tercipta peran-

---

[50] Djoko Suryo, *Gerakan Petani*, Prisma No. 11, 1985, LP3ES. Lihat juga bernhard Dahm, Kepemimpinan dan Reaksi Masyarakat di Jawa, Birma dan di Vietnam dalam Sartono Kartodirdjo (penyunting), *op cit.*

[51] Onghokham, *Penelitian Sumber-sumber Gerakan Mesianis*, Prisma No. 1 Januari 1977, LP3ES. Untuk mencapai tujuan manusia yang tertinggi yaitu bersatu dengan Tuhan (Manunggaling Kawulo-Gusti) adalah dengan cara patuh kepada raja yang telah mendapat wahyu kedaton dari Tuhan.

[52] Ada tiga macam kewajiban kerja rodi yaitu : 1. Krigandiensten, kerja rodi untuk kepentingan bersama yakni kepentingan raja atau orang yang diberi tanah oleh raja (lurah patuh) dan kepentingan petani, misalnya perbaikan jembatan, perbaikan jalan dsb. 2. Wachdiensten, kerja rodi dalam bentuk jaga malam, yakni menjaga rumah, pekarangan atau milik berharga dari raja atau lurah patuh. 3. *Gugurgunungdiensten*, kerja rodi untuk menanggulangi malapetaka/kecelakaan atau pekerjaan yang membutuhkan penyelesaian dengan cepat. Lihat : Djoko Utomo, *Pemogokan Buruh Tani di Abad ke-19* : Kasus Yogyakarta, Prisma No. 8 Agustus 1983, LP3ES.

[53] Belanda memang berkeinginan melakukan transformasi budaya dengan melakukan perubahan ketatanegaraan lingkungan desa, antara lain dengan pembinasaan dan penaklukan kerajaan-kerajaan kuno, penghapusan kefeodalan kekuasaan para kepala dan raja yang di masa lalu tak terbatas. Upaya untuk mengubah masyarakat Jawa yang statis, tradisionil dan selalu menurut irama lama tanpa ada dorongan untuk mengadakan perubahan tersebut menurut Belanda mendapat tanggapan positip dari masyarakat Indonesia yang dianggap mempunyai keluwesan untuk beradaptasi dengan kebudayaan Barat. Lihat: DH Burger, *Perubahan-perubahan Struktur Dalam Masyarkat Jawa*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1983, hal. 113 -137. Belanda kurang peka melihat persoalan yang sebenarnya terjadi, pergolakan petani dianggap hanya merupakan proses beradaptasinya masyarakat tradisionil.

peran sosial baru, menggantikan peranan tradisionil yang tadinya menganut pola *patron-klien*. Dengan meluasnya sistem administrasi yang bersifat legal-rasionil, lembaga-lembaga politik tradisionil menjadi semakin terdesak. Proses birokrasi menurut nilai-nilai atau standar Barat menggantikan penguasa tradisionil. Muncul birokrasi baru yang ditempatkan sepenuhnya di bawah pengawasan ke-kuasaan kolonial.

Apalagi kolonialisme moderen di bawah Hindia Belanda menyempurnakan proses-proses dari abad-abad sebelumnya bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat makin dikekang dan dinamisme makin merosot atau mendapat saluran berlainan antara lain dengan meningkatnya jumlah penduduk dan meluasnya daerah pertanian sampai ke lereng-lereng gunung. Petani semkin banyak kehilangan tanah jarena adanya sistem perkebunan yang dikelola pemerintah. Di Jawa perkebunan-perkebunan hasil ekspor seperti gula, kopi, nila dan lain-lain, pada umumnya memiskinkan petani karena tenaga dan tanah mereka dikerahkan untuk mensukseskan perkebunan sementara penduduk sendiri dilarang menjadikan tanah mereka sebagai perkebunan ekspor.[54] Petani pemilik tanah kecil terlibat banyak hutang karena adanya beban yang harus ditanggung seperti pembayaran pajak tanah, pajak kepala, biaya kehidupan sehari-hari, serta meningkatnya kebutuhan hidup lainnya. Akibatnya. mereka terpaksa harus menyerahkan tanah kepada orang lain dan kemudian menjadi buruh tani yang bekerja pada petani lain yang berhasil memiliki tanah luas.[55]

Runtuhnya bangunan tradisionil akibat adanya gagasan-gagasan baru dalam kehidupan sosial menimbulkan kegoncangan nor-

[54] Onghokham, *op cit.*

[55] Djoko Suryo, *op cit.*

ma-norma lama dan sumber ketidakpuasan serta frustasi di kalangan rakyat pedesaan. Terjadinya disorganisasi dan disorientasi masyarakat tradisionil ini mendorong upaya untuk melancarkan gerakan yang mampu mengembalikan keadaan semula.

Masyarakat yang kehilangan arah dan kebingungan itu melihat apa yang dialaminya merupakan sebuah pertandan *jaman edan* di mana prinsip kerukunan, saling hormat dan keselarasan [56] yang dianut masyarakat lebur oleh adanya penindasan dan kekacauan. Hal ini menyebabkan munculnya harapan-harapan bakal datangnya seorang Ratu Adil yang mampu mengakhiri kesengsaraan dan ketidakadilan yang menimpa rakyat seperti yang ada dalam *Sabda Palon* Jayabaya. Kedatangan Ratu Adil akan membawa *Millenium,* jaman keemasan di mana semua penderitaan, konflik dan ketidakadilan akan lenyap. Rakyat tak mengenal penderitaan lagi, bebas dari pajak, segala kebutuhan pokok terpenuhi. Impian akan datangnya seorang Ratu Adil merupakan jawaban atas kebutuhan dan keinginan untuk mengembalikan nilai-nilai lama yang telah terjungkir-balik.

Masa menjelang kedatangan Ratu Adil ditandai dengan gejala apokaliptis. Antara lain terjadinya gangguan terhadap tatanan moral, malapetaka dan bencana alam seperti hujan, api, banjir serta merajalelanya kesengsaraan dan kemerosotan nilai-nilai, meningkatnya kebebasan seks dan kejahatan dan sebagainya. Sementara itu hukum dan pengadilan negara tidak berguna. Perintah berganti-ganti membingungkan, yang jahat dianggap besar, setan menyamar seba-

[56] Kejelasan tentang prinsip ini bisa dibaca pada Niels Mulder, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional,* Gajah Mada University Press, Yogyakarta 1986 dan Franz Magnis-Suseno, Etika Jawa, Gramedia, Jakarta 1985, hal. 69.

gai wahyu dan banyak orang yang melupakan Tuhan dan orang tua.[57]

Impian tentang akan datangnya jaman keemasan/kemakmuran dan keinginan untuk mengembalikan keserasian hidup tradisionil inilah yang mendorong munculnya gerakan protes. Sebuah gerakan yang seringkali dilakukan tanpa adanya kesadaran akan kekacauan sosial yang dapat ditimbulkannya. Keyakinan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran, situasi ideal yang menggantikan keadaan serba merosot dan kacau itu justru menumbuhkansikap totalitas untuk berkor-ban demi kepentingan gerakan. Kerusuhan biasanya muncul ketika ada orang yang merasa mendapat wahyu atau *pulung* untuk memimpin masyarakat menegakkan keadilan.

Dalam sejarah kolonial Belanda terccatat beberap gerakan protes petani dengan ideologi Ratu adil yang disertai kekerasan seperti pemberontakan di Candi Udik (1892), peristiwa Gedangan (1904), gerakan Dermojoyo (1907), peristiwa Entong Gendut di Condet (1986) dan sebaginya. Gerakan protes petani yang bersifat radikal umumnya bersifat pendek. Dalam sejarah, merupakan gerakan lokal atau regional yang dengan mudah ditindas dan ditumpas oleh pihak pemerintah kolonial. Namum tidak semua gerakan protes Ratu Adil berorientasi keduniawian dan berciri agresif, radikal dan revolusioner. Ada banyak gerakan yang bersifat lebih pasif dan berorientasi kepada kerohanian dan kedunia-bakaan atau gerakan massa yang tidak disertai kekerasan.[58] Gerakan protes yang sering

[57] Ramalan Jayabaya Musabar (Sinom). Lihat : Andjar Any, *Rahasia Ramalan Jayabaya*, Ranggawarsita & Sabdo Palon, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang, 1986. Bandingkan dengan apa yang dialami orang-orang Kedung Ombo.

[58] Sebagai contoh adalah gerakan Samin yang muncul di Blora pada Abad XIX yang melakukan gerakan protes dengan cara menjungkirbalikkan dan mementahkan peraturan-peraturan yang

memakai agama sebagai basis gerakan juga meliputi dua hal, yaitu dengan melakukan perang jihad terhadap pemerintah yang dianggap kafir atau gerakan sektaris yang lebih terarah kepada pemurnian hidup rohani seperti geraakan Haji Rifangi dari Pekalongan (1860).

Gerakan Ratu Adil di Jawa yang terbesar dalam sejarah adalah perang yang dilancarkan Pangeran Diponegoro (1825 - 1830). Perang mempunyai dampak jangka panjang antara lain bertambah beratnya beban pembiayaan koloni dan pemerintah dalam negeri yang harus ditanggung pihak Belanda. Pangeran Diponegoro diyakini oleh rakyat sebagai sang Ratu Adil yang dinanti-nantikan setelah terjadinya pertemuan mistik dengan Nyai Roro Kidul. Rakyat percaya bahwa Pangeran Diponegoro mempunyai kekuatan gaib, dengan hanya menyentuh pakaiannya atau memakan sisa makanannya sudah cukup untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang serius.[59] Pecahnya perang Diponegoro yang lazim disebut sebagai perang Jawa tersebut disebabkan karena ketidakpuasan petani akibat hilangnya tanah-tanah mereka, meningkatnya tarif pajak yang diberlakukan Belanda. Serta terjadinya penyelewengan administratif, merosotnya kondisi spiritual dan material yang akhirnya terakumulasi menjadi perasaan terhina yang sangat mendalam ketika terjadi aksi

dibuat kolonial Belanda. Contoh lain adalah kasus Sawito Kartowibowo yang merasa mendapat wangsit di lereng utara Gn. Muria pada 1972 di tengah malam saat menjalani tapa brata. Lewat suara gaib itu Sawito mengaku mendapat mandat sebagai Ratu Adil yang berhak atas tahta di Indonesia. Kasus yang melibatkan beberapa tokoh seperti Moh. Hatta, Prof, Hamka, Mayjen. Ishak Djuarsa, DR. T.B. Simatupang dan Kardinal Justinus Darmojuwono tersebut berakhir dengan ditangkapnya Sawito pada September 1976. Sawito dijatuhi hukuman penjara 8 tahun kemudian diubah menjadi 7 tahun, dan semenjak bebas pada bulan Oktober 1983 suaranya tak pernah terdengar lagi.

59) Hal ini pernah ditulis dalam *Java Oorlog*. Lihat : Michael Adas, *Ratu Adil*, CV Rajawali, Jakarta, 1988.

sepihak oleh kolonial Belanda lewat Patih Danureja.

Guna keperluan pembangunan jalan, Patih Danureja langsung mematoki tanah-tanah milik petani dan Pangeran Diponegoro tanpa meminta ijin pada pemiliknya terlebih dahulu. Para pembangun jalan bahkan kemudian bertindak kasar terhadap daerah pemakaman kuno yang terletak di daerah itu yang sangat dihormati oleh penduduk.[60] Patok-patok itu kemudian dipindah-pindahkan, baik oleh rakyat dan pengikut Pangeran Diponegoro maupun oleh pihak Belanda sehingga menyebabkan Residen Belanda Smissaert memerintahkan sepasukan tentara untuk menangkap Pangeran Diponegoro, namun ia berhasil meloloskan diri. Setelah kejadian itu, Pangeran Diponegoro menyatakan perang suci terbuka terhadap kolonial Belanda. Pengikut Pangeran Diponegoro semakin besar dan kuat dengan bergabungnya pangeran-pangeran yang kecewa, para ulama dan kepala bandit.[61]

Selanjutnya, bila melihat kembali kasus Kedung Ombo akan tampak paralelisme dengan keadaan menjelang terjadinya perang Jawa, di mana tatanan tradisionil terganggu. Beberapa kesamaan tersebut antara lain :

Menjelang Perang Jawa	Kedung Ombo 1982 - Jan. '89
- Aksi sepihak oleh Patih Danureja. Tanah rakyat dipatoki, tanpa pernah meminta ijin pemiliknya terlebih dahulu. Patok sering berpindah-pindah.	- Aksi sepihak oleh Tim Pembebasan tanah dan aparat. Tanah rakyat diinventarisasi dan dibebaskan dengan harga Rp 250/m persegi tanpa mengajak musyawarah Patok batas sabuk hijau sering berpindah-pindah.
- Terjadi ketidakadilan, ketertindasan dan kemerosotan hidup yang ditafsirkan sebagai jaman edan.	- Pengecapan ET pada KTP, penangkapan, ganti rugi yg rendah, isolasi dll di ditafsirkan sebagai jamanedan.
- Pemerintah kolonial Belanda yang terlalu dominan tidak peka terhadap adat kebiasaan & tidak mampu mengawasi segala urusan kraton.	- Birokrasi tidak responsif. Legislatif tak mampu menyuarakan suara rakyat. Juga akibat laporan-laporan ABS.
- Tidak ada raja yang adil dan bijaksana	- Rakyat beranggapan mereka tidak mempunyai pemimpin/ raja.[63]
- Ada kerinduan terhadap datangnya jaman keemasan dengan datangnya seorang Ratu Adil seperti apa yang diramalkan Jayabaya.	- Ada mitologi tentang jaman kemakmuran a.l. *Iwak bader mangan manggar* dan datangnya Ratu Adil seperti ramalan Jayabaya.
- Pangeran Diponegoro merasa mendapat wahyu	- Ada tokoh Kedung Ombo yg merasa mendapat wahyu untuk memimpin rakyat Kedung Ombo.

[60] *Ibid.*, hal. 218.

[61] *Ibid.*, hal 217. Hal lain yang menyebabkan terjadinya Perang Diponegoro adalah ketidakpuasan Diponegoro akibat tidak bisa naik tahta dan kasus pengangkatan empat wali Sultan yang masih bayi oleh Belanda.

[62] Lihat: Kompas, 14 Januari 1989.

SEPUTAR KEDUNG OMBO

Paralelisme situasi menjelang pecahnya perang Jawa dengan Kedung Ombo tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan, mengapa di Kedung Ombo tidak terjadi gerakan protes Ratu Adil yang agresif, radikal dan revolusioner seperti terjadinya perang Jawa. Padahal secara persyaratan kasus Kedung Ombo sebetulnya memenuhi bagi

[63] Bagi penduduk Kedung Ombo, tidak adanya raja ini terbukti dari tidak adanya pemimpin yang membela mereka. Dalam pola patron-client, memang si raja diharapkan dapat melindungi dan membela kepentingan rakyatnya. Anggapan tentang tidak adanya raja ini didapat dari wawancara dengan beberapa orang lanjut usia di daerah genangan pada tgl. 12 - 19 Agustus 1989, dua di antaranya adalah cucu Nyai Ageng Serang. Mereka beranggapan Presiden RI yang sekarang bukanlah seorang "Raja".

meletusnya sebuah kerusuhan sosial. Apalagi rakyat Kedung Ombo mempunyai akar sejarah perlawanan yang cukup panjang.

Namun kenyataan berbicara lain. Petani Kedung Ombo justru melakukan pembangkangan ala 'gerakan Samin' yang menolak kebijakan pemerintah dan memilih menjalankan cara hidupnya sendiri. Mereka menolak menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan di Balai Desa yang diwajibkan oleh pemerintah, menolak kedatangan Tim Pembebasan yang akan mengukuri tanah dan menginventaris karang kitri milik penduduk. Dan ketika secara paksa penduduk disuruh ke luar dari daerah genangan Waduk Kedung Ombo lewat cara penggenangan, mereka memilih untuk pindah secara beringsut di tanah-tanah yang dekat dengan tanah asal mereka. Yang lebih menarik lagi, adalah perlawanan di Kedung Ombo merupakan perpaduan antara gerakan petani tradisionil dan gerakan petani moderen.[64] Rakyat Kedung Ombo mengumpulkan uang secara sukarela untuk mengongkosi beberapa orang yang dianggap pandai, pergi ke kota dan meminta bantuan kepada lembaga-lembaga yang tidak terdapat di desa mereka. Pimpinan mereka mampu mengadakan perundingan dengan pejabat pemerintahan dan tidak canggung-canggung tampil di depan pers.

Fenomena menarik di Kedung Ombo ini tidak bisa dilepaskan dari adanya campur tangan organisasi-organisasi moderen (LSM) yang telah mendidik beberapa tokoh Kedung Ombo selama bertahun-tahun. Beberapa LSM yang melakukan pendampingan kepada rakyat Kedung Ombo, secara tidak langsung telah mendewasakan dan mempengaruhi cara perjuangan yang dipilih. Interaksi orang-orang Kedung Ombo dengan 'dunia luar' lewat tokoh-tokohnya saat meminta bantuan kepada lembaga-lembaga di beberapa kota, serta

[64] Djoko Suryo membagi gerakan protes petani menjadi 3 golongan, yaitu gerakan petani tradisional, gerakan petani tradisional dan gerakan petani modern. Lihat: Djoko Suryo, *op cit.*

adanya rakyat Kedung Ombo yang bekerja di kota memang sedikit banyak telah berpengaruh.

Gerakan protes dan pembangkangan yang terjadi di Kedung Ombo tersebut juga menunjukkan bagaimana petani dan rakyat pedesaan sekarang berada dalam ketidakberdayaan. Mereka kehilangan agresifitas petani sebagai seorang yang dekat dengan tanah sebagai alat produksi. Tekanan-tekanan yang diterima oleh massa petani hanya menimbulkan protes biasa dan sama sekali tidak bisa melakukan *revolt* seperti yang pernah dilakukan di jaman kolonial dulu. Mereka benar-benar telah menjadi massa tanpa pemimpin, sehingga diinjak atau ditindas sekalipun tak akan bisa bangkit. Karena mereka benar-benar telah terbelenggu oleh situasi apolitis. Posisi *wong cilik* menjadi labil karena kehilangan pemimpin yang personal untuk ke dua kalinya yaitu pada masa kolonial dan orde

[65] Aris Arif Mundayat, *"Gerakan Protes Petani dan Massa Tanpa Pemimpin"*, Kompas 6 September 1989. Gagalnya strategi ekonomi yang sekarang ini untuk melaksanakan pembangunan yang berguna bagi mayoritas rakyat akan menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang biasa menjadi ledakan sosial dan politik yang besar. Masalah-masalah yang dihadapi petani seperti kemiskinan, kekurangan tanah, pengangguran dan menumpuknya utang akan membuat kaum petani menjadi militan seperti terjadinya keresahan agraria di tahun 1960 yang kemudian dimanfaatkan oleh PKI untuk memperoleh dukungan umum dari desa. Lihat : Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil, Sinar Harapan*, Jakarta, 1984 dan juga Rex Mortimer, *Strategies of Rural Development in Indonesia : Peasant Mobilization Versus Technological Stimulation*, Makalah Seminar SEADAG, New York, 27 September 1975. Kemandirian petani pernah ada yaitu saat adanya Barisan Tani Indonesia yang mencoba membuka pintu bagi pencapaian martabat dan kuasa serta memberi suatu kerangka orientasi baru kepada rakyat jelata yang sedang terombang-ambing dalam pusaran gejolak waktu itu. Lihat : Justus M. van der Kroef, *Penguasaan Tanah Dan Struktur Sosial Di Pedesaan Jawa*, Salam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (penyunting), Dua Abad penguasaan Tanah, PT. Gramedia, Jakarta, 1984.

baru. Benang-benang penyambung antara rakyat dan pemimpin menjadi hilang.[65]

Bukan hanya lembaga perwakilan rakyat yang terus-terusan gagal untuk memecahkan masalah penggusuran tanah yang melanda rakyat kecil, orang-orang desa yang pandai dan berpendidikan atau terkemuka tidak bisa lagi menjadi tumpuan harapan rakyat. Mereka yang seharusnya tampil sebagai pemimpin, banyak yang ke kota atau menjadi kekuatan birokratis semacam pegawai negeri yang sering menghimpit petani. Rakyat pedesaan juga tak mungkin lagi melkukan protes terhadap pihak penguasa seperti pada jaman Mataram, di mana mereka bisa melakukan aksi menjemur diri (*pepe*) di alun-alun sampai raja menaruh belas kasihan dan mengabulkan tuntutan mereka.

Dengan demikian petani hanya bisa pasrah kehilangan tanah yang merupakan kekayaan paling berharga yang biasanya diwariskan kepada anak-anak mereka secara turun-temurun. Musim panen seringkali menjadi musim bertengkar antara penduduk desa yang paling miskin, para pekerja perantau, pemilik tanah dan para pamong.[66] Revolusi hijau dan teknik- teknik pertanian moderen yang membuat hasil produksi menjadi tinggi dan padat modal hanya semakin membuat jurang kaya-miskin semakin lebar. Kegiatan-kegiatan seperti Bimas, LKMD, PKK, Pos Yandu, KUD, Kelompencapir dsb yang lebih merupakan kewajiban daripada kebutuhan bagi orang desa, akhirnya cuma menimbulkan kesan sebagai upaya "penjinakan!"

Masyarakat desa, terutama di Jawa dewasa ini mungkin sedang mengalami frustasi, merasa tidak aman baik secara ekonomis maupun psikologis dan orang-orangnya merasa selalu terancam.

[66] Rex Mortimer, *loc cit.*

Mereka mengalami kekurangan dalam mekanisme mempertahankan keseimbangan nilai-nilai lama maupun dalam mekanisme menegakkan nilai-nilai yang lebih moderen dan tatanan yang *impersonal*. Rakyat bingung menghadapi ketidakpastian dan keterasingan dari proses-proses perubahan masyarakat yang lebih luas. Solidaritas sosial yang di antara nilai-nilai Jawa termasuk yang dijun-jung tinggi tersingkir oleh kenyataan dan ketidakpastian. Di desa-desa, hubungan kerukunan diancam oleh meningkatnya kemiskinan dan jeleknya pembagian sumber-sumber ekonomi.[67] Sedangkan pemilikan tanah semakin terpusat di tangan sedikit orang. Rusaknya pola hubungan yang berada dalam bangunan tradisional ini mungkin seperti ucapan seorang penduduk desa :

> "Musyawarah, kesetiakawanan desa, gotong royong, semua itu omong kosong ! Mereka yang mempunyai tanah mendapat lebih banyak dan mereka yang memilikinya sedikit semakin kehilangan apa yang mereka miliki. Pak Lurah dan beberapa orang lainnya menjadi kaya dan semakin kaya dan tidak perlu mendengarkan pendapat orang lain. Kalau ada proyek gotong royong, si miskinlah yang harus melakukan pekerjaan. Sekarang mereka bahkan membuat lurah menjadi pegawai negeri, dan memberikan kekuasaan yang semakin besar kepadanya dengan menyokongnya sebagai wakil pemerintah. Orang kaya di desa-desa sekarang mengirim anak-anak mereka ke kota untuk bersekolah; si miskin, harus meminta-minta untuk makan dan jika mereka ingin pergi ke kota harus meminjam celana. [68]

Rakyat di pedesaan juga tahu berdasarkan pengalaman, bah-

[67] Niels Mulder, *op cit.* Pengalaman Kedung Ombo menunjukkan cerai-berainya rakyat karena tidak ada lagi pemimpin tradisionil. Kebijakan-kebijakan yang digunakan pemerintah cenderung membentuk kelompok elit desa, yang akhirnya di mata rakyat dianggap sebagai kepanjangan tangan pemerintah.

[68] Niels Mulder, *Pribadi dan Masyarkat Jawa*, Sinar Harapan, Jakarta, 1985.

wa bercocok tanam dan mengolah kondisi-kondisi materiil tidak akan menghasilkan kebahagiaan serta rasa aman. Selama beberapa generasi, para petani belajar bahwa kerja keras mereka hanya akan memberikan imbalan yang sedikit, karena keuntungan mereka dirampas oleh para pemungut pajak pertanian maupun oknum-oknum pemerintah lainnya. Hal tersebut menyebabkan petani kehilangan harga dirinya dan tidak mempunyai pilihan lain kecuali pasrah, sebagimana dilukiskan oleh Koentjaraningrat :

> "Orang tani di Indonesia, terutama di Jawa, pada dasarnya menganggap hidupnya itu suatu hal yang buruk, penuh dosa dan kesengsaraan, tetapi tidak berarti bahwa ia harus demikian saja menghindari hidup yang nyata dan mengundurkan diri dengan bersembunyi di alami kebatinan atau dengan bertapa. Ia malahan wajib menyadari keburukan hidup itu dengan berlaku prihatin, dan wajib untuk berbuat sebaliknya dengan usaha atau iktiar. Ia hanya mempunyai perhatian untuk hari sekarang ini, bagaimana keadaan hari kemudiannya, ia tidak peduli; ia terlampau miskin untuk dapat memikirkan hal itu; hanya kadang-kadang ia rindu akan masa lampau, yang menurut dongeng-dongeng orang tua merupakan suatu masa kejayaan. [69]

Para petani sekarang hanya bisa melamun, karena para petani yang melakukan revolusi di masa kolonial Belanda dahulu selalu dihargai sebagai pahlawan sekarang ini derajad mereka turun menjadi penghambat pembangunan, anti Pancasila atau sisa-sisa organisasi terlarang.[70] Padahal tidak dapat dipungkiri hanya karena jasa-jasa merekalah Indonesia bisa berswasembada beras. Sebuah pertanyaan penting, apakah justru agar bisa berswasembada beras para petani itu harus digusur, dikucilkan dan diasingkan dari alat-alat produksi yang dikuasainya?

---

[69] Niels Mulder, *op cit.*, hal. 86.

[70] Aris Arif Mundayat, *op cit.*

Keberhasilan Kampanye Kedung Ombo dan Faktor Penyebabnya

Pemerintah pada awalnya tampak bersikap kaku dan keras serta berpegang teguh pada aturan ganti rugi dan alternatif bertransmigrasi yang telah ditetapkan. Sepertinya tidak mungkin pemerintah akan mau berubah sikap, mengingat Presiden Soeharto sendiri telah menyatakan sikapnya untuk melarang orang-orang yang berniat membantu penduduk yang bertahan di daerah genangan Waduk Kedung Ombo.

Namun dengan munculnya berbagai tekanan dari banyak pihak yang diarahkan kepada pemerintah Indonesia membuat para pejabat, baik di tingkat daerah maupun pusat, berupaya mencari informasi secara langsung ke daerah genangan . Mereka kemudian memberikan penjelasan kepada masyarakat lewat media massa. Beberapa anggota DPR RI bahkan menyempatkan diri untuk turun ke lokasi genangan guna mengumpulkan fakta dan mendengarkan pendapat dari masyarakat setempat secara langsung. Gubernur Jateng HM Ismail kemudian juga terpaksa memberikan peluang, lewat tawar-menawar dengan Kelompok Delapan, kepada penduduk yang bertahan di daerah genangan untuk menempati tanah-tanah yang berada di kawasan Perhutani. Pemerintah juga terpaksa membuat beberapa kebijakan lain. Antara lain dengan melipatduakan tanah yang diberikan kepada penduduk di Kayen, pemberian ijin bagi penduduk untuk sementara waktu tinggal di wilayah sabuk hijau, penyediaan program guru kunjung. Mekipun program guru kunjung ini ternyata tidak berjalan.

Perubahan sikap pemerintah cukup menarik untuk dibahas lebih lanjut. Umumnya, pada kasus-kasus serupa pihak pemerintah yang akhirnya selalu muncul sebagai pemenang. Pemerintah senantiasa berhasil menekan dan memaksakan kehendaknya kepada

orang-orang yang tanahnya dipakai untuk kepentingan pembangunan. Pengalaman-pengalaman dari berbagai kasus pembangunan yang terjadi selama ini di banyak tempat selalu meletakkan rakyat pada posisi yang "terkalahkan". Oleh sebab itu, dikabulkannya sebagian tuntutan rakyat Kedung Ombo mungkin bisa dianggap sebagai sebuah prestasi dan kemenangan dari "perjuangan rakyat kecil". Hal tersebut dikarenakan berhasilnya kampanye yang dilakukan berbagai pihak untuk mengangkat permasalahan Kedung Ombo ke permukaan yang akhirnya "memaksa" pemerintah untuk tidak memaksa seluruh penduduk Kedung Ombo bertransmigrasi ke luar Jawa.

Keberhasilan kampanye Kedung Ombo dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan. [71] Antara lain adanya faktor sejarah, mitologi yang diyakini sebagian rakyat Kedung Ombo, cara-cara salah yang digunakan aparat pemerintah dalam upaya pembebasan tanah, solidaritas dari kelompok kelas menengah, kampanye LSM di dalam dan di luar negeri, perpecahan di tubuh Bank Dunia, faktor-faktor interen pemerintah sendiri serta pemberitaan oleh media massa yang cukup gencar.

Pembangkangan yang dulu pernah melibatkan rakyat Kedung Ombo dalam Perang Jawa muncul kembali ketika aparat pemerintah secara "semena-mena" mencoba memaksakan pembebasan tanah-tanah yang akan digunakan untuk keperluan proyek. Kenangan rakyat terhadap kebesaran dan keberanian tokoh-tokoh dan para leluhur mereka seperti Nyai Ageng Serang, Tumenggung Prawirodigdoyo yang masih kental dalam ingatan rakyat Kedung Ombo turut

[71] George Junus Aditjondro melihat penyebab keberhasilan kampanye Kedung Ombo ada dua puluh enam faktor yang merupakan hasil dialektika dan synergy dari berbagai kekuatan, yang kebetulan berinteraksi pada momen historis yang menguntungkan. Lihat: George Junus Aditjondro, Januari 1990, *op cit.*

mengilhami munculnya pembangkangan. Perlawanan penduduk mengalami proses pematangan, setelah mereka mengikuti bimbingan hukum berupa penyuluhan dan pengorganisasian masyarakat oleh sebuah LSM .padan kemudian langsung berhadapan dengan berbagai intimidasi yang dilakukan aparat.[72]

Kepercayaan diri di kalangan tokoh-tokoh masyarakat setempat menjadi besar setelah mengetahui adanya dukungan moral dan simpati dari beberapa pejabat di Bekasi, aktivis LSM, para mahasiswa, Romo Mangun dan sebagainya, termasuk sebuah kelompok di lingkungan kraton Mangkunegaran yang memberikan perlindungan kepada rakyat Kedung Ombo yang dikejar-kejar oleh aparat keamanan karena pembang-kangan yang mereka lakukan. Dalam hal ini ternyata pihak kraton masih merupakan kekuatan yang disegani oleh aparat militer maupun kelompok-kelompok sipil di Jawa tengah. Ramalan-ramalan Jayabaya dan mitologi tentang jaman kemakmuran yang dulu pernah tumbuh subur di kawasan Kedung Ombo "Kelihatannya" sengaja dimunculkan kembali oleh beberapa kaum tua untuk membangkitkan semangat bertahan para penduduk di daerah genangan.[73] Sebab yang lain adalah kuatnya sikap dan rasa kebersamaan di sebagian besar kalangan rakyat pada saat

[72] Kesadaran rakyat akan hak-haknya, juga persyaratan musyawarah yang harus dilalui dalam proses pembebasan tanah diperoleh dari bimbingan hukum yang dilakukan oleh sebuah LSM di Solo yang juga memberikan informasi-informasi perihal dukungan masyarakat di luar Kedung Ombo. Orang-orang yang telah mendapatkan training menjadi pintar, bahkan di beberapa pemukiman ada tokoh yang bisa "menghafal" ungkapan-ungkapan klise yang bermakna pembangunan harus memihak rakyat, tanah adalah benda yang bisa dihak-miliki dan aspek pidana/perdata dari perampasan "hak" tanah mereka. Lihat : Tri Kadarsilo, *"Peranan Kelas Menengah Dalam Kemelut Kedung Ombo"*, Gita Kampus, Oktober 1989.

[73] Setelah diberikannya tanah-tanah Perhutani, terjadi pergeseran keyakinan penduduk terhadap mitologi-mitologi yang semua

munculnya tekanan-tekanan.

Munculnya gejala radikalisasi mahasiswa Indonesia setelah sepuluh tahun diberlakukannya ketentuan NKK/BKK, turut mendorong munculnya aksi-aksi mahasiswa di beberapa tempat. Kalau di awal tahun '80an para aktivis mahasiswa lebih banyak terjun dalam kelompok-kelompok studi dan diskusi, kemudian beralih ke LSM serta pers kampus, maka di akhir tahun 1987 para aktivis banyak yang aktif masuk ke dalam lembaga kemahasiswaan. Banyak di antara mereka yang kemudian menjadi simpul-simpul massa di kampusnya masing-masing. Aksi-aksi gabungan mahasiswa beberapa kota di Jawa yang bertemakan pembelaan terhadap rakyat kecil sebenarnya merupakan hasil dari tercapainya upaya konsolidasi di kalangan aktivis mahasiswa yang dilakukan selama bertahun-tahun dan sempat beregenarasi. Meskipun masih sangat cair dan belum terorganisasi secara rapi. Para mahasiswa mencoba membela korban penggusuran Proyek Kedung Ombo setelah beberapa LSM yang semula mendampingi rakyat terpaksa mundur. Munculnya serangkaian aksi-aksi mahasiswa yang cukup keras menimbulkan pro dan kontra masyarakat yang akhirnya memaksa pemerintah untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian dengan mendengarkan pendapat masyarakat tentang apa yang terjadi di Kedung Ombo.[74]

Perhatian dunia terhadap kasus Kedung Ombo semakin bertambah ketika Romo Mangunwijaya beserta beberapa cendekiawan Semarang dan Kyai Hamam Djaffar berniat melakukan aksi kemanusiaan menolong anak-anak Kedung Ombo. Figur Romo Mangun sendiri telah dikenal dunia internasional sebagai figur seorang intelektual-rohaniwan yang punya kepedulian sangat tinggi terhadap masyarakat golongan kecil. Pelarangan Gubernur Jateng HM Ismail terhadap niat kemanusiaan kelompok Romo Mangun semakin mengundang simpati dunia internasional terhadap rakyat Kedung Ombo yang seakan-akan sengaja diisolasi oleh pemerintah. Apalagi sebelumnya niat tulus Romo Mangun untuk membantu anak-anak terlantar di daerah genangan telah mendapat simpati masyarakat secara luas.[75]

---

mereka percayai. Penduduk yang telah mendapatkan tanah ingkar terhadap apa yang pernah mereka yakini dan menyatakan bahwa mitologi hanya dipercayai oleh nenek moyang mereka. Sedangkan penduduk yang masih bertahan di daerah genangan masih mempercayai mitologi-mitologi tersebut sambil berharap pemerintah mau melakukan musyawarah. Memang ada kesan sebagian mitologi-mitologi sengaja dicocok-cocokan (*digathuk-gathuke supoyo mathuk*) dan dibesar-besarkan oleh beberapa orang untuk dijadikan alasan penolakan mengambil ganti rugi atau bertransmigrasi.

[74] Ada anggapan bahwa sejarah Kedung Ombo akan lain sama sekali bila saja demonstrasi tanggal 6 Februari 1989 tidak terjadi. Peristiwa tersebut dianggap sebagai salah satu puncak kepedulian kelompok kelas menengah terhadap masalah-masalah sosial dari lapisan bawah. Bila disimak lebih lanjut peran mahasiswa sebagai kelompok penekan di masa Orde Baru ternyata memang lebih mempan dibandingkan dengan usaha yang pernah dilakukan cendekiawan, budayawan atau para 'rulling elite' contohnya adalah peristiwa Sawito, petisi 50 atau 'buku putih Tanjung Priuk'. Lihat : Tri Kadarsilo, *op cit.*

[75] Hadirnya aktivis LSM, mahasiswa dan kelompok Romo Mangunwijaya yang merupakan kelompok kelas menengah sangat penting dalam kasus Kedung Ombo. Karena kelas menengah ini mempunyai akses kapital, pendidikan yang memadai, arus informasi dan jalur distribusinya serta koneksi hubungan dengan berbagai pihak sehingga kelompok ini lebih leluasa menyuarakan suara hati dan kehendaknya lewat kelompok-kelompok interes dan atau kelompok penekan dalam rangka memajukan solidaritas sosial dan moral sebagai kontrol, apalagi kelompok kelas menengah ini memiliki wakilnya di legislatif dan eksekutif. Keleluasaan yang sama tidak dimiliki oleh kelompok massa di pedesaan, walaupun mereka bisa menggalang kesadaran dan tujuan organisasi bersama, Ibid. Lihat juga: Maurice Duverger, ***Partai Politik dan Kelompok Penekan***, PT Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 119. Gerakan kelas menengah ini membuat pemerintah "terpaksa" mendengarkan gerakan dari bawah karena khawatir akan menimbulkan keributan yang semakin besar, kekacauan politik yang pada akhirnya akan menjatuhkan wibawa pemerintah.

Faktor yang lain adalah peran LSM di dalam dan di luar negeri, yang berpuncak dengan keluarnya *Aide Memoire* INGI ke V bersamaan dengan surat INGI yang ditujukan kepada Presiden Bank Dunia. Kampanye LSM-LSM soal Kedung Ombo sebetulnya telah dimulai pada saat konprensi INGI ke IV di Belanda. Sebagian LSM di dalam negeri mencoba langsung mengadakan pendampingan kepada rakyat yang tanahnya terkena proyek, mengumpulkan dan menyebarluaskan fakta-fakta tentang kasus Kedung Ombo. Sedangkan LSM di luar negeri yang mempunyai kekuatan politik cukup besar mencoba menggalang kekuatan untuk menekan pemerintah Indonesia dan badan-badan donor agar lebih memperhatikan masalah hak azasi dalam proses pembebasan tanah. Tekanan yang dilancarkan kelompok LSM semakin kuat, karena sedang ada arus pasang kepedulian LSM terutama di Eropa dan Amerika terhadap dampak sosial waduk-waduk raksasa. Khususnya yang ikut dibiayai oleh uang para pembayar pajak dan saham perusahaan transnasional yang berbasis di Amerika Serikat, Kanada dan Eropa Barat. Dalam beberapa pertemuan LSM-LSM sedunia, masalah pembangunan waduk beberapa kali telah menjadi salah satu agenda pembicaraan yang di antaranya menghasilkan "Deklarasi San Francisco" pada tanggal 11 Juni 1988. Kedung ombo juga menjadi medan laga pertempuran antara pembangun dan penentang waduk yang di Amerika Serikat sudah berjalan hampir seabad lamanya.[76)]

Sebab yang lain adalah terjadinya perpecahan di tubuh Bank Dunia yang menjadi sponsor utama pembangunan Waduk Kedung Ombo. Dalam kasus Kedung Ombo yang merupakan masalah sosial

76) George Junus Aditjondro, Januari 1990, *op cit.*

terbesar di antara proyek-proyek Bank Dunia di Indonesia, seperti proyek pembangkit listrik Cirata dan Suralaya IV, ada sekelompok orang Bank Dunia yang bersimpati kepada rakyat Kedung Ombo. Mereka pulalah yang kemudian membocorkan laporan-laporan interen dan rahasia Bank Dunia ke kalangan LSM di negara-negara Barat.[77)] Sementara itu tekanan-tekanan terhadap Bank Dunia yang dianggap ikut bertanggungjawab atas penderitaan yang dihadapi rakyat Kedung Ombo, memaksa Bank Dunia memberikan tekanan-tekanan halus kepada pemerintah Indonesia agar segera menangani korban-korban sosial akibat pembangunan bendungan tersebut secara lebih manusiawi.[78)] Tekanan Bank Dunia itu cukup mempunyai bobot bagi pemerintah Indonesia akibat belum pulihnya harga minyak bumi di pasaran dunia yang telah menambah ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri. Bank Dunia sendiri pada akhirnya menarik sembilan buah pelajaran penting dari pengalaman pemukiman kembali rakyat Kedung Ombo yang relevan

[77)] Bocoran-bocoran laporan interen Bank Dunia yang sebenarnya bersifat rahasia ini bisa dilihat pada laporan-laporan Tapol tentang Kedung Ombo.

[78)] Bank Dunia sebagai lembaga keuangan internasional di mana Amerika Serikat merupakan penyandang dana terbesar agaknya merasa khawatir dengan keutuhan lembaganya, apabila persoalah Kedung Ombo tidak segera diselesaikan. Rekomendasi jelek terhadap hak azasi manusia dan pelaksanaan pembangunan Waduk Kedung Ombo yang dibiayai Bank Dunia, ditambah kampanye gencar dari kalangan LSM internasional bukan tidak mungkin akan mengundang campur tangan dari anggota konggres dan senat Amerika Serikat.

[79)] Pelajaran yang dipetik Bank Dunia dari kasus Kedung Ombo ini tercantum dalam surat pimpinan Bank Dunia yang ditujukan kepada Dirjen Pengairan Ir. Soebandi Wirosoemarto yang dibocorkan kepada LSM-LSM barat dan kemudian dimuat dalam Laporan Tapol. Salah satu di antaranya adalah memperhitungkan semua pilihan (option) rakyat lebih dari sekedar yang disukai oleh pemerintah atau Bank Dunia (Lesson 2).

dengan kerja dan proyek Bank Dunia di masa-masa mendatang.[79]

Selain itu, ada faktor-faktor interen dari pemerintah sendiri yang turut membuat kampanye Kedung Ombo berhasil, selain diakibatkan cara-cara yang dipakai aparat pemerintah dalam mengupayakan pembebasan tanah, juga distorsi informasi oleh para pejabat dan adanya berbagai laporan ABS (Asal Bapak Senang) yang semakin membuat masalah menjadi runyam. Faktor yang lain adalah terlanjur merosotnya citra program transmigrasi selama masa Pelita III dan IV, serta perpecahan di tubuh pemerintah sendiri.

Ada beberapa kelompok dari elit penguasa di Jakarta yang sengaja memberi angin kepada aksi-aksi mahasiswa, bahkan ada yang sengaja menawarkan sejumlah bantuan dana kepada para mahasiswa. Namun semua tawaran bantuan ditolak oleh mahasiswa yang menginginkan kemurnian gerakan yang mereka lakukan.[80] Dalam aksi-aksi yang berhubungan dengan Kedung Ombo, diduga kelompok-kelompok tersebut telah turut membantu dan menjaga mahasiswa dari kemungkinan terjadinya kekerasan yang biasanya dipakai aparat militer untuk membungkam sebuah aksi. Ada beberapa pihak yang sepertinya berkepentingan dengan aksi-aksi maha-

[80] Hal ini bisa dikaitkan dengan adanya pertarungan di antara elit penguasa menjelang suksesi 1992. Secara terang-terangan, beberapa orang perwiran tinggi yang mengaku utusan seorang tokoh di Jakarta mencoba mendekati dan mengajak para mahasiswa untuk bekerja sama. Salah seorang di antara mereka sempat datang ke sekretariat KSKPKO di Salatiga dan kediaman Romo Mangun di Yogya. Ia menawarkan sejumlah dana sekaligus menawarkan diri untuk jadi penghubung dengan sejumlah jendral. Agaknya orang-orang tersebut berkepentingan dengan "isyu-isyu besar" yang bisa langsung menohok Orde Baru. Bandingkan dengan aksi-aksi mahasiswa yang memakai isyu elitis dan "terbatas", yang kurang bertema merakyat dan relatif tidak melibatkan massa petani seperti aksi mahasiswa urusan kenaikan tarif listrik, aksi solidaritas untuk aktivis kelompok studi di Jogja yang dituduh melakukan tindakan subversif. Aksi-aksi tersebut dihadapi dengan kekerasan oleh pihak aparat keamanan.

siswa yang diharapkan bisa mencairkan dominasi kekuasaan Orde Baru selama hampir dua puluh lima tahun. Mayoritas anggota legislatif secara terang-terangan memberikan dukungan kepada aksi mahasiswa yang bisa mendorong terjadinya keterbukaan dan proses demokratisasi.

Di dalam tubuh Departemen PU sendiri muncul kelompok-kelompok yang bersimpati kepada sistem irigasi rakyat yang tak memerlukan waduk raksasa seperti Kedung Ombo. Mereka melakukan kerjasama dengan Bank Dunia untuk mengadakan sebuah seminar tertutup tentang bendungan raksasa, dampak sosial dan alternatifnya pada bulan Juni 1989.[81]

Pemerintah agaknya terpaksa melakukan perubahan-perubahan kebujakan terhadap pembangunan Waduk Kedung Ombo secara drastis, untuk menutup kemungkinan pihak-pihak yang akan memanfaatkan aksi-aksi mahasiswa mempunyai kesempatan untuk melakukan manuver politik.

Apabila dikaji lebih lanjut, berhasilnya gerakan rakyat dalam kasus Kedung Ombo juga dikarenakan efektifnya "serangan-serangan" kombinasi yang dilancarkan, baik oleh kalangan LSM, mahasiswa, kelompok Romo Mangun maupun pembangkangan rakyat (petani). Tekanan-tekanan yang dilakukan terhadap pemerintah merupakan perkawinan antara "gerakan fisik" yang mengorganisir diri dengan basis masyarakat luas (massa) dan kekuatan lobi politik. Gerakan mahasiswa berhasil membuat tekanan-tekanan baru dan mencairkan kebuntuan yang ada di Kedung Ombo setelah LSM tidak mungkin lagi berada di sana. Bersamaan dengan mencairnya kembali keadaan yang tadinya tertutup memungkinkan beberapa pihak, terutama kalangan LSM untuk masuk kembali ke Kedung Ombo sambil terus melakukan lobi-lobi politik dibantu

[81] George Junus Aditjondro, Januari 1990, *op cit.*

dengan LSM luar negeri yang *concern* dengan masalah hak azasi.[82]

Kampanye Kedung Ombo memang berhasil dalam mengangkat kasus Kedung Ombo menjadi kasus internasional dan memaksa pemerintah merubah kebijaksanaannya, tapi kenyataannya di daerah genangan masih ada ratusan KK yang hidup menderita dan terlunta-lunta. Demikian juga dengan penduduk di Kedungrejo, Kedungmulyo dan Kayen, serta Muko-muko yang taraf hidupnya bisa dikatakan tidak lebih baik bahkan lebih buruk daripada kondisi sebelum tanah-tanah mereka digenangi. Dengan demikian, secara keseluruhan kampanye Kedung Ombo sebetulnya bisa dikatakan jauh daripada berhasil.[83]

Dengan diberikannya tanah hak milik Perhutani kepada sebagian penduduk, justru pemerintah melegitimasi alasan telah terselesaikannya persoalan di Kedung Ombo Tanpa ada upaya lain dari pemerintah untuk memberikan ganti rugi tambahan yang sepadan kepada penduduk yang dulunya dipaksa untuk menerima ganti rugi. Ataupun memulihkan kembali kondisi hidup orang-orang yang dahulu pernah bermukim di daerah genangan Waduk Kedung Ombo.

---

[82] Lihat juga: Arbi Sanit (dialog), *Saat Ini Lobi Politik Lebih Efektif* Prisma No 7 Th. XVIII 1989, LP3ES.

[83] Lihat kembali situasi terakhir di Kedung Ombo pada Bab IV, di mana proses penyertifikatan tanah belum beres, lahan-lahan garapan untuk penduduk Kedungmulyo dan Kedungrejo belum dibuka kesemuanya. Di daerah Sragen yang secara resmi dianggap sudah tidak ada persoalan lagi, sekarang justru muncul kembali keresahan-keresahan akibat penekanan-penekanan yang dahulu pernah dilakukan aparat terhadap penduduk. Penduduk Sragen berniat mengembalikan uang ganti rugi yang telah mereka terima kepada pemerintah dan akan menuntut tanah di sekitar waduk seperti halnya penduduk Boyolali yang mendapatkan pemukiman Kedungmulyo dan Kedungrejo. Mahasiswa yang tergabung dalam KSKPKO, sekarang tengah mencoba melakukan pendampingan kepada penduduk Kedung Ombo di wilayah Sragen guna mencari kemungkinan menuntut kembali hak-hak yang telah terampas. Sedangkan LBH Semarang tengah mempersiapkan tuntutan ratusan penduduk yang sampai saat ini masih bertahan di daerah genangan Waduk Kedung Ombo yang menjadi kliennya.

Awal dan Akhir

Indonesia memang telah berhasil melewati masa-masa sulit dalam melakukan penyesuaian terhadap kelesuan pasaran minyak bumi, setelah sebelumnya selama tujuh tahun (tahun 1974 sampai dengan tahun 1981) sempat menikmati *bonanza* minyak. Dan memang tidak dapat disangkal, bahwa pembangunan perekonomian Indonesia di tahun-tahun terakhir mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama setelah dikeluarkannya tiga paket kebijaksanaan penting di tahun 1988 yang kemudian diikuti beberapa langkah mengetat-an anggaran belanja.

Indonesia secara resmi juga telah berhasil memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya, terutama yang menyangkut sandang dan pangan.[84] Namun masih terlalu dini untuk menilai pembangunan yang dikonsepkan lewat strategi Repelita telah berhasil. Banyak pihak beranggapan paket-paket kebijakan perekonomian yang diambil pemerintah sama sekali belum memadai dan hanya baru dinikamti oleh segelintir orang saja. Kesenjangan sosial justru semakin besar seperti yang ditulis dalam Tajuk Rencana Kompas:

> "Tidak dapat dipungkiri bahwa bagian yang diperoleh rakyat banyak, oleh rakyat kecil atau *wong cilik*, jauh ketinggalan dibandingkan dengan yang diperoleh kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, terutama oleh mereka yang lebih sanggup menggunakan kesempatan yang diberikan oleh sistem pembangunan kita serta oleh mereka yang mempunyai jabatan dan wewenang."[85]

---

[84] Ukuran resmi yang dipakai di sini adalah didapatkannya penghargaan dari FAO di tahun 1985 oleh Indonesia atas keberhasilan berswasembada beras.

[85] Kompas, 11 Maret 1989.

Upaya mengurangi kesenjangan sosial memang telah dilakukan oleh pemerintah guna menghindari terjadinya kerusuhan sosial antara lain lewat koperasi-koperasi, pemberian kredit kepada pengusaha lemah dan lain-lain, tapi semuanya tidak menjangkau kaum marginal di perkotaan atau petani-petani gurem yang terus menerus kehilangan tanah-tanahnya sebagai konsekuensi dari program industrialisasi yang tengah digalakkan pemerintah.[86]

Perusahaan-perusahaan besar milik para konglomerat dihimbau untuk membagi saham-sahamnya kepada koperasi karyawan perusahaannya masing-masing, tapi sementara itu pula ribuan tukang becak dan pedagang asongan dikejar-kejar untuk "ditertibkan". Mereka sama sekali tidak mendapatkan perlindungan. Pabrik-pabrik atau proyek pemerintah terus-menerus mencaploki tanah-tanah di pedesaan. Penduduknya dipaksa bertransmigrasi ke luar Jawa. Sebagian dari mereka ada yang lari ke kota dan menjadi kaum urban. Mereka kebanyakan menganggur atau bekerja di sektor informal. Orang-orang miskin yang berada di sektor informal ini belum terjangkau oleh pembangunan. Mereka yang berupaya mempertahankan hidupnya dengan menciptakan lapangan usaha sendiri dan memanfaatkan ruang-ruang serta sisa pembangunan tersebut dianggap mengotori kehidupan kota.

---

[86] Pengalaman di banyak negara berkembang, rencana pembangunan pertanian pada umumnya berakhir dengan penguasaan sumber alam berupa tanah dan air yang beralih dari produsen kecil ke tangan para pengusaha besar yang proyek-proyeknya menciptakan lebih sedikit lapangan kerja daripada jumlah pencari nafkah yang tersingkir, mengurangi jumlah orang yang sebelumnya bekerja bebas dan diubah menjadi buruh tani yang tidak bertanah dan berupah sangat rendah, membiarkan orang-orang desa yang miskin dan jumlahnya membengkak untuk bersaing memperebutkan bagian sumber alam utama yang masih tersisa. Lihat: David C. Korten, ***Pembangunan Yang Memihak Rakyat,*** LSP, Jakarta, 1984, hal. 18.

Pembangunan seringkali cuma diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi semata-mata yang diartikan sebagai penambahan kekayaan masyarakat, di mana jumlah GNP atau GDP dibagi dengan jumlah penduduk. Ukuran keberhasilan tersebut sebetulnya tidak cukup sahih Karena kekayaan beberapa konglomerat dibagi setengah jumlah seluruh penduduk Indonesia sudah cukup untuk mendapatkan kesimpulan bahwa rakyat Indonesia makmur, sementara kenyataan mayoritas penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Tampaknya memang terdapat kepincangan dalam pelaksanaan Trilogi Pembangunan, ya... belum adanya perhatian ke arah pelaksanaan program-program pemerataan. Pertanian masih dominan dalam perekonomian Indonesia di mana lebih dari 70 % penduduk masih hidup dari pertanian dan kemiskinan masih luas di pedesaan sementara strategi industrialisasi tidak secara langsung dikaitkan dengan pembangunan pertanian dan pedesaan sehingga tidak akan pernah menghasilkan pemerataan.[87]

Mungkin sudah saatnya pembangunan berciri "model pembangunan jalan tol" yang digunakan selama ini ditinjau kembali, karena hasil "pembangunan jalan tol" yang memang berkesan kolosal itu ternyata hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu saja. Sementara mayoritas pemakai jalan masih harus berdesak-desakan dan mengalami kemacetan. Telah terbukti bahwa "strategi pembangunan jalan tol" ternyata tidak bisa memecahkan masalah "kemacetan lalu lintas" dan baru membantu mempersingkat waktu perjalanan orang-orang yang bisa "membayar karcis tol". Tidak artinya kalau GNP atau GDP meningkat tapi masih ada banyak orang miskin. Atau berhasil dalam swasembada beras tapi kaum tani di pedesa-

---

[87] Mubyarto, *"Pengkajian Ulang Strategi Pembangunan Nasional,"* Prisma No. 1 Th. XVII 1988, LP3ES.

an banyak kehilangan tanahnya. Karena hutang-hutang luar negeri dan pajak-pajak yang dikumpulkan dari rakyat yang tidak dimaksudkan untuk membuat para petani kehilangan tanah-tanahnya atau tukang becak dan pedagang asongan kehilangan pekerjaannya.

Sudah saatnya mengkonsepkan kembali pola-pola pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun-tahun mendatang. Pembangunan yang sekedar ikut trend yang terjadi di negara-negara maju sudah saatnya dikaji ualng atau bahkan dihentikan. Perlu memprioritaskan kembali kepada masalah-masalah besar yang substansial yang mungkin tidak berkesan "wah". Adanya bendungan, industri pesawat terbang, satelit komunikasi dan lain-lain tidak ada artinya sama sekali kalau mengakibatkan sebagian besar rakyat yang masih miskin menjadi lebih miskin. Upaya pencukupan kebutuhan dana pembangunan sendiri harus dilakukan, tidak dengan terus-terusan menggantungkan diri pada hutang-hutang luar negeri atau menggadaikan kekayaan hutan dan bumi. Mungkin dengan mengefisienkan pemakaian dana yang seringkali bocor dan masuk ke kantong-kantong orang dari kelompok tertentu. Juga pembenahan birokrasi.

Pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi telah terbukti hanya memperkuat ketimpangan dalam distribusi pendapatan, aset dan kekuasaan yang menyebabkan tidak dimungkinkannya penyebaran keuntungan-keuntungan yang diperoleh, baik secara ekonomis maupun politis.[88] Suatu studi komprehensif antar bangsa yang meliputi tujuh puluh empat negara menunjukkan bahwa kenaikan GNP cenderung diikuti oleh suatu penurunan dalam proporsi relatif pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok termiskin.[89] Peranan negara dan aparatnya sebagai pencipta, perencana dan pelaksana pembangunan pedesaan yang hanya menempatkan rakyat sebagai konsumen pembangunan sangat dominan. Ini membuktikan adanya suatu pewarisan dari strategi pembangunan pedesaan di masa kolonial.[90]

Semua keputusan tentang pelayanan dan fasilitas sosial yang pernah diberikan, siapa yang memberi, kapan, di mana serta bagaimana diberikan, sepenuhnya merupakan kebijakan birokrasi pemerintah, kelompok sasarannya tidak mempunyai bentuk pasti. Karena mereka ditentukan secara terpusat tanpa mempertimbangkan kebutuhan subyektif rakyat dan kemampuannya untuk memberikan respon. Rakyat diharapkan menerima secara pasif apapun pelayanan sosial dan fasilitas sosial yang dipilih birokrasi pemerintah untuk

[88] Masyarakat sekarang cenderung bingung dan tidak punya alternatif lain kalau ditanya tentang siapa calon presiden RI mendatang. Munculnya kebulatan tekad-kebulatan tekad menunjukan fenomena terjadinya mobilisasi massa. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan ekonomi (pertumbuhan) tidak diimbangi dengan pembangunan budaya dan politik untuk jangka panjang.

[89] Studi tersebut menghasilkan pola yang sama, yaitu meningkatnya GNP dan hasil pertanian diikuti dengan merosotnya upah riil bagi pekerja pertanian, tercaploknya petani gurem oleh petani yang lebih kaya, diusirnya para petani penyewa oleh para tuan tanah yang mengharapkan keuntungan baru atau untuk menghindarkan ancaman reformasi sewa menyewa. Erik Eckholm, *Orang-orang Yang Tergeser: Land Reform dan Pembangunan Yang Mantap*, dalam Seri "Wawasan, Hak dan Kebutuhan Desa," LSP, Jakarta, 1983. Lihat juga: Andre Gunder Frank, *Borjuasi Antek: Perkembangan Semu* dalam seri "Wawasan, Gurita Kolonialisme," LSP, Jakarta, 1984.

[90] Pada jaman kolonial, negara membiayai semua program pembangunan pedesaan sehingga aprarat negara merasa mempunyai wewenang untuk secara langsung terlibat dalam pelaksanaan program di tingkat desa, di mana negara kemudian menciptakan aparat-aparat pelaksana baru yang jenisnya amat banyak. Mulai dari mantri cacar sampai dengan mantri pertanian. Lihat: Loekman Soetrisno, *Negara dan Peranannya Dalam Menciptakan Pembangunan Desa,* Prisma No.1 Th. XVII, 1988, LP3ES.

ditawarkan sesuai dengan kebijaksanaannya. Memang benar bahwa anjuran untuk "berpartisipasi" tidak henti-hentinya terdengar di setiap kesempatan. Tetapi "partisipan" yang dimaksud tidak lain sekedar berarti ramai-ramai mendukung suatu program yang metode dan isinya sudah ditentukan dari atas.

Sentralisasi program-program pembangunan oleh negara mengakibatkan munculnya konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Antara lain kesulitan menciptakan sumber-sumber tambahan yang dibutuhkan negara untuk melestarikan program-program modernisasi yang dilakukan. Munculnya nepotisme di bidang ekonomi dan politik yang menyebabkan terganggunya kelancaran dan keadilan dalam proses berlangsung modernisasi. Serta munculnya ketegangan-ketegangan politik karena proses modernisasi dan sentralistis dan birokratis tersebut menyebabkan negara dan aparatnya sering kali menjadi obyek kritik, padahal aparat negara seringkali tidak bisa menghargai makna sebuah kritik.[91]

Dominasi negara juga mengakibatkan negara menjadi tidak peka pada persoalan-persoalan masyarakat, sehingga seringkali mengakibatkan terjadinya sebuah kerusuhan sosial dengan kerugian cukup besar yang harus ditanggung pemerintah. Sedangkan sentralisasi juga menyebabkan mata rantai perijinan menjadi panjang dan tidak efisien karena terjadinya berbagai pemotongan-pemotongan "semi resmi" serta pelaksanaan program yang tumpang tindih.[92] Pemusatan wewenang dan pengawasan membuat keputusan atas sumber daya berakibat orang selalu menoleh ke pusat

---

91) *Ibid.*

92) Beberapa contoh kasus, lihat: Moeljarto T., *Politik Pembangunan*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta, 1987, hal. 65-72.

untuk mendapatkan penyelesaian berbagai masalah, baik lokal maupun global.

Idealnya pembangunan harus bisa menyentuh dan menciptakan kemandirian kelompok yang paling bawah dari masyarakat golongan bawah serta menyertakan kelompok-kelompok masyarakat seperti LSM. Untuk itu aparat-aparat pembangunan di daerah yang seringkali didominasi kelompok militer, atau kalau tidak aparat sipil yang meniru-niru cara-cara militer, harus belajar dan merubah persep-sinya tentang rakyat, khususnya rakyat pedesaan. Rakyat pedesaan bukan hanya merupakan sumber energi maupun sumber informasi yang sekedar digerakkan untuk mendukung pembangunan dan tidak mempunyai kemampuan mengarahkan pembangunan tanpa bantuan aparat negara. Pengertian akan budaya lokal di desa-desa di Indonesia yang sangat majemuk sangat penting sebagai suatu aset pembangunan. Aparat tidak perlu melihatnya sebagai faktor penghambat. Persepsi aparat dalam melihat kelompok miskin yang ditemui dan dilayani di daerah pedesaan yang selama ini dianggap sebagai kelompok yang tidak produktif haru sdirubah. Penelitian empirik justru menunjukkan bahwa kelompok yang miskin materi tersebut ternyata tidak miskin dalam pengalaman membangun, seperti kemampuan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mereka hadapi.[93]

Keberhasilan strategi pembangunan yang mencita-citakan pemerataan dan partisipasi paling tidak memerlukan suatu organisasi dan cara pendekatan baru yang berbeda dengan model konvensional yang bersifat tradisional-paternalistik "model birokrasi Mataram".

---

93) Loekman Soetrisno, *op cit.*

Penerapan prinsip hubungan setara (*equal-partnership*) antara rakyat kecil dan aparat perencana serta aparat pelaksana pembangunan sebagai orang yang sama-sama berkepentingan dengan kehadiran proyek pembangunan mungkin dapat dilakukan untuk menghindarkan kemungkinan diabaikannya kepentingan-kepentingan rakyat kecil yang mengakibatkan munculnya pembangkangan.

Sudah saatnya rakyat kecil mendapatkan perhatian dalam masa pembangunan yang sebentar lagi akan memasuki PJPT II ini. Mereka tidak cukup hanya didakwahi dengan kotbah atau ceramah belaka. Sebagaimana ajakan Wapres Sudharmono, orang-orang kecil perlu dibimbing dan dibantu untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kata-kata baku dan keren dalam jargon-jargon pembangunan seperti "tinggal landas", "delapan jalur pemerataan", "peran serta", "bersih-indah-tertib-aman-lancar", "bertekad bulat", "pendekatan terpadu", "partisipasi masyarakat" dan seterusnya tidak mempunyai makna apa-apa bagi rakyat kecil bila tidak disertai niatan dan komitmen sungguh-sungguh untuk memperbaiki nasib si kecil.

Pembangunan bagi rakyat kecil malah seringkali bukan berarti kesejahteraan, kemakmuran atau kedamaian tapi sebaliknya yaitu penyengsaraan, pemiskinan dan pengkhawati.paran. Rakyat kecil tidak belajar dari kata-kata atau slogan, tapi belajar dari apa yang dilihat dan dirasakan.[94] Pengalaman Kedung Ombo telah memberikan pelajaran yang sangat baik kepada pemerintah untuk menjalankan program-programnya di masa mendatang dengan lebih berhati-hati. Khususnya guna mencegah munculnya kasus-kasus serupa di mana rakyat kecil yang tadinya dianggap sebagai "warga liliput", tiba-tiba bisa menjadi garang dan nekad. Mereka melawan semua instruksi-instruksi pembangunan dari pemerintah.

Memang sepantasnya apa yang masih tersisa dan belum terselesaikan di Kedung Ombo mendapat perhatian dan cepat-cepat diselesaikan oleh pemerintah, khususnya penanganan dari pusat. Karena pemerintah daerah (aras Kecamatan) memandang penyelesaian masalah Waduk Kedung Ombo bak mengejar layangan putus. Artinya tidak ada ketentuan pasti atau jurus tertentu dari peraturan yang kini telah ditetapkan untuk menyelesaikannya, semua sangat situasional.[95]

Mungkin sudah saatnya melihat kembali model pembangunan yang berpusat pada manusia (pembangunan yang manusiawi dan berkeadilan sosial) dan lingkungan (pembangunan yang berkelanjutan). Model pembangunan yang berkelanjutan ini sangat penting artinya bagi negara-negara berkembang yang sedang giat-giatnya membangun mengingat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata bisa saja dicapai dengan cara menguras semua kekayaan bumi dan lautnya. Pada suatu saat tiba-tiba dapat terhenti karena tak ada lagi kekayaan alam yang bisa dijual ke negara lain. Sedangkan tanah, hutan dan cadangan air serta faktor ekologis lain terlanjur rusak berat. Pembangunan yang dikerjakan selama bertahun-tahun tiba-tiba saja tidak ada artinya sama sekali dibandingkan hancurnya kekayaan alam. Konsep pembangunan yang berkelanjutan menyentuh juga dua hal penting lainnya, yaitu unsur sumber daya manusia

---

[94] Seorang penduduk Dukuh Ngrapah mengatakan : "Bapak Bupati Boyolali lewa selebaran yang dijatuhkan dari helikopter menyatakan sumpah demi nama Allah pemerintah tidak bermaksud menyengsarakan rakyat, tapi mensejahterakan masyarakat. Lha, ini bagaimana sekarang? Sejahtera kok seperti ini?" Sumber: Penduduk Kedung Ombo, wawancara, 22.1.1990. Ada pula orang yang berpendapat, sebaiknya para Manggala Penatar P4 diajak melihat Kedung Ombo dahulu sebelum memberikan penataran, agar mereka bisa ngomong lebih kongkrit.

[95] Tri Kadarsilo, *op.cit.*

dan unsur berkelanjutan sosial.[96] Tanggungjawab negara sebagai unsur dominan pelaksana pembangunan adalah menerjemahkan kembali manfaat jangka panjang ke dalam perhitungan ke dalam perhitungan manfaat biaya hari ini. Negara harus bisa membawa cakrawala pembangunan yang menjangkau generasi kini dan generasi masa depan. Juga mampu menghargai unsur-unsur lingkungan yang memiliki nilai di masa depan. Mereka harus bisa melihat pembangunan tidak saja dari kacamata keberhasilan proyek, tapi lebih-lebih dari keberhasilan proses mengangkat harkat diri manusia di tingkat yang utuh dalam ruang lingkungan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.[97]

Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya di tahun 1945, semua rakyat Indonesia berkeinginan bisa segera merealisasikan mimpi-mimpi dari generasi sebelumnya. Yaitu membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan, penindasan dan kemudian Orde Baru bertekad mengisi kemerdekaan

---

[96] Lihat Arief Budiman, *"Pembangunan Yang berkelanjutan : Sebuah pemikiran Awal"*, Kompas 28 Juni 1989 dan juga Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, LP3ES, 1986, hal. 183-295. Konsep pendekatan atas-bawah (top-down) seringkali melemahkan kemampuan kreatif rakyat untuk menemukan kebutuhan dasar mereka, dan merampas apa yang secara tradisionil telah mereka lakukan untuk diri mereka serta menggantinya dengan campur tangan pemerintah sehingga menghilangkan keswasembadaan rakyat kecil dan malah menumbuhkan ketergantungan sepenuhnya kepada pemerintah.

[97] Emil Salim, *loc.cit* Ada tiga tata sosial yang sebetulnya memungkinkan terjadinya pertumbuhan dalam arti yang sebenarnya, tapi justru sering diabaikan dalam pelaksanaan pembangunan di negara-negara dunia ketiga, yaitu kelestarian hidup, harga diri dan kebebasan. Lihat : David C. Korten. *op.cit.* hal.29.

dengan program-program pembangunan lewat Repelita. Maka sudah sewajarnya kalau pembangunan yang tengah dilaksanakan sekarang ini diarahkan atau diprioritaskan kepada lapisan paling terbawah dari piramida sosial seperti buruh, petani miskin dan kelompok-kelompok yang tertinggal selama berlangsungnya proses pembangunan. Karena arti kemerdekaan yang sesungguhnya baru adalah apabila *wong cilik* tidak lagi dapat diperlakukan secara sewenang-wenang dan dapat sepenuhnya mengecap hasil keringatnya sendiri. Tanpa diganggu dengan bermacam-macam aturan yang seringkali hanya dimaksudkan untuk menyenangkan orang-orang yang berkuasa.[98]

Idealnya rakyat harus menjadi fokus sentral dari tujuan pembangunan. Untuk itu harus ada kemauan untuk mengubah realitas pembangunan agar tidak menunjukkan bahwa usaha-usaha pembangunan sosial tertutup di bawah bayangan pembangunan ekonomi, orientasi pertumbuhan dan teknologi. Pembangunan sosial tak dapat hanya diinterpretasikan secara sempit, yaitu sekedar pemberian pelayanan dan fasilitas sosial. Rakyat kecil semestinya mampu tampil sebagai sebuah kekuatan penekan (***pressure group***) yang mampu mengontrol pelaksanaan garis kebijaksanaan yang secara resmi tertulis ditujukan untuk menguntungkan mereka dan tidak lagi sekedar dijadikan obyek politik.

Model-model pembangunan yang lebih manusiawi dan berkeadilan sosial sesuai cita-cita Pancasila hanya dimungkinkan apabila ada kesungguhan untuk mengupayakan demokratisasi di bidang

---

[98] S Syahrir, *Perjuangan Kita*, Yayasan "28 Oktober", (tanpa tanggal dan tahun penerbitan).

politik dan ekonomi serta rasa hormat terhadap hak-hak azasi manusia. Hanya dengan demokrasi politik rakyat dapat mengorganisir diri dan mencari basis-basis politik untuk melakukan partisipasinya. Sudah saatnya kekuatan tawar menawar di antara kelompok-kelompok masyarakat dipulihkan kembali. Sekaligus membebaskan orang-orang miskin, bodoh, tak punya aset suara dan kekuasaan dari usaha-usaha pemanipulasian dan kooptasi kelompok-kelompok lain yang lebih kuat, yang mencari keuntungan dan kesempatan dari lemahnya posisi mereka.

GBHN 1978 merupakan pemberi arah bagi pembangunan jangka panjang bagi terlaksananya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia mensyaratkan bahwa pembangunan harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai tingkat hidup berkeadilan sosial. Untuk itu, parameter keberhasilan pembangunan dapat diletakkan pada ukuran yang mengandung kualitas pertumbuhan spiritual, kultural dan ideologis. Dan tidak hanya diukur dengan kemakmuran dan tersedianya barang-barang konsumsi di pasaran, serta jasa-jasa yang dapat diperoleh dari masyarakat.

Pekerjaan rumah pemerintah Indonesia memang cukup banyak dan berat. Kesemuanya memerlukan penyelesaian sesegera mungkin. Apalagi belakangan ini *wong cilik* di beberapa tempat telah menunjukkan keresahan dan ketidakpuasannya. Untuk itu diperlukan keluwesan dan kepala dingin aparat pemerintah dalam usaha menyelesaikan pekerjaan serta memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan tanpa dihinggapi rasa frustasi atau paranoid dengan menuduh *wong cilik* yang tidak puas atau mencoba mempertahankan hak-haknya sebagai ekstrem kiri/kanan, anti Pancasila atau penghambat pembangunan yang merupakan sebuah tindakan berlebih-lebihan. Aparat pemerintah justru harus memperteguh

komitmen dan keseriusan untuk mewujudkan mimpi-mimpi pembangunan rakyat Indonesia yang semakin mampu bersikap kritis terhadap kenyataan yang sedang dihadapinya.

ooOoo